



PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURABAYA
TAHUN 2021



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SURABAYA TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan adalah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2021 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2021 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Daftar Gambar	xii
Bab I Pendahuluan	I - 1
I.1. Latar Belakang	I - 1
I.2. Dasar Hukum	I - 2
I.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 6
I.4. Maksud dan Tujuan	I - 9
I.5. Sistematika Dokumen RKPD.....	I - 9
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II - 151
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 152
Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 11
Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV - 7
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V - 1
Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VI - 1
6.1. Indikator Kinerja Daerah	VI - 1
6.2. Indikator Kinerja Utama	VI - 3
Bab VII Penutup.....	VII- 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya Tiap Kecamatan di Kota Surabaya.....	II - 6
Tabel II.2 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2016 -2019	II - 12
Tabel II.3 Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan	II - 13
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2019	II - 16
Tabel II.5 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama	II - 17
Tabel II.6 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019	II - 18
Tabel II.7 Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019	II - 19
Tabel II.8 Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 19
Tabel II.9 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 - 2019 (dalam Juta Rp)	II - 21
Tabel II.10 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 - 2019 (dalam Juta Rp)	II - 22
Tabel II.11 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	II - 24
Tabel II.12 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 - 2019.....	II - 26
Tabel II.13 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 - 2019 (%).....	II - 27
Tabel II.14 Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2017 - 2019	II - 29
Tabel II. 15 PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 30
Tabel II. 16 Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 32
Tabel II.17 Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya.....	II - 32
Tabel II.18 Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok...	II - 33

Tabel II.19 Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin	II - 34
Tabel II.20 Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019. II -	35
Tabel II.21 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 36
Tabel II.22 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki ..	II - 36
Tabel II.23 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 37
Tabel II.24 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 37
Tabel II.25 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya	II - 38
Tabel II.26 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya.....	II - 38
Tabel II.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya	II - 39
Tabel II.28 Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya.....	II - 39
Tabel II.29 Prevalensi Balita Stunting Kota Surabaya	II - 39
Tabel II.30 Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan) Tahun 2017-2019	II - 40
Tabel II.31 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya	II - 42
Tabel II.32 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 -2019	II - 42
Tabel II.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 - 2019	II - 44
Tabel II.34 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya Tahun 2016 -2019	II - 45
Tabel II.35 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2019	II - 47
Tabel II.36 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2019	II - 49
Tabel II.37 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya	II - 51
Tabel II.38 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya	II - 52
Tabel II.39 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya	II - 53
Tabel II.40 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya	II - 54

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

Tabel II.41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2019	II - 54
Tabel II.42 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 57
Tabel II.43 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2019	II - 57
Tabel II.44 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II - 58
Tabel II.45 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2019	II - 58
Tabel II.46 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam.....	II - 59
Tabel II.47 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 - 2019	II - 61
Tabel II.48 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016 - 2019	II - 61
Tabel II.49 Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016 -2019	II - 61
Tabel II.50 Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2016 - 2019	II - 62
Tabel II.51 Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya.....	II - 63
Tabel II.52 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 63
Tabel II.53 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 64
Tabel II.54 Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 65
Tabel II.55 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah.....	II - 65
Tabel II.56 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2016 -2019...	II - 67
Tabel II.57 IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 68
Tabel II.58 Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2016 - 2019.....	II - 68
Tabel II.59 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya	II - 69
Tabel II.60 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Cakupan Penduduk dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak di Kota Surabaya Tahun 2016 -2019	II - 71
Tabel II.61 Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya.....	II - 72
Tabel II.62 Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa	II - 72
Tabel II.63 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	II - 75

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

Tabel II.64 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2016 -2019	II - 76
Tabel II.65 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 77
Tabel II.66 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya.....	II - 78
Tabel II.67 Kejadian Kebakaran per Penyebab	II - 78
Tabel II.68 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 79
Tabel II.69 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya....	II - 79
Tabel II.70 Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 -2019.....	II - 81
Tabel II.71 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016-2019.....	II - 82
Tabel II.72 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 - 2018 ...	II - 84
Tabel II.73 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya.....	II - 84
Tabel II.74 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir	II - 85
Tabel II.75 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 86
Tabel II.76 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 86
Tabel II.77 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 87
Tabel II.78 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya Tahun 2017-2019	II - 88
Tabel II.79 KDRT Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 88
Tabel II.80 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 89
Tabel II.81 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 - 2019	II - 90
Tabel II.82 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 90
Tabel II.83 Pola Pangan Harapan Tahun 2016 - 2019	II - 91
Tabel II.84 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat	II - 92
Tabel II.85 Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya	II - 93
Tabel II.86 Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA. II	- 94

Tabel II.87 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016 - 2019	II	-	94
Tabel II.88 Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016 - 2019	II	-	95
Tabel II.89 Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019 ...	II	-	96
Tabel II.90 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya	II	-	97
Tabel II.91 Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-2019.....	II	-	99
Tabel II.92 Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK	II	-	99
Tabel II.93 Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	101
Tabel II.94 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	101
Tabel II.95 Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	102
Tabel II.96 Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	II	-	103
Tabel II.97 Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	104
Tabel II.98 Rasio Izin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2016 - 2019	II	-	104
Tabel II.99 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya	II	-	106
Tabel II.100 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	106
Tabel II.101 Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2016 -2019	II	-	107
Tabel II.102 Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2016 -2019	II	-	107
Tabel II.103 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	108
Tabel II.104 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016 - 2019	II	-	109
Tabel II.105 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	109
Tabel II.106 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	110
Tabel II.107 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	110
Tabel II.108 Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	111
Tabel II.109 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II	-	112
Tabel II.110 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019...	II	-	112
Tabel II.111 Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya	II	-	113

Tabel II.112 Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 116
Tabel II.113 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 117
Tabel II.114 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 118
Tabel II.115 Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 -2019.....	II - 119
Tabel II.116 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 120
Tabel II.117 Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016-2019.....	II - 120
Tabel II.118 Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 -2019	II - 121
Tabel II.119 Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 122
Tabel II.120 Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 123
Tabel II.121 Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 124
Tabel II.122 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 124
Tabel II.123 Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 - 2017	II - 126
Tabel II.124 Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 128
Tabel II.125 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	II - 128
Tabel II.126 Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya.....	II - 129
Tabel II.127 Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 130
Tabel II.128 Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 - 2019	II - 130
Tabel II.129 Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 - 2019	II - 131
Tabel II.130 Jumlah Usaha Berdasarkan Izin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 131
Tabel II.131 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 132
Tabel II.132 Dokumen Perencanaan Kota Surabaya	II - 133

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Tabel II.133 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya	II - 134
Tabel II.134 Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan Tahun 2016 - 2019	II - 134
Tabel II.135 Rata - Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 134
Tabel II.136 Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016-2019	II - 135
Tabel II.137 Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 -2019 ...	II - 136
Tabel II.138 Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016-2019	II - 136
Tabel II.139 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 137
Tabel II.140 MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga Tahun 2019	II - 138
Tabel II.141 MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2019	II - 138
Tabel II.142 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 139
Tabel II.143 Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2016 - 2019	II - 140
Tabel II.144 Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya	II - 141
Tabel II.145 Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 141
Tabel II.146 Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan	II - 142
Tabel II.147 Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya.....	II - 143
Tabel II.148 Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya.....	II - 143
Tabel II.149 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016 -2019	II - 143
Tabel II.150 Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 144
Tabel II.151 Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 145
Tabel II.152 Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 145
Tabel II. 153 Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 145
Tabel II.154 Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019	II - 147
Tabel II.155 Penerangan Jalan Umum Tahun 2016 - 2019	II - 148

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

Tabel II.156 Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 148
Tabel II.157 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya	II - 149
Tabel II.158 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2016-2019.....	II - 150
Tabel II.159 Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	II - 150
Tabel II. 160 Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program Tahun 2019.....	II - 151
 Tabel II. 159 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2019	II - 158
Tabel III.1 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam juta)	III - 1
Tabel III.2 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam juta)	III - 2
Tabel III.3 Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)	III - 4
Tabel III.4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)	III - 5
Tabel III.5 Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar Kota Surabaya Tahun 2019.....	III - 5
Tabel III.6 Tingkat Inflasi Kota Surabaya Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam persen)	III - 5
Tabel III.7 Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019.....	III - 7
Tabel III.8 Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2017 - 2019.....	III - 8
Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya Tahun 2018 dan Tahun 2019	III - 8
Tabel III.10 Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya Tahun 2014-2016 dan Perkiraan Tahun 2017 dan 2018	III - 9
Tabel III.11 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III - 13
Tabel III.12 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Kota Surabaya Tahun 2017 s.d Tahun 2021	III - 16
Tabel III.13 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 s.d Tahun 2021.....	III - 18

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Tabel IV.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya.....	IV - 3
Tabel IV.2 Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur	IV - 9
Tabel IV.3 Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Surabaya dan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021	IV - 11
Tabel IV.4 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV - 12
Tabel IV.5 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021 yang Mendukung Prioritas Pembangunan	IV - 14
Tabel IV.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021	IV - 53
Tabel IV.7 Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam dokumen RKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021	IV - 66
Tabel V.1 Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Surabaya Tahun 2021	V - 2
Tabel V.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021.....	V - 70
Tabel VI.1 Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2021	VI - 2
Tabel VI.2 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021.....	VI - 4

DAFTAR GAMBAR



Gambar I.1 Alur Penyusunan RKPD	I	-	8
Gambar II.1 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya	II	-	3
Gambar II. 2 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya	II	-	4
Gambar II. 3 Kondisi Instruksi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya	II	-	8
Gambar II. 4 Peta Sesar Kendeng	II	-	10
Gambar II. 5 Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara	II	-	11
Gambar II. 6 Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya	II	-	11
Gambar II. 7 Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya	II	-	12
Gambar II. 8 Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia	II	-	15
Gambar II. 9 Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2015-2018	II	-	29
Gambar II. 10 Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2019	II	-	45
Gambar II. 11 Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2019	II	-	61
Gambar II. 12 Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2018	II	-	62
Gambar II. 13 Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2018	II	-	64
Gambar II. 14 Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2018	II	-	68
Gambar II. 15 Persentase Atlet Berprestasi	II	-	117
Gambar II. 16 Perangkat Smart Water Level	II	-	152
Gambar III.1 Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2019 (dalam persen)	III	-	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Dokumen RKPD Kota Surabaya Tahun 2021 disusun sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16 dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Musrenbang
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah

menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD yang memasuki periode tahunan kelima/tahun terakhir, dan memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan pada periode tahunan kelima, serta berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mempengaruhi pelaksanaan perencanaan APBD 2020. Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sehingga dibutuhkan perubahan prioritas penggunaan anggaran serta penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan pada tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rankhir RKPD Kota Surabaya tahun 2021 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran

Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 8).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Kota Surabaya tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2020 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Surabaya mempedomani RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan RKPD Kota Surabaya Tahun 2021 mempedomani RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, RKPD Provinsi Jawa Timur, program strategis nasional serta pedoman penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara substansial, RKPD Kota Surabaya Tahun 2021 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2021.

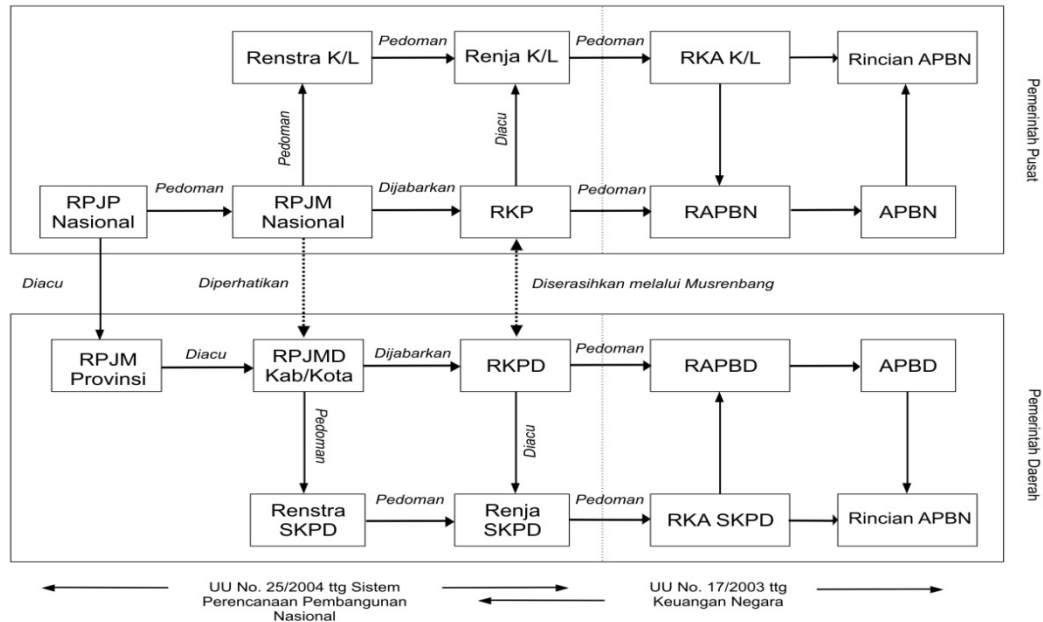
Secara Normatif, RKPD Kota Surabaya dijadikan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kota Surabaya;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kota Surabaya serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Surabaya yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

Secara operasional, RKPD tahun 2021 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar I.1
Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2021 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara substansi rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyempurnaan rancangan Renja PD;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Penyusunan Plafon Anggaran Sementara;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Surabaya tahun 2021 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen

RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan secara ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2019 selain itu juga memperhatikan dokumen Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 dan dokumen RKPD tahun 2020 sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan mengenai kondisi geografi daerah, kondisi demografi, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

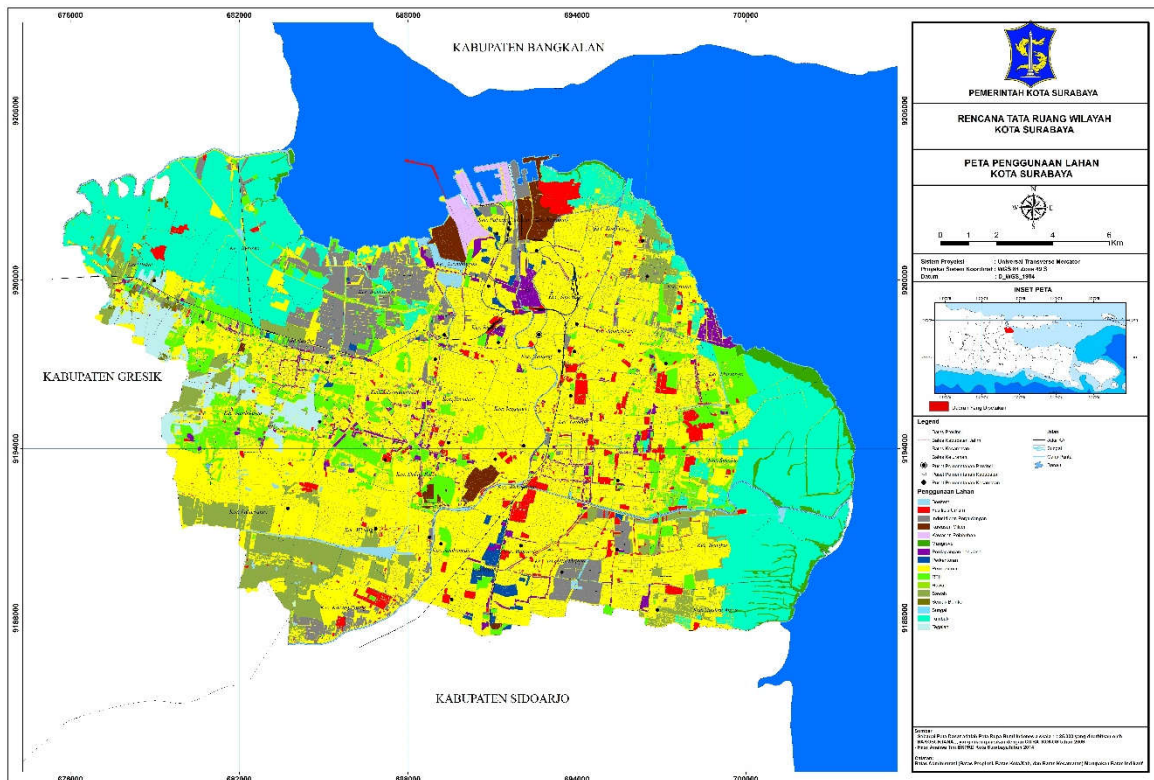
Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

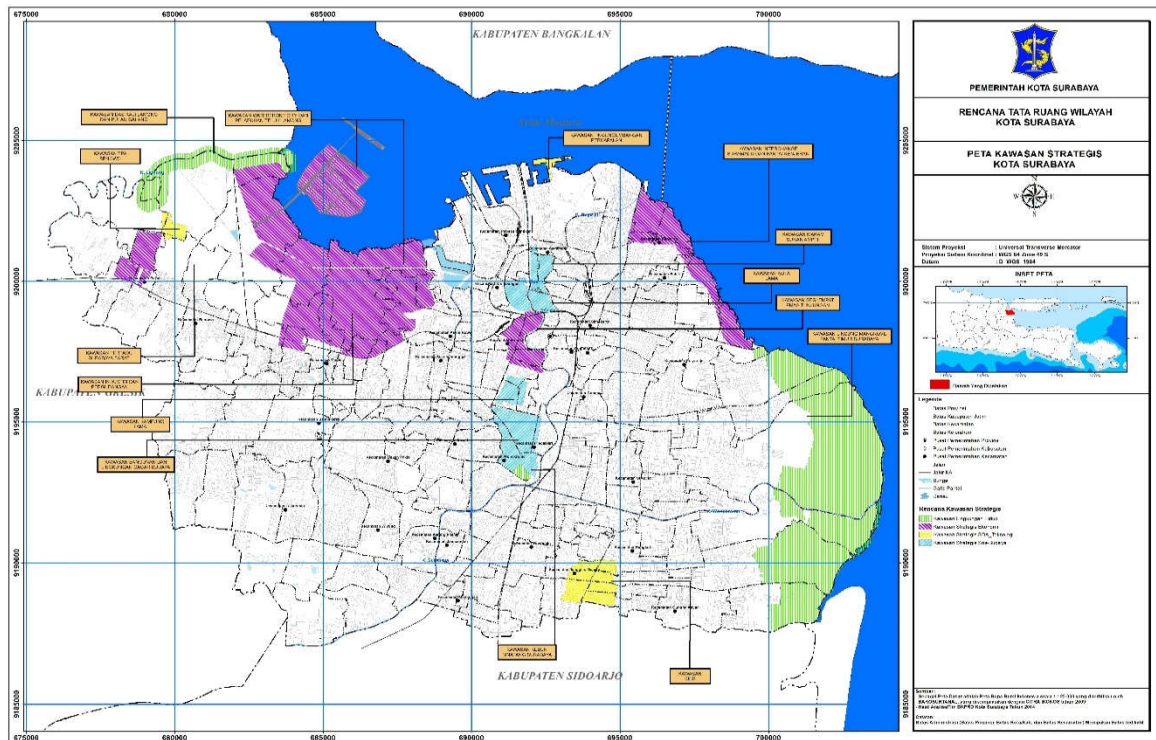
Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya

untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.



Gambar II.1 Peta Penggunaan Lahan Kota Surabaya

Berdasarkan peta penggunaan lahan di atas, Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang. Gambar II.2 menunjukkan Peta kawasan strategis kota Surabaya.



Gambar II.2 Peta Kawasan Strategis Kota Surabaya

Beberapa kawasan strategis yang dimaksud diantaranya adalah:

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya, sebagai pusat kegiatan regional. Dengan adanya Sentra Ikan Bulak, kawasan ini, khususnya Kecamatan Bulak menyumbang kontribusi PDRB pada kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 33,36% dari total PDRB Kecamatan Bulak, diikuti kategori Perdag. Besar&Eceran; Reparasi Mobil & Motor sebesar 26,53% dari total PDRB Kecamatan Bulak.

- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan mixed-use pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal Multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.

b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II.1
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya
Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

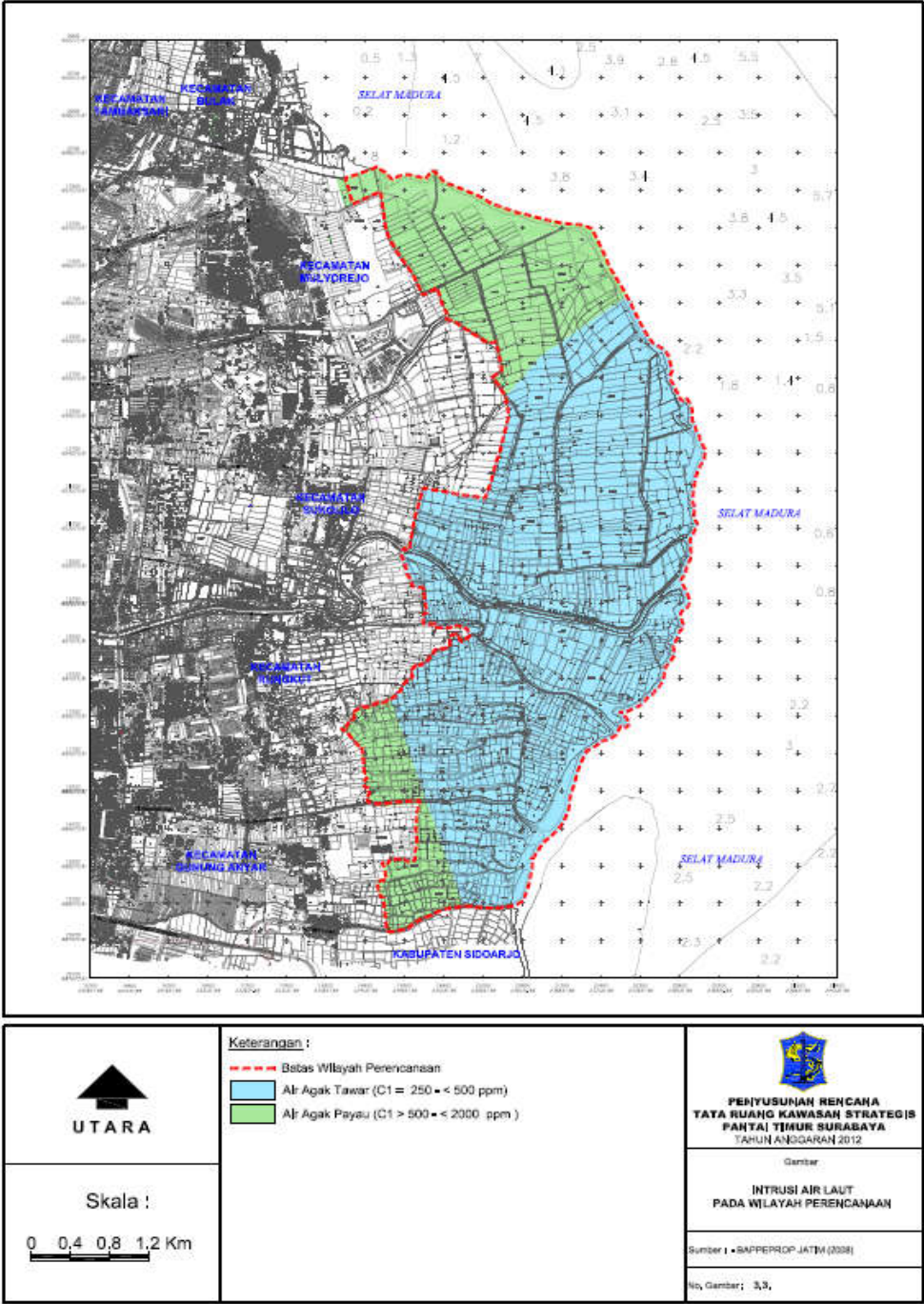
No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya***
1	Pabean Cantian	27
2	Krembangan	51
3	Genteng	62
4	Sawahan	9
5	Wonokromo	24
6	Gubeng	11
7	Tegalsari	30
8	Bubutan	26
9	Semampir	17
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	8
12	Dukuh Pakis	1
13	Lakarsantri	2
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1
Jumlah		277

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019*** (angka sangat sementara)

c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.



Gambar II.3
Kondisi Instruksi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya

- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:

1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.4



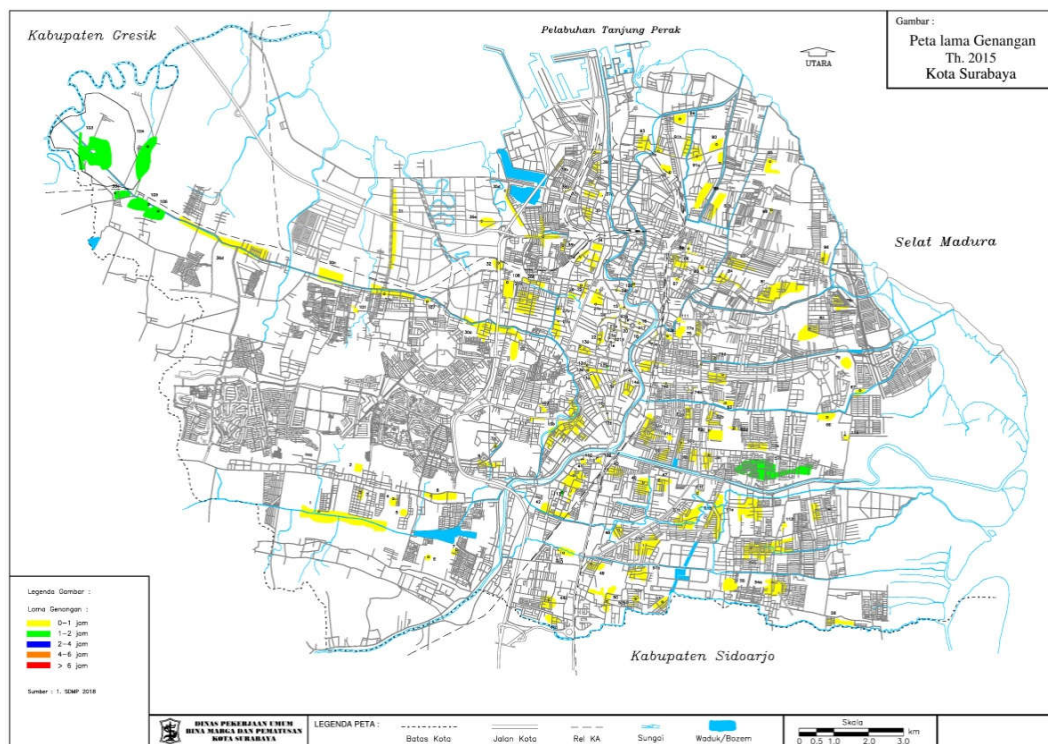
Gambar II.4
Peta Sesar Kendeng

Sumber: (http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270)

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:



Gambar II.5
Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara

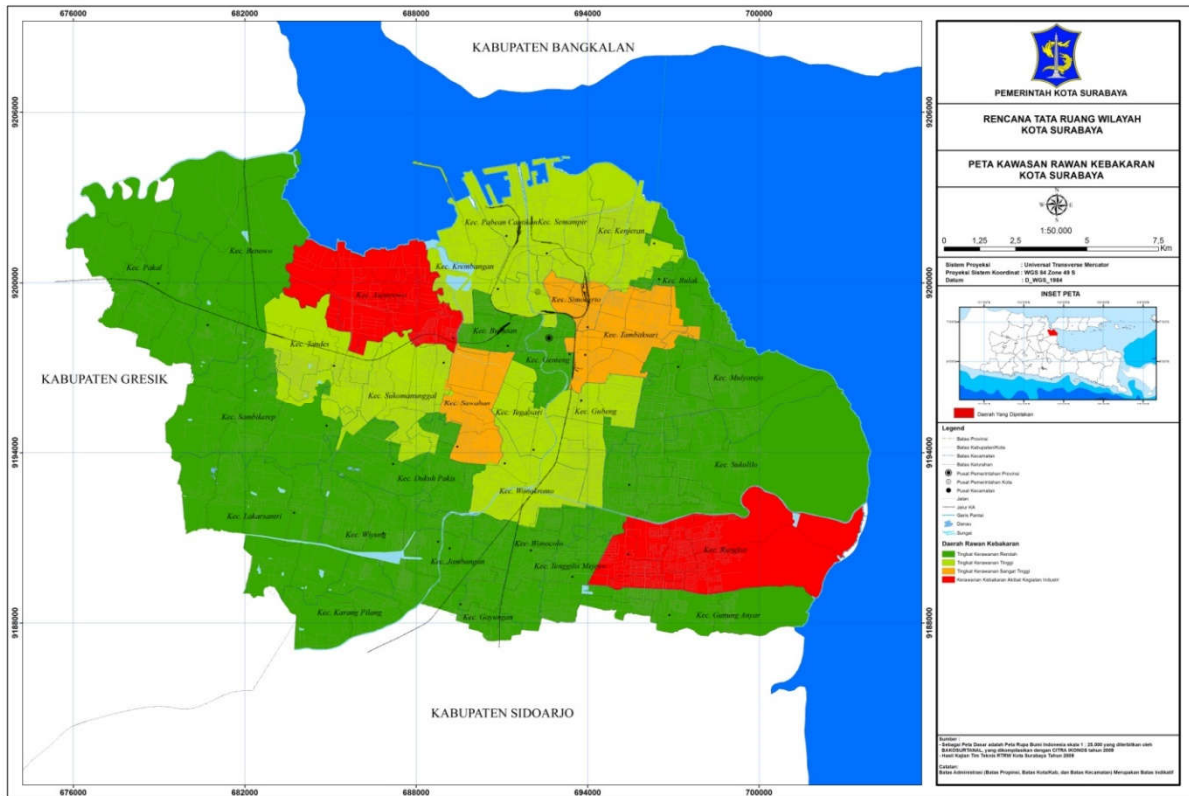


Gambar II.6
Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar II.7
Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana di Kota Surabaya.

Tabel II.2
Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Banjir	10	1	0	0
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	12	3	3	7
3	Kebakaran	300	589	496	515

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

2.1.1.3 Kondisi Demografis

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK per 31 Desember Tahun 2019 sebesar 3.159.481 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.3. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II.3 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km² yaitu Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Kenjeran. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel II.3
Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Asemrowo	15,3241	49.808	3.250	17	Pakal	19,0729	58.599	3.072
2	Benowo	25,106	68.351	2.722	18	Rungkut	22,7359	121.247	5.333
3	Bubutan	3,947	107.835	27.321	19	Sambikerep	16,7174	66.833	3.998
4	Bulak	5,6633	46.166	8.152	20	Sawahan	7,0668	216.414	30.624
5	Dukuh Pakis	10,9526	62.846	5.738	21	Semampir	8,7024	206.449	23.723
6	Gayungan	5,5139	47.827	8.674	22	Simokerto	2,7723	104.143	37.566
7	Genteng	14,1224	63.165	4.473	23	Sukolilo	28,7225	116.915	4.071
8	Gubeng	7,8009	143.874	18.443	24	Sukomanunggal	9,2935	108.264	11.649
9	Gunung Anyar	9,7686	60.505	6.194	25	Tambaksari	9,3023	239.272	25.722
10	Jambangan	4,5385	54.105	11.921	26	Tandes	9,7564	96.590	9.900
11	Karang Pilang	9,9754	77.557	7.775	27	Tegalsari	4,2905	108.097	25.194
12	Kenjeran	8,7314	179.198	20.523	28	Tenggilis Mejoyo	5,8474	60.274	10.308

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

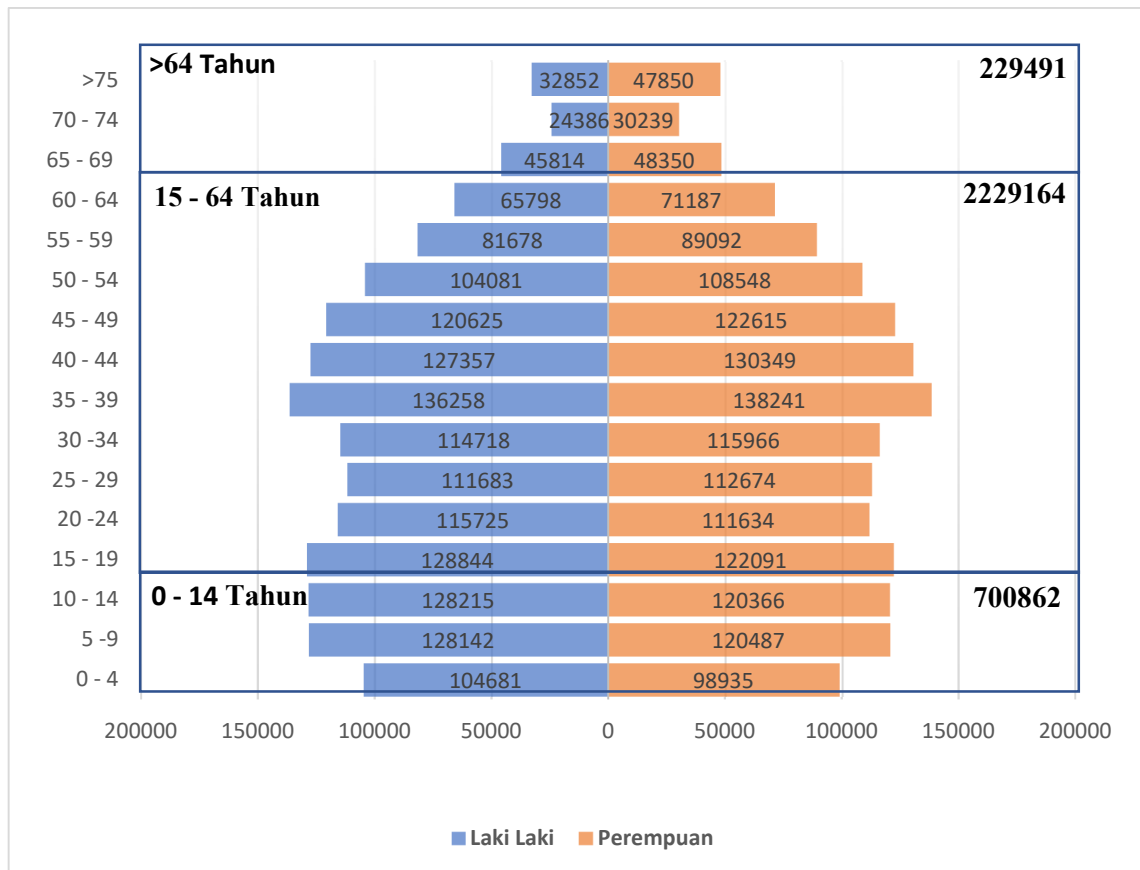
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
13	Krembangan	8,7253	126.743	14.526
14	Lakarsantri	19,2742	61.907	3.212
15	Mulyorejo	12,7742	91.339	7.150
16	Pabean Cantian	5,5762	85.856	15.397

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
29	Wiyung	11,3889	74.024	6.500
30	Wonocolo	6,5355	85.284	13.049
31	Wonokromo	8,3176	169.994	20.438

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019, diolah

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.588.624 jiwa atau 50,28 persen penduduk perempuan dan 1.570.857 jiwa atau 49,72 persen penduduk laki-laki. Dari piramida penduduk seperti Gambar II.8 menunjukkan bahwa kelompok usia 35-39 tahun populasinya tertinggi dari kelompok usia lainnya. Jumlah penduduk dengan usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25-59 tahun sebesar 1.613.885 jiwa atau 51,08 persen dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5-24 tahun sebesar 975.504 jiwa atau 30,88 persen, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 366.476 atau 11,60 persen. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II.8.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**



Gambar II.8

Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2019, diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada tahun 2019 yaitu usia 0-4 tahun sebanyak 203.616 jiwa, usia 5-9 tahun sebanyak 248.629 jiwa, usia 10-14 tahun sebanyak 248.581 jiwa dan usia 15-19 tahun sebanyak 250.935 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan angkatan kerja usia 15-64 tahun sebesar 2.229.128 jiwa dan usia bukan angkatan kerja 930.353 jiwa dengan rasio ketergantungan 41,73 persen.

Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah pada akhir tahun 2019 disajikan pada berikut ini.

Tabel II.4
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah
Tahun 2019

No	Kecamatan	3-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Asemrowo	3.221	5.298	2.552	2.492
2	Benowo	4.347	7.174	3.500	3.543
3	Bubutan	6.057	10.099	5.138	5.101
4	Bulak	2.917	4.782	2.384	2.417
5	Dukuh Pakis	3.651	5.946	2.814	2.870
6	Gayungan	2.614	4.251	2.158	2.220
7	Genteng	3.336	5.513	2.798	2.960
8	Gubeng	7.694	12.790	6.507	6.519
9	Gunung Anyar	3.776	5.971	2.759	2.708
10	Jambangan	3.415	5.324	2.569	2.489
11	Karang Pilang	4.535	7.173	3.521	3.785
12	Kenjeran	11.846	19.049	9.082	9.344
13	Krembangan	7.330	11.872	5.759	6.023
14	Lakar Santri	3.831	6.322	3.006	3.127
15	Mulyorejo	5.138	8.390	4.030	4.155
16	Pabean Cantian	4.585	7.801	3.853	4.021
17	Pakal	3.649	6.022	3.060	3.066
18	Rungkut	7.538	11.523	5.437	5.572
19	Sambikerep	4.073	6.711	3.137	3.197
20	Sawahan	12.129	20.648	10.111	10.278
21	Semampir	12.857	20.911	9.874	10.268
22	Simokerto	5.901	9.570	4.597	4.829
23	Sukolilo	6.969	11.021	5.193	5.341
24	Sukomanunggal	6.459	10.460	4.887	4.980
25	Tambak Sari	13.703	22.541	10.787	11.325
26	Tandes	5.852	9.703	4.608	4.432
27	Tegalsari	5.887	9.827	4.821	4.949
28	Tenggilis Mejoyo	3.520	5.688	2.698	2.693
29	Wiyung	4.378	7.093	3.433	3.630
30	Wonocolo	4.870	7.926	3.841	3.888
31	Wonokromo	8.934	15.622	8.038	8.228
Jumlah		185.012	303.021	146.952	150.450

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II.4 di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.5.

Tabel II.5
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama

AGAMA	2016	2017	2018	2019
1. Islam	85,04%	85,11%	85,35%	85,51%
2. Katholik	4,00%	3,96%	3,94%	3,91%
3. Kristen	9,14%	9,12%	8,98%	8,89%
4. Hindu	0,28%	0,28%	0,26%	0,25%
5. Budha	1,51%	1,50%	1,45%	1,42%
6. Konghuchu	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
7. Lainnya	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dilihat dari Tabel II.5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 85,51% sedangkan sebesar 14,49% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 27,75 persen. Posisi kedua ditempati oleh belum/tidak bekerja sebesar 26,62 persen dan di posisi ketiga adalah mengurus rumah tangga sebesar 18,34 persen. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II.6.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

**Tabel II.6
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019**

No	Pekerjaan	Jumlah	%	No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	Belum Tidak Bekerja	840.953	26,62	46	Juru Masak	79	0,00
2	Mengurus Rumah Tangga	579.477	18,34	47	Promotor Acara	1	0,00
3	Pelajar Mahasiswa	518.005	16,40	48	Anggota DPR RI	8	0,00
4	Pensiunan	22.514	0,71	49	Anggota DPD	1	0,00
5	Pegawai Negeri Sipil	45.022	1,43	50	Anggota BPK	1	0,00
6	Tentara Nasional Indonesia	12.554	0,40	51	Presiden	-	-
7	Kepolisian RI	5.227	0,17	52	Wakil Presiden	-	-
8	Perdagangan	3.060	0,10	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0,00
9	Petani Pekebun	3.397	0,11	54	Anggota Kabinet Kementerian	5	0,00
10	Peternak	32	0,00	55	Duta Besar	1	0,00
11	Nelayan Perikanan	1.148	0,04	56	Gubernur	1	0,00
12	Industri	524	0,02	57	Wakil Gubernur	-	-
13	Konstruksi	281	0,01	58	Bupati	-	-
14	Transportasi	282	0,01	59	Wakil Bupati	1	0,00
15	Karyawan Swasta	876.629	27,75	60	Walikota	1	0,00
16	Karyawan BUMN	5.891	0,19	61	Wakil Walikota	2	0,00
17	Karyawan BUMD	619	0,02	62	Anggota DPRD Provinsi	14	0,00
18	Karyawan Honorer	1.708	0,05	63	Anggota DPRD Kabupaten Kota	16	0,00
19	Buruh Harian Lepas	5.719	0,18	64	Dosen	6.135	0,19
20	Buruh Tani Perkebunan	365	0,01	65	Guru	24.440	0,77
21	Buruh Nelayan Perikanan	98	0,00	66	Pilot	18	0,00
22	Buruh Peternakan	18	0,00	67	Pengacara	210	0,01
23	Pembantu Rumah Tangga	700	0,02	68	Notaris	186	0,01
24	Tukang Cukur	41	0,00	69	Arsitek	118	0,00
25	Tukang Listrik	121	0,00	70	Akuntan	70	0,00
26	Tukang Batu	1.441	0,05	71	Konsultan	178	0,01
27	Tukang Kayu	288	0,01	72	Dokter	6.623	0,21
28	Tukang Sol Sepatu	64	0,00	73	Bidan	821	0,03
29	Tukang Las Pandai Besi	165	0,01	74	Perawat	2.729	0,09
30	Tukang Jahit	511	0,02	75	Apoteker	359	0,01
31	Tukang Gigi	6	0,00	76	Psikiater Psikolog	48	0,00
32	Penata Rias	71	0,00	77	Penyiar Televisi	8	0,00
33	Penata Busana	21	0,00	78	Penyiar Radio	16	0,00
34	Penata Rambut	63	0,00	79	Pelaut	335	0,01
35	Mekanik	391	0,01	80	Peneliti	37	0,00
36	Seniman	150	0,00	81	Sopir	1.974	0,06
37	Tabib	11	0,00	82	Pialang	10	0,00
38	Paraji	4	0,00	83	Paranormal	5	0,00
39	Perancang Busana	16	0,00	84	Pedagang	8.277	0,26
40	Penterjemah	21	0,00	85	Perangkat Desa	6	0,00
41	Imam Masjid	16	0,00	86	Kepala Desa	2	0,00
42	Pendeta	518	0,02	87	Biarawati	160	0,01
43	Pastor	29	0,00	88	Wiraswasta	173.323	5,49
44	Wartawan	220	0,01	89	Lainnya	4.255	0,13
45	Ustadz Mubaligh	77	0,00	Jumlah		3.158.943	100,00

Sumber : Data Penduduk WNI, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II.7. Penduduk Kota Surabaya paling banyak (28,20 persen), merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah penduduk yang tidak/belum sekolah sebesar 23,42 persen dan posisi selanjutnya adalah lulusan SD sebanyak 16,05 persen.

Tabel II.7
Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	740.033	23,42
2.	Belum Tamat SD/ sederajat	232.914	7,37
3.	SD/ sederajat	507.081	16,05
4.	SLTP/ sederajat	399.548	12,65
5.	SLTA/ sederajat	890.818	28,20
6.	D I / D II	20.637	0,65
7.	Akademi D III/ Sarjana Muda	40.396	1,28
8.	D IV/ S1	305.315	9,66
9.	S2/ S3	22.739	0,72
10.	LAIN-LAIN	-	0,00
JUMLAH		3.159.481	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II.8.

Tabel II.8
Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
IPM	80,38	81,07	81,74	82,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2020

2.1.2.1.2 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar

2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp580.756.010,680.000,- yang meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp538.954.457.780.000,- Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2019 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp161.141.233.330.000,- atau meningkat sebesar 8.03% dibanding dengan tahun 2018 sebesar Rp149.167.327.310.000,-. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebesar Rp109.245.937.200.000,- di tahun 2019 atau meningkat sebesar 7,95% dibanding tahun 2018 sebesar Rp101.196.564.520.000,- sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti yang dapat dilihat pada Tabel II.9.

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar Rp387.340.042.930.000,- meningkat menjadi sebesar Rp410.969.893.880.000,- di tahun 2019. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp116.343.590.220.000,- diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp77.312.368.810.000,- serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp62.898.688.760.000,- seperti dapat dilihat pada Tabel II.10 berikut.

Tabel II.9

**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2019 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	883.177,33	0,18	913.363,56	0,17	928.398,16	0,16
B	Pertambangan dan Penggalan	30.638,64	0,01	32.568,38	0,01	33.531,33	0,01
C	Industri Pengolahan	92.745.070,08	18,81	101.196.564,52	18,78	109.245.937,20	18,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.263.680,02	0,46	2.311.134,20	0,43	2.362.300,29	0,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	740.173,38	0,15	771.856,00	0,14	791.147,83	0,14
F	Konstruksi	49.603.609,37	10,06	52.920.129,31	9,82	54.649.310,30	9,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135.322.725,10	27,45	149.167.327,31	27,68	161.141.233,33	27,75
H	Transportasi dan Pergudangan	26.215.295,76	5,32	28.811.194,17	5,35	31.240.415,60	5,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78.971.933,92	16,02	87.056.324,46	16,15	95.537.038,24	16,45
J	Informasi dan Komunikasi	26.571.784,77	5,39	28.390.748,22	5,27	30.770.585,80	5,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.631.465,09	5,20	28.140.646,05	5,22	29.413.339,89	5,06
L	Real Estate	12.495.064,18	2,53	13.775.255,11	2,56	14.947.568,30	2,57
M,N	Jasa Perusahaan	12.098.851,21	2,45	13.571.273,11	2,52	14.930.184,77	2,57

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.768.287,70	1,37	7.345.115,74	1,36	8.154.990,77	1,40
P	Jasa Pendidikan	11.958.097,23	2,43	12.897.475,91	2,39	14.007.607,77	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.730.513,94	0,76	4.053.612,67	0,75	4.443.228,45	0,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.995.936,81	1,42	7.599.869,06	1,41	8.159.192,66	1,40
Produk Domestik Regional Bruto		493.026.304,54	100,00	538.954.457,78	100,00	580.756.010,68	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020
Catatan : *) data sementara

Tabel II.10

**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2016 – 2019 (dalam Juta Rp)**

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	589.909,43	0,16	581.426,57	0,15	576.221,53	0,14
B	Pertambangan dan Penggalian	20.544,80	0,01	20.762,58	0,01	20.782,09	0,01
C	Industri Pengolahan	69.881.287,92	19,16	73.328.747,38	18,93	77.312.368,81	18,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.541.129,01	0,42	1.540.006,38	0,40	1.546.272,08	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	564.406,83	0,15	583.121,24	0,15	605.979,60	0,15

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kategori	Uraian	2017		2018		2019*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
F	Konstruksi	36.208.179,04	9,93	38.480.421,60	9,93	40.576.452,62	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	103.301.112,79	28,32	109.870.324,37	28,37	116.343.590,22	28,31
H	Transportasi dan Pergudangan	17.707.950,22	4,86	19.046.861,58	4,92	20.497.977,43	4,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.192.882,21	14,86	58.419.739,39	15,08	62.898.688,76	15,30
J	Informasi dan Komunikasi	23.974.911,33	6,57	25.613.455,86	6,61	27.531.903,71	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.685.808,04	4,85	18.541.116,14	4,79	19.187.832,54	4,67
L	Real Estate	9.610.228,83	2,63	10.165.858,67	2,62	10.784.959,46	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	8.278.199,91	2,27	8.867.969,79	2,29	9.474.538,92	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.597.265,29	1,26	4.697.025,94	1,21	4.867.861,44	1,18
P	Jasa Pendidikan	8.531.781,66	2,34	9.064.164,83	2,34	9.668.100,19	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.804.625,21	0,77	3.023.591,50	0,78	3.254.593,89	0,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.224.596,95	1,43	5.495.449,09	1,42	5.821.770,58	1,42
Produk Domestik Regional Bruto		364.714.819,48	100,00	387.340.042,93	100,00	410.969.893,88	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

Tabel II.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Uraian	2017		2018		2019	
		ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)	ADHB (%)	ADHK (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,16	0,17	0,15	0,16	0,14
B	Pertambangan dan Penggalan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	18,81	19,16	18,78	18,93	18,81	18,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,46	0,42	0,43	0,40	0,41	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15
F	Konstruksi	10,06	9,93	9,82	9,93	9,41	9,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,45	28,32	27,68	28,37	27,75	28,31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,32	4,86	5,35	4,92	5,38	4,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,02	14,86	16,15	15,08	16,45	15,30
J	Informasi dan Komunikasi	5,39	6,57	5,27	6,61	5,30	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,20	4,85	5,22	4,79	5,06	4,67
L	Real Estate	2,53	2,63	2,56	2,62	2,57	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	2,45	2,27	2,52	2,29	2,57	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,37	1,26	1,36	1,21	1,40	1,18
P	Jasa Pendidikan	2,43	2,34	2,39	2,34	2,41	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,77	0,75	0,78	0,77	0,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,43	1,41	1,42	1,40	1,42
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman. Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Disamping itu, daya dukung seperti padatnya jumlah penduduk Kota Surabaya disertai tingginya tingkat konsumsi membuat Kota Surabaya memiliki nilai tambah lebih besar bagi pelaku pasar.

Selama tahun 2017-2019 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27-28 persen setiap tahunnya. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori industri pengolahan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai kontribusi 18-19 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya setiap tahunnya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 16-17 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

2.1.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya

berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.12. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha terkecuali lapangan usaha pengadaan listrik dan gas. Jika dirinci, kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi setiap tahunnya adalah kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori informasi dan komunikasi, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Tabel II.12
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha
Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2017 – 2019

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	-1,44	-0,90
B	Pertambangan dan Penggalian	2,58	1,06	0,09
C	Industri Pengolahan	4,95	4,93	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,75	-0,07	0,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	3,32	3,92
F	Konstruksi	6,92	6,28	5,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	6,36	5,89
H	Transportasi dan Pergudangan	6,87	7,56	7,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,64	7,80	7,67
J	Informasi dan Komunikasi	6,93	6,83	7,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,92	4,84	3,49
L	Real Estate	5,08	5,78	6,09
M,N	Jasa Perusahaan	6,66	7,12	6,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,85	2,17	3,64
P	Jasa Pendidikan	5,95	6,24	6,66

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kategori	Uraian	2017	2018*	2019**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,87	7,81	7,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,89	5,18	5,94
PDRB		6,13	6,20	6,10
PDRB TANPA MIGAS		6,13	6,20	6,10

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

**) data sangat sementara

Di tengah berlangsungnya pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga kestabilannya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih tumbuh positif. Beberapa permasalahan diindikasikan beresiko menghambat kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi cenderung semakin terbatas. Kendati demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun, yakni pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Selengkapnya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional terangkum dalam tabel berikut.

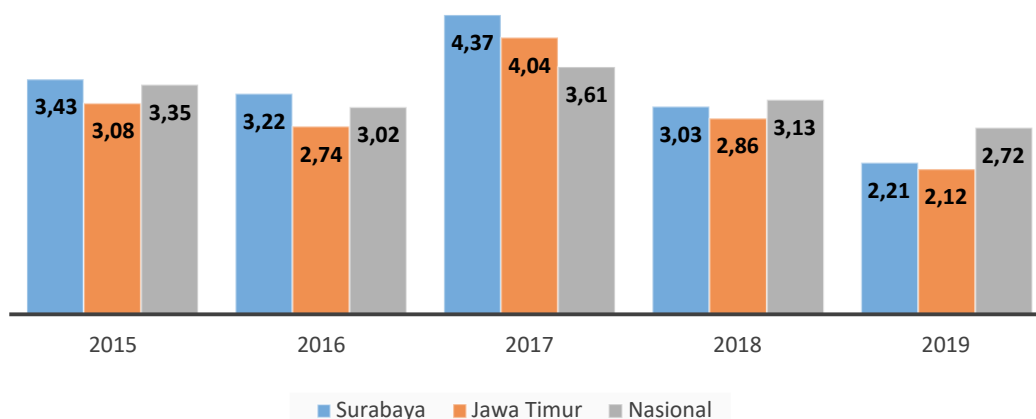
Tabel II.13
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016 – 2019 (%)

Pertumbuhan Ekonomi	2016	2017	2018	2019
Surabaya	6,00	6,13	6,19	6,10
Jawa Timur	5,57	5,45	5,50	5,52
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

2.1.2.1.4 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2019 tingkat inflasi Kota Surabaya sebesar 2,21 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi Kota Surabaya Tahun 2018 sebesar 3,03 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2019 juga sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2019 sebesar $3,5 \pm 1$ persen, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah.



Gambar II.9
Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2015-2018

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Berdasarkan data rilis BPS Kota Surabaya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 2,21 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Surabaya pada tahun sebelumnya sebesar 3,03 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi di Jawa Timur dan Nasional, Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana terangkum dalam grafik di atas. Meski rata-rata inflasi Kota Surabaya cenderung lebih rendah dibandingkan angka inflasi nasional, namun pada periode tertentu nilai inflasi tersebut bisa tinggi melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga tetap perlu dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota Surabaya.

Inflasi Kota Surabaya yang rendah di tahun 2019 ini merupakan capaian keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga stabilitas harga di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya selama ini terus berupaya menjaga stabilitas harga untuk mendorong konsumsi masyarakat tinggi melalui koordinasi intensif antar instansi terkait maupun pengawasan dan survei perkembangan harga di pasaran.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2019 antara lain: emas perhiasan, sekolah dasar, sepeda motor, akademi/ perguruan tinggi, bawang merah, kontrak rumah, tarif kereta api, rokok kretek filter, mobil, dan bawang putih.

Berdasarkan komoditasnya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan dari berkontribusi tertinggi yang membentuk

inflasi Kota Surabaya tahun 2019. Jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Surabaya tahun 2019 paling banyak berkontribusi oleh inflasi kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*). Selama ini tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah manapun ketika menghadapi inflasi yang disebabkan dari kelompok *administered price* (inflasi akibat kebijakan Pemerintah Pusat). Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya mampu mengendalikan inflasi dari kelompok *volatile food* (bahan makanan) dengan menjaga pasokan dan pengawasan arus barang. Hal itu ditunjukkan oleh nilai inflasi yang lebih rendah baik dibanding perkembangan harga di tahun sebelumnya.

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat Surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II.14
Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok
Tahun 2017 – 2019

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun					
		2017		2018		2019	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
BERAS							
Beras IR.64 Kualitas I	Kg	1,00%	179,02%	2,34%	153,13%	0,58%	188,36%
Beras IR.64 Kualitas II	Kg	2,00%	167,04%	4,55%	108,95%	1,70%	165,92%
Beras IR.64 Kualitas III	Kg	2,00%	168,60%	2,81%	143,74%	4,96%	100,84%
GULA							
Gula Pasir Lokal Curah	Kg	5,00%	96,77%	2,79%	144,18%	5,84%	83,19%
MINYAK GORENG							
Minyak Goreng Curah (Bening)	Kg	2,00%	156,66%	4,15%	117,06%	2,91%	141,72%
DAGING							
Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	2,00%	165,07%	0,85%	183,08%	0,97%	180,53%
Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	0,00%	191,15%	1,23%	175,35%	0,83%	183,42%
Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	1,00%	187,74%	0,89%	182,11%	1,08%	178,48%
Daging Ayam Broiler	Kg	5,00%	96,64%	6,37%	72,57%	5,14%	97,24%
I K A N							
Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,00%	122,15%	6,89%	62,13%	8,40%	32,08%
Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	11,00%	-15,82%	6,99%	60,20%	9,66%	6,80%

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun					
		2017		2018		2019	
		Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	4,00%	122,87%	-	-	3,36%	132,86%
Ikan Lele Segar (Ukuran Sedang)	Kg	1,00%	184,11%	1,87%	162,67%	1,12%	177,53%
Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	3,00%	139,99%	5,05%	98,92%	1,52%	169,52%
Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	3,00%	144,14%	1,13%	177,31%	1,61%	-122,59%
TELUR							
Telur Ayam Broiler	Kg	1,00%	8,60%	6,97%	60,58%	5,72%	85,67%
Telur Ayam Kampung	Butir	6,00%	78,83%	3,38%	132,36%	3,09%	138,20%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah dan Dinas Perdagangan, diolah Bappeko, 2019

2.1.2.1.5 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2016 - 2019.

Tabel II. 15
PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
ATAS DASAR HARGA BERLAKU				
PDRB (Milyar Rp)	451.486,79	495.043,31	544.594,46	580.756,01

Tahun	2016	2017	2018	2019
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	149,68	172,21	188,73	200,52
ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
PDRB (Milyar Rp)	343.652,59	364.714,82	387.333,39	410.969,89
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	113,93	126,87	134,23	141,90
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481

Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya, 2020, diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB perkapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 4 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang, namun pada tahun 2015 tingkat pemerataan pendapatan masuk dalam kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya - upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel II. 16
Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019

Gini Ratio	0,42	0,387	0,387	0,38

Sumber data: BPS Provinsi Jawa Timur, 2020

2.1.2.1.7 Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode Williamson *Index* yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

Tabel II.17
Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018	2019
Indeks Ketimpangan Wilayah (PDRB Tahun dasar 2010)	0,67	0,669	0,669	0,665

Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2020

Terjadinya perubahan tahun dasar dalam PDRB yaitu yang awalnya menggunakan tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 maka terjadi perubahan besaran indeks Williamson dapat disajikan pada Tabel II.17. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa secara umum ketimpangan pembangunan antar kecamatan di Kota Surabaya relatif tinggi dengan nilai indeks sekitar 0,6 namun mempunyai kecenderungan yang terus meningkat.

2.1.2.1.8 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

Tabel II.18
Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok
Pendapatan Kota Surabaya

Tahun	40 % terbawah	40 % menengah	20 % tertinggi
2012	21,38	32,01	46,61
2013	23,55	36,62	39,83
2014	19,74	31,64	48,62
2015	17,81	32,34	49,85
2016	17,96	33,80	48,24

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 diolah

Seperti disajikan pada Tabel II.18, pada tahun 2015 ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40% penduduk termiskin mencapai lebih dari 17% dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai 17,81%.

2.1.2.1.9 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2017 sebesar Rp474.365,- dan meningkat menjadi Rp530.178,- pada tahun 2018. Jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2017 sebanyak 154.710 jiwa menjadi 140.810 jiwa pada tahun 2018,

sehingga persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,54%. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2019 meningkat menjadi Rp567.474, tetapi jumlah penduduk miskin menurun dari tahun 2018 sebanyak 140.810 menjadi 130.550 sehingga angka kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2019 turun menjadi 4,51 persen. Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II.19.

Tabel II.19
Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Kemiskinan	2016	2017	2018	2019
Angka Kemiskinan (persen)	5,63	5,39	4,54	4,51
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	438.283	474.365	530.178	567.474
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	161,01	154,71	140,81	130,55

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, pemberdayaan UKM serta inkubasi dan klinik usaha mandiri. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.361.908 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 2.408.552 jiwa, pada tahun

2018 sebanyak 2.157.098, pada tahun 2019 sebanyak 2.458.655 jiwa dan seluruhnya dapat membaca dan menulis. Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.20
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.361.908	2.408.552	2.157.098	2.458.655
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.361.908	2.408.552	2.157.098	2.458.655
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dari data pada Tabel II.20 di atas, penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM pada tahun 2016 jenjang SD/MI sebesar 92,38 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 90,93 persen. APM pada tahun 2017 jenjang SD/MI sebesar 100,54 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 75,09 persen. APM pada tahun 2018 jenjang SD/MI sebesar 95,71 persen dan jenjang SMP/MTS sebesar 83,80 persen. Sedangkan pada tahun 2019 APM jenjang SD/MI sebesar 96,33 persen dan jenjang SMP/MTs sebesar 83,90 persen Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel II.21 sebagai berikut:

Tabel II.21
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	255.142	282.604	274.104	291.907
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373	303.021
	APM SD/MI (persen)	92,38	100,54	95,71	96,33
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	128.810	108.231	118.636	123.398
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554	146.952
	APM SMP/MTs (persen)	90,93	75,09	83,80	83,97

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.22
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	97,78	99,76	101,73%	94,34%
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	90,42	94,52	105,49%	100,04%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2016 - 2019 disajikan pada Tabel II.23 sebagai berikut:

Tabel II.23
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1.	PAUD (KB,TK, PPT, TPA)				
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	123.925	119.747	119.047	125.941
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	192.239	177.009	179.389	185.012
	APK PAUD (persen)	64,46	67,65	66,36	68,07
2.	SD/MI				
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.310	287.406	287.830	310.982
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	276.183	281.089	286.373	303.021
	APK SD/MI (persen)	101,86	102,25	100,50	102,63
3.	SMP/MTs				
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	135.283	143.426	129.136	135.629
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	141.653	144.127	141.554	146.952
	APK SMP/MTs (persen)	95,50	99,51	91,22	92,29

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 21 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel II.24.

Tabel II.24
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 - 2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Rata-Rata Lama Sekolah	10,44	10,45	10,46	10,47

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data

perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.25
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Lama Sekolah	13,99	14,41	14,78	14,79

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya di tahun 2019 berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA, yakni melebihi tingkat Diploma-3 (D3) namun masih belum mencapai Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1).

2.1.2.2.2 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.26.

Tabel II.26
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016– 2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (persen)	73,87	73,88	73,98	74,13

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 73,88 tahun, pada tahun 2018 menjadi 73,98 tahun dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 74,13 tahun.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk dan *stunting* pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2016 sebesar 0,16 persen menurun menjadi 0,13 persen pada tahun 2019. Persentase balita *stunting* juga menurun sebesar 0,42 persen dari tahun 2018 ke 2019. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk dan *stunting* tahun 2016- 2019.

Tabel II.27
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	280	278	254	242
2	Jumlah balita yang ditimbang	176.439	179.662	181.842	180.328
3	Persentase (persen)	0,16	0,15	0,14	0,13

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II.28
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk + Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	16.627	15.274	15.060
2	Jumlah balita yang ditimbang	179.662	181.842	180.328
3	Persentase (persen)	9,25	8,39	8,35

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II.29
Prevalensi Balita *Stunting* Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah balita dengan status <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	N/A	16.220	15.391
2	Jumlah balita yang ditimbang	N/A	181.842	180.328
3	Persentase (persen)	N/A	8,92	8,46

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II.30
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya (menurut Kecamatan)
Tahun 2017–2019

No.	Kecamatan	2017			2018			2019		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
1	Kec. Asemrowo	0	3.633	0,00%	4	3.369	0,12%	3	3.228	0,09%
2	Kec. Benowo	4	4.506	0,09%	4	4.559	0,09%	4	4.392	0,09%
3	Kec. Bubutan	4	6.361	0,06%	3	5.989	0,05%	1	5.793	0,02%
4	Kec. Bulak	3	2.770	0,11%	4	2.839	0,14%	5	2.802	0,18%
5	Kec. Dukuh Pakis	5	3.436	0,15%	4	3.293	0,12%	3	3.148	0,10%
6	Kec. Gayungan	3	2.449	0,12%	2	2.338	0,09%	4	2.249	0,18%
7	Kec. Genteng	8	3.203	0,25%	11	3.257	0,34%	11	3.265	0,34%
8	Kec. Gubeng	2	7.164	0,03%	0	7.268	0,00%	0	7.592	0,00%
9	Kec. Gunung Anyar	2	3.321	0,06%	2	3.483	0,06%	0	4.087	0,00%
10	Kec. Jambangan	6	3.586	0,17%	3	3.587	0,08%	0	3.529	0,00%
11	Kec. Karang Pilang	2	4.155	0,05%	2	4.347	0,05%	5	4.372	0,11%
12	Kec. Kenjeran	18	11.251	0,16%	15	11.822	0,13%	15	14.034	0,11%
13	Kec. Krembangan	6	7.597	0,08%	2	7.987	0,03%	2	7.832	0,03%
14	Kec. Lakarsantri	2	5.148	0,04%	9	3.670	0,25%	4	4.158	0,10%
15	Kec. Mulyorejo	2	5.373	0,04%	4	5.589	0,07%	0	5.616	0,00%
16	Kec. Pabean Cantian	3	4.425	0,07%	5	4.357	0,11%	2	4.249	0,05%
17	Kec. Pakal	44	4.576	0,96%	16	4.394	0,36%	36	4.093	0,88%
18	Kec. Rungkut	11	6.803	0,16%	8	7.304	0,11%	8	7.163	0,11%
19	Kec. Sambikerep	2	2.864	0,07%	5	4.229	0,12%	5	3.400	0,15%
20	Kec. Sawahan	16	12.390	0,13%	14	12.380	0,11%	15	12.064	0,12%
21	Kec. Semampir	22	11.651	0,19%	24	11.740	0,20%	21	11.680	0,18%
22	Kec. Simokerto	5	5.807	0,09%	9	5.694	0,16%	8	3.626	0,22%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No.	Kecamatan	2017			2018			2019		
		Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvey	Persentase Gizi Buruk
23	Kec. Sukolilo	7	6.246	0,11%	2	6.540	0,03%	3	6.845	0,04%
24	Kec. Sukomanunggal	63	6.775	0,93%	60	6.657	0,90%	59	6.405	0,92%
25	Kec. Tambaksari	12	11.482	0,10%	18	12.229	0,15%	6	11.963	0,05%
26	Kec. Tandes	4	5.989	0,07%	4	6.108	0,07%	4	6.263	0,06%
27	Kec. Tegalsari	9	5.911	0,15%	7	5.884	0,12%	7	5.646	0,12%
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	0	2.820	0,00%	0	3.022	0,00%	0	3.058	0,00%
29	Kec. Wiyung	1	4.364	0,02%	3	4.318	0,07%	3	4.316	0,07%
30	Kec. Wonocolo	5	5.037	0,10%	5	4.859	0,10%	4	4.925	0,08%
31	Kec. Wonokromo	7	8.569	0,08%	5	8.730	0,06%	4	8.535	0,05%
Total		278	179.662	0,15%	254	181.842	0,14%	242	180.328	0,13%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada Tabel II.31 dan Tabel II.32 sebagai berikut:

Tabel II.31
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	37	34	31	25
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474	42.145
3	AKI per 100.000 KH	85,72	79,40	72,99	59,32

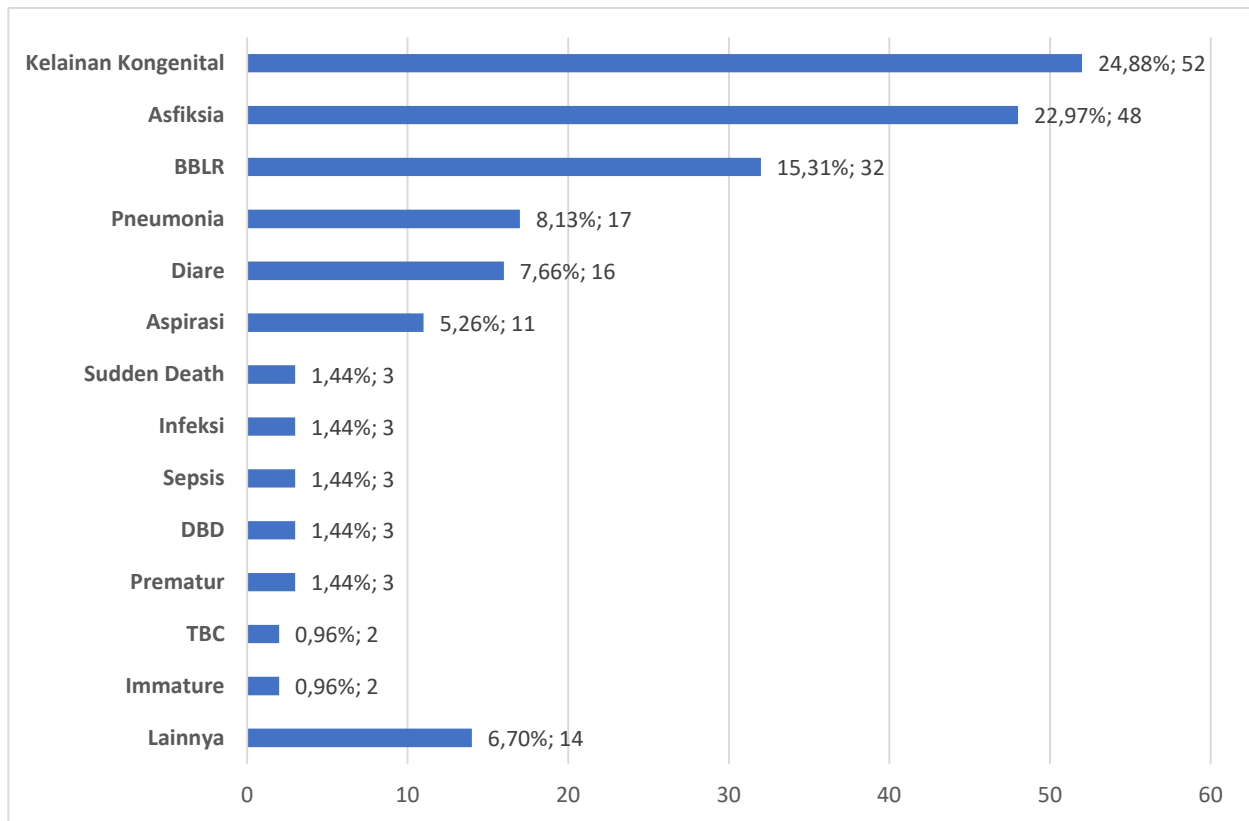
Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menurun dari tahun 2016 sebesar 85,72 menjadi 72,99 pada tahun 2018. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 sebesar 6,39 menurun menjadi 5,04 pada tahun 2019. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah bayi berat lahir rendah (BBLR), asfiksia dan kelainan kongenital, ketiganya menyumbang 63,16 persen dari 211 bayi yang meninggal di tahun 2019.

Tabel II.32
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah bayi lahir meninggal	276	219	214	211
2	Kelahiran Hidup	43.164	42.822	42.474	42.145
3	AKB per 1.000 KH	6,39	5,11	5,04	5,01

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II.10

Kematian Bayi berdasarkan Penyebab Kematian Terbanyak Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019 diolah

Dari data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan prevalensi balita kurang gizi di bawah target bahkan capaiannya telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2018 mempunyai trend meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,12%. Adapun data tahun 2016

belum tersedia dikarenakan anggaran Sakernas Besar (Bulan Agustus) berdasarkan kebijakan pemerintah pusat digeser untuk kegiatan lain. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka tahun 2017 sampai dan 2018 disajikan pada Tabel II.33.

Tabel II.33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	89.479	93.096	130.459
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.468.094	1.520.041	2.222.469
3	Persen Pengangguran Terbuka	5,98%	6,12%	5,87%

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.468.094 menjadi 1.520.041 pada tahun 2018. Tahun 2019, jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.222.469. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sehingga dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan

prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.34.

Tabel II.34
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Grup Kesenian	498	591	611	731*
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	42	42	42
4	Jumlah Gedung Olahraga	4	4	4	4

*) Data per September 2019

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Salah satu wadah untuk menyalurkan minat terhadap budaya lokal adalah melalui kelompok/grup kesenian. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2016 sebanyak 498 grup kesenian, tahun 2017 meningkat menjadi 591 grup kesenian dan sampai dengan tahun 2018 meningkat menjadi 611 grup kesenian. dan sampai dengan tahun 2019 meningkat menjadi 731 grup kesenian.

Jumlah klub olahraga sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 klub olahraga, dan yang atletnya telah berprestasi di tingkat nasional maupun internasional sebanyak 41 klub olahraga. Untuk memberikan fasilitasi pembinaan klub olahraga tersebut, diperlukan gedung olahraga yang baik dan memadai. Sampai dengan tahun 2018, gedung olahraga yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 4 unit antara lain Gelanggang Remaja, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan gedung indoor Surabaya *Sport Center* (SSC). Selain itu, terdapat pula fasilitas gedung untuk pembinaan klub-klub olahraga milik KONI Provinsi Jawa Timur, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dan milik perseorangan maupun badan usaha yang memperhatikan pengembangan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.1.1 Pendidikan

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

2.1.3.1.1.a Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 telah disajikan di atas pada Tabel II.23 dan APK per kecamatan dalam Tabel berikut:

Tabel II.35
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Asemrowo	3.221	1926	59,80%	5.298	4060	76,63%	2.552	1719	67,36%
Benowo	4.347	3636	83,64%	7.174	7464	104,04%	3.500	2892	82,63%
Bubutan	6.057	3602	59,47%	10.099	9735	96,40%	5.138	2083	40,54%
Bulak	2.917	1878	64,38%	4.782	6799	142,18%	2.384	2741	114,97%
Dukuh Pakis	3.651	2916	79,87%	5.946	6858	115,34%	2.814	3279	116,52%
Gayungan	2.614	1787	68,36%	4.251	6533	153,68%	2.158	2242	103,89%
Genteng	3.336	2686	80,52%	5.513	7048	127,84%	2.798	5825	208,18%
Gubeng	7.694	4941	64,22%	12.790	14532	113,62%	6.507	3785	58,17%
Gunung Anyar	3.776	3160	83,69%	5.971	5186	86,85%	2.759	1299	47,08%
Jambangan	3.415	2312	67,70%	5.324	5205	97,76%	2.569	4004	155,86%
Karangpilang	4.535	3480	76,74%	7.173	7225	100,72%	3.521	3683	104,60%
Kenjeran	11.846	6499	54,86%	19.049	19001	99,75%	9.082	7671	84,46%
Krembangan	7.330	4664	63,63%	11.872	13721	115,57%	5.759	8142	141,38%
Lakarsantri	3.831	3291	85,90%	6.322	8793	139,09%	3.006	4701	156,39%
Mulyorejo	5.138	5496	106,97%	8.390	10664	127,10%	4.030	5254	130,37%
Pabean Cantian	4.585	2104	45,89%	7.801	4636	59,43%	3.853	1770	45,94%
Pakal	3.649	3225	88,38%	6.022	7775	129,11%	3.060	2447	79,97%
Rungkut	7.538	5385	71,44%	11.523	11793	102,34%	5.437	5428	99,83%
Sambikerep	4.073	2551	62,63%	6.711	6220	92,68%	3.137	3821	121,80%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kecamatan	APK PAUD			APK SD/MI			APK SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 3-6 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang PAUD	APK	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTS	APK
Sawahan	12.129	6874	56,67%	20.648	17389	84,22%	10.111	3451	34,13%
Semampir	12.857	6105	47,48%	20.911	21550	103,06%	9.874	5170	52,36%
Simokerto	5.901	4267	72,31%	9.570	7408	77,41%	4.597	3529	76,77%
Sukolilo	6.969	5306	76,14%	11.021	13119	119,04%	5.193	7050	135,76%
Sukomanunggal	6.459	4977	77,06%	10.460	10810	103,35%	4.887	5452	111,56%
Tambaksari	13.703	8710	63,56%	22.541	19210	85,22%	10.787	5103	47,31%
Tandes	5.852	5232	89,41%	9.703	12252	126,27%	4.608	3364	73,00%
Tegalsari	5.887	3766	63,97%	9.827	10875	110,66%	4.821	2952	61,23%
Tenggilis Mejoyo	3.520	2943	83,61%	5.688	5926	104,18%	2.698	2965	109,90%
Wiyung	4.378	3393	77,50%	7.093	7293	102,82%	3.433	2692	78,42%
Wonocolo	4.870	3094	63,53%	7.926	8630	108,88%	3.841	4744	123,51%
Wonokromo	8.934	5732	64,16%	15.622	12573	80,48%	8.038	7060	87,83%
Jumlah	185.012	125.938	68,07%	303.021	310.982	102,63%	146.952	135.629	92,29%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019 diolah

2.1.3.1.1.b Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 telah disajikan di atas dan APM per kecamatan pada Tabel II.36.

**Tabel II.36
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan
Tahun 2019**

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Asemrowo	5.298	3758	70,93%	2.552	1668	65,36%
Benowo	7.174	6989	97,42%	3.500	2674	76,40%
Bubutan	10.099	9123	90,34%	5.138	2057	40,04%
Bulak	4.782	6312	131,99%	2.384	2362	99,08%
Dukuh Pakis	5.946	6502	109,35%	2.814	3128	111,16%
Gayungan	4.251	6260	147,26%	2.158	2048	94,90%
Genteng	5.513	6647	120,57%	2.798	5509	196,89%
Gubeng	12.790	13883	108,55%	6.507	3624	55,69%
Gunung Anyar	5.971	4847	81,18%	2.759	1166	42,26%
Jambangan	5.324	5004	93,99%	2.569	3735	145,39%
Karangpilang	7.173	6908	96,31%	3.521	3381	96,02%
Kenjeran	19.049	17258	90,60%	9.082	7065	77,79%
Krembangan	11.872	13077	110,15%	5.759	7634	132,56%
Lakarsantri	6.322	8462	133,85%	3.006	4285	142,55%
Mulyorejo	8.390	10248	122,15%	4.030	4978	123,52%
Pabean Cantian	7.801	4366	55,97%	3.853	1617	41,97%
Pakal	6.022	7427	123,33%	3.060	2394	78,24%
Rungkut	11.523	11032	95,74%	5.437	4792	88,14%
Sambikerep	6.711	5974	89,02%	3.137	3559	113,45%
Sawahan	20.648	16192	78,42%	10.111	3272	32,36%
Semampir	20.911	19864	94,99%	9.874	4699	47,59%
Simokerto	9.570	6874	71,83%	4.597	3327	72,37%
Sukolilo	11.021	12479	113,23%	5.193	6394	123,13%
Sukomanunggal	10.460	10231	97,81%	4.887	5003	102,37%
Tambaksari	22.541	17725	78,63%	10.787	4793	44,43%
Tandes	9.703	11518	118,71%	4.608	3014	65,41%
Tegalsari	9.827	10331	105,13%	4.821	2804	58,16%
Tenggiling Mejoyo	5.688	5567	97,87%	2.698	2718	100,74%

Kecamatan	APM SD/MI			APM SMP/MTS		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	siswa berusia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI	APM	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	siswa berusia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs	APM
Wiyung	7.093	7016	98,91%	3.433	2586	75,33%
Wonocolo	7.926	8204	103,51%	3.841	4467	116,30%
Wonokromo	15.622	11892	76,12%	8.038	6569	81,72%
Jumlah	303.021	291.907	96,33%	146.952	123.398	83,97%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II.35 dan Tabel II.36 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan.

Dari data diatas terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK lebih dari 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK 100% menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

2.1.3.1.1.c Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2016 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,97 persen, dan meningkat pada tahun 2017, 2018,

dan 2019 menjadi 100 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.37.

Tabel II.37
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI				
1.1	Jumlah Siswa SD/MI yang Lulus	40.849	42.621	44.223	46.127
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	40.849	42.621	44.223	46.127
	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100
2.	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Lulus	39.570	41.834	42.282	40.965
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	39.580	41.834	42.282	40.965
	AL SMP/MTs (persen)	99,97	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada AL untuk jenjang SD/MI tahun 2016 mencapai angka 100 persen dan konsisten sebesar 100 persen sampai dengan tahun 2019. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2016 sebesar 99,97 persen, dan meningkat pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menjadi 100 persen. Perkembangan Angka Kelulusan (AL) jenjang pendidikan dasar Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 36.

Tabel II. 37 menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus.

2.1.3.1.1.d Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan

maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia sekolah. Jadi semakin rendah APS, maka kondisi pendidikan menjadi semakin baik. Saat ini, penyebab utama putus sekolah lebih disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua maupun anak yang bersangkutan akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan, baik karena dari dalam diri anak yang bersangkutan merasa malas untuk pergi ke sekolah, terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang tidak mendukung untuk menempuh pendidikan, maupun karena menikah sehingga tidak lagi menganggap pendidikan sebagai prioritas.

Pada tahun 2016 APS di jenjang SD/MI sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2019. Begitu pula dengan APS SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 0,00% dan konsisten sebesar 0,00% sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Surabaya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada Tabel II.38.

Tabel II.38
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SD/MI	0	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI	281.310	282.408	287.830	309.427
	APS SD/MI (persen)	0	0	0	0
2.	SMP/MTs				
	Jumlah Siswa putus sekolah di jenjang SMP/MTs	0	0	0	0
	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs	135.283	130.505	129.136	134.215
	APS SMP/MTs (persen)	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

2.1.3.1.1.e Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Angka Melanjutkan SMP/MTs diukur dari perbandingan jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs/setara di Kota Surabaya terhadap siswa yang lulus ujian kelas 6 SD/MI/setara di Kota Surabaya, dan Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK diukur dari perbandingan jumlah

siswa baru kelas 10 SMA/MA/SMK di Kota Surabaya terhadap siswa yang lulus ujian kelas 9 SMP/MTs/setara di Kota Surabaya.

Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 95,03% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 105,51%. Penurunan juga terjadi pada Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2016 sebesar 116,54% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 96,68%. Pada tahun 2018, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 92,35% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 100%. Pada tahun 2019, Angka Melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs sebesar 112,31% persen dan Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK sebesar 99,69%. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.39
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs				
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMP/MTs	43.099	40.503	40.841	51.803
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Sebelumnya	40.849	42.621	44.223	46.167
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	105,51	95,03	92,35	112,21
2	(AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK				
	Jumlah Siswa yang melanjutkan ke Jenjang SMA/MA/SMK	46.116	40.445	42.282	40.837
	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Sebelumnya	39.570	41.834	42.282	40.965
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMA/MA/SMK (persen)	116,54	96,68	100	99,69

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya siswa yang melanjutkan pendidikan di luar Kota Surabaya, salah satunya dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

2.1.3.1.1.f Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 disajikan pada Tabel II.40.

Tabel II.40
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
1.1.	Jumlah gedung sekolah	733	900	846	851
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	304.652	281.089	286.373	303.021
1.3.	Rasio	1 : 415	1 : 312	1 : 339	1 : 356
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah gedung sekolah	341	393	404	412
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	158.893	144.127	141.554	146.952
2.3	Rasio	1 : 465	1 : 367	1 : 350	1 : 357

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

*Sekolah negeri

Tabel II.41
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut
Kecamatan Tahun 2019

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	8	9	17	5.298	1:312	3	4	7	2.552	1:365
Benowo	13	5	18	7.174	1:399	4	2	6	3.500	1:583
Bubutan	29	2	31	10.099	1:326	8	0	8	5.138	1:642
Bulak	13	6	19	4.782	1:252	5	1	6	2.384	1:397
Dukuh Pakis	24	1	25	5.946	1:238	11	1	12	2.814	1:235
Gayungan	14	1	15	4.251	1:283	6	1	7	2.158	1:308
Genteng	20	1	21	5.513	1:263	11	0	11	2.798	1:254
Gubeng	25	5	30	12.790	1:426	14	0	14	6.507	1:465
Gununganyar	13	1	14	5.971	1:427	8	1	9	2.759	1:307
Jambangan	7	5	12	5.324	1:444	7	1	8	2.569	1:321

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Karangpilang	12	3	15	7.173	1:478	9	0	9	3.521	1:391
Kenjeran	23	20	43	19.049	1:443	14	9	23	9.082	1:395
Krembangan	31	7	38	11.872	1:312	17	1	18	5.759	1:320
Lakarsantri	21	5	26	6.322	1:243	10	2	12	3.006	1:251
Mulyorejo	25	0	25	8.390	1:336	16	0	16	4.030	1:252
Pabean Cantian	14	4	18	7.801	1:433	6	1	7	3.853	1:550
Pakal	15	6	21	6.022	1:287	7	3	10	3.060	1:306
Rungkut	24	5	29	11.523	1:397	9	2	11	5.437	1:494
Sambikerep	15	6	21	6.711	1:320	15	3	18	3.137	1:174
Sawahan	45	0	45	20.648	1:459	14	1	15	10.111	1:674
Semampir	36	36	72	20.911	1:290	18	17	35	9.874	1:282
Simokerto	18	6	24	9.570	1:399	10	3	13	4.597	1:354
Sukolilo	32	1	33	11.021	1:334	17	1	18	5.193	1:289
Sukomanunggal	28	1	29	10.460	1:361	17	2	19	4.887	1:257
Tambaksari	40	10	50	22.541	1:451	20	4	24	10.787	1:449
Tandes	21	10	31	9.703	1:313	12	2	14	4.608	1:329
Tegalsari	30	2	32	9.827	1:307	12	0	12	4.821	1:402
Tenggilis Mejoyo	17	1	18	5.688	1:316	7	0	7	2.698	1:385
Wiyung	15	1	16	7.093	1:443	11	0	11	3.433	1:312
Wonocolo	19	2	21	7.926	1:377	9	1	10	3.841	1:384
Wonokromo	34	8	42	15.622	1:372	20	2	22	8.038	1:365

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada Tabel II. 39 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD semakin meningkat, sedangkan pada jenjang SMP mengalami penurunan di tahun 2019. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II.40 pada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Karangpilang dengan nilai rasio sebesar 1:478, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:238. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Bubutan memiliki rasio tertinggi yaitu 1:642 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:174.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2019 terdapat 379 sekolah SMP yang telah terakreditasi, terdiri dari 241 sekolah yang terakreditasi A, 124 sekolah terakreditasi B dan terdapat 14 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/MI /Sederajat terdapat 815 sekolah yang terakreditasi, terdiri dari 524 sekolah yang terakreditasi A, 252 sekolah terakreditasi B dan 39 sekolah SD/MI yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2019 terdapat 233 lembaga kursus/pelatihan, yang telah terakreditasi 71 lembaga kursus/pelatihan, dan sebanyak 162 lembaga kursus/pelatihan belum terdaftar.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2019 dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat peserta pendidikan kesetaraan Paket A sebanyak 699 peserta, sebanyak 276 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus. Sedangkan peserta pendidikan kesetaraan Paket B sebanyak 1.414 peserta, sebanyak 892 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus. Dan untuk peserta pendidikan kesetaraan Paket C terdapat 2.961 peserta, sebanyak 1.714 peserta mengikuti ujian dan seluruhnya lulus.

2.1.3.1.1.g Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula, dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Tabel II.42
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
1.1	Guru	12.642	12.797	14.132	13.798
1.2	Murid	281.310	282.408	287.830	310.283
1.3	Rasio	1:22	1 : 22	1 : 21	1 : 19
2	SMP/MTs				
2.1	Guru	7.167	7.231	7524	6.887
2.2	Murid	135.283	128.471	129.136	134.215
2.3	Rasio	1:19	1:18	1 : 18	1 : 19

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.43
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2019

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	12		11	1	-	255	32	-	311
SD	69	2	73	13	1	3.392	585	2	4.137
SMP	9	6	4	14	1	1.421	467	3	1.925
TOTAL	90	8	88	28	2	5.068	1.084	5	6.373

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II.44
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2019

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	1.011	57	136	57	5	4.094	137	1	5.498
SD	451	16	74	46	9	8.641	416	2	9.655
SMP	84	4	5	30	6	4.416	416	1	4.962
TOTAL	1.546	77	215	133	20	17.151	969	4	20.115

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II.45
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2019

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah
1	SD	3.736	2.961	6.697	4.143	9.655	13.798	407	6.693	7.100
2	SMP	1.835	1.865	3.700	1.925	4.962	6.887	90	3.097	3.187
Jumlah		5.234	5.571	4.826	10.397	6.068	14.617	20.685	497	9.790

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 7.100 guru SD/MI/setara dan 3.187 guru SMP/MTs/setara yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan banyaknya guru non PNS yang tidak dapat didaftarkan sertifikasi mengingat terbatasnya kuota sertifikasi guru dari Pemerintah Pusat dan syarat guru yang diajukan untuk sertifikasi adalah guru PNS.

2.1.3.1.2 Kesehatan

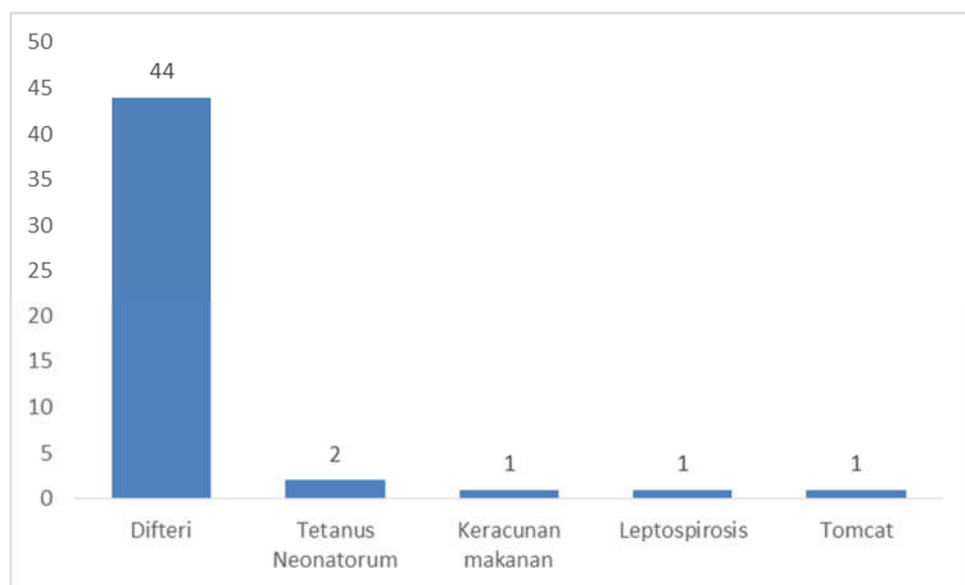
Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada Tabel II.46.

Tabel II.46
Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam
Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	38	30	49	4
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	38	30	49	4
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II.11
Kejadian Luar Biasa Kota Surabaya Tahun 2019

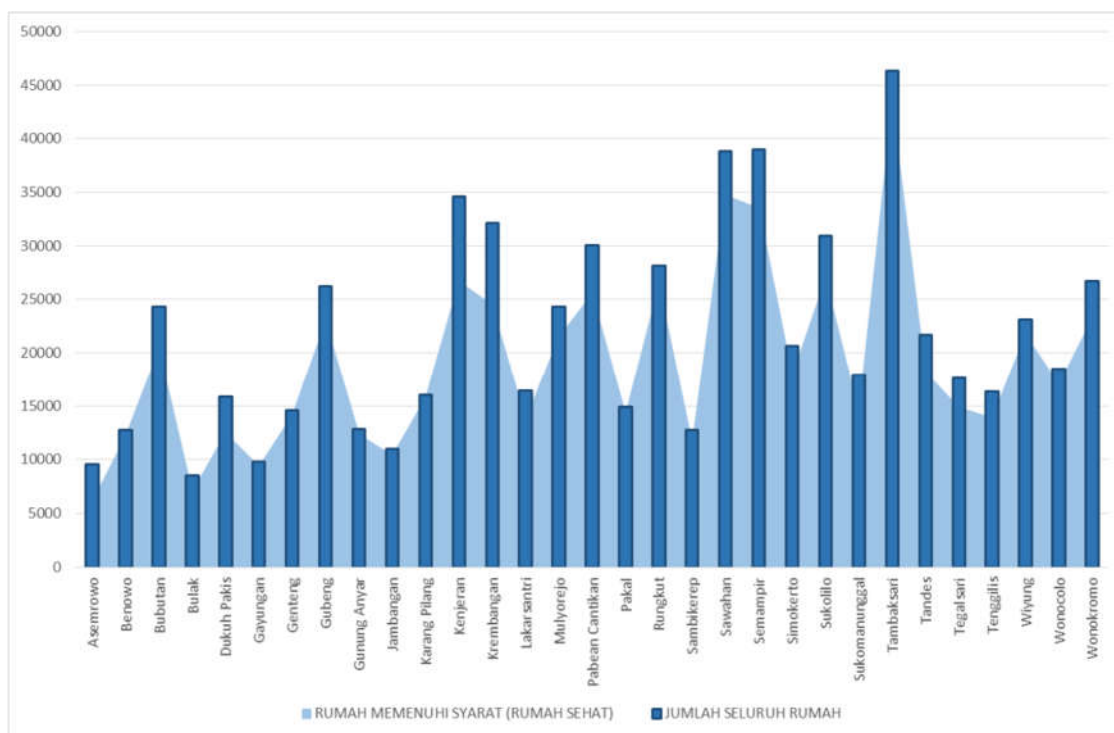
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Kejadian Luar Biasa tahun 2018 terbanyak adalah Difteri yang terjadi di 42 kelurahan, diikuti tetanus neonatorum yang terjadi di 2 kelurahan, serta leptospirosis, keracunan makanan dan tomcat masing-masing terjadi di 1 kelurahan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, target penanganan KLB telah ditingkatkan menjadi <20 jam.

Kesehatan masyarakat juga diupayakan melalui terwujudnya rumah sehat. Kriteria rumah sehat yang digunakan meliputi tujuh kriteria, yaitu atap berplafon, dinding permanen (tembok/papan), jenis lantai/bukan tanah, tersedia jendela, ventilasi cukup, pencahayaan alami cukup, dan tidak padat huni (lebih besar atau sama

dengan 8 m²/orang). Selain itu, sarana sanitasi seperti sarana air bersih, jamban, sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah serta perilaku hidup sehat penghuni rumah menjadi pertimbangan dalam penilaian rumah sehat.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Persentase rumah sehat dapat dilihat pada Gambar II.12 dibawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah sehat meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.



Gambar II.12
Persentase Rumah Sehat Kota Surabaya Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2018, seluruh

kelurahan telah memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.47.

Tabel II.47
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II.48
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2016 – 2019

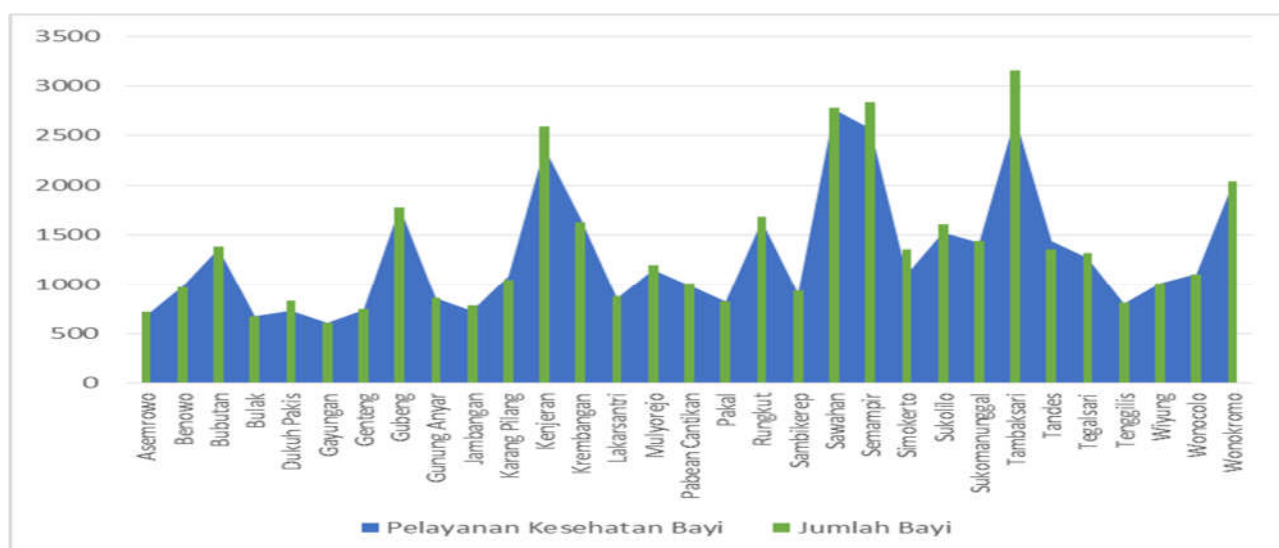
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	42.548	42.502	42.791	42.783
2	Jumlah ibu nifas	45.322	44.963	44.598	44.252
3	Persentase (persen)	93,88%	94,65%	95,95%	96,68%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II.49
Cakupan kunjungan bayi Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas sesuai standar	40.086	40.668	41.070	40.813
2	Jumlah bayi	42.767	42.377	42.003	41.646
3	Persentase (persen)	93,73%	95,97%	97,78%	98.00%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019



Gambar II.13

Cakupan pelayanan kesehatan bayi per Kecamatan Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan, diolah, 2019

Pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling banyak sesuai gambar II.13 adalah di Kecamatan Tambaksari. Sedangkan pelayanan kesehatan bayi per kecamatan paling sedikit ada di Kecamatan Gayungan.

Tabel II.50

**Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Tahun 2016 – 2019**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	280	278	254	242
2	Jumlah balita gizi buruk	280	278	254	242
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2016 jumlah Posyandu balita sebanyak 2.824 posyandu, pada tahun 2017 jumlah posyandu balita mengalami penurunan karena terdapat penggabungan beberapa posyandu yang menyesuaikan jumlah balita di wilayahnya masing-masing, dan di 2018 jumlah posyandu balita sebanyak 2.804. Perkembangan dan cakupan posyandu dapat dilihat dalam Tabel II.51.

Tabel II.51
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah posyandu	2.824	2.797	2.804	2.804
2	Jumlah balita	215.713	219.367	211.564	209.706
3	Rasio posyandu per 1.000 balita	13,09	12,75	13,25	13,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Dari data Tabel II.51 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 1000 penduduk berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Pada tahun 2017, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 59 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2019 sejumlah 3.159.481 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang lebih melayani 50.150 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya belum mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel II.52.

Tabel II.52
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah puskesmas	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	296	241	352	286
3	Jumlah pustu	59	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II.53.

Tabel II.53
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	301636 8	307488 3	309473 2	315948 1
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	4	3	4
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/ Provinsi	4	4	4	4
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	43	42	43	43
Jumlah Rumah Sakit		59	59	59	59
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0178	0,0179	0,0191	0,0187

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah SDM tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2016, jumlah dokter di kota Surabaya sebanyak 7.358 orang, dengan rasio sebesar 2,22 dokter per 1.000 penduduk atau 22,2 dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017, jumlah dokter sebanyak 5.195 orang, dengan rasio 1,55 per 1000 penduduk. Pada tahun 2018, jumlah dokter sebanyak 4.295 orang, dengan rasio 1,38 per 1000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah dokter sebanyak 2.093 orang, dengan rasio 0,66 per 1000 penduduk. Apabila dibandingkan dengan

rasio jumlah dokter di Indonesia berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2012 sebesar 19 dokter per 100.000 penduduk, maka pada saat ini jumlah dokter di Kota Surabaya masih belum mencukupi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.54.

Tabel II.54
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481
2	Jumlah dokter	7.358	5195	4295	2093
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	2,22	1,55	1,38	0,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II.55.

Tabel II.55
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

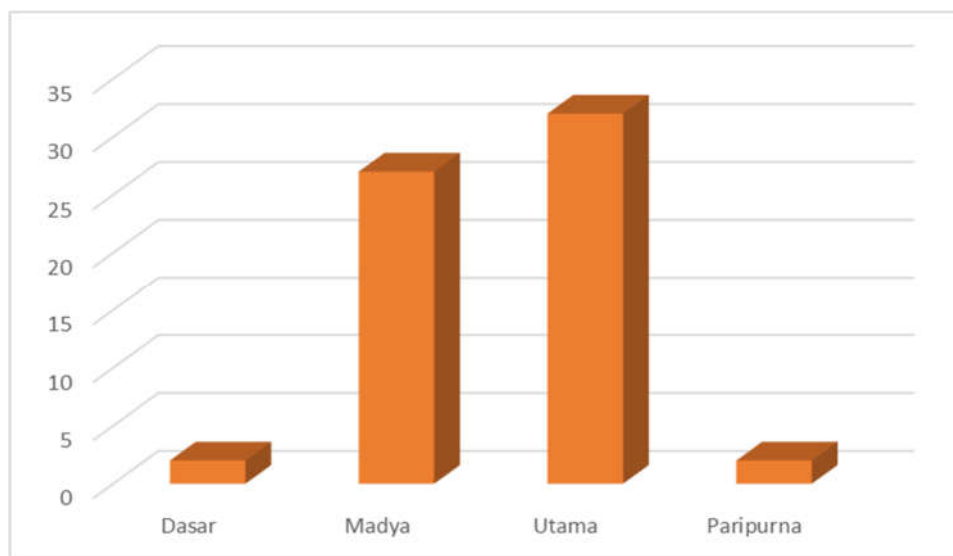
Instansi	2016	2017	2018	2019
RSUD Bhakti Dharma Husada	78,91	78,73	86,41	86,43
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	77,02	81,12	87,72	88,80

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengamanatkan bahwa puskesmas wajib terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2016 terdapat 16 puskesmas telah dilakukan akreditasi diantaranya yaitu Puskesmas Pucang Sewu, Puskesmas Dupak, Puskesmas Jagir, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Sawahan, Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Medokan Ayu, Puskesmas Gunung Anyar, Puskesmas Keputih, Puskesmas Pegirian, Puskesmas Jeruk, Puskesmas Tenggilis, Puskesmas Putat Jaya, Puskesmas Wonokromo dan Puskesmas Dukuh Kupang. Pada tahun 2017, terdapat 44 puskesmas yang dilaksanakan akreditasi, dan sisanya di tahun 2018.

Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilaksanakan penilaian akreditasi di semua puskesmas. Untuk rumah sakit umum daerah, pada tahun 2017 RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada telah diakreditasi dengan hasil akreditasi paripurna.

Hasil akreditasi puskesmas Kota Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II.14
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Status Akreditasi Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019 diolah

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.a Pekerjaan Umum

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2017, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,51; di mana jalan Kota Surabaya sepanjang 1.689.290 meter melayani jumlah penduduk sebesar 3.342.627 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang

mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Pada Tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik 1.662,99 km, dengan prosentase 98,61%. Pada tahun 2017, panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 1.667,78 km dari panjang jalan 1.689,29 km, dengan persentase 98,73%. Pada Tahun 2018, panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 1.678,86 km dari panjang jalan 1.692,53 km, dengan persentase 99,19%. Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Tabel II.56.

Tabel II.56
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.662,99	1.667,78	1.678,86	1.683,11
Panjang Jalan (Km)	1.686,38	1.689,29	1.692,53	1.694,38
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,61%	98,73%	99,19%	99,33%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

2.1.3.1.3.b Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan

pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.57.

Tabel II.57
IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Tinggal	7.196	7.638	4.923	5.723
2	Non Rumah Tinggal	1.762	1.717	1.773	1.944
3	Reklame	2.450	1.576	1.148	454
Total		11.408	10.931	7.844	8.121

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Tabel II.58
Penertiban Bangunan Yang Tidak Sesuai IMB Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah bangunan yg dikenakan sanksi administratif	19 persil	22 persil	29 persil	9 persil

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin berkurangnya jumlah persil yang melanggar izin di tahun 2019. Meski demikian, dengan meningkatnya jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka dibutuhkan usaha yang lebih baik untuk menjamin ketertibannya. Karena bagaimana pun, penerbitan izin tersebut harus sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kota.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2015-2019, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II.59.

Tabel II.59

Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2017

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II.60 berikut:

Tabel II.60
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Cakupan Penduduk

**dengan Akses Air Bersih, Sanitasi, Air Minum Layak di Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019**

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	749	1.629	1.648	1.090
Cakupan Penduduk dengan Akses Sanitasi Layak	97,57%	97,85%	97,97%	98,10%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak	99,56%	99,6%	99,54%	99,48%
Cakupan Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih	95,51%	96,38%	98,97%	99,90%

Sumber: Dinas Sosial, 2019

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan-tau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;

- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap, penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga dilaksanakan melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.61
Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemohon Rusun	801	1.287	1.588	1.190

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 79 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 15 lokasi dan pada 2017 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 85 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi. Pada tahun 2018, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 93 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 17 lokasi dan pada tahun 2019, penyediaan rumah susun mengalami peningkatan menjadi 96 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 19 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.62
Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m ²)	Keterangan
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 41. 044	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 32.350	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6		Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2		Dibangun th. 2009 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 5.466	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4		Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 44.290	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 28.810	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen	Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan	24	1	± 2.500	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 2.977,3	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000	Dibangun 2013-2015 (APBN)

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/ Kecamatan	Tipe	Blok	Luas lahan (m2)	Keterangan
13.	Siwalankerto	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000	Dibangun 2012 (APBN)
			24	2		Dibangun 2018 (APBD)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.320	Dibangun 2012 (APBN)
15.	Gununganyar	Kelurahan Gununganyar Tambak Kecamatan Gununganyar	36	1	± 9.438	Dibangun 2014 (APBN)
			24	1	± 4.282	Dibangun 2019 (APBN)
16.	Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan	24	2	± 14.388	Dibangun 2017 (APBN)
17	Keputih	Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo	36	4	±258.140	Dibangun 2016 (APBN)
			36	2		Dibangun 2017 (APBN)
			36	2		Dibangun 2018 (APBN)
18	Pondok Benowo	Babat Jerawat, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal	24	1	± 4.129	Dibangun 2019 (APBN)
19	Indrapura 135	Pabean Cantian	24	1	± 5.466	Dibangun 2019 (APBN)
Total				96		

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

2.1.3.1.5.a Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.63
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	648	663	677	781
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,14	2,15	2,18	2,47

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja, 2019

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda atau Ketertiban, Keamanan dan Keindahan (K3).

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan

demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara lain, pelanggaran HO, IMB, Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PKL, PSK dan Perda lainnya. Pada tahun 2016, dari pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) sejumlah 47.067, keseluruhannya telah dapat diselesaikan. Sehingga tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah 100% dari 47.067 obyek yang ditangani. Pada tahun 2017, sebanyak 41.111 pelanggaran K3 telah diselesaikan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018, jumlah pelanggaran menurun menjadi 24.095 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pelanggaran menurun menjadi 16.382 dan kesemuanya telah dapat diselesaikan 100 persen. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada Tabel II.64.

Tabel II.64
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095	16.382
2	Jumlah pelanggaran K3	47.067	41.111	24.095	16.382
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2019

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kota Surabaya pada tahun 2016, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 82 personil Linmas. Pada tahun 2017, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 63 personil Linmas, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 64-65 personil Linmas. Sedangkan pada tahun 2019, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 65 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel II.65.

Tabel II.65
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Linmas	24.859	19.372	20.033	20.641
2	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	82,41	63,00	64,73	65,33

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis. Pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis dari 226 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, sedangkan di tahun 2018, hanya ada 11 kejadian anarkis dari 236 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk tahun 2019, hanya ada 13 kejadian anarkis dari 227 jumlah kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

2.1.3.1.5.b Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II.66 berikut.

Tabel II.66
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	57	64	74	86
2	Jumlah Penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	93%	93%	93%	94%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.67
Kejadian Kebakaran per Penyebab

No	Penyebab	2016	2017	2018	2019
1	Hubungan Listrik	142	114	107	75
2	Api Terbuka	125	239	301	186
3	Api Mekanis	3	0	4	0
4	Dalam Penyelidikan	30	234	70	254
5	Tidak Ada Keterangan	0	2	14	0
Total		300	589	496	515

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesiapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2017, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian

kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II.68.

Tabel II.68
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 Menit	300	589	496	515
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	300	589	496	515

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2019

Sepanjang tahun 2016, jumlah kejadian kebakaran yaitu 300 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 300 kejadian. Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 534 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 534 kejadian. Pada tahun 2018, jumlah kejadian kebakaran yaitu 496 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 496 kejadian. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah kejadian kebakaran yaitu 515 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya ≤ 15 menit setelah pengaduan adalah 515 kejadian, sebagaimana tampak pada tabel di atas.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit, jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 21 unit direncanakan dapat mencakup jumlah penduduk Kota Surabaya sesuai dengan response time yang telah ditentukan.

Tabel II.69
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	20	20	21	21
2	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- a. Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- b. Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- d. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.1.3.1.5.c Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2016 –2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.70
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Ormas Aktif	51	32	25	21
2	Jumlah Ormas Terdaftar	167	167	167	167

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan terhadap Ormas dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Pemberdayaan Ormas melalui antara lain fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sampai dengan akhir tahun 2019, kegiatan pembinaan terhadap ormas terhadap 21 lembaga.

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

2.1.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Pelayanan dasar yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

2.1.3.1.6.a PMKS yang Ditangani

Bentuk pelayanan dasar yang diberikan merupakan penanganan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II.71
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2016–2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS yang ada	50.222	47.633	58.129	77.808
2	Jumlah PMKS yang ditangani	30.468	28.643	36.098	46.765
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	60,67	60,13	62,09	60,10

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2019

Secara umum, walaupun jumlah PMKS meningkat dari tahun 2018 sebanyak 58.129 orang menjadi 77.808 orang pada tahun 2019. Namun jumlah PMKS yang

ditangani yang ditangani semakin meningkat yaitu dari 36.089 orang menjadi 46.765 orang. Hal tersebut tidak lepas dari upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS. Tidak ada hambatan dalam verifikasi dan validasi PMKS, akan tetapi memang terdapat tantangan terkait dinamika kondisi sosial di masyarakat yang menyebabkan perubahan pada masing-masing kategori PMKS.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung meningkat hingga tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, yaitu sebesar 1.520.041 pada tahun 2018 menjadi 1.556.846 pada tahun 2019. Adapun data tahun 2016 belum dapat disediakan dikarenakan anggaran untuk Sakernas besar (bulan agustus) pada tahun 2016 digeser oleh Pemerintah Pusat untuk kepentingan yang lain. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.72
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2017 – 2018

No.	Uraian	2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.495.837	1.520.041	1.566.846
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.254.188	2.269.293	2.283.861
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,67	0,69

Sumber : BPS Kota Surabaya, Agustus 2019

2.1.3.2.1.a Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.73
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	275	280	226	235
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Rasio sengketa	2,15	2,19	1,77	0,02

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah sengketa pekerja pengusaha pada tahun 2016 sebanyak 275, meningkat pada tahun 2017 menjadi 280 sengketa. Sengketa pada tahun 2017 tersebut dipicu oleh kenaikan UMK yang menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan adanya hak- hak pekerja yang belum terpenuhi. Jumlah sengketa kembali menurun menjadi sebesar 226 pada tahun 2018 sebagai dampak dari upaya pemeliharaan hubungan industrial yang baik. Tahun 2019 kembali naik menjadi 235 sengketa dengan kasus yang sama dengan tahun 2017 yaitu terjadinya PHK.

2.1.3.2.1.b Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SMA maupun SMK sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.74
Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun 2018
1	Tidak/belum pernah sekolah	14.001
2	Tidak/belum tamat SD	
3	Sekolah Dasar	
4	SMP	6.264
5	SMA	28.608
6	SMK	22.724
7	Diploma I/II/III/Akademi	3.012
8	Universitas	18.487

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Melalui adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pencari kerja yang difasilitasi sebesar 7.502 orang dan 3.803 orang diantaranya berhasil ditempatkan, sedangkan pada 2017 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.035 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 4.305 orang. Pada tahun 2018, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 8.288 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 5.805 orang. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebesar 9.235 orang dan berhasil ditempatkan sebesar 6.065 orang. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II.75.

Tabel II.75
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.803	4.305	5.805	6.065

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	7.502	8.035	8.288	9.235

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

2.1.3.2.1.c Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3), dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja. Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II.76.

**Tabel II.76
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	5.174	5.215	6.689	7.801
2	Jumlah Perusahaan	12.782	12.782	12.782	12.782
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	40,48	40,80	52,33	61,03

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2019

Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sebanyak 5.174 perusahaan atau 40,48% dari total perusahaan yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 5.215 perusahaan atau 40,80% dari total perusahaan yang terdaftar. Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 6.689 perusahaan atau 52,33% dari total perusahaan yang terdaftar. Selanjutnya pada tahun 2019, jumlah

perusahaan yang menerapkan K3 meningkat menjadi 7.801 perusahaan atau 61,03% dari total perusahaan yang terdaftar.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2.1.3.2.2.a Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.159 orang. Adapun pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12.125 orang dan di tahun 2018, jumlah pekerja perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 8.003 orang sebagai PNS dan 13.362 orang sebagai tenaga kontrak yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah. Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.77.

Tabel II.77
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pekerja Perempuan	-	583.772	587.684	617.965
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.159	12.125	21.365	24.476
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	-	2,07	3,63	3,96

Sumber : Badan Pusat Statistik, Badan Kepegawaian dan Diklat dan Bagian Administrasi Pembangunan, 2019

Dari data pada Tabel II.77 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2.1.3.2.2.b Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Surabaya pada tahun 2017, sebesar 583.772 orang atau 95,23% dari jumlah angkatan kerja perempuan dan meningkat di 2018 menjadi sebesar 587.684 orang. Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II. 78.

**Tabel II.78
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya
Tahun 2017-2019**

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	612.988	617.096	657.039
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	583.772	587.684	617.965
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	95,23	95,23	94,05

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2019

2.1.3.2.2.c Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada Tabel II. 79 di bawah ini.

**Tabel II.79
KDRT Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Tangga	908.577	935.089	953.888	974.740
2	Jumlah KDRT	77	26	37	10
3	Rasio KDRT	1:11.800	1:35.965	1:25.781	1:97.474

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2019

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel II.79 di atas jumlah KDRT menurun dari tahun 2016-2017 namun mengalami peningkatan di tahun 2018. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM),

Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II.80.

Tabel II.80
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	263	138	123	342
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	263	138	123	342
3	Persen penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2019

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan di *shelter* (rumah aman).

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 3 kecamatan yang responsif gender. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 6 kecamatan yang responsif gender dan 15 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2016, terdapat 11 kecamatan yang responsif gender dan 30 kelurahan ramah anak. Pada tahun 2017, terdapat 15

kecamatan yang responsif gender dan 50 kelurahan ramah anak, dan sampai dengan tahun 2018, terdapat 19 kecamatan yang responsif gender dan 81 kelurahan ramah anak.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93,65	93,66	93,67***

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

*** Angka Sangat Sementara, Bappeko, diolah

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Pada Tabel II.82 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat sejak tahun 2016 yaitu pada tahun 2016 sebesar 145,01 kg/kapita/th dan pada tahun 2017 menjadi 167,946 kg/kapita/th, dan pada tahun 2018 sebesar 521,49 kg/kapita/th. selanjutnya pada tahun 2019 menjadi 310,95 kg/kapita/th. Hal tersebut dikarenakan produksi beras dari daerah penghasil pangan menurun.

Tabel II.82
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	479.602.970	561.380.280	1.613.871.200	982.443.190
Jumlah Penduduk (jiwa)	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	145,01	167,946	521,49	310,95

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tingkat konsumsi beras masyarakat di Kota Surabaya pada tahun 2018 rata-rata sebesar 101,54 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan data ketersediaan pangan sebesar 521,49 kg/kapita/th maka ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2018 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Surabaya.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel II.83 dapat disampaikan bahwa Pola pangan harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 96,76. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 maka capaian kinerjanya mencapai 101,32%. Namun, pada tahun 2019 PPH masyarakat kota Surabaya menurun menjadi 96,1, hal ini dikarenakan ada pergeseran pola konsumsi pangan kota Surabaya dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein.

Tabel II.83
Pola Pangan Harapan Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Pola Pangan Harapan	95,28	95,62	96,76	96,1

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2019

2.1.3.2.4 Pertanian

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada Tabel II.84 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pada tahun 2016, sebanyak 744 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat dan pada tahun 2017 sebesar 16,56 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pada tahun 2018, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,27 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Sedangkan pada tahun 2019, tanah aset yang bersertifikat telah mencapai 20,36 persen dari total tanah aset Pemerintah Kota. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

Tabel II.84
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	744	1076	1317	1323
Total aset pemerintah	1567**	6497	6497	6497
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	47,48%	16,56%	20,27%	20,36%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, 2019

**) Total aset 2016 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT

Total aset 2017-2018 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya

Tabel II.85
Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	29	24	30	30
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	6	2	2	6
3.	Persen Kasus yang Diselesaikan	20,68%	8,33%	6,67%	20%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

Kasus tanah di atas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya).

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan m³/hari yaitu pada tahun 2016 sebanyak 9.710,61 m³/hari, pada tahun 2017 sebanyak 10.674,63 m³/hari, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 7.143,36 m³/hari, sebagaimana rekap data pada Tabel II.86.

Tabel II.86
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA
Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Volume Produksi Sampah (m ³ /hari)	9.710,61	10.674,63	7.143,36	2.954,28
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m ³ /hari)	5.237,7	5.539,15	5.501,12	2.954,28
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	53,94%	51,89%	77,01%	100%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel II.87.

Tabel II.87
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481
2	Jumlah TPS (unit)	187	187	183	245

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Di samping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2016 mencapai 21,73 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,46 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Pada tahun 2017 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,75 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.275,27 Ha. Pada tahun 2018 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,88 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.321,93 Ha. Sedangkan pada tahun 2019 luasan RTH publik Kota Surabaya mencapai 21,91 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 7.329,82 Ha. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.88
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2016 – 2019

NO.	JENIS RTH PUBLIK	2016	2017	2018	2019
1	RTH makam	283,53	283,53	283,53	283,53
2	RTH lapangan dan stadion	350,34	352,50	355,19	359,36
3	RTH telaga/waduk/boezem	191,86	191,86	191,86	191,86
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	204,61	204,61	204,61	204,61
5	RTH kawasan lindung dan pesisir timur	4.548,59	4.548,59	4.548,59	4.548,59
6	RTH hutan	45,23	48,01	88,88	90,78
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.643,55	1.646,17	1.649,27	1651,09
Jumlah Luasan RTH Publik total (Ha)		7.267,72	7.275,27	7.321,93	7.329,82
Luas Kota Surabaya		33.451	33.451	33.451	33.451
Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)		21,73	21,75	21,89	21,91

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai *stakeholder*.

Jumlah kasus dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 75 kasus yang secara keseluruhan juga dapat ditangani. Pada tahun 2017, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 54 kasus, dan sebanyak 54 kasus dapat ditangani. Pada tahun 2018, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 66 kasus, dan sebanyak 66 kasus dapat

ditangani. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pengaduan dari masyarakat sebanyak 59 kasus, dan sebanyak 59 kasus dapat ditangani

Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada Tabel II.89.

Tabel II.89
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	75	54	66	59
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	75	54	66	59
3	Persentase Permasalahan Lingkungan yang ditangani (persen)	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan usaha yang berbeda-beda baik dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, maupun kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan udara. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan dari kegiatan usaha yang menggunakan air, baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan pencemaran udara antara lain berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya *boiler*, *genset*, *furnace*, *dryer*, serta suara kebisingan dari kegiatan usaha. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan juga ada yang belum melakukan seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penataan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perizinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi

yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.

Tabel II.90
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya

Indeks	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Pencemaran Air (IPA)	54,9	57,5	57,62	57,68
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	89,57	90,26	90,26	90,30
Indeks Ruang Terbuka Hijau (ITH)	42,38	42,38	42,44	42,45
Indeks Persampahan	69,27	74,96	74,98	75,09

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah, 2019

Pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi. Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

Tabel II.91
Penerapan Upaya Penerapan Konservasi Energi Tahun 2016-2019

Penerapan Konservasi Energi	Satuan	Jumlah (titik) s.d. Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Jumlah PJU LED	Unit	2.747	8.127	13.499	19.589
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	18	22	22	22
<i>Solar cell</i> di gedung pemerintah	Lokasi	3	7	7	7
Kincir Angin	Unit	8	8	8	8
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	26	21	18	18
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	0	9	24	59

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.92
Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK
Tahun 2014 – 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2014	2.160.362	2.026.310
2015	2.218.411	2.066.693
2016	2.267.213	2.057.533
2017	2.313.440	2.040.526
2018	2.348.598	2.020.291
2019	2.355.489	2.108.476

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Dari data pada Tabel II.92 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

2.1.3.2.7.a Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Jumlah akseptor KB pada tahun 2016 sebesar 40.349 atau sebesar 7,96 persen dari jumlah PUS 504.416. Di tahun 2017, Jumlah akseptor KB sebesar 66.425 atau sebesar 12,97 persen dari jumlah PUS 512.066. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, jumlah akseptor KB sebesar 67.972 atau sebesar 13,23 persen dari jumlah PUS sebesar 513.412. Pada tahun 2019, jumlah akseptor KB meningkat sebesar 426.024 atau 80,94 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya pasangan usia subur dan meningkatnya orang peduli KB. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II.93.

Tabel II.93
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412	526.329
2	Jumlah Akseptor KB	40.349	66.425	67.972	426.024
3	Rasio Akseptor KB (persen)	7,96	12,97	13,23	80,94

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019

2.1.3.2.7.b Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan

pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II.94.

Tabel II.94
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	506.416	512.066	513.412	526.329
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	415.241	414.571	412.170	426.024
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,99	80,96	80,28	80,94

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, 2017

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah Pasangan Usia Subur yaitu wanita usia 15-49 tahun yang telah menikah. Pada tahun 2016 terdapat 506.416 PUS, tahun 2017 terdapat 512.066 PUS, dan pada tahun 2018 terdapat 513.412 PUS. Sampai dengan 2019, terdapat 526.329 PUS dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 426.024.

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.95.

Tabel II.95
Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Total Fertility Rate (TFR)	1,78***	1,79***	1,73***	1,73

Sumber : Bappeko, 2019 diolah

***angka sangat sementara

Catatan : Tahun 2019 merupakan data olahan Susenas

2.1.3.2.7.c Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis

bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu secara mikro kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga diharapkan dapat meningkatkan gizi, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Pada tahun 2014, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 193.550 atau 27,18% dari jumlah keluarga sebesar 712.172. Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2017, sebanyak 724 BKB, 209 BKR, dan 42 BKL yang aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2018, terdapat 1000 BKB, 232 BKR, dan 97 BKL yang aktif melakukan kegiatan, dan sampai dengan 2019, terdapat 1000 BKB, 233 BKR dan 100 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

2.1.3.2.7.d Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra luhur dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga. Selain itu, kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi. Pada tahun 2017, dari 1017 PMKS yang dilatih, 695 orang atau sebesar 68,34% di antaranya berproduksi. Sedangkan dari 695 orang yang telah berproduksi sebanyak 508 orang atau sebesar 73,09 % yang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta. Sedangkan di tahun 2018, dari 464 orang yang dibina, 335 orang diantaranya telah berproduksi dan sebanyak 277 orang telah menghasilkan omzet diatas 1 juta atau sebesar 82,68%. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II.96.

Tabel II.96
Keluarga Miskin yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif
di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Keluarga Miskin yang telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1.824	695	464	190

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator Persentase PMKS terutama keluarga miskin usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang memproduksi. Data PMKS terutama keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II. 96 diatas. Kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki total 14 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bus dan/atau angkutan kota (angkot), dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2016 sejumlah 10.202. Sampai dengan tahun 2017, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.444 kendaraan. Sampai dengan tahun 2018, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 8.001 kendaraan. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, jumlah angkutan darat yang beroperasi di Kota Surabaya berjumlah 7.349 kendaraan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan restrukturisasi angkutan kota (mikrolet dan bus kota) untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di bidang transportasi.

Tabel II.97
Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Terminal Tipe A (Bus)	2	2	2	2

2	Jumlah Terminal Tipe B	2	2	1	1
3	Jumlah Terminal Tipe C	10	10	11	11
4	Jumlah Angkutan Darat	10.202	8.444	8.001	7.349

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

11 terminal tipe C sesuai tabel di atas antara lain Terminal Joyoboyo, Terminal Dukuh Menanggal, Terminal Bratang, Terminal Dukuh Kupang, Terminal Keputih, Terminal Kasuari, Terminal Kalimas Barat, Terminal Benowo, Terminal Balongsari, Terminal Manukan dan Terminal Lidah Kulon. Dalam merealisasikan restrukturisasi angkutan kota, Pemerintah Kota Surabaya masih menjamin pelayanan transportasi (angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek) eksisting. Salah satu contohnya adalah pemberian izin trayek yang dikeluarkan kepada pemilik angkutan umum. Dalam pemberian izin trayek tersebut, angkutan umum harus memenuhi syarat laik jalan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel II.98
Rasio Izin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2016 – 2019**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481
2	Jumlah Izin Trayek yang Dikeluarkan	7.017	3.699	3.341	2.435
3	Rasio Izin Trayek	0,0021	0,0011	0,0011	0.00077

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Pada tahun 2016, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 7.017 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.307.300 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0023. Sementara tahun 2017, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.699 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.342.627 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0011. Untuk tahun 2018, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 3.341 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.094.732 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,0011. Sedangkan pada tahun 2019, izin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2.435 izin dengan jumlah penduduk sebanyak 3.159.481 jiwa sehingga rasio izin trayek sebesar 0,00077.

Tren penurunan jumlah izin trayek yang dikeluarkan ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan angkutan umum yang sudah berakhir masa berlaku pajaknya tidak bisa balik nama kendaraan, dikarenakan persyaratan wajib berbadan usaha.

Penyebab berikutnya adalah menurunnya jumlah penumpang angkutan umum setiap tahun diakibatkan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi serta persaingan dengan kendaraan berbasis aplikasi sehingga membuat pendapatan pemilik dan pengemudi angkutan hanya mencukupi untuk pemenuhan bahan bakar, sehingga pemilik tidak mampu melakukan perawatan kendaraan yang berakibat pada angkutan umum yang tidak laik jalan. Penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengurusan izin trayek disebabkan juga oleh banyaknya kendaraan taksi dan angkot yang berubah menjadi plat hitam, yakni sebanyak 16 dan 23 kendaraan angkutan umum pada tahun 2018 dan 2019 secara berurutan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum (baik penumpang dan barang) di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR yang berada di UPTD PKB Tandes dan Wiyung, khususnya bagi angkutan penumpang dan angkutan barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala selama tiap hari kerja. Jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2016 sebanyak 123.830 kendaraan, sementara sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 131.256 kendaraan. Pada tahun 2018, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 150.494 kendaraan. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 149.446 kendaraan. Rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.99
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	37.575	39.610	46.989	47.605
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	97.377	99.983	155.450	157.768
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	133.463	148.528	158.619	158.249
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	123.830	131.256	150.494	149.446

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

Demi menjaga kondisi lalu lintas di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan setiap tahunnya, yang salah satunya berupa pemasangan rambu-rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Surabaya selalu meningkat dari tahun ke tahun, di mana sampai dengan tahun 2016 mencapai 12.775 unit, dan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 13.974 unit. Sedangkan sampai dengan tahun 2018, pemasangan rambu meningkat menjadi 16.337 unit. Dengan adanya penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku berkendara para pengguna kendaraan serta menjadi lebih taat dan tertib terhadap peraturan.

Tabel II.100
Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	12.775	13.974	16.337	16.915

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi dan alat komunikasi (HT) pada tiap SKPD. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perizinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perizinan. Pada tahun 2017 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 88 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 997 unit. Pada tahun 2018 tower yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 29 unit dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 1.542 unit. Sedangkan pada tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki tower dan jumlah alat komunikasi (HT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah 2.653 unit. Selain menggunakan alat komunikasi (HT), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

Tabel II.101
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Menara (Tower) (unit)	88	88	29	0
Alat Komunikasi (HT)	802	997	1.542	2.653

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat beberapa sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

Tabel II.102
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kota telah membangun 30 sistem informasi pelayanan perizinan dan 10 sistem informasi pelayanan non perizinan. Sedangkan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 terdapat 10 sistem informasi pelayanan perizinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perizinan yang terbangun. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.103
Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online Kota
Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	TW II 2019
1	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	6	10	10	10
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perizinan	7	5	5	5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

2.1.3.2.10.a Koperasi

Peningkatan jumlah koperasi di Kota Surabaya disertai dengan peningkatan pertumbuhan jumlah anggota koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2016 jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya sebanyak 261.799 orang, pada tahun 2017 jumlah anggota koperasi juga meningkat menjadi 262.153 orang, serta ditahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 266.396 Orang. selanjutnya pada tahun 2019 jumlah anggota koperasi meningkat menjadi 271.267 orang. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II.104.

Tabel II.104
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah anggota koperasi	261.799	262.153	266.396	271.267

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil, hal tersebut dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.726 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.461 koperasi. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah koperasi di Kota Surabaya adalah sebanyak 1.747 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.484 koperasi, pada tahun 2018 jumlah koperasi meningkat menjadi 1.750 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487 koperasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali meningkat sebanyak 1.784 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.521 koperasi. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II.105.

Tabel II.105
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi	1.726	1.747	1.750	1.784
2	Jumlah koperasi aktif	1.461	1.484	1.487	1.521
3	Persen koperasi aktif	84,65	84,95	84,97	85,26

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi adalah sebesar 1,657 milyar dari 1.463 koperasi, pada tahun 2017, volume usaha koperasi meningkat menjadi 1,797 milyar dari 1.484 koperasi, di tahun 2018 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2,092 milyar dari 1.487 koperasi, dan pada tahun 2019 volume usaha koperasi meningkat mencapai 2,128 milyar dari 1.521 koperasi. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada Tabel II.106.

Tabel II.106
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Koperasi Aktif	1.463	1.484	1.487	1.521
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.657	1.797	2.092	2.128
Rasio	1,13	1,21	1,41	1,4

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.2.10.b Usaha Mikro dan Kecil

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Sampai dengan tahun 2018 jumlah UMKM tercatat sebanyak 26.854 di mana sebanyak 22.924 merupakan Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha kecil dan menengah yang tercatat merupakan usaha kecil dan menengah yang telah memiliki izin dan untuk usaha mikro yang tercatat merupakan jumlah usaha mikro baik yang memiliki izin maupun yang masih belum memiliki izin. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.107
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah seluruh UMKM	26.854	26.854	26.854	26.854
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	22.924	22.924	22.924	22.924
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,37	85,37	85,37	85,37

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

2.1.3.2.11.a PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.108 di bawah ini.

Tabel II.108
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Proyek PMDN	16	10	13	296

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Jumlah Proyek PMA	43	34	109	249
Total	20	59	44	545

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Penanaman Modal Kota Surabaya menunjukkan bahwa nilai investasi di Kota Surabaya pada tahun 2016 sebanyak 59 investasi dan pada tahun 2017 tercatat sejumlah 44 investasi. Tahun 2018 tercatat ada 22 investasi, sedangkan tahun 2019 terdapat 203 investasi yang masuk ke kota Surabaya. Tahun 2017 realisasi investasi di Kota Surabaya sejumlah 44 PMA dan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.3.972,13 Milyar, pada tahun 2018 sebanyak 22 investasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp.4.740,23 Milyar sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 203 investasi dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 19.219,90. Menurut jenisnya, realisasi investasi lebih banyak berasal dari investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2016 realisasi investasi PMA sebanyak 43 investasi dan PMDN sebanyak 16 investasi, pada tahun 2017 realisasi PMA sebanyak 34 investasi dan PMDN sebanyak 10 investasi. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi investasi PMA sebanyak 9 investasi dan PMDN sebanyak 13 investasi. Kinerja investasi yang relatif baik tidak terlepas prospek perekonomian domestik yang dipersepsikan masih cukup baik disertai iklim usaha yang kondusif.

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perizinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.109 di bawah ini.

Tabel II.109
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Persetujuan				
1.1	Jumlah Proyek	109	82	136	155
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	2.371,45	4.964,37	10.379,22	5.689,61
	(USD Juta)	351,62	-	774,57	379,90
2	Realisasi				
2.1	Jumlah Proyek	59	44	122	545
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	3.797,87	3.972,13	4.854,57	19.219,90
	(USD Juta)	209,65	166,45	362,28	1.281,32

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II.110 di bawah ini.

**Tabel II.110
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMA/PMDN	59	44	122	6.081
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	6.897	10.627	10.607	123.705
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	116,90	241,52	86,94	20,34

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, pada sisi penawaran tingginya investasi akan meningkatkan kapasitas barang dan jasa yang dihasilkan sementara pada sisi permintaan peran investasi juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, realisasi investasi baik dari penanaman PMA dan PMDN pada tahun 2016 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6.897 orang dari 59 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 116,90. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.627 orang dari 44 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 241,52. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 10.607 orang dari 122 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 86,94. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 123.705 orang dari 6081 proyek maka nilai rasio investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya terhadap daya serap tenaga kerja sebesar 20,34.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan Atletik THOR, Lapangan Softball dan Hockey Dharmawangsa, Gelora 10 Nopember, dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 428 lapangan olahraga. Pada tahun 2017, total lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya adalah sejumlah 393 lapangan yang berada di atas lahan fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun di tanah aset BTKD di wilayah kota Surabaya. Pada tahun 2018, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 479 lapangan olahraga. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 630 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II.111.

Tabel II.111
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah lapangan olahraga	428	393	479	630
2	Jumlah penduduk	3.307.300	3.342.627	3.094.732	3.159.481
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 7.727	1 : 8.505	1 : 6461	1 : 5015

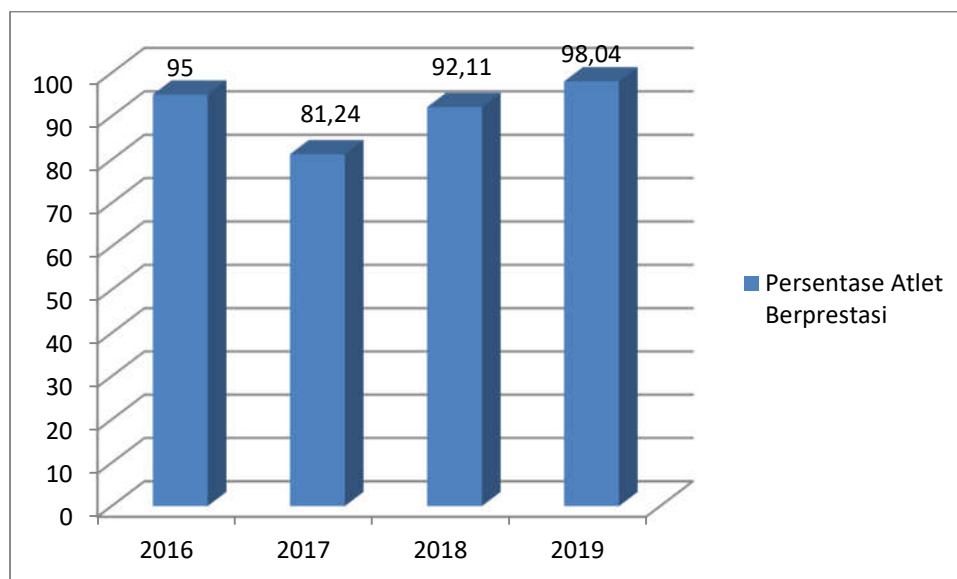
Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Kepemudaan & Olahraga, 2019

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya tetap berupaya untuk mewujudkan pemerataan sebaran prasarana olahraga di seluruh kelurahan di wilayah Kota Surabaya dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan pengadaan lahan.

Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan masyarakat Kota Surabaya khususnya generasi muda, dapat memanfaatkan waktu luang untuk diarahkan untuk kegiatan yang positif. Hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya secara umum dan menumbuhkan bibit-bibit atlit olahraga secara khusus.

Pada tahun 2016, nilai persentasi atlit yang berprestasi sangat memuaskan yaitu mencapai 95%, dari 847 orang atlit olahraga yang dibina sejumlah 805 orang

diantaranya meraih prestasi olahraga ditingkat regional, nasional maupun internasional. Sementara pada tahun 2017, nilai persentase atlit yang berprestasi mencapai 81,24% terdapat 581 orang atlit yang dibina dan sejumlah 472 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sampai dengan tahun 2018, nilai persentase atlit yang berprestasi mencapai 92,11% terdapat 2307 orang atlit yang dibina dan sejumlah 2125 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan sampai dengan tahun 2019, nilai persentase atlit yang berprestasi mencapai 98,04% terdapat 2,852 orang atlit yang dibina dan sejumlah 2,796 orang diantaranya berhasil meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional.



Gambar II.15
Persentase Atlet Berprestasi

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitannya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja.

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2016 terdapat sejumlah 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sementara sampai

dengan tahun 2017 terdapat sejumlah 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2018 terdapat sejumlah 1.244 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan sampai dengan tahun 2019 terdapat sejumlah 1.732 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya.

2.1.3.2.13 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

Tabel II.112
Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Dokumen	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	-	Ada	Ada
2.	PDRB Kecamatan	Ada	-	Ada	Ada
3.	Informasi Data Pokok Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeko Surabaya, 2019

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data

dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada PRJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

2.1.3.2.14 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

2.1.3.2.14.a Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel II.113 di bawah ini.

Tabel II.113
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	887	445	984	805

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan di kota Surabaya sebanyak 887 festival, dan pada tahun 2017 sebanyak 445 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Sedangkan di 2018, jumlah festival seni dan budaya meningkat menjadi sebanyak 984 kali. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 805 festival karena beberapa festival melakukan kolaborasi dalam satu festival.

2.1.3.2.14.b Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

2.1.3.2.14.c Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Sedangkan pada tahun 2019, ada penambahan Bangunan Cagar Budaya sebanyak 4 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, sehingga jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya pada tahun 2019 menjadi 277 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel II.114
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	273	273	273	277
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	273	273	273	277
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

2.1.3.2.15 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya

rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan layanan perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Puskesmas, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal yang tersebar secara merata; menyediakan Sumber Daya Manusia dan biaya operasional pada layanan perpustakaan dan TBM; menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM; menyelenggarakan perpustakaan keliling yang menggunakan sarana angkutan yang melayani di sekolah dan taman kota; melaksanakan promosi budaya gemar membaca dengan mengadakan pameran buku, bedah buku, lomba-lomba pemasyarakatan perpustakaan, seminar, lokakarya, penyebarluasan informasi melalui brosur/*leaflet*, spanduk, *banner*, *billboard*, media cetak dan elektronik; melaksanakan kerjasama dan jaringan antar perpustakaan; melaksanakan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola perpustakaan serta melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Selain Taman Bacaan Masyarakat dan Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota, terdapat perpustakaan milik non pemerintah Kota yang diselenggarakan masyarakat dan Perguruan Tinggi. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 63 layanan baca yang telah dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Data yang tercatat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel II.115.

Tabel II.115
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	61	61	61	61
3	Total	63	63	63	63

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Perpustakaan berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku. Keberhasilan

pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung layanan baca sebanyak 729.877 orang. Pada tahun 2018, jumlah ini meningkat menjadi 1.762.516 pengunjung dan seluruhnya meminjam buku. Jumlah pengunjung terus meningkat pada tahun 2019. Pengunjung perpustakaan ini antara lain merupakan pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan keliling. Jumlah kunjungan perpustakaan milik Pemerintah Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II.116.

Tabel II.116
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Kunjungan layanan baca per bulan (kali)	4.762.438	5.496.517	6.061.413	6.715.104

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Mengacu kepada sasaran pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, meningkatkan kualitas pembangunan manusia dilakukan salah satunya dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan minat dan budaya baca melalui program 15 menit membaca di sekolah sebelum jam pelajaran dimulai, kegiatan Tantangan Membaca Surabaya, kegiatan bedah buku, festival budaya pustaka dan pameran buku.

Selanjutnya perlu diukur peningkatan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah, yang diukur melalui tes *reading text leveling*. Tes *reading text leveling* bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa sesuai dengan level standar usia siswa. Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 51.085 siswa atau sebesar 58,59% dari target 289.166 siswa di tahun 2021 telah mengikuti tes reading text levelling. Dan dari 51.085 siswa yang mengikuti tes di tahun 2018, seluruh siswa kemampuan membacanya sesuai dengan *reading text levelling*.

Tabel II.117
Partisipasi Reading Text Levelling Tahun 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019

Jumlah siswa mengikuti <i>reading text levelling</i>	3.041	59.438	55.871	51.085
Jumlah siswa yang kemampuan membacanya sesuai dengan <i>reading text levelling</i>	2.219	59.438	55.871	51.085
Persentase (%)	72,97	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

2.1.3.2.16 Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Kearsipan salah satunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (*Filing Cabinet*, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Data Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.118.

Tabel II.118

Perangkat Daerah (PD), Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang Tertib Sistem Tata Kearsipan Tahun 2016 –2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri	224	684	899	641
2.	Jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	24	154	284	432

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan (%)	10,71%	22,51%	43,89%	67,39%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019

Pada tahun 2017 sebanyak 154 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 284 Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan. Pada tahun 2019, jumlah Perangkat Daerah (PD), unit kerja, BUMD dan sekolah negeri tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan terus meningkat menjadi 432 lembaga.

Peningkatan yang signifikan didukung oleh adanya pendampingan dan pembinaan kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu juga didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompeten pada kearsipan. Pada tahun 2019, dilakukan pembinaan sistem kearsipan kepada 130 lembaga, antara lain 7 Perangkat Daerah, 5 Kecamatan, 28 Kelurahan; serta pelatihan/Bintek/Inhouse training kepada 90 SDN di kota Surabaya.

Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah, maka dilaksanakan juga akuisisi arsip, yaitu proses penambahan khasanah arsip statis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari Perangkat Daerah pencipta arsip kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada tahun 2017, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 473 arsip. Dan di tahun 2018, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 876 arsip. Pada tahun 2019, jumlah arsip diakuisisi sebanyak 352 arsip. Dengan demikian, persentase arsip diakuisi sebesar 50,78% terhadap target 1.725 arsip diakuisi.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan di Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.119 dan Tabel II.120.

Tabel II.119
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.242,07	495.043.304,5	547.769.497,0	580.756.010,0
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	721.552,58	786.764,6	814.659,3	828.597
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	0,16%	0,16%	0,15%	0,14%

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2019

Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar 0,16% atau sebesar Rp. 786.764,6 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp. 495.043.304,5 juta rupiah. Di tahun 2018, kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 0,15% atau sebesar Rp.814.659,3 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp.547.769.497,0 juta rupiah.

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,15-0.16%. Kontribusi sub kategori perikanan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,15%, hal tersebut dikarenakan peningkatan nilai tambah PDRB lebih besar daripada peningkatan nilai tambah sub kategori perikanan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.120
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)			
		2016	2017	2018	2019
1.	Perikanan Laut	10.578,30	8.416,60	8.151,50	7.165,30
2.	Perikanan Tambak	6.915,03	6.798,68	6.956,58	7.249,88
3.	Perairan umum	93,38	94	91,80	114,90
4.	Kolam	1.116,48	1.133,33	1.104,94	1.014,17
5.	Jaring Apung	144,82	134,22	138	125,97
Jumlah		14.954,15	18.849,44	16.576,83	15.670,22

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II.120, terlihat bahwa jumlah produksi perikanan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 15.670,22 ton. Penurunan jumlah produksi terjadi pada jenis usaha perikanan laut, kolam dan jaring apung. Menurunnya produksi perikanan laut karena sumber daya ikan semakin berkurang serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penangkapan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sedangkan kenaikan terjadi pada jumlah produksi perikanan tambak dan perairan umum, hal ini dikarenakan adanya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam budidaya perikanan melalui pelatihan teknologi tepat guna dan fasilitasi penyediaan sarana produksi dalam budidaya perikanan.

Untuk tingkat konsumsi ikan kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 47,35 kg/kapita/th atau tercapai sebesar 93,48% dari yang ditargetkan nasional yaitu 50,65 kg/kapita/th. Adapun upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Surabaya melalui memasyarakatkan gemar makan ikan, sosialisasi/penyuluhan, dan pelatihan diversifikasi pangan berbahan baku dari ikan. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.121 berikut.

Tabel II.121
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	40,33	43,23	45,85	47,35
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	43,88	47,12	50,65	54,00
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	91,91	91,74	90,52	87,69

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

2.1.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada pada tahun 2017 kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 24.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.569.130 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 22.713.892 wisatawan. Pada tahun 2018, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 29.283.022 wisatawan dengan perincian jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.728.194 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 27.575.125 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke kota Surabaya sebanyak 28.827.160 wisatawan dengan perincian jumlah

kunjungan wisatawan sebanyak 1.901.671 wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 26.925.489 wisatawan. Berikut Tabel II.122 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

Tabel II.122
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	772.058	1.569.130	1.728.194	1.901.671
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	20.580.728	22.713.892	27.575.125	26.925.489
Jumlah		21.352.786	24.283.022	29.283.022	28.827.160

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Dengan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada Tabel II.1232 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di Kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb. Dari data tabel tersebut dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata pada tahun 2016 sebanyak 5.622.177 orang. Sedangkan tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 5.811.227 orang. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebanyak 7.215.914 orang dan pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan ke

obyek-obyek wisata sebanyak 6.524.456 orang. Pada tahun 2019 obyek wisata yang paling banyak pengunjungnya adalah Kebun Binatang Surabaya.

Tabel II.123
Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017

Uraian	2016		2017		2018		2019	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
THP Kenjeran	747.950	13,30	511.227	8,79	490.353	6,79	460.552	7,06
Kenjeran Park	549.144	9,77	950.195	16,35	725.790	10,06	772.336	11,84
Taman Prestasi	41.925	0,75	55.156	0,95	98.085	1,36	103.998	1,59
Taman Hiburan Rakyat	18.725	0,33	11.115	0,19	9.696	0,13	872	0,01
Taman Remaja Surabaya	157.470	2,80	71.043	1,22	147.554	2,04	0	0,00
Monumen Tugu Pahlawan	246.400	4,38	264.501	4,55	324.290	4,49	328.588	5,04
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.513.076	26,91	1.845.913	31,76	2.502.546	34,68	1.439.185	22,06
Masjid Al-Akbar	75.123	1,34	89.299	1,54	63.966	0,89	62.253	0,95
Masjid Cheng Ho	20.918	0,37	17.200	0,29	19.643	0,27	18.507	0,28
Kebun Binatang	1.157.643	20,59	1.220.669	21,01	1.996.738	27,67	2.412.604	36,98
Monumen Kapal Selam	333.122	5,93	219.654	3,78	265.783	3,68	310.111	4,75
Monumen Jalesveva Jayamahe	-	-	-	-				0,00
Loka Jala Srana	48.247	0,86	35.222	0,61	36.816	0,51	25.132	0,39

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Uraian	2016		2017		2018		2019	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
Rumah wafat WR. Soepratman	804	0,01	1.244	0,02	6.425	0,09	12.900	0,20
Makam DR. Soetomo	5.101	0,09	18.755	0,32	8.029	0,11	12.695	0,19
Patung Djoko Dolog	5.399	0,10	1.170	0,02	1.438	0,02	970	0,01
Balai Pemuda	252.299	4,49	176.792	3,04	213.020	2,95	313.616	4,81
House Of Sampoerna	212.100	3,77	165.200	2,84	186.447	2,58	171.600	2,63
Ciputra Water Park	227.704	4,05	147.457	2,54	110.477	1,53	69.826	1,07
Museum Kesehatan	9.027	0,16	9.395	0,16	8.818	0,12	8.711	0,13
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	5.622.177	100	5.811.227	100	7.215.914	100	6.524.456	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

2.1.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya. Sebagaimana Tabel II.124 sampai dengan Tabel II.125 berikut:

Tabel II.124
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Total Nilai Tambah PDRB	452.345.242	495.043.304	547.769.497	580.756.010
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian	98.797	96.412	98.825	99.803
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2020

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya terhadap PDRB kota Surabaya dari tahun ke tahun relatif kecil yaitu 0,02%, hal ini disebabkan karena semakin terbatasnya lahan pertanian di kawasan kota Surabaya serta mulai beralihnya mata pencaharian petani ke sektor yang lain yang lebih menjanjikan dari segi ekonomi. Hal ini perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna, pemilihan jenis komoditi serta penyuluhan dan pendampingan yang intensif.

Tabel II.125
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	9.685,21
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	2.289	2.017	1.844	1.750
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,16	5,24	5,44	5,53

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Pada Tabel II.125 disajikan data bahwa jumlah produksi padi/bahan pangan utama lainnya di kota Surabaya pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4,4% dari tahun 2018 atau menurun dari 10.130,64 ton menjadi 9.685,21 ton. Penurunan jumlah produksi tersebut dikarenakan adanya penurunan luas areal penanaman karena adanya sengketa lahan seperti yang terjadi di Kecamatan Gayungan atau pengalihan lahan/areal yang sebelumnya ditanami padi, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah/perusahaan/pengembang selaku pemilik lahan menjadi penggunaan lainnya atau menjadi kawasan pembangunan infrastruktur seperti akses jalan umum dan rumah sakit diantaranya di Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Gunung Anyar. Namun, produktivitas mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 5,53 ton/ha, hal ini dikarenakan adanya pembinaan terhadap petani melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan, serta fasilitasi penyediaan sarana prasarana produksi.

Tabel II.126
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	11.799,80	10.568,57	10.130,64	9.685,21
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	519,2	503,05	400,49	109,54
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	406,9	174,11	471	528,10
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	757,2	773,60	352,24	718,40
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	4.466,57	26,80	3.182,5	2.083,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019

Produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi (padi, jagung, lombok, sayur dan buah) dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2019 komoditi yang mengalami peningkatan produksi yaitu lombok dan sayur, sedangkan jagung, padi dan buah mengalami penurunan. Produksi padi, jagung dan buah mengalami penurunan antara lain disebabkan berkurangnya luas areal penanaman karena pengurukan lahan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan rumah sakit diantaranya di Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Benowo dan Kecamatan Gunung Anyar dan atau pemanfaatan areal untuk penggunaan lainnya seperti di Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Gayungan serta alih komoditi ke tanaman

sayur. Sedangkan jumlah produksi lombok mengalami kenaikan karena petani beralih komoditi yang nilai jualnya pada saat itu sedang tinggi. Data perkembangan produksi hasil pertanian menurut jenis komoditi disajikan sebagaimana Tabel II.126.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26 persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.127
Jumlah Pasar Modern di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Jenis Pasar Modern	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Supermarket	61	61	67	63
2	Minimarket	566	566	593	601
3	Departement Store	9	9	12	12
4	Mall/Plaza	33	33	34	34
Total		603	669	669	728

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2019

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

Tabel II.128
Pasar yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2019

No	Tahun		
	2017	2018	2019
1	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)		
2	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)		
3	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	Pasar Nambangan/ Kenjeran (Lanjutan)	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Tahun		
	2017	2018	2019
4	Pasar Penjaringansari		Pasar Penjaringansari (lanjutan)
5	Pasar Keputih		
6	Pasar Dukuh Menanggal		
7	Pasar Jambangan		
8		Pasar Kapasari	
9		Pasar Kutisari	Pasar Kutisari (lanjutan)
10			Pasar Burung Dolly
11			Pasar Loak Gembong (rehab)

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

Tabel II.129
Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2016 – 2019

Cabang	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Selatan	17	17	17	17
Timur	22	22	22	22
Utara	28	28	28	28
Total	67	67	67	67

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, 2019

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari pertumbuhan izin usaha perdagangan sebagaimana pada Tabel II.130 berikut.

Tabel II.130
Jumlah Usaha Berdasarkan Izin yang Berlaku Di Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Jenis Perusahaan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Perdagangan	12.849	12.791	13.887	9.336
2	Industri	275	330	185	139
Total		14.975	13.124	13.121	9.475

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Surabaya, 2019

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya

pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*.

Aktivitas perdagangan di kota Surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari Tabel II.131

Tabel II.131

Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Nilai Ekspor (US \$)	17.901.405.669	18.268.869.178	18.156.429.939	18.120.064.879
2	Nilai Impor (US \$)	15.632.269.630	16.956.900.232	18.892.345.434	17.368.048.068
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	2.269.136.039	1.311.968.946	-735.915.495	752.016.811

Sumber: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, 2019

Berdasarkan perkembangannya, neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2016 dan tahun 2017 tercatat surplus sebesar US \$2.269.136.039 dan US \$1.311.968.946 dan pada tahun 2018, defisit menjadi -446.839.735. Hal tersebut didorong oleh permintaan eksternal, yaitu sebesar US \$19.165.996.010 dan impor sebesar US \$19.612.835.745. Permintaan eksternal turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, terjaganya kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya mempengaruhi terhadap net ekspor Kota Surabaya selama tahun 2018.

2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.4.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012. Sedangkan di tahun 2016, disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016, sehingga dengan ditetapkan dokumen perencanaan tersebut dalam peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.132
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Jenis Dokumen	2016	2017	2018	2019
1	RPJPD	Ada	Ada	Ada	Ada
2	RPJMD	Ada	Ada	Ada	Ada
3	RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Pada tahun 2015

jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 60 program, tahun 2016 sebanyak 79 program dan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah program pembangunan pada RKPD adalah sebanyak 102 program. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan program-program pembangunan telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Tabel II.133
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	79	102	102	102
2	Jumlah Program RKPD	79	102	102	102
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

Tabel II.134
Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan
Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	94,94%	91,18%	98,04%	99,02%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Rata-rata penyerapan anggaran di tahun 2019 mencapai 93,75% sehingga dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat berjalan secara optimal.

Tabel II.135
Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	89,29	87,29	90,19	95,95

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2019

2.1.3.4.2 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

2.1.3.4.2.a Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II.136.

Tabel II.136
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2016–2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	63,08	68,86	72,47	73,47

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya dengan nilai 63,08 atau tingkat akuntabilitas kerjanya B. Pada tahun 2017, penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Surabaya tahun 2017 meningkat yaitu 68,86 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B. Pada tahun 2018, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan yaitu 72,47 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB. Sedangkan pada tahun 2019, penilaian evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Kota Surabaya kembali meningkat dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB (73,47). Peningkatan ini diupayakan melalui perbaikan indikator kinerja utama Walikota dan Kepala Perangkat Daerah, dan akan terus ditingkatkan melalui proses penyusunan rencana kerja, pelaksanaan serta evaluasi hasil rencana yang lebih baik dan terintegrasi.

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Surabaya menjalankan ketatalaksanaan pelaksanaan pemerintahan dengan berpedoman pada adanya *standard operational procedure* (SOP) pada setiap jenis pelayanan. Pada 329 jenis pelayanan, sebanyak

267 jenis pelayanan atau 81,16% telah memiliki *standard operational procedure* (SOP).

Tabel II.137
Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP Tahun 2016 –2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah jenis pelayanan	329	329	329	329
2.	Jumlah jenis pelayanan yang memiliki SOP	267	267	267	267
3.	Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP	81,16%	81,16%	81,16%	81,16%

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II.138.

Tabel II.138
Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2016–2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rancangan produk hukum	73	79	89	75
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	73	79	89	75
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum, 2019

2.1.3.4.2.b Pelayanan Publik

Hasil *Survey Kepuasan Masyarakat* (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil *Survey Kepuasan Masyarakat* (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.139 berikut.

Tabel II.139
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Uraian	2016	2017	2018	2019
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	82,67	76,30	83,74	82,43

Sumber: Bagian Organisasi, 2019

Pelaksanaan *survey* kepuasan masyarakat pada tahun 2019 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTSA Surabaya Pusat, UPTSA Surabaya Timur, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, 63 puskesmas, 31 kecamatan, dan 154 kelurahan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kategori Baik, UPTSA Surabaya Pusat dan UPTSA Surabaya Timur masuk kategori Baik, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. M. Soewandhie, Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 61 Puskesmas masuk kategori Baik, serta 2 Puskesmas masuk kategori Sangat Baik. Penilaian untuk 31 kecamatan, dengan hasil 15 kecamatan masuk kategori Baik dan 3 kecamatan masuk kategori Sangat Baik, sedangkan 13 kecamatan masuk kategori cukup. Sedangkan 14 kelurahan masuk kategori Sangat Baik dan 77 kelurahan masuk kategori Baik, sisanya masuk dalam kategori Cukup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak Unit Pelayanan yang belum mencapai kategori Sangat Baik, dan kondisi tersebut secara umum menurun dari tahun 2018 di mana sebanyak 118 Unit Pelayanan masuk dalam Kategori Sangat Baik.

2.1.3.4.2.c Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan

kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.

Pada tahun 2019 terdapat 141 MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut sebanyak 120 MoU atau 85,11% terealisasi dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Untuk kerjasama luar negeri, terdapat 15 MoU dan 12 MoU diantaranya memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dari keseluruhan 119 MoU (non perdagangan) kerjasama antar daerah, pihak ketiga, dan luar negeri tahun 2019, 114 MoU diantaranya telah ditindaklanjuti. Pada tahun 2019, dari 2 MoU kerjasama yang memuat sektor perdagangan, semuanya terealisasi dan telah ditindaklanjuti.

Tabel II.140
MoU Kerjasama (Non Perdagangan) Antar Daerah dan Pihak Ketiga
Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2019	120
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga keseluruhan tahun 2019	141
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2019	85,11%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

Tabel II.141
MoU Kerjasama (non perdagangan) Luar Negeri Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti tahun 2019	12
2.	Jumlah bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri keseluruhan tahun 2019	15
3.	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti tahun 2019	80%

Sumber : Bagian Administrasi Kerjasama, 2019

2.1.3.4.2.d Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana ditunjukkan pada tabel II.142 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi.

Tabel II.142
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2016	2017	2018	2019
Hukuman Disiplin Ringan					
1	Teguran Lisan	-	1	2	0
2	Teguran Tertulis	2	10	1	0
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	2	3	2	2
	Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	4	14	5	2
Hukuman Disiplin Sedang					
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun	2	1	1	0
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun	1	0	2	2
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	1	3	0	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	4	4	3	2
Hukuman Disiplin Berat					
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	7	9	4	12
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	1	1	0
3	Pembebasan Dari Jabatan	8	4	2	4
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	5	3	3	7
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	1	1	0	0
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	-	1	0	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Berat	21	19	10	23
Hukuman Disiplin					
1	Pemberhentian Sementara (PP. No. 11 Tahun 2017)	3	2	1	3
2	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS	0	0	3	2
3	Pencabutan Pemberhentian Sementara	0	0	0	0
4	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0	0	0
5	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0	0	0

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		2016	2017	2018	2019
6	Rehabilitasi	0	0	0	0
Jumlah		3	2	4	5
TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN		32	39	22	32

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2019

2.1.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar

2.1.3.5.1 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II.143 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.

Tabel II.143
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklat Struktural
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pejabat struktural	1.638	1.577	1.577	1580
2.	Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	1.135	1.134	1.255	1174
3.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	69,29%	71,91%	78,24%	74,30%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel II.144
Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2015 – 2017**

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2015	581.474	33,75	1.141.526	66,25	1.722.999	100
2016	727.886	39,94	1.094.588	60,06	1.822.474	100
2017	758.750	39,88	1.143.770	60,12	1.902.520	100

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2018

Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat. Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana berikut:

**Tabel II.145
Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019**

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja (orang)	-	1.495.837	1.520.041	2.222.469
PDRB (Juta Rp)	451.486.791,00	503.824.868,16	547.769.496,96	580.756.010,68
Produktivitas (Juta per orang)	-	336,81	360,36	261,31

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2019

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan perdagangan.

Tabel II.146
Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan

Uraian		2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB ADHB					
Transportasi dan Pergudangan		16.569.183,7	17.707.950,2	19.276.049,9	20.497.980
1	Angkutan Rel	92.201,6	100.269,3	107.866,6	209.079,4
2	Angkutan Darat	4.245.058,0	4.660.509,3	5.050.404,3	4.880.569,0
3	Angkutan Laut	2.474.710,6	2.617.501,4	2.913.643,7	3.089.045,6
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	59.816,2	61.096,3	61.125,1	69.693,1
5	Angkutan Udara	-	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	9.697.397,3	10.268.574,0	11.143.010,3	12.249.592,8
Laju Pertumbuhan					
Transportasi dan Pergudangan		4,89	6,87	7,56	7,62
1	Angkutan Rel	9,60	8,75	7,58	93,83
2	Angkutan Darat	8,06	9,79	8,37	-3,36
3	Angkutan Laut	4,12	5,77	11,31	6,02
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1,27	2,14	0,05	14,02
5	Angkutan Udara	-	-	-	-
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	3,73	5,89	8,52	9,93

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2020

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Penataan Ruang

Pada tahun 2016, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Tabel II.147
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Tabel II.148
Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya
Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri pada tahun 2016 adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya.

Tabel II.149
Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2016 –2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya, 2019

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100 persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

2.1.4.2.2 Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Data jumlah kendaraan hanya bisa didapatkan dari perhitungan jumlah kendaraan (kepemilikan) oleh BPKAD Provinsi Jatim (melalui perhitungan pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya), sehingga Kota/Kabupaten tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut. Namun, melihat perkembangan jumlah kendaraan di Kota Surabaya yang semakin tahun semakin meningkat, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

Tabel II.150
Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Panjang Jalan (m)	1.686.380,5	1.689.289,1	1.678.857,7	1.694.376,1
Jumlah Kendaraan	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

2.1.4.2.3 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Lama rata-rata terjadinya genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2016, capaian lama rata-rata terjadinya genangan sebesar 52,98 menit dan pada tahun 2017, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 25,03 menit. Pada tahun 2018, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya

sebesar 22,43 menit. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata lama terjadinya genangan di Kota Surabaya sebesar 22,01 menit sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.151
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Lama Terjadinya Genangan (menit)	52,98	25,03	22,43	22,01

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

Rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016, rata-rata tinggi genangan sebesar 16,27 cm. Pada tahun 2017, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 13,37 cm. Pada tahun 2018, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 12,49 cm. Sedangkan pada tahun 2019, rata-rata tinggi genangan Kota Surabaya sebesar 9,20 cm sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel II.152
Rata-rata Tinggi Genangan Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Tinggi Genangan (cm)	16,40	13,37	12,49	9,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

Berdasarkan Tabel II.153 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar 1.257 ha dan pada tahun 2017, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 765,12 ha. Pada tahun 2018, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 697,79 ha. Sedangkan pada tahun 2019, luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 688,96 ha sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel II. 153
Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Luas Wilayah Genangan (ha)	1.257	765,12	697,79	688,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.16). Hingga sekarang, *smart water level* telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrengan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini, Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan *smart water level* di rumah pompa lainnya.



Perangkat



Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

Gambar II.16 Perangkat *Smart Water Level*

2.1.4.2.4 Air Bersih

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II.154 di bawah ini.

Tabel II.154
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	3.127.782	3.137.496	3.306.059	3.148.413
2	Jumlah Penduduk*	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	103,69	102,04	106,82	99,65

Sumber : PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2019

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya sebesar hingga tahun 2016 telah mencapai 103,69 persen. Begitupun pula di tahun 2017 dan tahun 2018, dimana capaiannya telah mencapai diatas 100%. Walaupun telah mencapai target diatas 100 persen, namun pelayanan tetap terus dioptimalkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

2.1.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Sampai dengan tahun 2015, jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang sebanyak 79.404. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2017 bertambah sebanyak 5.380 titik. Pada tahun 2018, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang bertambah 5.372 titik, sedangkan pada tahun 2019 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang bertambah 6.090 titik. Dengan demikian sampai dengan

tahun 2019 jumlah titik PJU sebanyak 101.539 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.155
Penerangan Jalan Umum Tahun 2016 – 2019

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah PJU terpasang (Titik)	5.293	5.380	5.372	6.090

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada Tabel II.156 berikut.

Tabel II.156
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Politik	48	35	67	78
2	Ekonomi	126	84	64	68
3	Sosial Budaya	165	107	105	81
4	Jumlah unjuk rasa	339	226	236	227

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, namun di 2018 mengalami sedikit kenaikan dan pada tahun 2019 kembali menurun. Hal ini menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada Tabel II.157 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT). Pada tahun 2018, perda yang mendukung iklim usaha adalah Perda nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

Tabel II.157
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2018

No.	Uraian	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perda Terkait Perizinan	1	0	0
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	0	0	1
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0

Sumber :Bagian Hukum, 2019

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II.158.

Tabel II.158
Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3 Kota Surabaya
Tahun 2016–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah lulusan D4/S1	325.755	328.211	303.549	305.315
2	Jumlah lulusan S2	21.579	22.091	21.010	21.363
3	Jumlah lulusan S3	1.279	1.315	1.353	1.376
4	Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3	348.613	351.617	325.912	328.054
5	Jumlah penduduk	3.016.368	3.074.883	3.094.732	3.159.481
6	Rasio lulusan D4/S1/S2/S3	0,116	0,114	0,105	0,104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

2.1.4.4.2 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.159
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	717.636	713.916	672.334	700.826
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	220.340	232.830	216.158	229.491
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	937.976	946.746	888.492	930.317
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.369.324	2.395.881	2.206.240	2,229,164
6	Rasio ketergantungan	0,396	0,395	0,402	0,417

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Dari data rasio ketergantungan pada tabel di atas, komposisi penduduk Surabaya pada tahun 2019 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia kurang dari 15 tahun sebesar 22,18 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 7,26 persen. Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 70,55%). Sehingga rasio ketergantungan sebesar 0,417 yaitu

setiap 100 orang yang berusia kerja/produktif mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan rekapitulasi hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 dan realisasi tahun ke empat RPJMD 2016-2021 yang bersumber dari hasil monitoring pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah serta dari laporan pertanggungjawaban APBD Akhir Tahun Anggaran 2019, maka rekapitulasi hasil telaah evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2019 menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2019, secara umum disajikan pada Tabel II.160 berikut.

Tabel II. 160
Rekapitulasi Evaluasi Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan dan Kinerja Hasil Program Tahun 2019

No.	Jenis Pencapaian Indikator Kinerja	Program (indikator kinerja hasil)		Kegiatan (indikator kinerja keluaran)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Realisasi indikator kinerja yang tidak memenuhi target yang direncanakan (capaian kurang dari 100%)	16	6,72%	251	0,46%
2	Realisasi indikator kinerja yang telah memenuhi target yang direncanakan (capaian 100% - 110%)	105	44,12%	787	64,14%
3	Realisasi indikator kinerja yang melebihi target yang direncanakan (capaian lebih dari 110%)	117	49,16%	189	15,40%
Total		238	100%	1227	100%

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan TW I tahun 2020, dijelaskan pada Tabel II.161 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan TW I Tahun 2020 sebagaimana berikut.

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

Tabel II.159
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		1	Urusan Pemerintahan																										
		1.1	Wajib																										
		1.1.1	Pelayanan Dasar																										
		1.1.1.01	Pendidikan																										
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan		129.030.170	N/A	139.161.087	9.611.716	150.604.400	-	-	24.672.156	17,73%	24.672.156	19,12%														
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A	86,25%	100,00 %	86,25%	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %	115,94 %	-													
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	89,27%	100,00 %	89,27%	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %	112,02 %	-													
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	91,24%	100,00 %	91,24%	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %	109,60 %	-													
			Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	72,25%	N/A	72,25%	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-													
			Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	78,50%	N/A	78,50%	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-													
			Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/pr ovinsi/nasional/int ernasional	0,15%	N/A	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-													
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasio nal/internasional	1,70%	N/A	1,70%	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-													
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasio nal/internasional	4%	N/A	4%	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-													
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	45,71%	N/A	45,71%	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-													

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.01.01.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu			13000 orang	53.130.262	0 orang	0	13000 orang	0	-	-	-	-	13000 orang	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga			2 kali	967.169	0 kali	0	0 kali	0	-	-	-	-	0 kali	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan			31 lembaga	5.218.627	31 lembaga	185.154	0 lembaga	564.429	-	-	-	-	31 lembaga	749.584	100,00%	14,36%	100,00%	14,36%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0004	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM			234 lembaga	815.214	234 lembaga	18.556	0 lembaga	42.064	-	-	-	-	234 lembaga	60.620	100,00%	7,44%	100,00%	7,44%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0005	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan			12 kali	1.766.848	0 kali	0	0 kali	64.528	-	-	-	-	0 kali	64.528	0,00%	3,65%	0,00%	3,65%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0006	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini			1368 lembaga	5.494.814	1357 lembaga	971.924	0 lembaga	80.740	-	-	-	-	1357 lembaga	1.052.664	99,20%	19,16%	99,20%	19,16%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0007	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			12010 orang	37.966.895	0 orang	31.000	8947 orang	8.604.040	-	-	-	-	8947 orang	8.635.040	74,50%	22,74%	74,50%	22,74%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan			18 kali	3.542.420	6 kali	86.204	12 kali	91.852	-	-	-	-	18 kali	178.056	100,00%	5,03%	100,00%	5,03%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0009	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat			3 kali	29.110.495	0 kali	8.318.878	0 kali	5.612.786	-	-	-	-	0 kali	13.931.664	0,00%	47,86%	0,00%	47,86%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan			2 lembaga	118.800	0 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	-	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		1.1.1.01.01.001.1	Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah PKBM yang mendapatkan peningkatan sarana			4 lembaga	802.729	0 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	-	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.01.001.2	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana			2 lembaga	226.814	0 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	-	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.02	Program Pengembangan Sekolah Dasar			317.789.833		N/A		308.134.437		24.042.640		378.963.850		-		61.939.025		20,10%		61.939.025		19,49%					
				Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100%		133,84 %		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		133,84 %		133,84 %		-				
				Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	92,01%		92,66 %		92,01%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		92,66 %		100,70 %		-				
				Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,12%		N/A		0,12%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		N/A		N/A		-				
		1.1.1.01.02.000.1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan			302 lembaga	122.796.255	0 lembaga	0	0 lembaga	13.144	-	-	-	-	0 lembaga	13.144	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.02.000.2	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD			90799 orang	2.395.908	0 orang	119.865	45724 orang	556.659	-	-	-	-	45724 orang	676.524	50,36%	28,24%	50,36%	28,24%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.02.000.3	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan			302 lembaga	151.384.817	301 lembaga	22.963.360	301 lembaga	33.660.571	-	-	-	-	301 lembaga	56.623.931	99,67%	37,40%	99,67%	37,40%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.02.000.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan			73 lembaga	15.134.930	55 lembaga	895.276	55 lembaga	1.751.439	-	-	-	-	55 lembaga	2.646.715	75,34%	17,49%	75,34%	17,49%			Dinas Pendidikan				
		1.1.1.01.02.000.5	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar			259 lembaga	552.027	145 lembaga	4.890	0 lembaga	52.972	-	-	-	-	145 lembaga	57.862	55,98%	10,48%	55,98%	10,48%			Dinas Pendidikan				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.01.02.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar					658 lembaga	725.932	0 lembaga	2.600	0 lembaga	56.956	-	-	-	-	0 lembaga	59.556	0,00%	8,20%	0,00%	8,20%			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar					302 lembaga	10.613.905	0 lembaga	0	13 lembaga	1.791.500	-	-	-	-	13 lembaga	1.791.500	4,30%	16,88%	4,30%	16,88%			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar					5 kali	1.470.306	1 kali	56.648	0 kali	13.144	-	-	-	-	1 kali	69.792	20,00%	4,75%	20,00%	4,75%			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.02.0009	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan					17 lembaga	3.060.357	0 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	-	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03	Program Pengembangan Sekolah Menengah			160.437.825		N/A		149.265.860		9.287.412		174.570.790		-	-	-		26.744.491		17,92%		26.744.491		16,67%	
				Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100%			112,23 %		100%		-	-		-		-	-		-		112,23 %		112,23 %		-	
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	95,73%			93,95 %		95,73%		-	-		-		-	-		-		93,95 %		98,14 %		-	
				Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0,14%			N/A		0,14%		-	-		-		-	-		-		N/A		N/A		-	
		1.1.1.01.03.0001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan					63 lembaga	61.324.155	0 lembaga	0	0 lembaga	15.944	-	-	-	-	0 lembaga	15.944	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah					40993 orang	909.287	0 orang	214.237	39056 orang	59.944	-	-	-	-	39056 orang	274.181	95,27%	30,15%	95,27%	30,15%			Dinas Pendidikan
		1.1.1.01.03.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah Sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan					63 lembaga	65.012.121	63 lembaga	8.261.320	62 lembaga	10.492.811	-	-	-	-	63 lembaga	18.754.131	100,00%	28,85%	100,00%	28,85%			Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e)(Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.1.1.01.03.0004	Facilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan			37 lembaga	7.127.931	37 lembaga	586.550	37 lembaga	1.326.690	-	-	-	-	37 lembaga	1.913.240	100,00%	26,84%	100,00%	26,84%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.03.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah			294 lembaga	434.243	168 lembaga	57.022	294 lembaga	27.142	-	-	-	-	307 lembaga	84.164	104,42%	19,38%	104,42%	19,38%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.03.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah			245 lembaga	568.003	0 lembaga	0	0 lembaga	19.544	-	-	-	-	0 lembaga	19.544	0,00%	3,44%	0,00%	3,44%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.03.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah			63 lembaga	10.386.130	27 lembaga	71.200	24 lembaga	5.499.060	-	-	-	-	35 lembaga	5.570.260	55,56%	53,63%	55,56%	53,63%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.03.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah			1 kali	1.739.825	0 kali	97.083	0 kali	15.944	-	-	-	-	0 kali	113.027	0,00%	6,50%	0,00%	6,50%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.03.0009	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan			6 lembaga	1.764.164	0 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	-	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pendidikan		
2	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	1.1.1.01.04	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan			120.360.715		N/A		129.781.833		18.983.971		281.976.150		-		47.181.586		36,35%		47.181.586		39,20%			
				Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	88,94%		85,41 %		88,94%		-		-		-		-		-		85,41 %		96,03 %		-		
		1.1.1.01.04.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi			29 bangunan	87.821.204	8 bangunan	10.666.505	30 bangunan	20.270.938	-	-	-	-	38 bangunan	30.937.443	131,03%	35,23%	131,03%	35,23%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.01.04.0002	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara			160 bangunan	40.245.994	109 bangunan	8.317.466	106 bangunan	7.218.707	-	-	-	-	215 bangunan	15.536.173	134,38%	38,60%	134,38%	38,60%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.01.04.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun			27 dokumen	1.714.635	2 dokumen	0	11 dokumen	707.970	-	-	-	-	13 dokumen	707.970	48,15%	41,29%	48,15%	41,29%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
3	Meningkatkan kualitas pendidikan	1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Sekolah		89.382.953	N/A		85.467.427		17.240.333		253.761.430	-	-	-	-		42.616.477		49,86%		42.616.477		47,68%			
				Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	81,86%	N/A		81,86%	-		-		-	-	-	-	-		-	N/A			N/A	-			
				Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	87,38%	N/A		87,38%	-		-		-	-	-	-	-		-	N/A			N/A	-			
		1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan			2 kali	1.749.081	0 kali	125.877	1 kali	455.812	-	-	-	-	1 kali	581.689	50,00%	33,26%	50,00%	33,26%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.05.0002	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah			2567 lembaga	821.658	0 lembaga	115.169	0 lembaga	64.973	-	-	-	-	0 lembaga	180.142	0,00%	21,92%	0,00%	21,92%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.05.0003	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan			365 lembaga	82.896.688	367 lembaga	16.999.287	367 lembaga	24.855.359	-	-	-	-	367 lembaga	41.854.646	100,55%	50,49%	100,55%	50,49%			Dinas Pendidikan		
		1.1.1.01.06	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan		147.755.972	N/A		151.134.716		4.655.938		279.813.440	-	-	-	-		32.637.282		21,59%		32.637.282		22,09%			
				Persentase guru PAUD yang kompeten	100%		100,00 %		100%	-	-		-	-	-	-	-		-	100,00 %		100,00 %		-			
				Persentase guru SD yang kompeten	100%	N/A		100%	-	-	-		-	-	-	-	-		-	N/A		N/A		-			
				Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100%	100,00 %		100%	-	-	-		-	-	-	-	-		-	100,00 %		100,00 %		-			
				Persentase guru SMP yang kompeten	100%	N/A		100%	-	-	-		-	-	-	-	-		-	N/A		N/A		-			
				Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100%	100,00 %		100%	-	-	-		-	-	-	-	-		-	100,00 %		100,00 %		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
				Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85%		N/A	85%			-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
				Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90%		N/A	90%			-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
				Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100%		100,00 %	100%			-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-				
		1.1.1.01.06.0001	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan				1 kali	955.915	0 kali	0	0 kali	35.212	-	-	-	-	0 kali	35.212	0,00%	3,68%	0,00%	3,68%			Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.06.0002	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan				2031 orang	5.732.512	1427 orang	127.628	687 orang	85.815	-	-	-	-	2114 orang	213.443	104,09%	3,72%	104,09%	3,72%			Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.06.0003	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan				957 lembaga	142.658.978	360 lembaga	4.480.910	833 lembaga	27.767.999	-	-	-	-	896 lembaga	32.248.909	93,63%	22,61%	93,63%	22,61%			Dinas Pendidikan			
		1.1.1.01.06.0004	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan				2 dokumen	1.787.311	0 dokumen	47.400	0 dokumen	92.318	-	-	-	-	0 dokumen	139.718	0,00%	7,82%	0,00%	7,82%			Dinas Pendidikan			
		1.1.1.02	Kesehatan																										
4	Meningkatkan derajat kesehatan	1.1.1.02.01	Program Jaminan Kesehatan			179.544.916		N/A		206.403.504		63.636.894		672.798.250		-		-		130.916.719		63,43%		130.916.719		72,92%			
				Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%		100,00 %	100%			-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-				
		1.1.1.02.01.0001	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan				366751 orang	198.750.642	571164 orang	55.984.074	590196 orang	67.279.825	-	-	-	-	710231 orang	123.263.899	193,65%	62,02%	193,65%	62,02%			Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.01.0002	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan				182210 orang	7.652.862	182210 orang	7.652.820	0 orang	0	-	-	-	-	182210 orang	7.652.820	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			Dinas Kesehatan			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output/Outcome/Kegiatan	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Dasar Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.02.02	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu		23.887.162		N/A		17.480.111		1.723.762		15.411.160		-					3.264.878		18,68%		3.264.878		13,67%	
				Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100%		100,00 %		100%		-		-	-	-	-	-	-	-			100,00 %		3.264.878		100,00 %	-
		1.1.1.02.02.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan					90 jenis	15.215.758	1 jenis	1.697.187	16 jenis	1.437.181	-	-	-	-	17 jenis	3.134.368	18,89%	20,60%	18,89%	20,60%			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.02.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan					17 jenis	2.264.353	2 jenis	26.575	3 jenis	103.935	-	-	-	-	5 jenis	130.510	29,41%	5,76%	29,41%	5,76%			Dinas Kesehatan
		1.1.1.02.03	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		32.174.873		N/A		34.174.799		0		0		-		-		0		0,00%		0		0,00%		
				Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%		100,00 %		100%		-		-	-	-	-	-	-	-			100,00 %		0		100,00 %	-
		1.1.1.02.03.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan					2 jenis	34.174.799	2 jenis	0	2 jenis	0	-	-	-	-	2 jenis	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada
		1.1.1.02.04	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		71.000.000		N/A		71.000.000		0		0		-		-		0		0,00%		0		0,00%		
				Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	100%		100,00 %		100%		-		-	-	-	-	-	-	-			100,00 %				100,00 %	-
		1.1.1.02.04.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan Perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan					2 jenis	71.000.000	2 jenis	0	2 jenis	0	-	-	-	-	2 jenis	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
		1.1.1.02.05	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		37.346.448		N/A		21.636.914		3.848.327		24.695.230		-		-	-		6.317.850		29,20%		6.317.850		16,92%	
				Cakupan kunjungan ibu hamil K4	99%		99,67 %		99%		-		-		-		-	-	-			99,67 %				100,68 %	-
				Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100%		101,73 %		100%		-		-		-		-	-	-			101,73 %				101,73 %	-
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinkes)	97,72%		100,18 %		97,72%		-		-		-		-	-	-			100,18 %				102,52 %	-
				Prevalensi balita gizi buruk	0,11%		N/A		0,11%		-		-		-		-	-	-			N/A				122,00 %	-
				Prevalensi balita gizi kurang	8,24%		8,22 %		8,24%		-		-		-		-	-	-			8,22 %				99,72 %	-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11				13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16							
				Prevalensi balita stunting	8,90%	N/A		8,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119 kunjungan	82.586	17,22%	2,41%	17,22%	2,41%	N/A	-	Dinas Kesehatan			
	1.1.1.02.05.0001	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				691 kunjungan	3.433.898	0 kunjungan	82.166	119 kunjungan	420	-	-	-	-	-	119 kunjungan	82.586	17,22%	2,41%	17,22%	2,41%			Dinas Kesehatan			
	1.1.1.02.05.0002	Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga				64 Lembaga	13.357.355	64 Lembaga	2.902.629	0 Lembaga	1.257.325	-	-	-	-	-	64 Lembaga	4.159.954	100,00%	31,14%	100,00%	31,14%			Dinas Kesehatan			
	1.1.1.02.05.0003	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan ayanan perbaikan gizi				366 orang	4.845.661	0 orang	863.533	91 orang	1.211.779	-	-	-	-	-	91 orang	2.075.311	24,86%	42,83%	24,86%	42,83%			Dinas Kesehatan			
	1.1.1.02.06	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			32.505.318	N/A		31.180.205		6.910.162		92.306.450		-		-			16.140.807		51,77%		16.140.807		49,66%				
			Cakupan imunisasi dasar lengkap	97,79%		98,06 %		97,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		98,06 %		100,28 %		-			
			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani ≤20 jam	100%		N/A		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		N/A		N/A		-			
			Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100%		100,00 %		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		100,00 %		100,00 %		-			
	1.1.1.02.06.0001	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular				154 lembaga	27.705.945	154 lembaga	6.516.660	154 lembaga	7.989.107	-	-	-	-	-	154 lembaga	14.505.767	100,00%	52,36%	100,00%	52,36%			Dinas Kesehatan			
	1.1.1.02.06.0002	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular				154 lembaga	2.795.245	154 lembaga	302.758	154 lembaga	1.145.300	-	-	-	-	-	155 lembaga	1.448.057	100,65%	51,80%	100,65%	51,80%			Dinas Kesehatan			
	1.1.1.02.06.0003	Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi				63 lembaga	679.015	63 lembaga	90.745	63 lembaga	96.238	-	-	-	-	-	63 lembaga	186.983	100,00%	27,54%	100,00%	27,54%			Dinas Kesehatan			
	1.1.1.02.07	Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat			71.680.219	N/A		68.408.170		2.640.879		10.345.140		-		-			3.675.392		5,37%		3.675.392		5,13%				
			Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100%		N/A		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		N/A		N/A		-			
			Persentase rumah sehat	86,42%		86,73 %		86,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		86,73 %		100,36 %		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Dasar Penanggung Jawab	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16												
				Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84,88%		91,94 %		84,88%			-		-		-		-		-		91,94 %		108,32 %		-		
		1.1.1.02.07.0001	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan					64 lembaga	31.163.575	64 lembaga	0	64 lembaga	0	-	-	-	-	64 lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.07.0002	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat					63 lembaga	22.707.243	63 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	-	63 lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.07.0003	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan					63 lembaga	10.318.391	63 lembaga	1.582.462	63 lembaga	708.768	-	-	-	-	63 lembaga	2.291.229	100,00%	22,21%	100,00%	22,21%			Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.07.0004	Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga					63 lembaga	4.218.961	63 lembaga	1.058.417	63 lembaga	325.746	-	-	-	-	63 lembaga	1.384.163	100,00%	32,81%	100,00%	32,81%			Dinas Kesehatan	
		1.1.1.02.08	Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada			16.307.536		N/A		16.542.686		0		0	-	-	-		0		0,00%		0		0,00%			
				Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80%		N/A		80%			-		-	-	-	-	-			-		N/A		N/A		-	
				Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60%		N/A		60%			-		-	-	-	-	-			-		N/A		N/A		-	
		1.1.1.02.08.0001	Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan					75 kali	15.926.857	31 kali	0	0 kali	0	-	-	-	-	31 kali	0	41,33%	0,00%	41,33%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
		1.1.1.02.08.0002	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan					115 kali	615.829	23 kali	0	30 kali	0	-	-	-	-	53 kali	0	46,09%	0,00%	46,09%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada	
		1.1.1.02.09	Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie			28.790.199		N/A		33.261.214		0		0	-	-	-	-		0		0,00%		0		0,00%		
				Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	50%		N/A		50%			-		-	-	-	-	-			-		N/A		N/A		-	
		1.1.1.02.09.0001	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan					4 jenis	476.124	1 jenis	0	0 jenis	0	-	-	-	-	1 jenis	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16										
		1.1.1.02.09.0002	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja					200 orang	32.785.090	64 orang	0	2 orang	0	-	-	-	66 orang	0	33,00%	0,00%	33,00%	0,00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie			
5	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	1.1.1.02.10	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan		323.723.718		N/A		299.438.933		199.382		9.427.870		-	-	-	1.142.170		0,38%		1.142.170		0,35%					
				Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	88,17%		N/A		88,17%		-	-	-	-	-	-	-	-		N/A		N/A		-					
		1.1.1.02.10.0001	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi					10 bangunan	128.608.083	0 bangunan	199.382	3 bangunan	928.147	-	-	-	3 bangunan	1.127.530	30,00%	0,88%	30,00%	0,88%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.02.10.0002	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah bangunan gedung RSUD beserta peralatannya yang dibangun/ direhab (Tahun Jamak / Multiyears)					1 bangunan	170.125.115	0 bangunan	0	0 bangunan	0	-	-	-	0 bangunan	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.1.1.02.10.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan					12 Dokumen	705.735	0 Dokumen	0	0 Dokumen	14.640	-	-	-	0 Dokumen	14.640	0,00%	2,07%	0,00%	2,07%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
6	Meningkatkan derajat kesehatan	1.1.1.02.11	Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji		1.824.693		N/A		1.779.352		60.312		805.680		-	-	-	140.880		7,92%		140.880		7,72%					
				Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	98,06%		100,00 %		98,06%		-	-	-	-	-	-	-	-		100,00 %		101,98 %		-					
		1.1.1.02.11.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa					5442 sampel	1.779.352	0 sampel	60.312	0 sampel	80.568	-	-	-	0 sampel	140.880	0,00%	7,92%	0,00%	7,92%			Dinas Kesehatan			
		1.1.1.02.12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		5.215.067		N/A		5.182.689		0		0	-	-	-	-	0		0,00%		0		0,00%					
				Average Length of Stay (AvLOS)	4 hari		N/A		4 hari		-	-	-	-	-	-	-	-		N/A		N/A		-					
				Bed Turn Over Ratio (BTO)	45 kali		N/A		45 kali		-	-	-	-	-	-	-	-		N/A		N/A		-					
				Turn Over Interval (TOI)	3 hari		N/A		3 hari		-	-	-	-	-	-	-	-		N/A		N/A		-					
		1.1.1.02.12.0001	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan					11751 orang	3.126.010	2847 orang	0	1183 orang	0	-	-	-	4030 orang	0	34,29%	0,00%	34,29%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada			
		1.1.1.02.12.0002	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik					2218 orang	2.056.679	874 orang	0	609 orang	0	-	-	-	1483 orang	0	66,86%	0,00%	66,86%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.1.1.02.13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		8.194.632	N/A	8.267.473		0		0		-		-			0		0,00%		0		0,00%			
				Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1,10%	N/A	1,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A		-			
				Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1,25%	N/A	1,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A		-			
		1.1.1.02.13.0001	Pelayanan Gizi Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit			28340 orang	7.044.511	6679 orang	0	3538 orang	0	-	-	-	-	-	10217 orang	0	36,05%	0,00%	36,05%	0,00%		RSUD Dr. Mohamad Soewandhie		
		1.1.1.02.13.0002	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan			180 kali	498.806	80 kali	0	29 kali	0	-	-	-	-	-	109 kali	0	60,56%	0,00%	60,56%	0,00%		RSUD Dr. Mohamad Soewandhie		
		1.1.1.02.13.0003	Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan			155 kali	724.156	48 kali	0	20 kali	0	-	-	-	-	-	68 kali	0	43,87%	0,00%	43,87%	0,00%		RSUD Dr. Mohamad Soewandhie		
		1.1.1.02.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		22.526.004	N/A	23.623.302	3.134.836	44.993.710		-		-		-			7.634.207		32,32%		7.634.207		33,89%			
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	83,70%	84,43 %	83,70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,43 %		100,87 %		-			
		1.1.1.02.14.0001	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan			1 jenis	3.190.000	0 jenis	0	0 jenis	0	-	-	-	-	-	0 jenis	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.14.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan			1 aplikasi	570.093	0 aplikasi	110.090	0 aplikasi	83.232	-	-	-	-	-	0 aplikasi	193.322	0,00%	33,91%	0,00%	33,91%		Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.14.0003	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya			63 Lembaga	19.863.209	63 Lembaga	3.024.747	63 Lembaga	4.416.139	-	-	-	-	-	63 Lembaga	7.440.885	100,00%	37,46%	100,00%	37,46%		Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		186.795.136	N/A	184.159.308	0	0		-		-		-			0		0,00%		0		0,00%			
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	96,25%	96,53 %	96,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,53 %		100,29 %		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		1.1.1.02.15.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara			3 jenis	182.974.618	2 jenis	0	4 jenis	0	-	-	-	-	4 jenis	0	133,33%	0,00%	133,33%	0,00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie				
		1.1.1.02.15.0002	Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan			1 jenis	1.184.690	0 jenis	0	1 jenis	0	-	-	-	-	1 jenis	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie				
		1.1.1.02.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada		14.139.573	N/A		42.166.778		24.176		0		-		-		24.176		0,06%		24.176		0,17%					
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90%		103,33%	90%		-		-		-		-		-		103,33%		114,81%		-					
		1.1.1.02.16.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran			3 jenis	38.637.469	2 jenis	0	2 jenis	0	-	-	-	-	2 jenis	0	66,67%	0,00%	66,67%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada				
		1.1.1.02.16.0002	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial			1 jenis	3.529.309	0 jenis	24.176	0 jenis	0	-	-	-	-	0 jenis	24.176	0,00%	0,69%	0,00%	0,69%			RSUD Bhakti Dharma Husada				
		1.1.1.02.17	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		90.084.344	61.798.419		90.050.677		15.451.005		202.358.540		-		-		35.686.859		39,63%		35.686.859		39,61%					
				Persentase puskesmas yang terakreditasi	85,71%	N/A		85,71%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-					
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie		107,27%		-		-		-		-		-						107,27%							
				Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada		105,37%		-		-		-		-		-						105,37%							
				Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin		115,45%		-		-		-		-		-						115,45%							
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin		114,56%		-		-		-		-		-						114,56%							
		1.1.1.02.17.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi			40 lembaga	1.067.297	0 lembaga	570	0 lembaga	0	-	-	-	-	0 lembaga	570	0,00%	0,05%	0,00%	0,05%			Dinas Kesehatan				
		1.1.1.02.17.0002	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer			64 lembaga	86.520.944	64 lembaga	15.135.081	63 lembaga	19.812.981	-	-	-	-	64 lembaga	34.948.062	100,00%	40,39%	100,00%	40,39%			Dinas Kesehatan				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.02.17.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi			134 lembaga	437.404	32 lembaga	85.040	0 lembaga	70.806	-	-	-	-	32 lembaga	155.846	23,88%	35,63%	23,88%	35,63%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.17.0004	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatderuratan yang dilayani			900 lokasi	1.388.741	114 lokasi	170.552	265 lokasi	267.444	-	-	-	-	379 lokasi	437.996	42,11%	31,54%	42,11%	31,54%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.17.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional			64 lembaga	636.291	18 lembaga	59.762	0 lembaga	84.624	-	-	-	-	18 lembaga	144.386	28,13%	22,69%	28,13%	22,69%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.18	Program Sumber Daya Kesehatan			35.582.411		N/A		39.775.593		1.196.301		2.923.350		-		1.488.636		3,74%		1.488.636		4,18%			
				Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar	98,84%		N/A	98,84%		-	-		-		-	-	-			N/A		N/A		-			
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	98,17%		98,52 %	98,17%		-	-		-		-	-	-			98,52 %		100,36 %		-			
		1.1.1.02.18.0001	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan			5 dokumen	259.235	2 dokumen	20.633	0 dokume n	28.872	-	-	-	-	2 dokumen	49.505	40,00%	19,10%	40,00%	19,10%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.18.0002	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan			27 kali	13.035.003	9 kali	883.143	0 kali	82.697	-	-	-	-	9 kali	965.840	33,33%	7,41%	33,33%	7,41%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.18.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan			46 jenis	21.285.760	4 jenis	292.525	2 jenis	180.766	-	-	-	-	6 jenis	473.291	13,04%	2,22%	13,04%	2,22%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.18.0004	Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan			4 item	3.602.763	0 item	0	0 item	0	-	-	-	-	0 item	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.18.0005	Penyediaan/Perin gkatan/Pemelihara an Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan			1 Jenis	689.853	0 Jenis	0	0 Jenis	0	-	-	-	-	0 Jenis	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.18.0006	Pengadaan bahan habis pakai penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)	Jumlah bahan habis pakai penanggulangan TBC			3 item	297.361	0 Item	0	0 Item	0	-	-	-	-	0 Item	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.02.18.0007	Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan			3 item	605.619	0 item	0	0 item	0	-	-	-	-	0 item	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Kesehatan		
		1.1.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																								
7	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.1.03.01	Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur			1.375.505		N/A		1.255.241		180.233		2.475.150		-		-	427.748		34,08%		427.748		31,10%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100									
				Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-
		1.1.1.03.01.0001	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang Infrastruktur			180 rekomendasi	1.255.241	45 rekomendasi	180.233	50 rekomen-dasi	247.515	-	-	-	-	95 rekomendasi	427.748	52,78%	34,08%	52,78%	34,08%				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman	
8	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	1.1.1.03.02	Program Penataan Ruang			18.468.950	N/A		16.106.963	0		0		-	-	-		0		0,00%		0		0,00%			
				Indeks Pelayanan Tata Ruang	94%		N/A		94%		-		-		-	-		-		-		N/A		N/A		-	
		1.1.1.03.02.0001	Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota			2 dokumen	2.315.564	0 dokumen	0	0 dokume-n	0	-	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1.03.02.0002	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan			12250 Persil	10.015.790	3392 Persil	0	2937 Persil	0	-	-	-	-	6329 Persil	0	51,67%	0,00%	51,67%	0,00%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1.03.02.0003	Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat			2 dokumen	2.781.481	0 dokumen	0	0 dokume-n	0	-	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.1.1.03.02.0004	Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun			9 Dokumen	994.128	0 Dokumen	0	0 Dokume-n	0	-	-	-	-	0 Dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
9	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan			348.082.962		482.772.508		391.718.457		7.832.243		205.294.760		-		28.361.720		7,24%		28.361.720		8,15%			
				Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	12,90%		13,91 %		12,90%		-		-		-		-		-		13,91 %		107,86 %		-		
				Persentase jaringan jalan yang terbangun	0,68%		N/A		0,68%		-		-		-		-		-		N/A		73,90 %		-		
				Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	28,64%		25,16 %		28,64%		-		-		-		-		-		25,16 %		87,84 %		-		
				Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu			125%		-		-		-		-		-		-				125,00%		-		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16							
				Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)		134,82%	-		-		-		-		-							134,82%					
				Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)		109,81%	-		-		-		-		-							109,81%					
				Persentase jalan yang terbangun (%)		104,69%	-		-		-		-		-							104,69%					
	1.1.1.03.03.000.1	1	1	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum		2 dokumen	356.094	0 dokumen	0	0 dokume n	17.936	-	-	-	-	0 dokumen	17.936	0,00%	5,04%	0,00%	5,04%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
	1.1.1.03.03.000.2	2	2	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak		220 unit	18.984.477	36 unit	3.189.035	58 unit	4.200.664	-	-	-	-	94 unit	7.389.699	42,73%	38,92%	42,73%	38,92%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
	1.1.1.03.03.000.3	3	3	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)		1 lokasi	10.838.357	0 lokasi	0	0 lokasi	0	-	-	-	-	0 lokasi	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
	1.1.1.03.03.000.4	4	4	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun		24 lokasi	285.062.618	0 lokasi	348.198	4 lokasi	1.501.458	-	-	-	-	4 lokasi	1.849.656	16,67%	0,65%	16,67%	0,65%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
	1.1.1.03.03.000.5	5	5	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah lokasi Jembatan yang dibangun		1 lokasi	31.312.000	0 lokasi	0	0 lokasi	5.734.358	-	-	-	-	0 lokasi	5.734.358	0,00%	18,31%	0,00%	18,31%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
	1.1.1.03.03.000.6	6	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi		1222 lokasi	45.164.911	889 lokasi	4.295.010	1025 lokasi	9.075.060	-	-	-	-	1727 lokasi	13.370.071	141,33%	29,60%	141,33%	29,60%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
10	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJKU hemat energi	1.1.1.03.04	1	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJKU Hemat Energi		270.349.994	N/A		276.917.279		49.587.129		602.885.300		-		-	109.875.659		39,68%		109.875.659		40,64%			
				Persentase titik pemasangan PJKU hemat energi	83,39%		187,06 %		83,39%		-		-		-		-				187,06 %		224,32 %		-		
	1.1.1.03.04.000.1	1	1	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJKU hemat energi yang terpasang		4600 titik	138.356.657	0 titik	20.397.020	87 titik	30.679.884	-	-	-	-	87 titik	51.076.904	1,89%	36,92%	1,89%	36,92%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
	1.1.1.03.04.000.2	2	2	Pembayaran Rekening listrik PJKU yang dibayarkan	Jumlah rekening listrik PJKU yang dibayarkan		6674 rekening	120.219.604	6979.33333333 rekening	27.723.037	7013 rekening	28.293.014	-	-	-	-	6996.166666667 rekening	56.016.052	104,83%	46,59%	104,83%	46,59%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
	1.1.1.03.04.000.3	3	3	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJKU yang dipelihara		73680 titik	18.341.019	85847 titik	1.467.072	85847 titik	1.315.632	-	-	-	-	85847 titik	2.782.704	116,51%	15,17%	116,51%	15,17%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
11	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	1.1.1.03.05	1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota		484.024.179	N/A		493.843.675		69.655.694		1.075.716.330		-		-	177.227.327		35,89%		177.227.327		36,62%			
				Lama genangan	22,3 menit		22,01 menit		22,3 menit		-		-		-		-				22,01 menit		98,71 %		-		
				Luas genangan	600 hektar		688,96 hektar		600 hektar		-		-		-		-				688,96 hektar		114,83 %		-		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)(Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Tinggi genangan	12.3 cm		9.20 cm		12.3 cm			-	-	-	-	-	-	56 unit	9.027.662	100,00%	28,87%	100,00%	28,87%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
		1.1.1.03.05.000.1	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak					56 unit	31.274.990	5 unit	2.204.855	51 unit	6.822.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.05.000.2	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan					25 lokasi	224.162.522	0 lokasi	3.811.358	0 lokasi	23.171.042	-	-	-	-	0 lokasi	26.982.400	0,00%	12,04%	0,00%	12,04%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.05.000.3	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah Lokasi Prasarana Pematusan beserta sarana kelengkapannya yang dibangun dan disediakan					2 lokasi	122.980.781	0 lokasi	48.719.170	0 lokasi	38.457.818	-	-	-	-	0 lokasi	87.176.988	0,00%	70,89%	0,00%	70,89%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		1.1.1.03.05.000.4	Pemeliharaan/Reh abilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Re habilitasi Saluran Drainase dan Boezem					1025 lokasi	115.425.382	196 lokasi	14.920.311	195 lokasi	39.119.966	-	-	-	-	360 lokasi	54.040.277	35,12%	46,82%	35,12%	46,82%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
12	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	1.1.1.03.06	Program Pengendalian Bidang Bangunan			3.764.447		N/A		3.670.083		661.481		9.706.590		-	-	-		1.632.141		44,47%		1.632.141		43,36%	
				Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	58,81%		57,57 %		58,81%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,57 %		97,89 %		-		
				Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%		100,00 %		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %		100,00 %		-		
		1.1.1.03.06.000.1	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan					6517 data	1.258.955	2204 data	227.922	1414 data	289.474	-	-	-	-	3618 data	517.395	55,52%	41,10%	55,52%	41,10%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.06.000.2	Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan					240 lokasi	1.945.678	90 lokasi	297.660	81 lokasi	544.113	-	-	-	-	168 lokasi	841.773	70,00%	43,26%	70,00%	43,26%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.03.06.000.3	Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun					4 dokumen	465.450	0 dokumen	135.900	0 dokume n	137.072	-	-	-	-	0 dokumen	272.972	0,00%	58,65%	0,00%	58,65%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
13	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	1.1.1.03.07	Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan			19.250.740		N/A		19.209.826		791.446		8.962.310		-	-	-		1.687.677		8,79%		1.687.677		8,77%	
				Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100%		100,00 %		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %		100,00 %		-		
		1.1.1.03.07.000.1	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Re hab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Re hab Jalan Dan Jembatan					12 dokumen	11.271.864	0 dokumen	78.592	0 dokume n	164.262	-	-	-	-	0 dokumen	242.855	0,00%	2,15%	0,00%	2,15%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		1.1.1.03.07.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan (Tahun Jamak/Multiyears 2019 - 2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan yang disusun			1 dokumen	1.711.292	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan				
		1.1.1.03.07.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun			35 dokumen	6.226.670	10 dokumen	712.853	7 dokumen	731.969	-	-	-	-	17 dokumen	1.444.822	48,57%	23,20%	48,57%	23,20%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan				
14	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	1.1.1.03.08	Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan			24.212.720		N/A		20.038.369		541.699		28.401.900		-		3.381.889		16,88%		3.381.889		13,97%					
				Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang legal	100%		N/A		100%		-	-	-	-	-	-	-		-		N/A		N/A		-				
		1.1.1.03.08.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Drainase/Gorong-gorong			20 dokumen	8.758.192	0 dokumen	75.691	1 dokumen	255.740	-	-	-	-	1 dokumen	331.431	5,00%	3,78%	5,00%	3,78%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan				
		1.1.1.03.08.0002	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan (Tahun Jamak/Multiyears 2019-2020)	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Drainase/Gorong-gorong			2 dokumen	4.386.659	0 dokumen	0	0 dokumen	1.096.665	-	-	-	-	0 dokumen	1.096.665	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan				
		1.1.1.03.08.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun			50 dokumen	6.893.518	8 dokumen	466.008	19 dokumen	1.487.785	-	-	-	-	27 dokumen	1.953.793	54,00%	28,34%	54,00%	28,34%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan				
15	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	1.1.1.03.09	Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas			1.625.094		N/A		1.496.664		139.971		2.761.220		-		416.093		27,80%		416.093		25,60%					
				Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%		100,00 %		100%		-	-	-	-	-	-	-		-		100,00 %		100,00 %		-				
		1.1.1.03.09.0001	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan			10 izin	1.496.664	0 izin	139.971	18 izin	276.122	-	-	-	-	18 izin	416.093	180,00%	27,80%	180,00%	27,80%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan				
		1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman																										
16	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.1.04.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan			5.012.375		N/A		4.249.487		725.407		10.660.270		-		1.791.434		42,16%		1.791.434		35,74%					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16												
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	70%		N/A		70%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		1.1.1.04.01.0001	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses					6517 berkas	4.054.807	1982 berkas	725.407	1656 berkas	1.036.955	-	-	-	-	3638 berkas	1.762.362	55,82%	43,46%	55,82%	43,46%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.01.0002	Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses					50 berkas	194.680	15 berkas	0	23 berkas	29.072	-	-	-	-	38 berkas	29.072	76,00%	14,93%	76,00%	14,93%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.02	Program Pelayanan Perizinan Konstruksi			393.761		N/A		340.016		36.734		686.580		-	-	-		105.392		31,00%		105.392		26,77%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	90%		N/A		90%		-		-		-	-	-	-			N/A		N/A		-		
		1.1.1.04.02.0001	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUKJ)	Jumlah jjin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan					700 berkas	340.016	231 berkas	36.734	149 berkas	68.658	-	-	-	-	376 berkas	105.392	53,71%	31,00%	53,71%	31,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
17	Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.04.03	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung			138.753.763		N/A		262.958.522		21.610.231		332.038.670		-		-	54.814.097		20,85%		54.814.097		39,50%		
				Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	90,59%		N/A		90,59%		-		-		-	-	-	-			N/A		N/A		-		
		1.1.1.04.03.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Tahun Jamak / Multiyears)	Jumlah gedung pemerintah dan pemerintah daerah (tahun jamak/multiyears) yang dibangun/direhab					1 bangunan	63.168.460	0 bangunan	11.305.943	0 bangunan	5.940.411	-	-	-	-	0 bangunan	17.246.354	0,00%	27,30%	0,00%	27,30%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.03.0002	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi					45 Bangunan	167.942.361	7 Bangunan	2.536.388	39 Bangunan	22.099.813	-	-	-	-	46 Bangunan	24.636.201	102,22%	14,67%	102,22%	14,67%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.04.03.0003	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara					300 bangunan	29.339.117	100 bangunan	7.728.442	105 bangunan	4.331.758	-	-	-	-	205 bangunan	12.060.200	68,33%	41,11%	68,33%	41,11%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah			39 Dokumen	2.508.585	1 Dokumen	39.457	15 Dokumen	831.885	-	-	-	-	16 Dokumen	871.342	41,03%	34,73%	41,03%	34,73%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
18	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	1.1.1.04.04	Program Pengelolaan Rusunawa			30.170.492		N/A		27.662.557		3.788.882		46.001.680		-	-		8.389.050		30,33%		8.389.050		27,81%		
				Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		1.1.1.04.04.0001	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola			3981 lokasi	7.730.570	3977 lokasi	329.589	3977 lokasi	365.652	-	-	-	-	3977 lokasi	695.241	99,90%	8,99%	99,90%	8,99%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.1.04.04.0002	Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola			105 blok	19.931.987	101 blok	3.459.293	101 blok	4.234.517	-	-	-	-	101 blok	7.693.810	96,19%	38,60%	96,19%	38,60%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
19	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	1.1.1.04.05	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			186.904.456		N/A		183.305.446		7.902.185		249.166.210		-	-		32.818.806		17,90%		32.818.806		17,56%		
				Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	67,65%		95,16 %		67,65%		-		-		-		-		-		95,16 %		140,66 %		-		
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	47%		37,63 %		47%		-		-		-		-		-		37,63 %		80,06 %		-		
		1.1.1.04.05.0001	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan			39 lokasi	59.900.108	0 lokasi	449.022	13 lokasi	9.335.952	-	-	-	-	13 lokasi	9.784.974	33,33%	16,34%	33,33%	16,34%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.05.0002	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun			2 Lokasi	683.463	0 Lokasi	10.963	0 Lokasi	5.000	-	-	-	-	0 Lokasi	15.963	0,00%	2,34%	0,00%	2,34%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.05.0003	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun			7 bangunan	92.140.598	0 bangunan	4.225.982	1 bangunan	9.037.743	-	-	-	-	1 bangunan	13.263.724	14,29%	14,40%	14,29%	14,40%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.05.0004	Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi			200 Lokasi	21.392.833	60 Lokasi	2.710.789	66 Lokasi	5.167.775	-	-	-	-	126 Lokasi	7.878.564	63,00%	36,83%	63,00%	36,83%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		1.1.1.04.05.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman			99 dokumen	6.989.107	5 dokumen	436.529	17 dokumen	1.180.746	-	-	-	-	22 dokumen	1.617.275	22,22%	23,14%	22,22%	23,14%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		1.1.1.04.05.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah dokumen Perencanaan Perumahan yang disusun					15 dokumen	2.199.338	0 dokumen	68.900	1 dokumen	189.406	-	-	-	-	1 dokumen	258.306	6,67%	11,74%	6,67%	11,74%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.1.1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																								
20	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	1.1.1.05.01	Program Kesatuan Bangsa			1.967.613		N/A		3.476.459		0		515.920		-		-		51.592		1,48%		51.592		2,62%	
				Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	70%		N/A		70%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-
		1.1.1.05.01.0001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan					1250 orang	1.460.382	0 orang	0	0 orang	19.092	-	-	-	-	0 orang	19.092	0,00%	1,31%	0,00%	1,31%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.01.0002	Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan					31 lembaga	359.389	0 lembaga	0	0 lembaga	32.500	-	-	-	-	0 lembaga	32.500	0,00%	9,04%	0,00%	9,04%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.01.0003	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama					72 kali	1.656.689	16 kali	0	0 kali	0	-	-	-	-	16 kali	0	22,22%	0,00%	22,22%	0,00%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.02	Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum			3.621.829		N/A		4.022.612		339.720		14.983.520		-		-		1.838.072		45,69%		1.838.072		50,75%	
				Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-
		1.1.1.05.02.0001	Kerjasama pengendalian keamanan kota	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota					194 kali	3.057.105	59 kali	264.385	22 kali	1.401.439	-	-	-	-	81 kali	1.665.824	41,75%	54,49%	41,75%	54,49%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.02.0002	Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota					67 kali	965.507	9 kali	75.334	2 kali	96.913	-	-	-	-	11 kali	172.248	16,42%	17,84%	16,42%	17,84%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
21	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana Alam			5.047.197		N/A		4.581.968		695.616		8.555.600		-		-		1.551.175		33,85%		1.551.175		30,73%	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Persentase pengurangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100%		100,00 %		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	5 jenis	79.805	62,50%	21,01%	62,50%	21,01%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0001	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan			8 jenis	379.788	1 jenis	17.208	4 jenis	62.596	-	-	-	-	-	-	5 jenis	79.805	62,50%	21,01%	62,50%	21,01%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0002	Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana	Jenis kejadian yang manajemen tanggap bencananya dikembangkan			10 Jenis	2.855.760	25 Jenis	454.929	18 Jenis	650.534	-	-	-	-	-	-	43 Jenis	1.105.463	430,00%	38,71%	430,00%	38,71%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana			100%	1.346.421	100%	223.478	100%	142.429	-	-	-	-	-	100%	365.908	100,00%	27,18%	100,00%	27,18%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
		1.1.1.05.04	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran			42.764.462		N/A		40.788.271		6.411.760		97.763.330		-	-	-		16.188.094		39,69%		16.188.094		37,85%	
				Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	51		45,89 kejadian		51		-	-	-	-	-	-	-	-				45,89 kejadian		89,99 %		-	
				Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100%		100,00 %		100%		-	-	-	-	-	-	-	-				100,00 %		100,00 %		-	
		1.1.1.05.04.0001	Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya			756 orang	36.817.072	756 orang	6.104.875	756 orang	9.511.796	-	-	-	-	-	-	756 orang	15.616.671	100,00%	42,42%	100,00%	42,42%			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.04.0002	Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan			180 kali	1.698.335	107 kali	187.627	0 kali	128.848	-	-	-	-	-	-	107 kali	316.475	59,44%	18,63%	59,44%	18,63%			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.04.0003	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat			60 kali	2.272.864	7 kali	119.259	0 kali	135.689	-	-	-	-	-	-	7 kali	254.948	11,67%	11,22%	11,67%	11,22%			Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1.1.05.05	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam			2.427.256		N/A		2.147.906		182.077		1.784.970		-	-	-		360.574		16,79%		360.574		14,86%	
				Persentase kelurahan tangguh bencana	88%		100,00 %		88%		-	-	-	-	-	-	-	-	-				100,00 %		113,64 %		-
		1.1.1.05.05.0001	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana			1650 orang	1.608.090	232 orang	170.387	0 orang	165.153	-	-	-	-	-	-	232 orang	335.540	14,06%	20,87%	14,06%	20,87%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
		1.1.1.05.05.0002	Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana			500 orang	539.815	40 orang	11.691	0 orang	13.344	-	-	-	-	-	-	40 orang	25.035	8,00%	4,64%	8,00%	4,64%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
22	Meningkatkan ketertiban umum	1.1.1.05.06	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi			1.770.441		N/A		1.746.891		311.401		2.697.870		-	-	-		581.188		33,27%		581.188		32,83%	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16									
				Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-				
	1.1.1.05.06.0001		Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi			480 kali	1.746.891	114 kali	311.401	51 kali	269.787	-	-	-	-	165 kali	581.188	34,38%	33,27%	34,38%	33,27%			Satuan Polisi Pamong Praja				
	1.1.1.05.07		Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah		1.585.927		N/A		3.190.406		385.666		6.160.100		-		-		1.001.676		31,40%		1.001.676		63,16%				
				Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-				100,00 %		100,00 %		-				
	1.1.1.05.07.0001		Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah			192 Kali	2.076.476	48 Kali	247.223	44 Kali	420.934	-	-	-	-	92 Kali	668.157	47,92%	32,18%	47,92%	32,18%			Satuan Polisi Pamong Praja				
	1.1.1.05.07.0002		Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah penindakan pelanggaran Perda			84 Kali	1.113.930	31 Kali	138.442	2 Kali	195.076	-	-	-	-	33 Kali	333.518	39,29%	29,94%	39,29%	29,94%			Satuan Polisi Pamong Praja				
	1.1.1.05.08		Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial			35.951.348		N/A		33.728.812		5.798.605		89.924.950		-		-		14.791.101		43,85%		14.791.101		41,14%			
				Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-				100,00 %		100,00 %		-				
	1.1.1.05.08.0001		Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentrman masyarakat			1368 kali	28.860.394	527 kali	5.235.343	185 kali	8.126.818	-	-	-	-	712 kali	13.362.161	52,05%	46,30%	52,05%	46,30%			Satuan Polisi Pamong Praja				
	1.1.1.05.08.0002		Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial			1368 Kali	4.868.418	541 Kali	563.263	253 Kali	865.677	-	-	-	-	794 Kali	1.428.940	58,04%	29,35%	58,04%	29,35%			Satuan Polisi Pamong Praja				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e)(Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.05.09	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja			1.424.940	N/A		1.976.804		310.787		1.907.480		-		-		501.535		25,37%		501.535		35,20%		
				Persentase aparat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-	
		1.1.1.05.09.0001	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP				96 kali	505.127	240 kali	14.442	0 kali	75.580	-	-	-	-	240 kali	90.022	250,00%	17,82%	250,00%	17,82%			Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.1.1.05.09.0002	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa				132 Kali	1.471.678	32 Kali	296.344	0 Kali	115.168	-	-	-	-	32 Kali	411.512	24,24%	27,96%	24,24%	27,96%			Satuan Polisi Pamong Praja	
23	Meningkatkan perlindungan masyarakat	1.1.1.05.10	Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat			40.698.109	N/A		38.691.589		6.950.760		99.521.500		-		-		16.902.909		43,69%		16.902.909		41,53%		
				Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	76,85%		N/A		76,85%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-	
		1.1.1.05.10.0001	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat				100 orang	334.182	0 orang	0	0 orang	21.816	-	-	-	-	0 orang	21.816	0,00%	6,53%	0,00%	6,53%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
		1.1.1.05.10.0002	Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat				81 kali	1.083.232	12 kali	51.598	0 kali	21.816	-	-	-	-	12 kali	73.414	14,81%	6,78%	14,81%	6,78%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
		1.1.1.05.10.0003	Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat				793 orang	37.274.175	1089 orang	6.899.161	800 orang	9.908.518	-	-	-	-	1153 orang	16.807.679	145,40%	45,09%	145,40%	45,09%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
24	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	1.1.1.05.11	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran			21.604.153	N/A		16.540.069		3.447.741		21.494.860		-		-		5.597.227		33,84%		5.597.227		25,91%		
				Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	80%		N/A		80%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-	
		1.1.1.05.11.0001	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara				210 unit	5.640.844	115 unit	1.846.095	82 unit	1.230.291	-	-	-	-	197 unit	3.076.386	93,81%	54,54%	93,81%	54,54%			Dinas Pemadam Kebakaran	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.05.11.0002	Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan			264 bangunan	1.035.399	66 bangunan	98.111	50 bangunan	106.097	-	-	-	-	116 bangunan	204.208	43,94%	19,72%	43,94%	19,72%			Dinas Pemadam Kebakaran		
		1.1.1.05.11.0003	Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun			947 unit	9.863.825	219 unit	1.503.535	87 unit	813.098	-	-	-	-	306 unit	2.316.633	32,31%	23,49%	32,31%	23,49%			Dinas Pemadam Kebakaran		
		1.1.1.06	Sosial																								
25	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	1.1.1.06.01	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah			5.356.954	N/A		4.838.316		645.813		8.024.940		-	-	-		1.448.308		29,93%		1.448.308		27,04%		
				Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100%		N/A	100%		-	-	-	-	-	-	-	-		-		N/A	N/A		N/A	-		
				Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50%		N/A	50%		-	-	-	-	-	-	-	-		-		N/A	N/A		-			
		1.1.1.06.01.0001	Fasilitasi Pemakaman	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Pemakaman			960 Orang	932.429	0 Orang	0	0 Orang	14.508	-	-	-	-	0 Orang	14.508	0,00%	1,56%	0,00%	1,56%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.01.0002	Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan			24 Kali	1.245.855	5 Kali	195.775	5 Kali	133.159	-	-	-	-	10 Kali	328.934	41,67%	26,40%	41,67%	26,40%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.01.0003	Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan			4416 Kali	2.660.031	1627 Kali	450.039	1187 Kali	654.827	-	-	-	-	2814 Kali	1.104.866	63,72%	41,54%	63,72%	41,54%			Dinas Sosial		
26	Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	1.1.1.06.02	Program Partisipasi Keagamaan			15.161.323	N/A		15.479.710		2.915.927		29.345.490		-	-	-		5.850.477		37,79%		5.850.477		38,59%		
				Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100%		N/A	100%		-	-	-	-	-	-	-	-		-		N/A	N/A		-			
		1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan			102 kali	15.479.710	20 kali	2.915.927	6 kali	2.934.549	-	-	-	-	26 kali	5.850.477	25,49%	37,79%	25,49%	37,79%			Dinas Sosial		
27	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	1.1.1.06.03	Program Partisipasi Kepahlawanan			8.360.730	N/A		7.888.825		1.585.163		4.129.870		-	-	-		1.998.150		25,33%		1.998.150		23,90%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16			
				Persentase lembaga/organisasi/kelompok kepelawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan kepelawanan	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-			
		1.1.1.06.03.0001	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepelawanan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepelawanan				62 kali	6.315.369	12 kali	1.312.336	0 kali	79.597	-	-	-	-	12 kali	1.391.933	19,35%	22,04%	19,35%	22,04%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.03.0002	Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara				7 lokasi	1.573.456	7 lokasi	272.827	7 lokasi	333.390	-	-	-	-	7 lokasi	606.217	100,00%	38,53%	100,00%	38,53%			Dinas Sosial			
28	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	1.1.1.06.04	Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial			194.790.086	N/A		34.995.437		5.551.494		67.965.010		-		-		12.347.996		35,28%		12.347.996		6,34%				
				Persentase pemulangan PMKS	30%		N/A		30%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-			
				Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-			
		1.1.1.06.04.0001	Pembinaan dan Pemulangan PMKS yang Mendapat Pelayanan	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan				1420 orang	2.525.743	157 orang	251.007	57 orang	314.124	-	-	-	-	214 orang	565.131	15,07%	22,37%	15,07%	22,37%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.04.0002	Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi anak	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi				12 Kali	988.989	5039 Kali	165.561	5010 Kali	179.409	-	-	-	-	5194 Kali	344.970	#####	34,88%	#####	34,88%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.04.0003	Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi lanjut usia	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi				12 Kali	1.100.276	18095 Kali	187.008	18297 Kali	171.168	-	-	-	-	18399 Kali	358.176	#####	32,55%	#####	32,55%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.04.0004	Pemenuhan kebutuhan dasar pemakanan bagi penyandang disabilitas dan penvakit tertentu	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi				12 Kali	1.127.246	6314 Kali	197.543	6336 Kali	169.640	-	-	-	-	6359 Kali	367.183	#####	32,57%	#####	32,57%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.04.0005	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat				93 orang	1.403.314	91 orang	205.008	91 orang	339.711	-	-	-	-	91 orang	544.719	97,85%	38,82%	97,85%	38,82%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.04.0006	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha				150 orang	5.204.924	151 orang	733.171	150 orang	1.085.128	-	-	-	-	157 orang	1.818.299	104,67%	34,93%	104,67%	34,93%			Dinas Sosial			
		1.1.1.06.04.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri				45 orang	2.342.286	34 orang	396.953	34 orang	577.557	-	-	-	-	34 orang	974.511	75,56%	41,61%	75,56%	41,61%			Dinas Sosial			

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.1.06.04.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih			1100 orang	17.299.544	1081 orang	2.843.665	1111 orang	3.458.217	-	-	-	-	1125 orang	6.301.882	102,27%	36,43%	102,27%	36,43%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.04.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan			65 orang	2.332.116	53 orang	497.486	53 orang	488.240	-	-	-	-	53 orang	985.726	81,54%	42,27%	81,54%	42,27%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.04.0010	Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia			34 kali	670.999	7 kali	74.092	0 kali	13.308	-	-	-	-	7 kali	87.400	20,59%	13,03%	20,59%	13,03%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.05	Program Pemberdayaan Kelambagaan Kesejahteraan Sosial		989.815	N/A		875.851		50.505		716.870		-	-	-		122.192		13,95%		122.192		12,34%			
				Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	60%		65,51 %		60%		-	-	-	-	-	-				65,51 %		109,18 %		-			
		1.1.1.06.05.0001	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan			17 lembaga	189.329	0 lembaga	0	0 lembaga	12.300	-	-	-	-	0 lembaga	12.300	0,00%	6,50%	0,00%	6,50%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.05.0002	Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah kegiatan PSKS yang dibina			45 kali	686.521	6 kali	50.505	0 kali	59.387	-	-	-	-	6 kali	109.892	13,33%	16,01%	13,33%	16,01%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.06	Program Pengendalian Layanan Sosial		3.735.560	N/A		2.266.492		318.757		6.204.840		-	-	-		939.241		41,44%		939.241		25,14%			
				Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan	100%	N/A		100%		-	-		-	-	-	-				N/A		N/A		-			
		1.1.1.06.06.0001	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi			4 kali	750.787	1 kali	103.208	1 kali	150.055	-	-	-	-	2 kali	253.263	50,00%	33,73%	50,00%	33,73%			Dinas Sosial		
		1.1.1.06.06.0002	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS			154 Kelurahan	1.515.705	0 Kelurahan	215.549	0 Kelurahan	470.429	-	-	-	-	0 Kelurahan	685.979	0,00%	45,26%	0,00%	45,26%			Dinas Sosial		
29	Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	1.1.1.06.07	Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni		14.471.016	N/A		36.751.191		6.878.765		18.511.910		-	-	-		8.729.956		23,75%		8.729.956		60,33%			
				Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	85%	123,76 %		85%		-	-		-	-	-	-				123,76 %		145,59 %		-			
		1.1.1.06.07.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			1000 Unit	36.751.191	6 Unit	6.878.765	0 Unit	1.851.191	-	-	-	-	6 Unit	8.729.956	0,60%	23,75%	0,60%	23,75%			Dinas Sosial		
		1.1.2	Non Pelayanan Dasar																								
		1.1.2.17	Perpustakaan																								
		1.1.2.18	Kearsifan																								
		1.1.2.01	Tenaga Kerja																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16												
30	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan			153.433		N/A		204.582		16.016		264.000		-		-			42.416		20,73%		42.416		27,64%	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	78%		N/A		78%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-	
		1.1.2.01.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang di proses					1000 berkas	204.582	180 berkas	16.016	150 berkas	26.400	-	-	-	-	330 berkas	42.416	33,00%	20,73%	33,00%	20,73%				Dinas Tenaga Kerja
31	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	1.1.2.01.02	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			2.972.131		2.370.414		2.739.024		353.304		5.319.280		-		-			885.232		32,32%		885.232		29,78%	
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,77%		8,32 %		7,77%		-		-		-		-		-		-		8,32 %		107,03 %		-	
				Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama			114,55%		-		-		-		-		-							114,55%				
		1.1.2.01.02.0001	Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial					300 orang	742.474	60 orang	101.525	0 orang	153.571	-	-	-	-	60 orang	255.095	20,00%	34,36%	20,00%	34,36%				Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)					110 Kasus	395.526	27 Kasus	29.787	27 Kasus	44.249	-	-	-	-	54 Kasus	74.037	49,09%	18,72%	49,09%	18,72%				Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0003	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja					300 lembaga	448.243	79 lembaga	51.129	0 lembaga	79.548	-	-	-	-	79 lembaga	130.677	26,33%	29,15%	26,33%	29,15%				Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.02.0004	Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun					1 dokumen	1.152.780	0 dokumen	170.862	0 dokumen	254.560	-	-	-	-	0 dokumen	425.422	0,00%	36,90%	0,00%	36,90%				Dinas Tenaga Kerja
		1.1.2.01.03	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			3.182.082		3.942.926		3.051.939		856.625		3.849.910		-		-			1.241.616		40,68%		1.241.616		39,02%	
				Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,10%		5,10 %		5,10%		-		-		-		-		-		-		5,10 %		99,93 %		-	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri		104,64%		-		-		-		-										104,64%			
				Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan		101,93%		-		-		-		-										101,93%			
		1.1.2.01.03.0001	Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek			60 lembaga	141.067	0 lembaga	0	0 lembaga	14.772	-	-	-	-	0 lembaga	14.772	0,00%	10,47%	0,00%	10,47%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.03.0003	Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja			1050 orang	282.703	210 orang	41.222	0 orang	14.772	-	-	-	-	210 orang	55.994	20,00%	19,81%	20,00%	19,81%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.03.0004	Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha			50 orang	143.702	0 orang	0	0 orang	18.816	-	-	-	-	0 orang	18.816	0,00%	13,09%	0,00%	13,09%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.03.0005	Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja			500 orang	108.811	200 orang	9.965	0 orang	14.772	-	-	-	-	200 orang	24.737	40,00%	22,78%	40,00%	22,78%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.03.0006	Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja			150 orang	879.220	150 orang	570.902	0 orang	87.171	-	-	-	-	150 orang	658.072	100,00%	74,85%	100,00%	74,85%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.03.0007	Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	Jumlah even job fair yang diselenggarakan			7 kali	1.346.799	2 kali	234.535	0 kali	215.873	-	-	-	-	2 kali	450.408	28,57%	33,44%	28,57%	33,44%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.03.0008	Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri			150 orang	149.837	0 orang	0	0 orang	18.816	-	-	-	-	0 orang	18.816	0,00%	12,56%	0,00%	12,56%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.04	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja			12.034.543		N/A		11.533.473		557.113		6.689.430		-		1.226.056		10,63%		1.226.056		10,19%			
				Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	75%		86,87 %		75%		-		-		-		-		-		86,87 %			115,83 %		-	
				Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	85%		98,16 %		85%		-		-		-		-		-		98,16 %			115,48 %		-	
		1.1.2.01.04.0002	Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang			120 orang	558.256	9 orang	18.454	0 orang	37.572	-	-	-	-	9 orang	56.026	7,50%	10,04%	7,50%	10,04%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.04.0003	Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi			604 orang	2.932.943	0 orang	361.914	0 orang	541.054	-	-	-	-	0 orang	902.967	0,00%	30,79%	0,00%	30,79%				Dinas Tenaga Kerja	
		1.1.2.01.04.0004	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, dan pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja			976 orang	7.810.141	16 orang	176.346	0 orang	63.537	-	-	-	-	16 orang	239.883	1,64%	3,07%	1,64%	3,07%				Dinas Tenaga Kerja	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.01.04.0005	Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun			1 dokumen	232.134	0 dokumen	400	0 dokumen	26.780	-	-	-	-	0 dokumen	27.180	0,00%	11,71%	0,00%	11,71%			Dinas Tenaga Kerja		
32	Meningkatkan realisasi investasi	1.1.2.10.01	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal			1.610.379		N/A		1.382.363		0		0		-		0		0,00%		0		0,00%			
				Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat KPM	40%		N/A		40%		-		-		-		-			-		N/A		N/A			
		1.1.2.10.01.0001	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi			3500 perusahaan	944.393	250 perusahaan	0	250 perusahaan	0	-	-	-	-	500 perusahaan	0	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.10.01.0003	Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola			41751 data	437.970	10803 data	0	10492 data	0	-	-	-	-	21295 data	0	51,00%	0,00%	51,00%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.10.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi			1.334.701		3.237.238		1.255.232		77.206		700.170		-		147.222		11,73%		147.222		11,03%			
				Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	20%		27,89 %		20%		-		-		-		-			-		27,89 %		139,44 %			
				Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi			370,93%		-		-		-		-								370,93%				
				Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi			174,30%		-		-		-		-								174,30%				
		1.1.2.10.02.0001	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal			4 dokumen	637.547	0 dokumen	0	0 dokumen	0	-	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.10.02.0002	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan			3 kali	617.685	0 kali	77.206	0 kali	70.017	-	-	-	-	0 kali	147.222	0,00%	23,83%	0,00%	23,83%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
33	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.10.03	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal			5.886.274		N/A		5.621.298		894.277		12.387.960		-		2.133.073		37,95%		2.133.073		36,24%			
				Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	72%		N/A		72%		-		-		-		-			-		N/A		N/A			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	78%		N/A		78%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-			
		1.1.2.10.03.0004	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan					2 kali	16.386	0 kali	7.876	1 kali	0	-	-	-	-	1 kali	7.876	50,00%	48,07%	50,00%	48,07%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.10.03.0005	Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi					11000 pelaku usaha	826.019	2350 pelaku usaha	92.751	2072 pelaku usaha	108.644	-	-	-	-	4422 pelaku usaha	201.395	40,20%	24,38%	40,20%	24,38%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.10.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu yang dihasilkan	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan					60000 berkas	4.743.892	27859 berkas	775.979	15524 berkas	1.130.153	-	-	-	-	43383 berkas	1.906.132	72,31%	40,18%	72,31%	40,18%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.10.03.0007	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau					2 kali	11.704	1 kali	6.222	0 kali	0	-	-	-	-	1 kali	6.222	50,00%	53,16%	50,00%	53,16%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		1.1.2.10.03.0008	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan					4 kali	23.297	2 kali	11.449	1 kali	0	-	-	-	-	3 kali	11.449	75,00%	49,14%	75,00%	49,14%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
34	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1.1.2.11.01	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			80.323.733	N/A			73.174.694		4.013.712		41.365.500		-		-		8.150.262		11,14%		8.150.262		10,15%			
				Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	142 kelurahan		137,00 kelurahan		142 kelurahan		-		-		-		-		-		137,00 kelurahan		96,48 %			-			
		1.1.2.11.01.0001	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi					11 unit	9.409.375	11 unit	1.402.110	12 unit	1.962.447	-	-	-	-	12 unit	3.364.557	109,09%	35,76%	109,09%	35,76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.01.0002	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan					57 unit	52.966.192	9 unit	2.214.474	7 unit	1.531.292	-	-	-	-	16 unit	3.745.766	28,07%	7,07%	28,07%	7,07%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.01.0003	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan					6 jenis	580.826	0 jenis	0	0 jenis	16.012	-	-	-	-	0 jenis	16.012	0,00%	2,76%	0,00%	2,76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.11.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun			58 dokumen	2.726.506	6 dokumen	148.126	46 dokumen	550.492	-	-	-	-	52 dokumen	698.618	89,66%	25,62%	89,66%	25,62%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.01.0005	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki			133 unit	7.491.794	27 unit	249.002	20 unit	76.308	-	-	-	-	47 unit	325.309	35,34%	4,34%	35,34%	4,34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.02	Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga			15.294.904		13.851.895		665.352		2.147.640		-		-		880.116		6,35%		880.116		5,75%			
				Akumulasi prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1660 medali	N/A	1660 medali		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi			41 kali	8.132.358	1 kali	193.521	0 kali	17.280	-	-	-	-	1 kali	210.801	2,44%	2,59%	2,44%	2,59%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.02.0002	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional			14 kali	1.050.455	1 kali	115.784	0 kali	52.472	-	-	-	-	1 kali	168.256	7,14%	16,02%	7,14%	16,02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.02.0003	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak			26 kali	1.302.018	4 kali	246.674	0 kali	81.460	-	-	-	-	4 kali	328.134	15,38%	25,20%	15,38%	25,20%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.02.0004	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan			10 kali	2.148.750	1 kali	109.374	0 kali	46.080	-	-	-	-	1 kali	155.454	10,00%	7,23%	10,00%	7,23%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan			29 kali	1.218.314	0 kali	0	0 kali	17.472	-	-	-	-	0 kali	17.472	0,00%	1,43%	0,00%	1,43%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
35	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	1.1.2.11.03	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			3.629.885		3.558.822	488.820	592.240		-		-		-	548.044		15,40%		548.044		15,10%				
				Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	15%	N/A	15%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		1.1.2.11.03.0001	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja			4565 peserta	1.389.814	770 peserta	164.190	0 peserta	15.212	-	-	-	-	770 peserta	179.402	16,87%	12,91%	16,87%	12,91%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcom e/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		1.1.2.11.03.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan					30 kali	2.169.008	7 kali	324.630	0 kali	44.012	-	-	-	-	7 kali	368.642	23,33%	17,00%	23,33%	17,00%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.04	Program Peningkatan Prestasi Pemuda			2.422.961		N/A		2.312.510		254.594		301.280		-	-	-		284.722		12,31%		284.722		11,75%			
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	10%		7,40 %		10%		-		-		-		-	-	-		-		7,40 %		73,98 %		-		
				Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%		15,70 %		15%		-		-		-		-	-	-		-		15,70 %		104,64 %		-		
		1.1.2.11.04.0001	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Seni musik modern di rumah kreatif					670 orang	1.026.934	14 orang	46.780	0 orang	15.064	-	-	-	-	14 orang	61.844	2,09%	6,02%	2,09%	6,02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.04.0002	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan					1050 Orang	1.285.576	250 Orang	207.814	0 Orang	15.064	-	-	-	-	250 Orang	222.878	23,81%	17,34%	23,81%	17,34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
36	Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	1.1.2.12.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal			5.964.878		N/A		7.079.555		423.980		900.110		-	-	-		513.990		7,26%		513.990		8,62%			
				Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	95%		223,53 %		95%		-		-		-		-	-	-		-		223,53 %		235,29 %		-		
				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	58,50%		80,12 %		58,50%		-		-		-		-	-	-		-		80,12 %		136,96 %		-		
		1.1.2.12.01.0001	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan even budaya daerah					512 kali	6.449.282	101 kali	393.590	0 kali	18.760	-	-	-	-	101 kali	412.350	19,73%	6,39%	19,73%	6,39%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		1.1.2.12.01.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal					3 kali	395.937	0 kali	297	0 kali	15.320	-	-	-	-	0 kali	15.617	0,00%	3,94%	0,00%	3,94%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		1.1.2.12.01.0003	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring					14 lokasi	234.336	4 lokasi	30.093	0 lokasi	55.931	-	-	-	-	4 lokasi	86.023	28,57%	36,71%	28,57%	36,71%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		1.1.2.12.02	Program Perlindungan Budaya Lokal			2.147.635		N/A		2.025.225		250.704		2.806.840		-	-	-		531.387		26,24%		531.387		24,74%			
				Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,60%		91,70 %		91,60%		-		-		-		-	-	-		-		91,70 %		100,11 %		-		
		1.1.2.12.02.0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian					250 lokasi	1.349.023	62 lokasi	248.904	75 lokasi	254.892	-	-	-	-	137 lokasi	503.795	54,80%	37,35%	54,80%	37,35%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.1.2.12.02.0002	Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah			9 kali	676.202	0 kali	1.800	0 kali	25.792	-	-	-	-	0 kali	27.592	0,00%	4,08%	0,00%	4,08%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
37	Meningkatkan minat baca masyarakat	1.1.2.13.01	Program Pembinaan Layanan Baca		910.018	N/A		841.610		104.844		1.669.160		-		-		271.760		32,29%		271.760		29,86%			
				Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	46,60%		23,61 %	46,60%		-	-		-		-						23,61 %		50,66 %		-		
		1.1.2.13.01.0001	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan			500 lembaga	841.610	385 lembaga	104.844	369 lembaga	166.916	-	-	-	-	570 lembaga	271.760	114,00%	32,29%	114,00%	32,29%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.13.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan		23.355.657	N/A		24.033.383		0		0		-		-		0		0,00%		0		0,00%			
				Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	8%	N/A		8%		-	-		-		-					N/A		N/A		-			
				Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%	10,99 %		10%		-	-		-		-					10,99 %		109,89 %		-			
		1.1.2.13.02.0001	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola			1494 lokasi	23.445.837	1494 lokasi	0	1494 lokasi	0	-	-	-	-	1494 lokasi	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.13.02.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca			239 kali	587.546	18 kali	0	5 kali	0	-	-	-	-	23 kali	0	9,62%	0,00%	9,62%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.13.03	Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat		3.771.713	N/A		2.631.999		98.985		1.353.670		-		-		234.352		8,90%		234.352		6,21%			
				Persentase penambahan koleksi buku	94,41%	88,43 %		94,41%		-	-		-		-					88,43 %		93,66 %		-			
		1.1.2.13.03.0001	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat			8084 Buku	2.631.999	0 Buku	98.985	0 Buku	135.367	-	-	-	-	0 Buku	234.352	0,00%	8,90%	0,00%	8,90%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.14.01	Program Pembinaan Penataan Kearsipan		484.142	N/A		475.118		36.656		866.890		-		-		123.344		25,96%		123.344		25,48%			
				Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	79,90%	67,39 %		79,90%		-	-		-		-					67,39 %		84,35 %		-			
		1.1.2.14.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan			130 lembaga	475.118	40 lembaga	36.656	0 lembaga	86.689	-	-	-	-	40 lembaga	123.344	30,77%	25,96%	30,77%	25,96%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.14.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan		345.814	N/A		330.890		47.901		451.830		-		-		93.084		28,13%		93.084		26,92%			
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81	N/A		81		-	-		-		-					N/A		N/A		-			

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16										
		1.1.2.14.02.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan					40 kali	330.890	9 kali	47.901	14 kali	45.183	-	-	-	-	23 kali	93.084	57,50%	28,13%	57,50%	28,13%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.14.03	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		3.525.345		N/A		3.203.618		392.997		7.199.660		-		-		1.112.963		34,74%		1.112.963		31,57%				
				Persentase arsip sejarah yang digitalisasi	85,19%		N/A		85,19%		-		-		-		-		-			N/A		N/A		-			
				Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	80%		20,41 %		80%		-		-		-		-		-			20,41 %		25,51 %		-			
		1.1.2.14.03.0001	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan					52 kali	2.127.185	17 kali	378.604	18 kali	484.215	-	-	-	-	35 kali	862.819	67,31%	40,56%	67,31%	40,56%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		1.1.2.14.03.0002	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan					15 item	1.076.433	1 item	14.393	1 item	235.751	-	-	-	-	2 item	250.144	13,33%	23,24%	13,33%	23,24%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
39	Mendorong pementapan daya saling usaha mikro dan koperasi	1.1.2.15.01	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro		9.726.220		N/A		9.288.729		1.343.664		15.958.480		-		-		2.939.512		31,65%		2.939.512		30,22%				
				Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitas pemasaran produk	90%		85,00 %		90%		-		-		-		-		-			85,00 %		94,44 %		-			
		1.1.2.15.01.0001	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro					330 Orang	3.989.372	205 Orang	356.226	157 Orang	413.311	-	-	-	-	306 Orang	769.537	92,73%	19,29%	92,73%	19,29%			Dinas Perdagangan		
		1.1.2.15.01.0003	Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola					12 lokasi	4.990.321	12 lokasi	987.438	10 lokasi	1.058.551	-	-	-	-	12 lokasi	2.045.988	100,00%	41,00%	100,00%	41,00%			Dinas Perdagangan		
		1.1.2.15.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan					11 Jenis	309.037	0 Jenis	0	7 Jenis	123.986	-	-	-	-	7 Jenis	123.986	63,64%	40,12%	63,64%	40,12%			Dinas Perdagangan		
		1.1.2.15.02	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro		1.213.759		N/A		1.259.211		105.365		1.824.710		-		-		287.836		22,86%		287.836		23,71%				
				Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	35,11%		39,07 %		35,11%		-		-		-		-		-			39,07 %		111,27 %		-			
		1.1.2.15.02.0002	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan					708 orang	1.259.211	587 orang	105.365	587 orang	182.471	-	-	-	-	589 orang	287.836	83,19%	22,86%	83,19%	22,86%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.03	Program Pengembangan Sentra Usaha			7.734.338		N/A		7.789.286		1.030.190		13.555.170		-		-		2.385.707		30,63%		2.385.707		30,85%			
				Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	58%		N/A		58%		-		-		-		-		-			N/A		N/A		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.1.2.15.03.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi			60 sentra usaha	4.297.490	20 sentra usaha	652.979	10 sentra usaha	947.333	-	-	-	-	20 sentra usaha	1.600.312	33,33%	37,24%	33,33%	37,24%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.03.0003	Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan			49 sentra usaha	3.491.796	133 sentra usaha	377.211	144 sentra usaha	408.185	-	-	-	-	277 sentra usaha	785.396	565,31%	22,49%	565,31%	22,49%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.04	Program Pengembangan Usaha Koperasi			1.547.135		N/A		1.077.299		45.915		1.284.780		-		174.392		16,19%		174.392		11,27%			
				Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	79%		78,04 %	79%	-		-		-		-	-	-		-		78,04 %		98,79 %		-		
		1.1.2.15.04.0001	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis			175 koperasi	659.941	0 koperasi	45.915	0 koperasi	128.478	-	-	-	-	0 koperasi	174.392	0,00%	26,43%	0,00%	26,43%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.04.0003	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM			178 Orang	417.358	0 Orang	0	0 Orang	0	-	-	-	-	0 Orang	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.05	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi			2.456.381		1.582.396		2.085.433		260.844		3.882.350		-		649.079		31,12%		649.079		26,42%			
				Persentase koperasi berklasifikasi AAB	69,95%		69,48 %	69,95%	-		-		-		-	-	-		-		69,48 %		99,32 %		-		
				Persentase koperasi berklasifikasi AAB			104,88%	-	-		-		-		-	-							104,88%				
		1.1.2.15.05.0001	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi			50 kelompok	661.770	21 kelompok	70.768	11 kelompok	76.101	-	-	-	-	32 kelompok	146.869	64,00%	22,19%	64,00%	22,19%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.05.0002	Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan			629 koperasi	1.167.216	307 koperasi	188.794	24 koperasi	281.170	-	-	-	-	331 koperasi	469.964	52,62%	40,26%	52,62%	40,26%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.05.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya			35 koperasi	256.447	0 koperasi	1.282	0 koperasi	30.964	-	-	-	-	0 koperasi	32.246	0,00%	12,57%	0,00%	12,57%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		1.1.2.15.06	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro			671.894		N/A		530.099		53.833		906.980		-		144.530		27,26%		144.530		21,51%			
				Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8,31%		9,86 %	8,31%	-		-		-		-	-	-		-		9,86 %		118,61 %		-		
		1.1.2.15.06.0001	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan			179 orang/kelompok	530.099	81 orang/kelompok	53.833	0 orang/kelompok	90.698	-	-	-	-	81 orang/kelompok	144.530	45,25%	27,26%	45,25%	27,26%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6*12	15=14/5*100	16													
40	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Data Statistik Daerah		285.287	N/A	291.870	0	0			0					0	0,00%		0		0,00%							
				Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100%	N/A	100%	-	-			-		-			-		-		N/A		N/A		-				
		1.1.2.16.01.0001	Penyusunan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun			1 dokumen	0 dokumen	0	0	0	0	-	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika				
		1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																										
41	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	1.1.2.02.01	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan		2.801.368	N/A	2.310.110	337.254		2.309.170		-		-			568.171	24,59%		568.171		20,28%							
				Persentase kelurahan yang responsif gender	20,13%	N/A	20,13%	-	-			-		-			-		-		N/A		N/A		-				
				Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100%	N/A	100%	-	-			-		-			-		-		N/A		N/A		-				
		1.1.2.02.01.0001	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan			29 kali	12 kali	216.393	1 kali	78.893	-	-	-	-		13 kali	44,83%	27,52%	44,83%	27,52%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender			289 lembaga	72 lembaga	890.453	0 lembaga	106.021	-	-	-	-		72 lembaga	24,91%	24,04%	24,91%	24,04%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		1.1.2.02.01.0003	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun			2 dokumen	0 dokumen	346.657	0 dokumen	46.004	-	-	-	-		0 dokumen	0,00%	16,97%	0,00%	16,97%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
		1.1.2.02.02	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		4.703.257	N/A	4.348.636		698.812		6.639.350		-		-		1.362.748	31,34%		1.362.748		28,97%							
				Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	73,84%	75,43 %	73,84%	-		-		-		-			-			75,43 %		102,15 %		-					
				Persentase kelurahan ramah anak	84,42%	N/A	84,42%	-		-		-		-			-			N/A		N/A		-					
				Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	100,00 %	100%	-		-		-		-			-			100,00 %		100,00 %		-					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.02.02.0001	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building			926 orang	426.202	420 orang	130.667	0 orang	63.220	-	-	-	-	420 orang	193.887	45,36%	45,49%	45,36%	45,49%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak			431 lembaga	1.039.113	279 lembaga	167.470	0 lembaga	130.542	-	-	-	-	279 lembaga	298.011	64,73%	28,68%	64,73%	28,68%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2.02.02.0003	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan			154 kampung	694.388	0 kampung	1.300	0 kampun g	14.840	-	-	-	-	0 kampung	16.140	0,00%	2,32%	0,00%	2,32%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2.02.02.0004	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak			200 kasus	818.531	39 kasus	132.749	26 kasus	186.046	-	-	-	-	65 kasus	318.795	32,50%	38,95%	32,50%	38,95%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2.02.02.0005	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan			2 lembaga	1.370.401	2 lembaga	266.628	2 lembaga	269.287	-	-	-	-	2 lembaga	535.915	100,00%	39,11%	100,00%	39,11%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		1.1.2.03	Pangan																								
42	Meningkatkan ketahanan pangan	1.1.2.03.01	Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan		725.723	N/A	732.449	0	0	-	-	-	-	-	0	0,00%	0		0		0,00%						
				Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	36,40%	N/A	36,40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A			-			
		1.1.2.03.01.0001	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring			15 laporan	732.449	3 laporan	0	3 laporan	0	-	-	-	-	6 laporan	0	40,00%	0,00%	40,00%	0,00%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1.1.2.03.02	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan		2.928.285	N/A	2.669.273	414.255	3.482.260	-	-	-	-	762.481	28,57%	762.481		26,04%									
				Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1	N/A	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A		-				
				Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	89,50%	89,52 %	89,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,52 %		100,02 %		-				
				Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95%	96,10	95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,10		101,16 %		-				
		1.1.2.03.02.0001	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa			2060 sampel	1.196.452	580 sampel	186.592	571 sampel	159.556	-	-	-	-	1151 sampel	346.148	55,87%	28,93%	55,87%	28,93%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.03.02.0002	Pengelolaan Sentra Olahahan Pangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahahan Pangan Yang Dilaksanakan			11 kali	974.697	8 kali	182.498	1 kali	157.827	-	-	-	-	9 kali	340.325	81,82%	34,92%	81,82%	34,92%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1.1.2.03.02.0003	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan			28 kali	498.124	8 kali	45.166	1 kali	30.842	-	-	-	-	9 kali	76.008	32,14%	15,26%	32,14%	15,26%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		1.1.2.04	Pertanahan																								
43	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	1.1.2.04.01	Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan		4.444.387	N/A		4.237.496		496.264		3.098.910		-		-		806.155		19,02%		806.155		18,14%			
				Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100%		100,00 %		100%		-	-	-	-	-	-	-			100,00 %		100,00 %		-			
		1.1.2.04.01.0001	Penanganan Sengketa Bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani			12 Kasus	1.381.143	3 Kasus	0	3 Kasus	0	-	-	-	-	6 Kasus	0	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.2.04.01.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani			18 obyek	1.391.233	5 obyek	259.253	4 obyek	181.472	-	-	-	-	9 obyek	440.725	50,00%	31,68%	50,00%	31,68%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		1.1.2.04.01.0003	Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya			8 kali	1.465.119	2 kali	237.011	0 kali	128.419	-	-	-	-	2 kali	365.430	25,00%	24,94%	25,00%	24,94%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
44	Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	1.1.2.04.02	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum		268.279.468	N/A		277.822.534		134.196.211		568.294.910		-		-		191.025.703		68,76%		191.025.703		71,20%			
				Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	15,77 hektar	20,55 Ha		15,77 hektar		-	-		-	-	-	-	-			20,55 Ha		130,29 %		-			
		1.1.2.04.02.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur			6 lokasi	277.822.534	8 lokasi	134.196.211	4 lokasi	56.829.491	-	-	-	-	11 lokasi	191.025.703	183,33%	68,76%	183,33%	68,76%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
		1.1.2.04.03	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum		354.067.362	N/A		302.702.598		30.753.340		4.038.190		-		-		31.157.158		10,29%		31.157.158		8,80%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16									
				Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	44,9 hektar	39,21 Ha	44,9 hektar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,21 Ha	-	87,33 %	-						
		1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan			4 dokumen	5.017.532	0 dokumen	317.740	0 dokumen	389.055	-	-	-	-	0 dokumen	706.794	0,00%	14,09%	0,00%	14,09%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
		1.1.2.04.03.0002	Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan			4 lokasi	297.685.067	1 lokasi	30.435.600	0 lokasi	14.764	-	-	-	-	1 lokasi	30.450.364	25,00%	10,23%	25,00%	10,23%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
45	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	1.1.2.04.04	Program Pengamanan Aset		9.593.122	N/A		8.813.850	922.769	6.451.110		-		-		-	1.567.879		17,79%		1.567.879		16,34%						
				Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan patok	36,80%	19,01 %		36,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19,01 %			51,65 %		-					
				Persentase tanah aset yang tersertifikasi	43,08%	20,32 %		43,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20,32 %			47,16 %		-					
		1.1.2.04.04.0001	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan			100 bidang	4.896.263	20 bidang	435.133	24 bidang	290.719	-	-	-	-	44 bidang	725.852	44,00%	14,82%	44,00%	14,82%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
		1.1.2.04.04.0002	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya			4 dokumen	1.179.182	0 dokumen	95.040	0 dokumen	97.496	-	-	-	-	0 dokumen	192.535	0,00%	16,33%	0,00%	16,33%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
		1.1.2.04.04.0003	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan			75 dokumen	2.738.405	3 dokumen	392.596	18 dokumen	256.896	-	-	-	-	21 dokumen	649.492	28,00%	23,72%	28,00%	23,72%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
46	Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	1.1.2.04.05	Program Pengamanan Aset Infrastruktur		2.324.071	N/A		1.480.047	165.703	1.892.910		-		-		-	354.994		23,99%		354.994		15,27%						
				Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	2,50%	N/A		2,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		N/A			N/A		-					
		1.1.2.04.05.0001	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan			40 bidang	1.480.047	8 bidang	165.703	12 bidang	189.291	-	-	-	-	20 bidang	354.994	50,00%	23,99%	50,00%	23,99%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemukiman				
47	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	1.1.2.04.06	Program Pengelolaan Aset Tanah		6.261.669	N/A		5.845.946	1.202.531	8.048.690		-		-		-	2.007.400		34,34%		2.007.400		32,06%						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
				Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	81,30%		131,19 %		81,30%		-		-		-		-		-		-		131,19 %		161,37 %		-		
	1.1.2.04.06.0001	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya						7000 izin	2.421.478	2346 izin	586.179	1292 izin	328.897	-	-	-	-	3638 izin	915.077	51,97%	37,79%	51,97%	37,79%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
	1.1.2.04.06.0002	Pendataan dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan						1 dokumen	1.984.608	0 dokumen	391.135	0 dokumen	258.256	-	-	-	-	0 dokumen	649.392	0,00%	32,72%	0,00%	32,72%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
	1.1.2.04.06.0003	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan ditetapkan						8000 lokasi	1.439.859	2177 lokasi	225.216	2171 lokasi	217.716	-	-	-	-	4348 lokasi	442.932	54,35%	30,76%	54,35%	30,76%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
	1.1.2.05	Lingkungan Hidup																											
48	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	1.1.2.05.01	Program Kebersihan			218.878.114		N/A		195.327.854		32.634.417		485.653.530		-		-		81.199.770		41,57%		81.199.770		37,10%			
				Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	84,86%		97,33 %		84,86%		-		-		-		-		-		-		97,33 %		114,69 %		-		
	1.1.2.05.01.0001	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan						104 Kegiatan	3.853.801	36 Kegiatan	304.371	8 Kegiatan	455.480	-	-	-	-	44 Kegiatan	759.851	42,31%	19,72%	42,31%	19,72%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
	1.1.2.05.01.0002	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian						364 lokasi	96.443.756	364 lokasi	16.973.176	364 lokasi	26.298.892	-	-	-	-	364 lokasi	43.272.068	100,00%	44,87%	100,00%	44,87%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
	1.1.2.05.01.0003	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran						450 lokasi	19.334.368	563 lokasi	3.518.071	563 lokasi	5.248.538	-	-	-	-	563 lokasi	8.766.609	125,11%	45,34%	125,11%	45,34%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
	1.1.2.05.01.0004	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah						267 lokasi	75.695.928	267 lokasi	11.838.799	267 lokasi	16.562.443	-	-	-	-	267 lokasi	28.401.242	100,00%	37,52%	100,00%	37,52%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
49	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.05.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup			2.632.368		N/A		2.468.745		65.460		1.116.570		-		-		177.117		7,17%		177.117		6,73%			
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	78%		N/A		78%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100									
		1.1.2.05.02.000 1	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah <i>ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan</i>			100 izin 423.280	41 izin 65.460	25 izin 111.657	-	-	-	-	66 izin 177.117	66,00% 41,84%	66,00% 41,84%			Dinas Lingkungan Hidup								
		1.1.2.05.02.000 2	Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah <i>rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan</i>			2000 berkas 1.489.272	841 berkas 0	559 berkas 0	-	-	-	-	1400 berkas 0	70,00% 0,00%	70,00% 0,00%			Dinas Lingkungan Hidup								
		1.1.2.05.02.000 3	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah <i>pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi</i>			100 izin 556.193	50 izin 0	23 izin 0	-	-	-	-	73 izin 0	73,00% 0,00%	73,00% 0,00%			Dinas Lingkungan Hidup								
50	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	1.1.2.05.03	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri			3.972.065 N/A	3.975.709	206.616	2.204.240	-	-			427.040		10,74%	427.040	10,75%									
			Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	8,75% 25,52 %		8,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	25,52 %		291,64 %	-									
		1.1.2.05.03.000 1	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah <i>kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan</i>			3 kali 3.975.709	1 kali 206.616	0 kali 220.424	-	-	-	-	1 kali 427.040	33,33% 10,74%	33,33% 10,74%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau								
51	Meningkatkan kualitas udara dan air	1.1.2.05.04	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga			1.961.056 N/A	3.308.709	196.350	3.790.800	-	-			575.430		17,39%	575.430	29,34%									
			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	80% N/A		80%	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A	-									
		1.1.2.05.04.000 1	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah <i>lokasi rumah yang terpasang jamban</i>			600 Unit 3.308.709	0 Unit 196.350	84 Unit 379.080	-	-	-	-	84 Unit 575.430	14,00% 17,39%	14,00% 17,39%			Dinas Lingkungan Hidup								
52	Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	1.1.2.05.05	Program Pengelolaan Air Limbah Kota			27.077.093 N/A	23.984.785	1.998.301	36.062.000	-	-			5.604.501		23,37%	5.604.501	20,70%									
			Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100% N/A		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A	-									
		1.1.2.05.05.000 1	Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	Jumlah <i>IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik</i>			96 lokasi 7.443.205	24 lokasi 252.400	24 lokasi 536.732	-	-	-	-	48 lokasi 789.133	50,00% 10,60%	50,00% 10,60%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
		1.1.2.05.05.0002	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTsa/T PS 3R yang dikelola						34 lokasi	16.541.580		34 lokasi	1.745.901	34 lokasi	3.069.468	-	-	-	-	34 lokasi	4.815.368	100,00%	29,11%	100,00%	29,11%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
53	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	1.1.2.05.06	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya			25.649.272		N/A		23.788.990			2.035.470		28.144.590		-		-		4.849.930		20,39%		4.849.930		18,91%	
				Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	54,76%		N/A			54,76%		-		-		-		-		-			N/A		N/A		-	
		1.1.2.05.06.0001	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara					12 lokasi	23.788.990	12 lokasi	2.035.470	12 lokasi	2.814.459	-	-	-	-	12 lokasi	4.849.930	100,00%	20,39%	100,00%	20,39%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		1.1.2.05.07	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau			89.598.539		N/A		88.677.153			12.766.604		189.647.120		-		-		31.731.316		35,78%		31.731.316		35,41%	
				Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	8,68%		N/A			8,68%		-		-		-		-		-			N/A		N/A		-	
		1.1.2.05.07.0001	Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara					425 lokasi	58.811.198	425 lokasi	7.448.243	425 lokasi	11.701.973	-	-	-	-	425 lokasi	19.150.216	100,00%	32,56%	100,00%	32,56%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
		1.1.2.05.07.0002	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi					15 lokasi	10.552.719	18 lokasi	2.192.912	17 lokasi	2.449.693	-	-	-	-	18 lokasi	4.642.604	120,00%	43,99%	120,00%	43,99%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
		1.1.2.05.07.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	Jumlah taman yang dipelihara					39 lokasi	19.313.237	39 lokasi	3.125.449	39 lokasi	4.813.046	-	-	-	-	39 lokasi	7.938.496	100,00%	41,10%	100,00%	41,10%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
54	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	1.1.2.05.08	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah			2.690.977		N/A		100.026.354			121.527		903.470		-		-		211.874		0,21%		211.874		7,87%	
				Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	30,77%		N/A			30,77%		-		-		-		-		-			N/A		N/A		-	
		1.1.2.05.08.0001	Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan					1 Kegiatan	100.026.354	0 Kegiatan	121.527	0 Kegiatan	90.347	-	-	-	-	0 Kegiatan	211.874	0,00%	0,21%	0,00%	0,21%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
55	Meningkatkan kualitas udara dan air	1.1.2.05.09	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak			3.735.333		N/A		3.901.439			645.864		7.106.790		-		-		1.356.543		34,77%		1.356.543		36,32%	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	80%		72,50 %		80%		-		-	-	-	-	-			-		72,50 %		90,63 %		-	
		1.1.2.05.09.0001	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah				96 lokasi	422.434	42 lokasi	128.181	46 lokasi	55.530	-	-	-	-	88 lokasi	183.711	91,67%	43,49%	91,67%	43,49%			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.05.09.0002	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublikasi dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak				365 data	914.967	91 data	132.882	91 data	95.318	-	-	-	-	182 data	228.200	49,86%	24,94%	49,86%	24,94%			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.05.09.0003	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak				778 data	583.605	204 data	69.632	194 data	120.849	-	-	-	-	398 data	190.481	51,16%	32,64%	51,16%	32,64%			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.05.09.0004	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani				50 obyek	566.374	17 obyek	79.622	8 obyek	89.072	-	-	-	-	25 obyek	168.694	50,00%	29,78%	50,00%	29,78%			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.05.09.0005	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya				254 lembaga	957.671	16 lembaga	182.549	24 lembaga	209.138	-	-	-	-	40 lembaga	391.687	15,75%	40,90%	15,75%	40,90%			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.05.09.0006	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa				224 sampel	456.387	69 sampel	52.997	50 sampel	140.772	-	-	-	-	119 sampel	193.769	53,13%	42,46%	53,13%	42,46%			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.05.10	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup			3.363.331		N/A		3.754.490		663.773		5.251.850		-		-	1.188.958		31,67%		1.188.958		35,35%		
				Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100%		N/A		100%		-		-		-		-				-		N/A		N/A		-
				Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	70%		N/A		70%		-		-		-		-				-		N/A		N/A		-
		1.1.2.05.10.0001	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day				113 kali	1.465.661	28 kali	297.904	0 kali	138.763	-	-	-	-	28 kali	436.668	24,78%	29,79%	24,78%	29,79%			Dinas Lingkungan Hidup	
		1.1.2.05.10.0002	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan				12 kali	1.013.253	3 kali	234.396	0 kali	186.192	-	-	-	-	3 kali	420.589	25,00%	41,51%	25,00%	41,51%			Dinas Lingkungan Hidup	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.05.10.0003	Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun			5 dokumen	1.275.575	0 dokumen	131.473	1 dokumen	200.229	-	-	-	-	1 dokumen	331.702	20,00%	26,00%	20,00%	26,00%			Dinas Lingkungan Hidup		
56	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	1.1.2.05.11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		217.422.270	N/A		185.172.874		24.673.394		496.173.060		-		-		74.290.700		40,12%		74.290.700		34,17%			
				Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	30,77%		25,93 %		30,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25,93 %		84,26 %		-			
		1.1.2.05.11.0002	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola			21 unit	9.469.698	4 unit	689.302	3 unit	1.134.832	-	-	-	-	7 unit	1.824.134	33,33%	19,26%	33,33%	19,26%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.11.0003	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan			1688 unit	26.906.970	93 unit	343.921	1435 unit	4.145.568	-	-	-	-	1528 unit	4.489.489	90,52%	16,69%	90,52%	16,69%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.11.0004	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar			1 rekening	122.737.825	1 rekening	21.007.068	1 rekening	39.729.566	-	-	-	-	1 rekening	60.736.635	100,00%	49,48%	100,00%	49,48%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.11.0005	Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola			183 lokasi	8.930.685	252 lokasi	558.095	183 lokasi	1.176.839	-	-	-	-	252 lokasi	1.734.934	137,70%	19,43%	137,70%	19,43%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.05.11.0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara			14 lokasi	17.127.695	14 lokasi	2.075.007	14 lokasi	3.430.501	-	-	-	-	14 lokasi	5.505.508	100,00%	32,14%	100,00%	32,14%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
57	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil		1.060.857	N/A		1.940.819		282.231		4.798.980		-		-		762.129		39,27%		762.129		71,84%			
				Cakupan penerbitan akte kelahiran	99,75%	100,00 %	99,75%		-		-		-		-		-			100,00 %		100,25 %		-			
				Cakupan penerbitan akte kematian	88%	100,00 %	88%		-		-		-		-		-			100,00 %		113,64 %		-			
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akte kematian)	100%	100,00 %	100%		-		-		-		-		-			100,00 %		100,00 %		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7	8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
				Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		-	100,00 %		100,00 %		-	
	1.1.2.06.01.0001	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani					104682 berkas	1.361.167	25436 berkas	228.898	11924 berkas	355.738	-	-	-	-	37360 berkas	584.636	35,69%	42,95%	35,69%	42,95%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.01.0002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani					3250 berkas	579.652	1549 berkas	53.333	358 berkas	124.159	-	-	-	-	1907 berkas	177.493	58,68%	30,62%	58,68%	30,62%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.02	Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk			7.688.089		N/A		12.317.553		559.064		48.592.810		-		-		5.418.345		43,99%		5.418.345		70,48%		
			Cakupan penerbitan KTP	92%		N/A		92%		-	-	-	-	-	-	-	-	-			N/A		N/A		-		
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%		100,00 %		100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-			100,00 %		100,00 %		-		
	1.1.2.06.02.0001	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan					200000 berkas	9.373.661	2000 berkas	108.900	350000 berkas	4.098.391	-	-	-	-	352000 berkas	4.207.291	176,00%	44,88%	176,00%	44,88%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.02.0002	Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani					398986 berkas	2.149.691	296123 berkas	354.358	43831 berkas	576.282	-	-	-	-	339954 berkas	930.640	85,20%	43,29%	85,20%	43,29%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.02.0003	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen					40930 berkas	794.201	10589 berkas	95.806	3792 berkas	184.608	-	-	-	-	14381 berkas	280.414	35,14%	35,31%	35,14%	35,31%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.1.2.06.03	Program Pemanfaatan Data Kependudukan			1.271.026		N/A		1.052.324		70.598		1.480.850		-		-		218.683		20,78%		218.683		17,21%		
			Persentase peningkatan inovasi pelayanan	33,33%		N/A		33,33%		-	-	-	-	-	-	-	-	-			N/A		N/A		-		
			Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	10%		N/A		10%		-	-	-	-	-	-	-	-	-			N/A		N/A		-		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)			
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										K	Rp.(000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16														
		1.1.2.06.03.0001	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan					2 kali	416.155	0 kali	38.697	1 kali	73.082	-	-	-	-	1 kali	111.779	50,00%	26,86%	50,00%	26,86%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		1.1.2.06.03.0002	Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil					6 dokumen	636.169	0 dokumen	31.902	0 dokumen	75.003	-	-	-	-	0 dokumen	106.905	0,00%	16,80%	0,00%	16,80%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		1.1.2.06.04	Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan			1.924.479		N/A		1.788.339		264.161		3.437.680		-	-	-		607.930		33,99%		607.930		31,59%			
				Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	85%		N/A		85%		-		-		-	-	-	-		-		N/A		N/A		-			
		1.1.2.06.04.0001	Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang di mutakhirkan					146684 data	532.952	36711 data	55.650	34476 data	121.486	-	-	-	-	71187 data	177.137	48,53%	33,24%	48,53%	33,24%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		1.1.2.06.04.0002	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara					8 sistem	1.255.387	8 sistem	208.511	8 sistem	222.282	-	-	-	-	8 sistem	430.793	100,00%	34,32%	100,00%	34,32%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		1.1.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																										
58	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.08.01	Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan			2.988.829		N/A		6.234.527	0	0		0	-	-	-	-	0		0,00%		0		0,00%				
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	78%		N/A		78%		-		-		-	-	-	-		-		N/A		N/A		-			
		1.1.2.08.01.0001	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan					3 Jenis	6.234.527	1 Jenis	0	1 Jenis	0	-	-	-	-	2 Jenis	0	66,67%	0,00%	66,67%	0,00%			Dinas Perhubungan		
59	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	1.1.2.08.02	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi			51.371.900		N/A		70.827.793		294.227		5.222.300		-	-	-		816.457		1,15%		816.457		1,59%			
				Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100%		100,00 %		100%		-		-		-	-	-	-		-		100,00 %		100,00 %		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		1.1.2.08.02.0001	Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun			1 bangunan	30.027.463	0 bangunan	0	0 bangunan	0	-	-	-	-	0 bangunan	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.08.02.0002	Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara			36 lokasi	6.096.648	0 lokasi	0	0 lokasi	0	-	-	-	-	0 lokasi	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.08.02.0003	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan			14 Lokasi	30.750.937	15 Lokasi	0	14 Lokasi	0	-	-	-	-	15 Lokasi	0	107,14%	0,00%	107,14%	0,00%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.08.02.0004	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi			8 Paket	3.952.745	0 Paket	294.227	1 Paket	522.230	-	-	-	-	1 Paket	816.457	12,50%	20,66%	12,50%	20,66%			Dinas Perhubungan				
60	Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	1.1.2.08.03	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			25.404.415		N/A		23.266.400		1.831.484		17.118.260		-		3.543.310		15,23%		3.543.310		13,95%					
				Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	93%		92,15 %		93%		-		-		-		-		-		92,15 %		99,09 %		-				
		1.1.2.08.03.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan bermotor			149069 unit	7.714.378	41769 unit	1.831.484	32895 unit	1.711.826	-	-	-	-	74664 unit	3.543.310	50,09%	45,93%	50,09%	45,93%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.08.03.0002	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan			365 Kali	10.831.194	91 Kali	0	91 Kali	0	-	-	-	-	182 Kali	0	49,86%	0,00%	49,86%	0,00%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.08.03.0003	Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan			7 Jenis	3.586.361	9 Jenis	0	7 Jenis	0	-	-	-	-	9 Jenis	0	128,57%	0,00%	128,57%	0,00%			Dinas Perhubungan				
		1.1.2.08.03.0004	Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan			48 kali	1.134.467	12 kali	0	12 kali	0	-	-	-	-	24 kali	0	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%			Dinas Perhubungan				
61	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	1.1.2.08.04	Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan			35.237.371		N/A		59.668.281		5.678.109		94.568.900		-		15.134.999		25,37%		15.134.999		42,95%					
				Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan pergiliran	40%		N/A		40%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
				Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	95,05 menit		100,12 menit		95,05 menit		-		-		-		-		-		100,12 menit		105,33 %		-				

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.08.04.000 1	Pengelolaan Transportasi Umum	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan			20 Unit	19.526.059	60 Unit	4.392.499	60 Unit	4.880.027	-	-	-	-	120 Unit	9.272.525	600,00%	47,49%	600,00%	47,49%			Dinas Perhubungan		
		1.1.2.08.04.000 2	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Jumlah Kegiatan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor			5 Kali	6.750.518	2 Kali	608.634	0 Kali	855.079	-	-	-	-	2 Kali	1.463.713	40,00%	21,68%	40,00%	21,68%			Dinas Perhubungan		
		1.1.2.08.04.000 3	Penyelenggaraan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang			2 kali	794.133	0 kali	0	0 kali	38.984	-	-	-	-	0 kali	38.984	0,00%	4,91%	0,00%	4,91%			Dinas Perhubungan		
		1.1.2.08.04.000 4	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan			8 unit	1.225.469	8 unit	230.550	8 unit	210.634	-	-	-	-	8 unit	441.185	100,00%	36,00%	100,00%	36,00%			Dinas Perhubungan		
		1.1.2.08.04.000 5	Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan			365 kali	28.781.141	333 kali	245.927	61 kali	3.150.588	-	-	-	-	394 kali	3.396.515	107,95%	11,80%	107,95%	11,80%			Dinas Perhubungan		
		1.1.2.08.04.000 6	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan			10 Dokumen	2.590.962	0 Dokumen	200.498	4 Dokumen	321.578	-	-	-	-	4 Dokumen	522.076	40,00%	20,15%	40,00%	20,15%			Dinas Perhubungan		
62	Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	1.1.2.08.05	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		79.061.393	N/A		82.023.291		7.711.455		132.520.240	-	-	-	-		20.963.479		25,56%		20.963.479		26,52%			
				Kecelakaan rata- rata kendaraan di jalan kewenangan kota	39 kilomete r per jam	33,41 km/jam	39 kilometer per jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,41 km/jam		85,67 %		-			
				Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%	18,68 %	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,68 %		934,07 %		-			
	1.1.2.08.05.000 1	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara				5 Jenis	31.944.565	5 Jenis	1.490.481	5 Jenis	7.095.362	-	-	-	-	5 Jenis	8.585.843	100,00%	26,88%	100,00%	26,88%			Dinas Perhubungan		
	1.1.2.08.05.000 2	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan				1200 unit	20.300.797	225 unit	1.226.982	787 unit	1.688.446	-	-	-	-	1012 unit	2.915.429	84,33%	14,36%	84,33%	14,36%			Dinas Perhubungan		
	1.1.2.08.05.000 3	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun				13 dokumen	3.569.982	0 dokumen	124.720	1 dokume n	354.803	-	-	-	-	1 dokumen	479.523	7,69%	13,43%	7,69%	13,43%			Dinas Perhubungan		
	1.1.2.08.05.000 4	Penyelenggaraan Parkir	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan				1821 Lokasi	25.694.473	1823 Lokasi	4.869.272	1821 Lokasi	4.113.413	-	-	-	-	1823 Lokasi	8.982.684	100,11%	34,96%	100,11%	34,96%			Dinas Perhubungan		
	1.1.2.08.05.000 5	Pemasangan Alat Keselamatan Jalan (DAK)	Jenis alat keselamatan jalan yang diadakan dalam satu tahun				1 jenis	513.475	0 jenis	0	0 jenis	0	-	-	-	-	0 jenis	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perhubungan		
	1.1.2.09	Perhubungan																									
63	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.09.01	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		28.039.717	N/A		32.743.759		0		0	-	-	-	-		0		0,00%		0		0,00%			
				Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	53,85%	39,01 %	53,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,01 %		72,44 %		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/(Kegiatan(Outpu t))	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.09.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan			396 lokasi	29.839.501	396 lokasi	0	396 lokasi	0	-	-	-	-	396 lokasi	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan			72 lokasi	739.042	0 lokasi	0	0 lokasi	0	-	-	-	-	0 lokasi	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun			15 aplikasi	811.100	0 aplikasi	0	3 aplikasi	0	-	-	-	-	3 aplikasi	0	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.01.0004	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan			150 Aplikasi	1.354.116	150 Aplikasi	0	150 Aplikasi	0	-	-	-	-	150 Aplikasi	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			6.880.174		N/A		6.529.668		264.909		4.244.870		-		689.396		10,56%		689.396		10,02%			
				Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32000 kunjungan		33.284,77 kunjungan		32000 kunjungan		-		-		-		-		-		33.284,77 kunjungan		104,01%		-		
		1.1.2.09.02.0001	Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani			3000 berkas	1.092.562	1332 berkas	0	1240 berkas	0	-	-	-	-	2572 berkas	0	85,73%	0,00%	85,73%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.02.0002	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola			19 Saluran	830.591	19 Saluran	0	19 Saluran	0	-	-	-	-	19 Saluran	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.02.0003	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial			11 kali	1.408.546	6 kali	0	0 kali	0	-	-	-	-	6 kali	0	54,55%	0,00%	54,55%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.02.0004	Penyusunan Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun			5 dokumen	682.604	0 dokumen	47.022	0 dokumen	83.452	-	-	-	-	0 dokumen	130.474	0,00%	19,11%	0,00%	19,11%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		1.1.2.09.02.0005	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah			4 Jenis	2.515.364	3 Jenis	217.887	3 Jenis	341.035	-	-	-	-	3 Jenis	558.922	75,00%	22,22%	75,00%	22,22%			Dinas Komunikasi dan Informatika		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.09.03	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			42.246.639	75.317.360		35.268.727		2.297.277		46.977.340		-		-		6.995.010		19,83%		6.995.010		16,56%		
				Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-			N/A			N/A		-
				Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik			100%		-		-		-		-		-							100,00%			
				Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK			100,92%		-		-		-		-		-							100,92%			
		1.1.2.09.03.0001	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola				1289 unit	2.329.393	351 unit	0	352 unit	0	-	-	-	-	703 unit	0	54,54%	0,00%	54,54%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.09.03.0002	Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK				136 lokasi	17.748.853	0 lokasi	23.400	0 lokasi	27.136	-	-	-	-	0 lokasi	50.536	0,00%	0,28%	0,00%	0,28%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.09.03.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK				4 Jenis	9.017.079	0 Jenis	1.385.083	0 Jenis	3.359.970	-	-	-	-	0 Jenis	4.745.052	0,00%	52,62%	0,00%	52,62%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.09.03.0004	Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani				100 persen	3.479.774	100 persen	808.373	100 persen	1.173.182	-	-	-	-	100 persen	1.981.555	100,00%	56,94%	100,00%	56,94%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.09.03.0005	Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola				2 Lokasi	2.693.628	2 Lokasi	80.421	2 Lokasi	137.446	-	-	-	-	2 Lokasi	217.867	100,00%	8,09%	100,00%	8,09%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
		1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika serta Persandian																								
64	Meningkatkan realisasi investasi	1.1.2.10.01	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal			1.610.379	N/A		1.382.363		0		0		-		-		0		0,00%		0		0,00%		
				Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat I KPM	40%		N/A		40%		-		-		-		-		-			N/A			N/A		-
		1.1.2.10.01.0001	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi				3500 perusahaan	944.393	250 perusahaan	0	250 perusahaan	0	-	-	-	-	500 perusahaan	0	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.10.01.0003	Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola				41751 data	437.970	10803 data	0	10492 data	0	-	-	-	-	21295 data	0	51,00%	0,00%	51,00%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.10.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi			1.334.701	3.237.238		1.255.232		77.206		700.170		-		-		147.222		11,73%		147.222		11,03%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
				Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	20%		27,89 %		20%		-		-		-			-		-		27,89 %		139,44 %		-	
				Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi			370,93%		-		-		-		-								370,93%				
				Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi			174,30%		-		-		-		-								174,30%				
		1.1.2.10.02.0001	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal				4 dokumen	637.547	0 dokumen	0	0	0	-	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.10.02.0002	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan				3 kali	617.685	0 kali	77.206	0 kali	70.017	-	-	-	-	0 kali	147.222	0,00%	23,83%	0,00%	23,83%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
65	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.10.03	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal			5.886.274	N/A		5.621.298		894.277		12.387.960		-	-	-		2.133.073		37,95%		2.133.073		36,24%		
				Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	72%		N/A		72%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A		-		
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	78%		N/A		78%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A		-		
		1.1.2.10.03.0004	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan				2 kali	16.386	0 kali	7.876	1 kali	0	-	-	-	-	1 kali	7.876	50,00%	48,07%	50,00%	48,07%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.10.03.0005	Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi				11000 pelaku usaha	826.019	2350 pelaku usaha	92.751	2072 pelaku usaha	108.644	-	-	-	-	4422 pelaku usaha	201.395	40,20%	24,38%	40,20%	24,38%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.10.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan				60000 berkas	4.743.892	27859 berkas	775.979	15524 berkas	1.130.153	-	-	-	-	43383 berkas	1.906.132	72,31%	40,18%	72,31%	40,18%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.10.03.0007	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau				2 kali	11.704	1 kali	6.222	0 kali	0	-	-	-	-	1 kali	6.222	50,00%	53,16%	50,00%	53,16%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11		12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16								
		1.1.2.10.03.0008	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBU/CHT)	Jumlah penyampaian informasi ketetapan peraturan cukai yang dilakukan				4 kali	23.297	2 kali	11.449	1 kali	0	-	-	-	-	3 kali	11.449	75,00%	49,14%	75,00%	49,14%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																								
66	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1.1.2.11.01	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		80.323.733		N/A		73.174.694		4.013.712		41.365.500	-	-	-	-		8.150.262		11,14%		8.150.262		10,15%		
				Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	142 kelurahan		137,00 kelurahan	142 kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		137,00 kelurahan		96,48 %		-			
		1.1.2.11.01.0001	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi				11 unit	9.409.375	11 unit	1.402.110	12 unit	1.962.447	-	-	-	-	12 unit	3.364.557	109,09%	35,76%	109,09%	35,76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.11.01.0002	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan				57 unit	52.966.192	9 unit	2.214.474	7 unit	1.531.292	-	-	-	-	16 unit	3.745.766	28,07%	7,07%	28,07%	7,07%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.11.01.0003	Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan				6 jenis	580.826	0 jenis	0	0 jenis	16.012	-	-	-	-	0 jenis	16.012	0,00%	2,76%	0,00%	2,76%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.11.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun				58 dokumen	2.726.506	6 dokumen	148.126	46 dokumen	550.492	-	-	-	-	52 dokumen	698.618	89,66%	25,62%	89,66%	25,62%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.11.01.0005	Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki				133 unit	7.491.794	27 unit	249.002	20 unit	76.308	-	-	-	-	47 unit	325.309	35,34%	4,34%	35,34%	4,34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.11.02	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		15.294.904		N/A		13.851.895		665.352		2.147.640		-		-		880.116		6,35%		880.116		5,75%		
				Akumulasi prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1660 medali		N/A	1660 medali		-		-		-	-	-	-	-		-		N/A		N/A		-	
		1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi				41 kali	8.132.358	1 kali	193.521	0 kali	17.280	-	-	-	-	1 kali	210.801	2,44%	2,59%	2,44%	2,59%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.11.02.0002	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional				14 kali	1.050.455	1 kali	115.784	0 kali	52.472	-	-	-	-	1 kali	168.256	7,14%	16,02%	7,14%	16,02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
		1.1.2.11.02.0003	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak				26 kali	1.302.018	4 kali	246.674	0 kali	81.460	-	-	-	-	4 kali	328.134	15,38%	25,20%	15,38%	25,20%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.1.2.11.02.0004	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan			10 kali	2.148.750	1 kali	109.374	0 kali	46.080	-	-	-	-	1 kali	155.454	10,00%	7,23%	10,00%	7,23%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan			29 kali	1.218.314	0 kali	0	0 kali	17.472	-	-	-	-	0 kali	17.472	0,00%	1,43%	0,00%	1,43%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
67	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	1.1.2.11.03	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			3.629.885		N/A		3.558.822		488.820		592.240		-		548.044		15,40%		548.044		15,10%			
				Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	15%		N/A		15%		-		-		-		-				N/A		N/A		-		
		1.1.2.11.03.0001	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja			4565 peserta	1.389.814	770 peserta	164.190	0 peserta	15.212	-	-	-	-	770 peserta	179.402	16,87%	12,91%	16,87%	12,91%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.03.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan			30 kali	2.169.008	7 kali	324.630	0 kali	44.012	-	-	-	-	7 kali	368.642	23,33%	17,00%	23,33%	17,00%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.04	Program Peningkatan Prestasi Pemuda			2.422.961		N/A		2.312.510		254.594		301.280		-		284.722		12,31%		284.722		11,75%			
				Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	10%		7,40 %		10%		-		-		-		-				7,40 %		73,98 %		-		
				Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	15%		15,70 %		15%		-		-		-		-				15,70 %		104,64 %		-		
		1.1.2.11.04.0001	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif			670 orang	1.026.934	14 orang	46.780	0 orang	15.064	-	-	-	-	14 orang	61.844	2,09%	6,02%	2,09%	6,02%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.11.04.0002	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan			1050 Orang	1.285.576	250 Orang	207.814	0 Orang	15.064	-	-	-	-	250 Orang	222.878	23,81%	17,34%	23,81%	17,34%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		1.1.2.12	Penanaman Modal																								

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
68	Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	1.1.2.12.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal			5.964.878		N/A		7.079.555		423.980		900.110		-		-		513.990		7,26%		513.990		8,62%	
				Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	95%		223,53 %		95%		-		-		-		-		-		-		223,53 %		235,29 %		-
				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	58,50%		80,12 %		58,50%		-		-		-		-		-		-		80,12 %		136,96 %		-
		1.1.2.12.01.000 1	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah				512 kali	6.449.282	101 kali	393.590	0 kali	18.760	-	-	-	-	101 kali	412.350	19,73%	6,39%	19,73%	6,39%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2.12.01.000 2	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal				3 kali	395.937	0 kali	297	0 kali	15.320	-	-	-	-	0 kali	15.617	0,00%	3,94%	0,00%	3,94%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2.12.01.000 3	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring				14 lokasi	234.336	4 lokasi	30.093	0 lokasi	55.931	-	-	-	-	4 lokasi	86.023	28,57%	36,71%	28,57%	36,71%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2.12.02	Program Perlindungan Budaya Lokal			2.147.635		N/A		2.025.225		250.704		2.806.840		-		-		531.387		26,24%		531.387		24,74%	
				Persentase cagar budaya yang terlindungi	91,60%		91,70 %		91,60%		-		-		-		-		-		-		91,70 %		100,11 %		-
		1.1.2.12.02.000 1	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian				250 lokasi	1.349.023	62 lokasi	248.904	75 lokasi	254.892	-	-	-	-	137 lokasi	503.795	54,80%	37,35%	54,80%	37,35%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2.12.02.000 2	Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah				9 kali	676.202	0 kali	1.800	0 kali	25.792	-	-	-	-	0 kali	27.592	0,00%	4,08%	0,00%	4,08%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga																								
69	Meningkatkan minat baca masyarakat	1.1.2.13.01	Program Pembinaan Layanan Baca			910.018		N/A		841.610		104.844		1.669.160		-		-		271.760		32,29%		271.760		29,86%	
				Persentase perpustakaan yang berhasil dibangun	46,60%		23,61 %		46,60%		-		-		-		-		-		-		23,61 %		50,66 %		-
		1.1.2.13.01.000 1	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan				500 lembaga	841.610	385 lembaga	104.844	369 lembaga	166.916	-	-	-	-	570 lembaga	271.760	114,00%	32,29%	114,00%	32,29%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		1.1.2.13.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan			23.355.657		N/A		24.033.383		0		0		-		-		0		0,00%		0		0,00%	
				Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	8%		N/A		8%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-
				Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10%		10,99 %		10%		-		-		-		-		-		-		10,99 %		109,89 %		-
		1.1.2.13.02.000 1	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola				1494 lokasi	23.445.837	1494 lokasi	0	1494 lokasi	0	-	-	-	-	1494 lokasi	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		1.1.2.13.02.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca			239 kali	587.546	18 kali	0	5 kali	0	-	-	-	23 kali	0	9,62%	0,00%	9,62%	0,00%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2.13.03	Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat		3.771.713	N/A	2.631.999	98.985		98.985		1.353.670		-	-		234.352		8,90%		234.352		6,21%				
				Persentase penambahan koleksi buku	94,41%	88,43 %	94,41%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		88,43 %		93,66 %		-				
		1.1.2.13.03.0001	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat			8084 Buku	2.631.999	0 Buku	98.985	0 Buku	135.367	-	-	-	0 Buku	234.352	0,00%	8,90%	0,00%	8,90%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2.16	Kebudayaan																								
70	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Data Statistik Daerah		285.287	N/A	291.870	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0,00%	0,00%		0		0,00%					
				Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100%	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A					-			
		1.1.2.16.01.0001	Penyusunan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun			1 dokumen	291.870	0 dokumen	0	0 dokumen	0	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Komunikasi dan Informatika			
		1.1.2.14	Statistik																								
71	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.2.14.01	Program Pembinaan Penataan Kearsipan		484.142	N/A	475.118	36.656	36.656	866.890	-	-	-	-	-	123.344	25,96%	25,96%		123.344		25,48%					
				Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	79,90%	67,39 %	79,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,39 %	84,35 %					-			
		1.1.2.14.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan			130 lembaga	475.118	40 lembaga	36.656	0 lembaga	86.689	-	-	-	40 lembaga	123.344	30,77%	25,96%	30,77%	25,96%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2.14.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan		345.814	N/A	330.890	47.901	47.901	451.830	-	-	-	-	-	93.084	28,13%	28,13%		93.084		26,92%					
				Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81	N/A	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A					-			
		1.1.2.14.02.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan			40 kali	330.890	9 kali	47.901	14 kali	45.183	-	-	-	23 kali	93.084	57,50%	28,13%	57,50%	28,13%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
		1.1.2.14.03	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		3.525.345	N/A	3.203.618	392.997	392.997	7.199.660	-	-	-	-	-	1.112.963	34,74%	34,74%		1.112.963		31,57%					
				Persentase arsip sejarah yang digitalisasi	85,19%	N/A	85,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A					-			
				Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	80%	20,41 %	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,41 %	25,51 %					-			
		1.1.2.14.03.0001	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan			52 kali	2.127.185	17 kali	378.604	18 kali	484.215	-	-	-	35 kali	862.819	67,31%	40,56%	67,31%	40,56%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		1.1.2.14.03.0002	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan			15 item	1.076.433	1 item	14.393	1 item	235.751	-	-	-	-	2 item	250.144	13,33%	23.24%	13,33%	23,24%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
		1.2	Pilihan																										
		1.2.2	Non Pelayanan Dasar																										
		1.2.2.03	Pertanian																										
72	Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	1.2.2.03.01	Program Distribusi Perdagangan		3.031.780	N/A		2.782.546	301.663		4.896.590	-	-	-			791.322		28,44%		791.322		26,10%						
				Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17 kali	N/A		17 kali	-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
				Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	31 kali per kejadian	39,00 kali/kejadian		31 kali per kejadian	-		-		-		-		-		-		39,00 kali/kejadian		125,81 %		-				
				Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	80%	81,97 %		80%	-		-		-		-		-		-		81,97 %		102,47 %		-				
		1.2.2.03.01.0001	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor			250 lokasi	477.509	77 lokasi	47.426	44 lokasi	101.763	-	-	-	-	121 lokasi	149.188	48,40%	31,24%	48,40%	31,24%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.03.01.0002	Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan yang dibina	Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina			31 Kelompok	797.862	93 Kelompok	117.538	93 Kelompok	179.836	-	-	-	-	186 Kelompok	297.374	600,00%	37,27%	600,00%	37,27%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.03.01.0003	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan			142 kali	1.507.175	107 kali	136.699	76 kali	208.060	-	-	-	-	183 kali	344.759	128,87%	22,87%	128,87%	22,87%			Dinas Perdagangan				
73	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.2.2.03.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan		1.663.156	N/A		1.732.085	257.468		3.444.640	-	-	-			601.932		34,75%		601.932		36,19%						
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	78%	N/A		78%	-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
		1.2.2.03.02.0001	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah jin bidang perdagangan yang diterbitkan			400 berkas	653.784	101 berkas	72.305	51 berkas	109.197	-	-	-	-	152 berkas	181.502	38,00%	27,76%	38,00%	27,76%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.03.02.0002	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya			1552 Lembaga	1.078.300	445 Lembaga	185.163	352 Lembaga	235.267	-	-	-	-	797 Lembaga	420.431	51,35%	38,99%	51,35%	38,99%			Dinas Perdagangan				
		1.2.2.03.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		3.409.564	3.740.501		2.904.659		251.747		4.121.400	-	-	-		663.886		22,86%		663.886		19,47%						

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti	85%		100,00 %		85%		-		-	-	-	-	-	-	-			100,00 %			117,65 %		-
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti			125%		-		-		-	-	-	-	-	-	-						125,00%		
		1.2.2.03.03.0001	Operasional UPTD Metrologi legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan					16 Jenis	1.163.871	10 Jenis	112.158	0 Jenis	103.550	-	-	-	-	10 Jenis	215.708	62,50%	18,53%	62,50%	18,53%			Dinas Perdagangan
		1.2.2.03.03.0002	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang dilayani					23855 unit	1.305.990	8230 unit	91.778	3271 unit	206.283	-	-	-	-	11501 unit	298.061	48,21%	22,82%	48,21%	22,82%			Dinas Perdagangan
		1.2.2.03.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah alat UTTP yang diawasi					4500 unit	434.799	1295 unit	47.811	1204 unit	102.307	-	-	-	-	2499 unit	150.117	55,53%	34,53%	55,53%	34,53%			Dinas Perdagangan
		1.2.2.02	Parwisata																								
74	Meningkatkan kualitas udara dan air	1.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif			364.334		N/A		307.458		0		0		-	-		0		0,00%		0		0,00%		
				Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	11 lingkungan		14,00 lingkungan		11 lingkungan		-		-	-	-	-	-	-	-		-	14,00 lingkungan			127,27 %		-
		1.2.2.02.01.0001	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif					3 Lingkungan	307.458	1 Lingkungan	0	2 Lingkungan	0	-	-	-	-	3 Lingkungan	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
		1.2.2.02.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota			2.562.086		N/A		2.429.533		0		0		-	-		0		0,00%		0		0,00%		
				Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	45 unit		67,00 unit		45 unit		-		-	-	-	-	-	-	-		-	67,00 unit			148,89 %		-
		1.2.2.02.02.0001	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan					7 unit	2.125.023	0 unit	0	0 unit	0	-	-	-	-	0 unit	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
		1.2.2.02.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun					4 dokumen	304.510	0 dokumen	0	0 dokumen	0	-	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		1.2.2.02.03	Program Upaya Konservasi Energi		559.604	525.830		0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%						
				Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	154 kegiatan dan/atau usaha	147,00 kegiatan dan /atau usaha	154 kegiatan dan/atau usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,00 kegiatan dan /atau usaha		95,45 %		-					
				Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi		102,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-							102,08%							
		1.2.2.02.03.000 1	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi			120 lembaga	551.476	0 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				Dinas Lingkungan Hidup				
		1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan																										
75	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.2.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata		727.578	N/A		633.557		95.868		1.093.360		-	-		205.204		32,39%		205.204		28,20%						
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	60%	N/A	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A		-						
		1.2.2.01.01.000 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses			400 berkas	331.072	202 berkas	71.492	51 berkas	46.668	-	-	-	253 berkas	118.160	63,25%	35,69%	63,25%	35,69%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
		1.2.2.01.01.000 2	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses			169 berkas	302.485	62 berkas	24.376	13 berkas	62.668	-	-	-	75 berkas	87.044	44,38%	28,78%	44,38%	28,78%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
76	Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	1.2.2.01.02	Program Pemasaran Pariwisata		6.310.966	8.356.569		6.710.076		821.250		6.278.500		-	-		1.449.100		21,60%		1.449.100		22,96%						
				Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	50,01%	64,57 %	50,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,57 %		129,11 %		-						
				Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan		135,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-							135,25%							
		1.2.2.01.02.000 1	Fasilitasi promosi wisata	Jumlah fasilitasi promosi wisata			246 kali	3.122.157	42 kali	437.214	1 kali	298.565	-	-	-	43 kali	735.780	17,48%	23,57%	17,48%	23,57%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		1.2.2.01.02.0002	Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel			93 kali	1.145.623	22 kali	183.014	0 kali	60.863	-	-	-	-	22 kali	243.877	23,66%	21,29%	23,66%	21,29%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.02.0003	Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR			41 kali	1.423.167	7 kali	153.430	0 kali	232.162	-	-	-	-	7 kali	385.592	17,07%	27,09%	17,07%	27,09%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.02.0004	Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti			66 kali	1.019.129	10 kali	47.591	0 kali	36.260	-	-	-	-	10 kali	83.851	15,15%	8,23%	15,15%	8,23%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.03	Program Pengembangan Destinasi Wisata			6.913.683		N/A		8.671.949		1.014.665		5.573.290		-		1.571.994		18,13%		1.571.994		22,74%					
				Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	69,23%		71,43 %		69,23%		-		-		-		-		-		71,43 %		103,18 %		-				
		1.2.2.01.03.0001	Fasilitasi Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi			770 kali	620.051	33 kali	12.900	45 kali	33.596	-	-	-	-	78 kali	46.496	10,13%	7,50%	10,13%	7,50%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.03.0002	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan			3 kali	306.474	1 kali	31.719	0 kali	50.601	-	-	-	-	1 kali	82.320	33,33%	26,86%	33,33%	26,86%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.03.0003	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang			3 lokasi	2.354.241	3 lokasi	246.391	3 lokasi	209.878	-	-	-	-	3 lokasi	456.270	100,00%	19,38%	100,00%	19,38%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.03.0004	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang			2 lokasi	2.138.284	4 lokasi	462.937	2 lokasi	198.572	-	-	-	-	4 lokasi	661.509	200,00%	30,94%	200,00%	30,94%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.03.0005	Peningkatan Destinasi Wisata	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata			6 kali	1.856.094	0 kali	17.658	0 kali	49.545	-	-	-	-	0 kali	67.203	0,00%	3,62%	0,00%	3,62%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.03.0006	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	Jumlah museum yang dipelihara			6 lokasi	700.000	6 lokasi	204.783	8 lokasi	15.137	-	-	-	-	14 lokasi	219.921	233,33%	31,42%	233,33%	31,42%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		1.2.2.01.03.0007	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata			280 orang	696.804	45 orang	38.276	0 orang	0	-	-	-	-	45 orang	38.276	16,07%	5,49%	16,07%	5,49%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.2.2.01.04	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata		720.758	N/A	583.678	60.523	902.160	-	-	-	-	-	-	-	150.739	25,83%	150.739	20,91%							
				Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	80%	N/A	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-	-					
		1.2.2.01.04.0001	Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata			12 kali	432.990	3 kali	60.493	0 kali	68.248	-	-	-	-	3 kali	128.741	25,00%	29,73%	25,00%	29,73%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		1.2.2.01.04.0002	Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi			6 lokasi	150.688	0 lokasi	30	9 lokasi	21.968	-	-	-	-	9 lokasi	21.998	150,00%	14,60%	150,00%	14,60%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		1.2.2.06	Perdagangan																								
		1.2.2.02	Energi dan Sumber Daya Mineral																								
77	Meningkatkan kualitas udara dan air	1.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif		364.334	N/A	307.458	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%					
				Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	11 lingkungan	14,00 lingkungan	11 lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00 lingkungan	127,27%			-				
		1.2.2.02.01.0001	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif			3 Lingkungan	307.458	1 Lingkungan	0	2 Lingkungan	0	-	-	-	-	3 Lingkungan	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		1.2.2.02.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota		2.562.086	N/A	2.429.533	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%					
				Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	45 unit	67,00 unit	45 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,00 unit	148,89%			-				
		1.2.2.02.02.0001	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan			7 unit	2.125.023	0 unit	0	0 unit	0	-	-	-	-	0 unit	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)(Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										K
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	
		1.2.2.02.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun					4 dokumen	304.510	0 dokumen	0	0 dokumen	0	-	-	-	-	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
		1.2.2.02.03	Program Upaya Konservasi Energi			559.604		525.830		551.476		0		0	-	-	-	-		0		0,00%		0		0,00%		
				Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	154 kegiatan dan/atau usaha		147,00 kegiatan dan /atau usaha		154 kegiatan dan/atau usaha		-		-		-	-	-	-	-			-		147,00 kegiatan dan /atau usaha		95,45 %		-
				Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi			102,08%		-		-		-		-	-	-	-								102,08%		
		1.2.2.02.03.0001	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi					120 lembaga	551.476	0 lembaga	0	0 lembaga	0	-	-	-	-	0 lembaga	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Penunjang Urusan Pemerintahan																									
		2.1	Fungsi Manajemen																									
		2.1.2	Non Pelayanan Dasar																									
		2.1.2.01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan																									
78	Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraa n pemerintahan	2.1.2.01.01	Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD			83.608.376		N/A		97.729.065		15.049.099		56.490.970		-	-	-		20.698.197		21,18%		20.698.197		24,76%		
				Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%		100,00 %		100%		-		-		-	-	-	-	-		-		100,00 %		100,00 %		-	
		2.1.2.01.01.0001	Fasilitasi Reses DPRD	Jumlah Fasilitasi Reses					3 kali	13.479.901	49 kali	0	49 kali	0	-	-	-	-	98 kali	0	#####	0,00%	#####	0,00%			Sekretariat DPRD	
		2.1.2.01.01.0002	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD					185 kali	61.520.111	52 kali	11.262.048	35 kali	2.382.307	-	-	-	-	87 kali	13.644.355	47,03%	22,18%	47,03%	22,18%			Sekretariat DPRD	
		2.1.2.01.01.0003	Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi					240 kali	3.543.492	59 kali	414.519	7 kali	89.553	-	-	-	-	66 kali	504.071	27,50%	14,23%	27,50%	14,23%			Sekretariat DPRD	
		2.1.2.01.01.0004	Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan					264 kali	1.337.269	63 kali	154.160	59 kali	190.461	-	-	-	-	122 kali	344.622	46,21%	25,77%	46,21%	25,77%			Sekretariat DPRD	
		2.1.2.01.01.0005	Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD					5 media	17.848.291	5 media	3.218.373	7 media	2.986.776	-	-	-	-	7 media	6.205.149	140,00%	34,77%	140,00%	34,77%			Sekretariat DPRD	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
79	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1.2.01.02	Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan		471.152.353	N/A		631.316.396		29.428.348		327.275.970		-		-			62.155.944		9,85%		62.155.944		13,19%		
				Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-			N/A		N/A		-	
		2.1.2.01.02.0001	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				7 Lembaga	3.842.426	1 Lembaga	439.579	1 Lembaga	406.148	-	-	-	-	1 Lembaga	845.727	14,29%	22,01%	14,29%	22,01%			Kec. Asemrowo	
		2.1.2.01.02.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				4 Lembaga	2.655.133	1 Lembaga	212.786	1 Lembaga	222.327	-	-	-	-	1 Lembaga	435.113	25,00%	16,39%	25,00%	16,39%			Kec. Asemrowo	
		2.1.2.01.02.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				6 Lembaga	2.930.883	1 Lembaga	191.143	2 Lembaga	175.302	-	-	-	-	3 Lembaga	366.445	50,00%	12,50%	50,00%	12,50%			Kec. Asemrowo	
		2.1.2.01.02.0004	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				9 Lembaga	4.173.887	1 Lembaga	306.298	1 Lembaga	303.959	-	-	-	-	1 Lembaga	610.257	11,11%	14,62%	11,11%	14,62%			Kec. Benowo	
		2.1.2.01.02.0005	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				3 Lembaga	1.603.504	1 Lembaga	99.244	1 Lembaga	149.955	-	-	-	-	1 Lembaga	249.199	33,33%	15,54%	33,33%	15,54%			Kec. Benowo	
		2.1.2.01.02.0006	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat				7 Lembaga	3.040.791	1 Lembaga	368.835	1 Lembaga	375.487	-	-	-	-	1 Lembaga	744.322	14,29%	24,48%	14,29%	24,48%			Kec. Benowo	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0007	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	1.856.689	2 Lembaga	149.836	2 Lembaga	189.748	-	-	-	-	3 Lembaga	339.584	75,00%	18,29%	75,00%	18,29%			Kec. Benowo		
		2.1.2.01.02.0008	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	1.781.576	6 Lembaga	137.922	6 Lembaga	162.916	-	-	-	-	6 Lembaga	300.838	100,00%	16,89%	100,00%	16,89%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.02.0009	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.049.576	1 Lembaga	371.735	1 Lembaga	359.969	-	-	-	-	1 Lembaga	731.703	11,11%	18,07%	11,11%	18,07%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.02.0010	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	4.441.517	1 Lembaga	461.199	1 Lembaga	433.926	-	-	-	-	1 Lembaga	895.125	9,09%	20,15%	9,09%	20,15%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.02.0011	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	4.574.122	1 Lembaga	370.957	1 Lembaga	403.444	-	-	-	-	1 Lembaga	774.400	12,50%	16,93%	12,50%	16,93%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.02.0012	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	5.089.985	3 Lembaga	550.927	3 Lembaga	507.881	-	-	-	-	3 Lembaga	1.058.807	25,00%	20,80%	25,00%	20,80%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.02.0013	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	4.818.171	1 Lembaga	251.080	1 Lembaga	316.645	-	-	-	-	1 Lembaga	567.725	14,29%	11,78%	14,29%	11,78%			Kec. Bulak		
		2.1.2.01.02.0014	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			3 Lembaga	4.562.785	1 Lembaga	251.807	1 Lembaga	261.831	-	-	-	-	1 Lembaga	513.639	33,33%	11,26%	33,33%	11,26%			Kec. Bulak		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0015	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			3 Lembaga	5.221.926	2 Lembaga	290.822	1 Lembaga	297.545	-	-	-	-	2 Lembaga	588.367	66,67%	11,27%	66,67%	11,27%			Kec. Bulak		
		2.1.2.01.02.0016	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	5.608.972	1 Lembaga	245.565	1 Lembaga	259.570	-	-	-	-	2 Lembaga	505.136	28,57%	9,01%	28,57%	9,01%			Kec. Bulak		
		2.1.2.01.02.0017	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	3.220.069	1 Lembaga	70.197	1 Lembaga	133.090	-	-	-	-	1 Lembaga	203.287	16,67%	6,31%	16,67%	6,31%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.02.0018	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.960.377	1 Lembaga	158.849	1 Lembaga	211.069	-	-	-	-	1 Lembaga	369.918	20,00%	12,50%	20,00%	12,50%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.02.0019	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	2.554.293	6 Lembaga	164.815	6 Lembaga	209.487	-	-	-	-	6 Lembaga	374.302	100,00%	14,65%	100,00%	14,65%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.02.0020	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.422.856	1 Lembaga	146.607	1 Lembaga	184.094	-	-	-	-	1 Lembaga	330.701	14,29%	9,66%	14,29%	9,66%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.02.0021	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.290.384	37 Lembaga	92.268	30 Lembaga	161.544	-	-	-	-	41 Lembaga	253.812	455,56%	5,92%	455,56%	5,92%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.02.0022	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	3.640.097	9 Lembaga	168.031	9 Lembaga	246.513	-	-	-	-	9 Lembaga	414.544	225,00%	11,39%	225,00%	11,39%			Kec. Gayungan		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)(Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0023	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	3.652.368	1 Lembaga	80.684	1 Lembaga	200.639	-	-	-	-	1 Lembaga	281.323	12,50%	7,70%	12,50%	7,70%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.02.0024	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	2.087.049	1 Lembaga	83.218	1 Lembaga	135.820	-	-	-	-	1 Lembaga	219.038	16,67%	10,50%	16,67%	10,50%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.02.0025	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.102.930	5 Lembaga	362.994	5 Lembaga	293.027	-	-	-	-	5 Lembaga	656.020	125,00%	31,20%	125,00%	31,20%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.02.0026	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	4.214.818	10 Lembaga	117.165	11 Lembaga	145.891	-	-	-	-	11 Lembaga	263.056	100,00%	6,24%	100,00%	6,24%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.02.0027	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	5.470.368	11 Lembaga	448.044	11 Lembaga	293.728	-	-	-	-	11 Lembaga	741.772	91,67%	13,56%	91,67%	13,56%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.02.0028	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	5.104.789	6 Lembaga	192.262	7 Lembaga	187.690	-	-	-	-	7 Lembaga	379.952	87,50%	7,44%	87,50%	7,44%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.02.0029	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			15 Lembaga	4.727.350	15 Lembaga	402.304	18 Lembaga	282.107	-	-	-	-	18 Lembaga	684.410	120,00%	14,48%	120,00%	14,48%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.02.0030	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	5.883.473	2 Lembaga	183.226	1 Lembaga	206.698	-	-	-	-	2 Lembaga	389.924	25,00%	6,63%	25,00%	6,63%			Kec. Gubeng		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.1.2.01.02.003 1	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Saratajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	4.380.775	1 Lembaga	248.453	1 Lembag a	261.450	-	-	-	-	1 Lembaga	509.903	12,50%	11,64%	12,50%	11,64%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.02.003 2	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			3 Lembaga	2.435.027	1 Lembaga	230.251	1 Lembag a	245.162	-	-	-	-	1 Lembaga	475.413	33,33%	19,52%	33,33%	19,52%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.02.003 3	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	4.877.055	1 Lembaga	233.771	1 Lembag a	224.229	-	-	-	-	1 Lembaga	458.001	9,09%	9,39%	9,09%	9,39%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.02.003 4	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	4.693.376	1 Lembaga	210.404	1 Lembag a	277.798	-	-	-	-	1 Lembaga	488.201	8,33%	10,40%	8,33%	10,40%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.02.003 5	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	3.606.836	1 Lembaga	0	1 Lembag a	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.02.003 6	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	3.530.819	9 Lembaga	320.199	9 Lembag a	304.371	-	-	-	-	17 Lembaga	624.569	212,50%	17,69%	212,50%	17,69%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.02.003 7	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	3.320.890	9 Lembaga	120.023	8 Lembag a	151.513	-	-	-	-	9 Lembaga	271.536	112,50%	8,18%	112,50%	8,18%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.02.003 8	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	1.937.886	1 Lembaga	154.967	1 Lembag a	205.676	-	-	-	-	1 Lembaga	360.643	25,00%	18,61%	25,00%	18,61%			Kec. Gunung Anyar		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0039	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	2.973.996	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	11,11%	0,00%	11,11%	0,00%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.02.0040	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	2.999.504	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.02.0041	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	4.590.666	12 Lembaga	139.725	14 Lembaga	167.073	-	-	-	-	14 Lembaga	306.799	116,67%	6,68%	116,67%	6,68%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.02.0042	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			3 Lembaga	2.416.672	3 Lembaga	289.414	5 Lembaga	237.684	-	-	-	-	5 Lembaga	527.098	166,67%	21,81%	166,67%	21,81%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.02.0043	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.169.708	4 Lembaga	0	8 Lembaga	0	-	-	-	-	8 Lembaga	0	200,00%	0,00%	200,00%	0,00%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.02.0044	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.126.312	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			Kec. Karangpilang		
		2.1.2.01.02.0045	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	5.121.915	1 Lembaga	137.163	1 Lembaga	189.867	-	-	-	-	1 Lembaga	327.031	8,33%	6,38%	8,33%	6,38%			Kec. Karangpilang		
		2.1.2.01.02.0046	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	3.453.452	1 Lembaga	211.742	1 Lembaga	266.549	-	-	-	-	1 Lembaga	478.291	9,09%	13,85%	9,09%	13,85%			Kec. Karangpilang		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0047	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			3 Lembaga	1.988.300	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%			Kec. Karangpilang		
		2.1.2.01.02.0048	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	4.292.388	1 Lembaga	393.380	1 Lembaga	367.237	-	-	-	-	1 Lembaga	760.617	12,50%	17,72%	12,50%	17,72%			Kec. Kenjeran		
		2.1.2.01.02.0049	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			2 Lembaga	3.665.799	3 Lembaga	412.587	2 Lembaga	410.443	-	-	-	-	3 Lembaga	823.030	150,00%	22,45%	150,00%	22,45%			Kec. Kenjeran		
		2.1.2.01.02.0050	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.520.566	2 Lembaga	259.160	1 Lembaga	260.113	-	-	-	-	2 Lembaga	519.273	40,00%	20,60%	40,00%	20,60%			Kec. Kenjeran		
		2.1.2.01.02.0051	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	6.174.231	1 Lembaga	609.386	1 Lembaga	560.601	-	-	-	-	1 Lembaga	1.169.986	10,00%	18,95%	10,00%	18,95%			Kec. Kenjeran		
		2.1.2.01.02.0052	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	3.424.996	1 Lembaga	420.537	1 Lembaga	479.344	-	-	-	-	1 Lembaga	899.882	20,00%	26,27%	20,00%	26,27%			Kec. Krembangan		
		2.1.2.01.02.0053	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	5.223.512	1 Lembaga	356.439	1 Lembaga	415.821	-	-	-	-	1 Lembaga	772.260	12,50%	14,78%	12,50%	14,78%			Kec. Krembangan		
		2.1.2.01.02.0054	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			13 Lembaga	6.046.784	2 Lembaga	0	2 Lembaga	0	-	-	-	-	2 Lembaga	0	15,38%	0,00%	15,38%	0,00%			Kec. Krembangan		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		2.1.2.01.02.0055	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	3.973.332	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.02.0056	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.654.633	1 Lembaga	98.826	1 Lembaga	125.432	-	-	-	-	1 Lembaga	224.258	14,29%	6,14%	14,29%	6,14%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.02.0057	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.355.680	4 Lembaga	142.061	9 Lembaga	245.256	-	-	-	-	9 Lembaga	387.318	180,00%	16,44%	180,00%	16,44%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.02.0058	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			3 Lembaga	2.176.889	3 Lembaga	378.920	3 Lembaga	350.837	-	-	-	-	3 Lembaga	729.757	100,00%	33,52%	100,00%	33,52%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.02.0059	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.548.155	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.02.0060	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.866.207	3 Lembaga	263.102	4 Lembaga	408.832	-	-	-	-	4 Lembaga	671.934	57,14%	17,38%	57,14%	17,38%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.02.0061	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.785.388	3 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	3 Lembaga	0	60,00%	0,00%	60,00%	0,00%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.02.0062	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			3 Lembaga	1.948.751	3 Lembaga	122.483	4 Lembaga	201.164	-	-	-	-	4 Lembaga	323.647	133,33%	16,61%	133,33%	16,61%			Kec. Lakarsantri				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.02.0063	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	3.849.723	8 Lembaga	0	8 Lembaga	0	-	-	-	-	8 Lembaga	0	80,00%	0,00%	80,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.02.0064	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	5.791.251	1 Lembaga	151.200	1 Lembaga	183.450	-	-	-	-	1 Lembaga	334.651	10,00%	5,78%	10,00%	5,78%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.02.0065	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	3.787.612	1 Lembaga	0	2 Lembaga	0	-	-	-	-	2 Lembaga	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.02.0066	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	1.914.524	1 Lembaga	84.301	2 Lembaga	163.535	-	-	-	-	2 Lembaga	247.836	50,00%	12,95%	50,00%	12,95%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.02.0067	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			13 Lembaga	5.711.066	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	7,69%	0,00%	7,69%	0,00%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.02.0068	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	4.098.862	1 Lembaga	141.078	1 Lembaga	177.582	-	-	-	-	1 Lembaga	318.661	9,09%	7,77%	9,09%	7,77%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.02.0069	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	4.176.412	9 Lembaga	187.866	10 Lembaga	178.222	-	-	-	-	10 Lembaga	366.089	100,00%	8,77%	100,00%	8,77%			Kec. Pabean Cantian				
		2.1.2.01.02.0070	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	5.047.587	10 Lembaga	706.947	10 Lembaga	477.720	-	-	-	-	10 Lembaga	1.184.667	100,00%	23,47%	100,00%	23,47%			Kec. Pabean Cantian				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6*12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.02.007 1	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	6.979.204	1 Lembaga	190.495	2 Lembaga	227.986	-	-	-	-	2 Lembaga	418.482	25,00%	6,00%	25,00%	6,00%			Kec. Pabean Cantian				
		2.1.2.01.02.007 2	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.226.661	1 Lembaga	257.437	1 Lembaga	205.171	-	-	-	-	1 Lembaga	462.608	11,11%	10,94%	11,11%	10,94%			Kec. Pabean Cantian				
		2.1.2.01.02.007 3	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	3.727.799	2 Lembaga	233.678	2 Lembaga	253.222	-	-	-	-	2 Lembaga	486.900	20,00%	13,06%	20,00%	13,06%			Kec. Pabean Cantian				
		2.1.2.01.02.007 4	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	4.733.250	1 Lembaga	252.510	1 Lembaga	269.492	-	-	-	-	1 Lembaga	522.002	10,00%	11,03%	10,00%	11,03%			Kec. Pakal				
		2.1.2.01.02.007 5	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.835.869	1 Lembaga	202.927	1 Lembaga	232.962	-	-	-	-	1 Lembaga	435.889	20,00%	15,37%	20,00%	15,37%			Kec. Pakal				
		2.1.2.01.02.007 6	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	2.656.057	1 Lembaga	185.865	1 Lembaga	213.650	-	-	-	-	1 Lembaga	399.515	16,67%	15,04%	16,67%	15,04%			Kec. Pakal				
		2.1.2.01.02.007 7	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			8 Lembaga	3.663.305	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	12,50%	0,00%	12,50%	0,00%			Kec. Pakal				
		2.1.2.01.02.007 8	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			13 Lembaga	6.861.211	1 Lembaga	212.992	1 Lembaga	244.374	-	-	-	-	1 Lembaga	457.366	7,69%	6,67%	7,69%	6,67%			Kec. Rungkut				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Output) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0079	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	4.113.540	2 Lembaga	228.058	2 Lembaga	251.464	-	-	-	-	2 Lembaga	479.522	20,00%	11,66%	20,00%	11,66%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.02.0080	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			15 Lembaga	6.494.996	1 Lembaga	181.785	1 Lembaga	300.457	-	-	-	-	1 Lembaga	482.241	6,67%	7,42%	6,67%	7,42%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.02.0081	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			15 Lembaga	4.965.833	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	6,67%	0,00%	6,67%	0,00%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.02.0082	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	3.909.353	1 Lembaga	148.550	1 Lembaga	267.753	-	-	-	-	1 Lembaga	416.303	8,33%	10,65%	8,33%	10,65%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.02.0083	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	4.955.526	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	9,09%	0,00%	9,09%	0,00%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.02.0084	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.018.528	2 Lembaga	124.285	1 Lembaga	138.521	-	-	-	-	2 Lembaga	262.805	50,00%	13,02%	50,00%	13,02%			Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.02.0085	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	6.847.325	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%			Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.02.0086	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	4.300.052	1 Lembaga	171.730	1 Lembaga	161.213	-	-	-	-	1 Lembaga	332.942	14,29%	7,74%	14,29%	7,74%			Kec. Sambikerep		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)(Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.1.2.01.02.0087	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	5.743.688	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%			Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.02.0088	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.644.405	9 Lembaga	665.391	9 Lembaga	585.054	-	-	-	-	9 Lembaga	1.250.445	100,00%	26,92%	100,00%	26,92%			Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02.0089	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.586.267	7 Lembaga	0	7 Lembaga	0	-	-	-	-	7 Lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02.0090	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	4.411.591	10 Lembaga	397.082	10 Lembaga	431.146	-	-	-	-	10 Lembaga	828.228	83,33%	18,77%	83,33%	18,77%			Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02.0091	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			18 Lembaga	7.206.112	24 Lembaga	0	18 Lembaga	0	-	-	-	-	24 Lembaga	0	133,33%	0,00%	133,33%	0,00%			Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02.0092	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			14 Lembaga	6.099.561	15 Lembaga	435.342	15 Lembaga	673.228	-	-	-	-	15 Lembaga	1.108.570	107,14%	18,17%	107,14%	18,17%			Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02.0093	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	4.120.565	10 Lembaga	300.828	11 Lembaga	366.042	-	-	-	-	11 Lembaga	666.870	110,00%	16,18%	110,00%	16,18%			Kec. Sawahan		
		2.1.2.01.02.0094	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			17 Lembaga	7.045.704	16 Lembaga	257.824	16 Lembaga	324.876	-	-	-	-	16 Lembaga	582.701	94,12%	8,27%	94,12%	8,27%			Kec. Semampir		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0095	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	4.644.574	22 Lembaga	453.470	22 Lembaga	530.774	-	-	-	-	22 Lembaga	984.244	200,00%	21,19%	200,00%	21,19%			Kec. Semampir		
		2.1.2.01.02.0096	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	6.699.220	11 Lembaga	457.013	12 Lembaga	528.848	-	-	-	-	12 Lembaga	985.861	109,09%	14,72%	109,09%	14,72%			Kec. Semampir		
		2.1.2.01.02.0097	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			14 Lembaga	5.991.977	14 Lembaga	0	14 Lembaga	0	-	-	-	-	14 Lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Semampir		
		2.1.2.01.02.0098	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			16 Lembaga	7.523.021	16 Lembaga	540.484	16 Lembaga	677.948	-	-	-	-	16 Lembaga	1.218.432	100,00%	16,20%	100,00%	16,20%			Kec. Semampir		
		2.1.2.01.02.0099	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	3.909.204	1 Lembaga	324.482	1 Lembaga	299.270	-	-	-	-	1 Lembaga	623.752	10,00%	15,96%	10,00%	15,96%			Kec. Simokerto		
		2.1.2.01.02.0100	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.782.835	1 Lembaga	453.785	2 Lembaga	650.707	-	-	-	-	2 Lembaga	1.104.492	28,57%	29,20%	28,57%	29,20%			Kec. Simokerto		
		2.1.2.01.02.0101	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			14 Lembaga	5.781.898	1 Lembaga	320.994	1 Lembaga	297.791	-	-	-	-	1 Lembaga	618.784	7,14%	10,70%	7,14%	10,70%			Kec. Simokerto		
		2.1.2.01.02.0102	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	4.424.565	1 Lembaga	647.077	1 Lembaga	535.938	-	-	-	-	1 Lembaga	1.183.015	10,00%	26,74%	10,00%	26,74%			Kec. Simokerto		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.0103	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	4.369.731	1 Lembaga	303.954	1 Lembaga	298.290	-	-	-	-	1 Lembaga	602.244	9,09%	13,78%	9,09%	13,78%			Kec. Simokerto
		2.1.2.01.02.0104	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					7 Lembaga	3.052.322	1 Lembaga	168.053	1 Lembaga	185.833	-	-	-	-	1 Lembaga	353.885	14,29%	11,59%	14,29%	11,59%			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0105	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	3.682.544	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0106	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4.375.762	1 Lembaga	323.183	2 Lembaga	308.740	-	-	-	-	2 Lembaga	631.923	22,22%	14,44%	22,22%	14,44%			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0107	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4.509.051	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	11,11%	0,00%	11,11%	0,00%			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0108	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	2.973.093	1 Lembaga	165.210	1 Lembaga	264.270	-	-	-	-	1 Lembaga	429.480	11,11%	14,45%	11,11%	14,45%			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0109	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	4.091.704	1 Lembaga	172.537	1 Lembaga	195.319	-	-	-	-	1 Lembaga	367.856	11,11%	8,99%	11,11%	8,99%			Kec. Sukolilo
		2.1.2.01.02.0110	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					13 Lembaga	4.727.736	1 Lembaga	82.648	1 Lembaga	177.586	-	-	-	-	1 Lembaga	260.234	7,69%	5,50%	7,69%	5,50%			Kec. Sukolilo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)(Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.011	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	1.879.462	2 Lembaga	55.493	1 Lembaga	129.039	-	-	-	-	2 Lembaga	184.532	50,00%	9,82%	50,00%	9,82%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02.0112	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.680.429	1 Lembaga	142.686	1 Lembaga	221.407	-	-	-	-	1 Lembaga	364.093	14,29%	9,89%	14,29%	9,89%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02.0113	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	5.259.181	2 Lembaga	292.857	1 Lembaga	356.159	-	-	-	-	2 Lembaga	649.016	20,00%	12,34%	20,00%	12,34%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02.0114	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.501.961	1 Lembaga	66.577	1 Lembaga	106.137	-	-	-	-	1 Lembaga	172.714	25,00%	6,90%	25,00%	6,90%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02.0115	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.688.199	1 Lembaga	214.467	1 Lembaga	313.436	-	-	-	-	1 Lembaga	527.902	20,00%	19,64%	20,00%	19,64%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02.0116	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.344.232	1 Lembaga	178.540	1 Lembaga	206.304	-	-	-	-	1 Lembaga	384.843	25,00%	16,42%	25,00%	16,42%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.02.0117	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.616.094	2 Lembaga	116.222	3 Lembaga	148.114	-	-	-	-	5 Lembaga	264.336	100,00%	10,10%	100,00%	10,10%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02.0118	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	5.132.727	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	9,09%	0,00%	9,09%	0,00%			Kec. Tambaksari		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.0119	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.547.660	9 Lembaga	522.198	8 Lembaga	474.305	-	-	-	-	9 Lembaga	996.503	100,00%	21,91%	100,00%	21,91%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02.0120	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	5.648.299	3 Lembaga	299.419	1 Lembaga	321.705	-	-	-	-	3 Lembaga	621.124	27,27%	11,00%	27,27%	11,00%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02.0121	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	5.485.871	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	9,09%	0,00%	9,09%	0,00%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02.0122	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	5.854.908	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	9,09%	0,00%	9,09%	0,00%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02.0123	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	3.739.052	2 Lembaga	0	2 Lembaga	0	-	-	-	-	3 Lembaga	0	33,33%	0,00%	33,33%	0,00%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02.0124	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	5.256.987	1 Lembaga	493.257	1 Lembaga	774.721	-	-	-	-	1 Lembaga	1.267.978	11,11%	24,12%	11,11%	24,12%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.02.0125	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.019.253	1 Lembaga	132.648	1 Lembaga	220.099	-	-	-	-	1 Lembaga	352.747	14,29%	11,68%	14,29%	11,68%			Kec. Tandes		
		2.1.2.01.02.0126	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			4 Lembaga	2.265.438	1 Lembaga	169.845	1 Lembaga	205.821	-	-	-	-	1 Lembaga	375.666	25,00%	16,58%	25,00%	16,58%			Kec. Tandes		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Output e)/Kegiatan(Output ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.1.2.01.02.0127	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.156.705	1 Lembaga	198.704	2 Lembaga	287.526	-	-	-	-	2 Lembaga	486.230	22,22%	11,70%	22,22%	11,70%			Kec. Tandes		
		2.1.2.01.02.0128	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			14 Lembaga	5.791.571	4 Lembaga	315.193	1 Lembaga	367.618	-	-	-	-	4 Lembaga	682.811	28,57%	11,79%	28,57%	11,79%			Kec. Tandes		
		2.1.2.01.02.0129	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	3.160.494	1 Lembaga	152.240	1 Lembaga	213.283	-	-	-	-	1 Lembaga	365.522	16,67%	11,57%	16,67%	11,57%			Kec. Tandes		
		2.1.2.01.02.0130	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.010.988	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	11,11%	0,00%	11,11%	0,00%			Kec. Tandes		
		2.1.2.01.02.0131	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			14 Lembaga	6.588.069	15 Lembaga	0	16 Lembaga	0	-	-	-	-	16 Lembaga	0	114,29%	0,00%	114,29%	0,00%			Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.02.0132	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	5.740.631	10 Lembaga	0	10 Lembaga	0	-	-	-	-	10 Lembaga	0	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.02.0133	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	3.547.427	6 Lembaga	0	7 Lembaga	0	-	-	-	-	7 Lembaga	0	116,67%	0,00%	116,67%	0,00%			Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.02.0134	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	4.573.720	6 Lembaga	472.623	7 Lembaga	402.425	-	-	-	-	7 Lembaga	875.048	116,67%	19,13%	116,67%	19,13%			Kec. Tegalsari		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.02.013 5	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					11 Lembaga	5.314.960	11 Lembaga	366.159	11 Lembaga	343.097	-	-	-	-	11 Lembaga	709.256	100,00%	13,34%	100,00%	13,34%			Kec. Tegalsari
		2.1.2.01.02.013 6	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2.566.295	1 Lembaga	299.183	1 Lembaga	286.319	-	-	-	-	1 Lembaga	585.503	20,00%	22,82%	20,00%	22,82%			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.013 7	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	2.616.209	1 Lembaga	176.650	1 Lembaga	157.334	-	-	-	-	1 Lembaga	333.984	16,67%	12,77%	16,67%	12,77%			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.013 8	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	3.413.964	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	2 Lembaga	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.013 9	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					6 Lembaga	3.224.209	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	16,67%	0,00%	16,67%	0,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo
		2.1.2.01.02.014 0	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					8 Lembaga	4.700.916	2 Lembaga	373.855	1 Lembaga	368.922	-	-	-	-	2 Lembaga	742.777	25,00%	15,80%	25,00%	15,80%			Kec. Wiyung
		2.1.2.01.02.014 1	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					9 Lembaga	3.170.388	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	11,11%	0,00%	11,11%	0,00%			Kec. Wiyung
		2.1.2.01.02.014 2	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat					5 Lembaga	2.702.980	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%			Kec. Wiyung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.02.014.3	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	4.540.258	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	9,09%	0,00%	9,09%	0,00%			Kec. Wiyung		
		2.1.2.01.02.014.4	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			13 Lembaga	5.200.227	30 Lembaga	0	30 Lembaga	0	-	-	-	-	30 Lembaga	0	230,77%	0,00%	230,77%	0,00%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.02.014.5	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	5.292.538	69 Lembaga	0	68 Lembaga	0	-	-	-	-	69 Lembaga	0	766,67%	0,00%	766,67%	0,00%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.02.014.6	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			10 Lembaga	3.611.674	25 Lembaga	0	20 Lembaga	0	-	-	-	-	28 Lembaga	0	280,00%	0,00%	280,00%	0,00%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.02.014.7	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosemo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			6 Lembaga	3.741.617	42 Lembaga	0	42 Lembaga	0	-	-	-	-	42 Lembaga	0	700,00%	0,00%	700,00%	0,00%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.02.014.8	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			7 Lembaga	3.220.799	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	14,29%	0,00%	14,29%	0,00%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.02.014.9	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Damo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	3.308.763	2 Lembaga	0	10 Lembaga	0	-	-	-	-	10 Lembaga	0	90,91%	0,00%	90,91%	0,00%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.02.015.0	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			11 Lembaga	5.302.961	1 Lembaga	406.457	1 Lembaga	370.839	-	-	-	-	1 Lembaga	777.296	9,09%	14,66%	9,09%	14,66%			Kec. Wonokromo		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16							
		2.1.2.01.02.0151	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			5 Lembaga	2.538.724	1 Lembaga	227.184	1 Lembaga	355.033	-	-	-	-	1 Lembaga	582.216	20,00%	22,93%	20,00%	22,93%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.02.0152	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	6.906.671	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.02.0153	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			12 Lembaga	5.571.470	1 Lembaga	0	1 Lembaga	0	-	-	-	-	1 Lembaga	0	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.02.0154	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat			9 Lembaga	4.955.068	1 Lembaga	501.445	1 Lembaga	745.019	-	-	-	-	1 Lembaga	1.246.464	11,11%	25,16%	11,11%	25,16%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.03	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		67.363.471	N/A		85.564.783		18.081.556		203.364.230		-		-		38.417.980		44,90%		38.417.980		57,03%			
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100%	N/A	100%		-		-		-		-	-			-	N/A		N/A		-			
		2.1.2.01.03.0001	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			139 Lembaga	1.195.871	139 Lembaga	244.670	139 Lembaga	280.306	-	-	-	-	139 Lembaga	524.976	100,00%	43,90%	100,00%	43,90%			Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.03.0002	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	126.157	12 Kali	2.160	4 Kali	17.088	-	-	-	-	16 Kali	19.248	33,33%	15,26%	33,33%	15,26%			Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.03.0003	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			183 Lembaga	1.412.549	184 Lembaga	327.150	183 Lembaga	347.788	-	-	-	-	184 Lembaga	674.938	100,55%	47,78%	100,55%	47,78%			Kec. Benowo		
		2.1.2.01.03.0004	Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	Pengembangan Kampung Edukasi			3 kali	75.037	0 kali	0	0 kali	10.744	-	-	-	-	0 kali	10.744	0,00%	14,32%	0,00%	14,32%			Kec. Benowo		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6*12		15=14/5*100		16									
		2.1.2.01.03.0005	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	172.537	12 Kali	2.880	12 Kali	10.744	-	-	-	-	24 Kali	13.624	50,00%	7,90%	50,00%	7,90%			Kec. Benowo				
		2.1.2.01.03.0006	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			414 Lembaga	3.079.344	414 Lembaga	710.565	426 Lembaga	741.969	-	-	-	-	426 Lembaga	1.452.533	102,90%	47,17%	102,90%	47,17%			Kec. Bubutan				
		2.1.2.01.03.0007	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	60.860	8 Kali	3.600	12 Kali	8.256	-	-	-	-	20 Kali	11.856	41,67%	19,48%	41,67%	19,48%			Kec. Bubutan				
		2.1.2.01.03.0008	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			157 Lembaga	1.355.692	158 Lembaga	276.815	158 Lembaga	309.138	-	-	-	-	159 Lembaga	585.953	101,27%	43,22%	101,27%	43,22%			Kec. Bulak				
		2.1.2.01.03.0009	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	122.140	12 Kali	2.880	12 Kali	22.268	-	-	-	-	24 Kali	25.148	50,00%	20,59%	50,00%	20,59%			Kec. Bulak				
		2.1.2.01.03.0010	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			195 Lembaga	1.625.601	195 Lembaga	341.315	197 Lembaga	381.299	-	-	-	-	199 Lembaga	722.614	102,05%	44,45%	102,05%	44,45%			Kec. Dukuh Pakis				
		2.1.2.01.03.0011	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	131.239	12 Kali	2.880	4 Kali	21.720	-	-	-	-	16 Kali	24.600	33,33%	18,74%	33,33%	18,74%			Kec. Dukuh Pakis				
		2.1.2.01.03.0012	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			197 Lembaga	1.599.290	197 Lembaga	344.475	197 Lembaga	371.102	-	-	-	-	197 Lembaga	715.577	100,00%	44,74%	100,00%	44,74%			Kec. Gayungan				
		2.1.2.01.03.0013	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	129.580	12 Kali	2.880	12 Kali	21.784	-	-	-	-	24 Kali	24.664	50,00%	19,03%	50,00%	19,03%			Kec. Gayungan				
		2.1.2.01.03.0014	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			364 Lembaga	2.749.169	364 Lembaga	421.420	363 Lembaga	667.070	-	-	-	-	365 Lembaga	1.088.490	100,27%	39,59%	100,27%	39,59%			Kec. Genteng				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.03.0015	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	74.179	12 Kali	3.600	6 Kali	9.928	-	-	-	-	18 Kali	13.528	37,50%	18,24%	37,50%	18,24%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.03.0016	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			488 Lembaga	3.554.076	481 Lembaga	825.380	480 Lembaga	857.228	-	-	-	-	481 Lembaga	1.682.608	98,57%	47,34%	98,57%	47,34%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.03.0017	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	135.447	12 Kali	4.320	12 Kali	21.360	-	-	-	-	24 Kali	25.680	50,00%	18,96%	50,00%	18,96%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.03.0018	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			215 Lembaga	1.683.606	217 Lembaga	376.469	217 Lembaga	395.369	-	-	-	-	217 Lembaga	771.837	100,93%	45,84%	100,93%	45,84%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.03.0019	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	175.385	12 Kali	1.440	14 Kali	31.632	-	-	-	-	26 Kali	33.072	54,17%	18,86%	54,17%	18,86%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.03.0020	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			168 Lembaga	1.393.544	173 Lembaga	294.175	168 Lembaga	329.704	-	-	-	-	173 Lembaga	623.878	102,98%	44,77%	102,98%	44,77%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.03.0021	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	69.980	14 Kali	2.880	14 Kali	10.812	-	-	-	-	28 Kali	13.692	58,33%	19,57%	58,33%	19,57%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.03.0022	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			220 Lembaga	1.777.264	220 Lembaga	381.619	220 Lembaga	420.155	-	-	-	-	220 Lembaga	801.773	100,00%	45,11%	100,00%	45,11%			Kec. Karangpilang		
		2.1.2.01.03.0023	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	129.580	12 Kali	2.880	4 Kali	21.448	-	-	-	-	16 Kali	24.328	33,33%	18,77%	33,33%	18,77%			Kec. Karangpilang		
		2.1.2.01.03.0024	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			456 Lembaga	3.401.971	460 Lembaga	783.051	460 Lembaga	822.648	-	-	-	-	460 Lembaga	1.605.700	100,88%	47,20%	100,88%	47,20%			Kec. Kenjeran		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6*12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.03.0025	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	165.743	12 Kali	2.160	4 Kali	27.828	-	-	-	-	16 Kali	29.988	33,33%	18,09%	33,33%	18,09%			Kec. Kenjeran				
		2.1.2.01.03.0026	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			430 Lembaga	3.206.548	430 Lembaga	738.615	430 Lembaga	779.279	-	-	-	-	430 Lembaga	1.517.893	100,00%	47,34%	100,00%	47,34%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.03.0027	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	161.362	12 Kali	3.600	4 Kali	26.340	-	-	-	-	16 Kali	29.940	33,33%	18,55%	33,33%	18,55%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.03.0028	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			199 Lembaga	1.622.199	200 Lembaga	348.640	200 Lembaga	381.332	-	-	-	-	200 Lembaga	729.972	100,50%	45,00%	100,50%	45,00%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.03.0029	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	169.353	12 Kali	4.320	12 Kali	20.368	-	-	-	-	24 Kali	24.688	50,00%	14,58%	50,00%	14,58%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.03.0030	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			347 Lembaga	2.673.233	347 Lembaga	604.265	347 Lembaga	637.514	-	-	-	-	348 Lembaga	1.241.779	100,29%	46,45%	100,29%	46,45%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.03.0031	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	137.490	12 Kali	4.320	4 Kali	21.364	-	-	-	-	16 Kali	25.684	33,33%	18,68%	33,33%	18,68%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.03.0032	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			377 Lembaga	2.836.011	376 Lembaga	652.449	377 Lembaga	677.837	-	-	-	-	377 Lembaga	1.330.286	100,00%	46,91%	100,00%	46,91%			Kec. Pabean Cantian				
		2.1.2.01.03.0033	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	132.934	12 Kali	3.360	12 Kali	23.972	-	-	-	-	24 Kali	27.332	50,00%	20,56%	50,00%	20,56%			Kec. Pabean Cantian				
		2.1.2.01.03.0034	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi masyarakat yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			226 Lembaga	1.804.702	226 Lembaga	395.235	226 Lembaga	424.628	-	-	-	-	226 Lembaga	819.863	100,00%	45,43%	100,00%	45,43%			Kec. Pakal				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.03.0035	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	121.939	12 Kali	2.880	8 Kali	23.904	-	-	-	-	20 Kali	26.784	41,67%	21,97%	41,67%	21,97%			Kec. Pakal				
		2.1.2.01.03.0036	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			488 Lembaga	3.646.650	488 Lembaga	835.280	488 Lembaga	894.704	-	-	-	-	488 Lembaga	1.729.984	100,00%	47,44%	100,00%	47,44%			Kec. Rungkut				
		2.1.2.01.03.0037	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	166.404	12 Kali	4.320	12 Kali	28.384	-	-	-	-	24 Kali	32.704	50,00%	19,65%	50,00%	19,65%			Kec. Rungkut				
		2.1.2.01.03.0038	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			250 Lembaga	1.980.189	261 Lembaga	450.980	259 Lembaga	480.824	-	-	-	-	261 Lembaga	931.804	104,40%	47,06%	104,40%	47,06%			Kec. Sambikerep				
		2.1.2.01.03.0039	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	133.429	12 Kali	2.880	12 Kali	25.088	-	-	-	-	24 Kali	27.968	50,00%	20,96%	50,00%	20,96%			Kec. Sambikerep				
		2.1.2.01.03.0040	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			627 Lembaga	4.835.350	627 Lembaga	1.080.255	627 Lembaga	1.152.406	-	-	-	-	627 Lembaga	2.232.661	100,00%	46,17%	100,00%	46,17%			Kec. Sawahan				
		2.1.2.01.03.0041	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	138.721	12 Kali	4.320	0 Kali	21.376	-	-	-	-	12 Kali	25.696	25,00%	18,52%	25,00%	18,52%			Kec. Sawahan				
		2.1.2.01.03.0042	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			636 Lembaga	4.640.968	636 Lembaga	1.091.089	636 Lembaga	1.130.660	-	-	-	-	636 Lembaga	2.221.749	100,00%	47,87%	100,00%	47,87%			Kec. Semampir				
		2.1.2.01.03.0043	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	131.428	12 Kali	3.600	12 Kali	21.080	-	-	-	-	24 Kali	24.680	50,00%	18,78%	50,00%	18,78%			Kec. Semampir				
		2.1.2.01.03.0044	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			356 Lembaga	2.679.758	356 Lembaga	617.157	356 Lembaga	644.457	-	-	-	-	356 Lembaga	1.261.614	100,00%	47,08%	100,00%	47,08%			Kec. Simokerto				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RP-JMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6*12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.03.0045	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	72.093	12 Kali	3.600	0 Kali	8.328	-	-	-	-	12 Kali	11.928	25,00%	16,55%	25,00%	16,55%			Kec. Simokerto				
		2.1.2.01.03.0046	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			439 Lembaga	3.397.717	439 Lembaga	766.170	440 Lembaga	804.963	-	-	-	-	440 Lembaga	1.571.133	100,23%	46,24%	100,23%	46,24%			Kec. Sukolilo				
		2.1.2.01.03.0047	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	135.536	30 Kali	6.090	0 Kali	21.212	-	-	-	-	30 Kali	27.302	62,50%	20,14%	62,50%	20,14%			Kec. Sukolilo				
		2.1.2.01.03.0048	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			323 Lembaga	2.425.328	323 Lembaga	377.015	324 Lembaga	760.938	-	-	-	-	324 Lembaga	1.137.953	100,31%	46,92%	100,31%	46,92%			Kec. Sukomanunggal				
		2.1.2.01.03.0049	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	126.966	12 Kali	2.880	4 Kali	21.324	-	-	-	-	16 Kali	24.204	33,33%	19,06%	33,33%	19,06%			Kec. Sukomanunggal				
		2.1.2.01.03.0050	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			749 Lembaga	5.452.257	749 Lembaga	1.282.499	749 Lembaga	1.330.489	-	-	-	-	749 Lembaga	2.612.987	100,00%	47,92%	100,00%	47,92%			Kec. Tambaksari				
		2.1.2.01.03.0051	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	137.745	10 Kali	4.800	0 Kali	21.068	-	-	-	-	10 Kali	25.868	20,83%	18,78%	20,83%	18,78%			Kec. Tambaksari				
		2.1.2.01.03.0052	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			371 Lembaga	2.890.449	371 Lembaga	644.940	371 Lembaga	696.548	-	-	-	-	371 Lembaga	1.341.488	100,00%	46,41%	100,00%	46,41%			Kec. Tandes				
		2.1.2.01.03.0053	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	133.423	12 Kali	4.320	0 Kali	20.744	-	-	-	-	12 Kali	25.064	25,00%	18,79%	25,00%	18,79%			Kec. Tandes				
		2.1.2.01.03.0054	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			366 Lembaga	2.817.935	366 Lembaga	632.820	370 Lembaga	662.880	-	-	-	-	370 Lembaga	1.295.700	101,09%	45,98%	101,09%	45,98%			Kec. Tegalsari				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.03.0055	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	59.188	14 Kali	3.600	0 Kali	7.988	-	-	-	-	14 Kali	11.588	29,17%	19,58%	29,17%	19,58%			Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.03.0056	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			176 Lembaga	1.464.150	185 Lembaga	321.800	185 Lembaga	340.180	-	-	-	-	185 Lembaga	661.980	105,11%	45,21%	105,11%	45,21%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2.01.03.0057	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	157.333	12 Kali	2.880	4 Kali	20.724	-	-	-	-	16 Kali	23.604	33,33%	15,00%	33,33%	15,00%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2.01.03.0058	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			210 Lembaga	1.837.347	211 Lembaga	369.735	211 Lembaga	421.898	-	-	-	-	211 Lembaga	791.633	100,48%	43,09%	100,48%	43,09%			Kec. Wiyung		
		2.1.2.01.03.0059	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	131.973	12 Kali	2.880	4 Kali	21.584	-	-	-	-	16 Kali	24.464	33,33%	18,54%	33,33%	18,54%			Kec. Wiyung		
		2.1.2.01.03.0060	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			278 Lembaga	2.152.904	281 Lembaga	464.260	280 Lembaga	538.964	-	-	-	-	281 Lembaga	1.003.224	101,08%	46,60%	101,08%	46,60%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.03.0061	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	132.142	12 Kali	3.600	12 Kali	21.392	-	-	-	-	24 Kali	24.992	50,00%	18,91%	50,00%	18,91%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.03.0062	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan			574 Lembaga	4.291.160	570 Lembaga	974.120	569 Lembaga	1.018.852	-	-	-	-	571 Lembaga	1.992.972	99,48%	46,44%	99,48%	46,44%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.03.0063	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian			48 Kali	134.634	12 Kali	4.320	12 Kali	21.444	-	-	-	-	24 Kali	25.764	50,00%	19,14%	50,00%	19,14%			Kec. Wonokromo		
80	Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	2.1.2.01.04	Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD		3.716.522	N/A		3.908.387		348.465		1.756.310		-		-		524.096		13,41%		524.096		14,10%			
				Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100%		N/A		100%	-		-		-		-		-		N/A		N/A		-			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2.01.04.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD					38 kali	3.908.387	11 kali	348.465	0 kali	175.631	-	-	-	-	11 kali	524.096	28,95%	13,41%	28,95%	13,41%			Sekretariat DPRD		
81	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1.2.01.05	Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat			17.396.696		N/A		7.149.389		522.720		7.334.060		-	-	-		1.256.126		17,57%		1.256.126		7,22%			
				Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
				Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%		100,60 %		100%		-		-		-		-		-		-		100,60 %		100,60 %		-		
		2.1.2.01.05.0001	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	217.831	25 Kali	13.640	6 Kali	21.376	-	-	-	-	31 Kali	35.016	26,72%	16,07%	26,72%	16,07%			Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.05.0004	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	241.105	20 Kali	23.820	4 Kali	23.540	-	-	-	-	24 Kali	47.360	20,69%	19,64%	20,69%	19,64%			Kec. Benowo		
		2.1.2.01.05.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	240.898	24 Kali	19.910	29 Kali	22.088	-	-	-	-	53 Kali	41.998	45,69%	17,43%	45,69%	17,43%			Kec. Bubutan		
		2.1.2.01.05.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	228.500	27 Kali	13.840	18 Kali	29.696	-	-	-	-	45 Kali	43.536	38,79%	19,05%	38,79%	19,05%			Kec. Bulak		
		2.1.2.01.05.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	236.740	10 Kali	11.630	10 Kali	20.300	-	-	-	-	20 Kali	31.930	17,24%	13,49%	17,24%	13,49%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.05.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	284.960	32 Kali	22.970	6 Kali	42.536	-	-	-	-	38 Kali	65.506	32,76%	22,99%	32,76%	22,99%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.05.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	224.558	9 Kali	9.050	0 Kali	17.320	-	-	-	-	9 Kali	26.370	7,76%	11,74%	7,76%	11,74%			Kec. Genteng		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.05.002 2	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	218.067	4 Kali	8.950	5 Kali	24.390	-	-	-	-	9 Kali	33.340	7,76%	15,29%	7,76%	15,29%			Kec. Gubeng				
		2.1.2.01.05.002 5	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	253.100	27 Kali	21.970	29 Kali	26.172	-	-	-	-	56 Kali	48.142	48,28%	19,02%	48,28%	19,02%			Kec. Gunung Anyar				
		2.1.2.01.05.002 8	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	200.240	32 Kali	15.980	24 Kali	23.040	-	-	-	-	56 Kali	39.020	48,28%	19,49%	48,28%	19,49%			Kec. Jambangan				
		2.1.2.01.05.003 1	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	201.140	12 Kali	7.790	4 Kali	25.492	-	-	-	-	16 Kali	33.282	13,79%	16,55%	13,79%	16,55%			Kec. Karangpilang				
		2.1.2.01.05.003 4	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	267.479	22 Kali	12.170	14 Kali	32.584	-	-	-	-	36 Kali	44.754	31,03%	16,73%	31,03%	16,73%			Kec. Kenjeran				
		2.1.2.01.05.003 7	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	236.562	24 Kali	15.350	0 Kali	26.032	-	-	-	-	24 Kali	41.382	20,69%	17,49%	20,69%	17,49%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.05.004 0	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	258.836	26 Kali	14.790	30 Kali	22.256	-	-	-	-	56 Kali	37.046	48,28%	14,31%	48,28%	14,31%			Kec. Lakarsantri				
		2.1.2.01.05.004 3	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	220.110	18 Kali	11.720	6 Kali	20.004	-	-	-	-	24 Kali	31.724	20,69%	14,41%	20,69%	14,41%			Kec. Mulyorejo				
		2.1.2.01.05.004 6	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	247.697	29 Kali	17.540	28 Kali	26.126	-	-	-	-	57 Kali	43.666	49,14%	17,63%	49,14%	17,63%			Kec. Pabean Cantian				
		2.1.2.01.05.004 9	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	189.599	22 Kali	7.890	11 Kali	23.480	-	-	-	-	33 Kali	31.370	28,45%	16,55%	28,45%	16,55%			Kec. Pakal				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.05.005 2	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	251.544	29 Kali	24.240	18 Kali	27.148	-	-	-	-	47 Kali	51.388	40,52%	20,43%	40,52%	20,43%			Kec. Rungkut				
		2.1.2.01.05.005 5	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	241.341	25 Kali	10.870	13 Kali	29.842	-	-	-	-	38 Kali	40.712	32,76%	16,87%	32,76%	16,87%			Kec. Sambikerep				
		2.1.2.01.05.005 8	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	269.881	25 Kali	17.260	4 Kali	27.272	-	-	-	-	29 Kali	44.532	25,00%	16,50%	25,00%	16,50%			Kec. Sawahan				
		2.1.2.01.05.006 1	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	181.128	24 Kali	16.840	12 Kali	16.232	-	-	-	-	36 Kali	33.072	31,03%	18,26%	31,03%	18,26%			Kec. Semampir				
		2.1.2.01.05.006 4	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	206.401	27 Kali	20.950	33 Kali	15.100	-	-	-	-	60 Kali	36.050	51,72%	17,47%	51,72%	17,47%			Kec. Simokerto				
		2.1.2.01.05.006 7	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	259.056	30 Kali	25.300	6 Kali	26.380	-	-	-	-	36 Kali	51.680	31,03%	19,95%	31,03%	19,95%			Kec. Sukolilo				
		2.1.2.01.05.007 0	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	213.306	24 Kali	10.020	6 Kali	7.584	-	-	-	-	30 Kali	17.604	25,86%	8,25%	25,86%	8,25%			Kec. Sukomanunggal				
		2.1.2.01.05.007 3	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	236.045	30 Kali	27.420	0 Kali	21.052	-	-	-	-	30 Kali	48.472	25,86%	20,54%	25,86%	20,54%			Kec. Tambaksari				
		2.1.2.01.05.007 6	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	248.683	29 Kali	25.040	6 Kali	28.096	-	-	-	-	35 Kali	53.136	30,17%	21,37%	30,17%	21,37%			Kec. Tandes				
		2.1.2.01.05.007 9	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak			116 Kali	207.408	24 Kali	11.470	0 Kali	18.848	-	-	-	-	24 Kali	30.318	20,69%	14,62%	20,69%	14,62%			Kec. Tegalsari				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16							
		2.1.2.01.05.008 2	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	195.896	7 Kali	12.500	0 Kali	20.088	-	-	-	-	7 Kali	32.588	6,03%	16,64%	6,03%	16,64%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2.01.05.008 5	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	199.633	16 Kali	13.100	4 Kali	18.856	-	-	-	-	20 Kali	31.956	17,24%	16,01%	17,24%	16,01%			Kec. Wiyung		
		2.1.2.01.05.008 8	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	214.362	31 Kali	31.580	28 Kali	21.348	-	-	-	-	59 Kali	52.928	50,86%	24,69%	50,86%	24,69%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.05.009 1	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak					116 Kali	257.284	29 Kali	27.120	29 Kali	29.128	-	-	-	-	58 Kali	56.248	50,00%	21,86%	50,00%	21,86%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.06	Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah			23.284.768		N/A		19.199.722		1.150.678		30.265.410		-	-	-		4.177.219		21,76%		4.177.219		17,94%			
				Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100%		N/A		100%		-		-		-	-	-	-		-	N/A		N/A		-				
		2.1.2.01.06.000 1	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	375.642	90 kali	25.563	90 kali	59.600	-	-	-	-	180 kali	85.163	50,00%	22,67%	50,00%	22,67%			Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.06.000 2	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	76.771	15 Kali	2.700	5 Kali	12.204	-	-	-	-	20 Kali	14.904	33,33%	19,41%	33,33%	19,41%			Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.06.000 4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	69.421	4 lembaga	780	0 lembaga	12.204	-	-	-	-	4 lembaga	12.984	100,00%	18,70%	100,00%	18,70%			Kec. Asemrowo		
		2.1.2.01.06.000 5	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	360.427	90 kali	42.719	90 kali	62.021	-	-	-	-	180 kali	104.740	50,00%	29,06%	50,00%	29,06%			Kec. Benowo		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16														
		2.1.2.01.06.0006	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	83.829	15 Kali	3.600	5 Kali	11.204	-	-	-	-	20 Kali	14.804	33,33%	17,66%	33,33%	17,66%			Kec. Benowo				
		2.1.2.01.06.0008	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	70.297	4 lembaga	1.350	0 lembaga	12.828	-	-	-	-	4 lembaga	14.178	100,00%	20,17%	100,00%	20,17%			Kec. Benowo				
		2.1.2.01.06.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	436.108	91 kali	29.667	92 kali	75.921	-	-	-	-	183 kali	105.588	50,83%	24,21%	50,83%	24,21%			Kec. Bubutan				
		2.1.2.01.06.0010	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	64.460	15 Kali	4.500	15 Kali	8.256	-	-	-	-	30 Kali	12.756	50,00%	19,79%	50,00%	19,79%			Kec. Bubutan				
		2.1.2.01.06.0012	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	54.440	4 lembaga	4.620	0 lembaga	8.256	-	-	-	-	4 lembaga	12.876	100,00%	23,65%	100,00%	23,65%			Kec. Bubutan				
		2.1.2.01.06.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	645.509	91 kali	29.810	92 kali	98.576	-	-	-	-	183 kali	128.386	50,83%	19,89%	50,83%	19,89%			Kec. Bulak				
		2.1.2.01.06.0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	92.860	15 Kali	3.600	15 Kali	15.968	-	-	-	-	30 Kali	19.568	50,00%	21,07%	50,00%	21,07%			Kec. Bulak				
		2.1.2.01.06.0016	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan .			4 Lembaga	82.720	4 Lembaga	1.680	0 Lembaga	13.568	-	-	-	-	4 Lembaga	15.248	100,00%	18,43%	100,00%	18,43%			Kec. Bulak				
		2.1.2.01.06.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	361.925	89 kali	29.709	90 kali	62.741	-	-	-	-	179 kali	92.450	49,72%	25,54%	49,72%	25,54%			Kec. Dukuh Pakis				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.1.2.01.06.0018	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	81.064	15 Kali	3.600	9 Kali	12.032	-	-	-	-	24 Kali	15.632	40,00%	19,28%	40,00%	19,28%			Kec. Pakis		
		2.1.2.01.06.0020	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	72.454	4 lembaga	1.650	0 lembaga	12.032	-	-	-	-	4 lembaga	13.682	100,00%	18,88%	100,00%	18,88%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.1.2.01.06.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	464.789	90 kali	29.417	90 kali	76.083	-	-	-	-	180 kali	105.500	50,00%	22,70%	50,00%	22,70%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.06.0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 kali	74.020	15 kali	3.600	5 kali	12.036	-	-	-	-	20 kali	15.636	33,33%	21,12%	33,33%	21,12%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.06.0024	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	65.260	4 lembaga	3.000	0 lembaga	12.036	-	-	-	-	4 lembaga	15.036	100,00%	23,04%	100,00%	23,04%			Kec. Gayungan		
		2.1.2.01.06.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	513.218	90 kali	29.667	90 kali	93.369	-	-	-	-	180 kali	123.037	50,00%	23,97%	50,00%	23,97%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.06.0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	77.779	15 Kali	4.500	7 Kali	9.928	-	-	-	-	22 Kali	14.428	36,67%	18,55%	36,67%	18,55%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.06.0028	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	70.399	4 lembaga	1.500	0 lembaga	9.928	-	-	-	-	4 lembaga	11.428	100,00%	16,23%	100,00%	16,23%			Kec. Genteng		
		2.1.2.01.06.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	473.560	90 kali	29.822	90 kali	81.105	-	-	-	-	180 kali	110.927	50,00%	23,42%	50,00%	23,42%			Kec. Gubeng		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.1.2.01.06.0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	80.308	15 Kali	5.400	15 Kali	10.284	-	-	-	-	30 Kali	15.684	50,00%	19,53%	50,00%	19,53%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.06.0032	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	68.278	4 lembaga	3.000	0 lembaga	10.284	-	-	-	-	4 lembaga	13.284	100,00%	19,46%	100,00%	19,46%			Kec. Gubeng		
		2.1.2.01.06.0033	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			408 kali	373.624	102 kali	24.341	102 kali	59.270	-	-	-	-	204 kali	83.611	50,00%	22,38%	50,00%	22,38%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.06.0034	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	80.222	15 Kali	1.080	5 Kali	10.320	-	-	-	-	20 Kali	11.400	33,33%	14,21%	33,33%	14,21%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.06.0036	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	69.542	4 lembaga	1.350	0 lembaga	10.320	-	-	-	-	4 lembaga	11.670	100,00%	16,78%	100,00%	16,78%			Kec. Gunung Anyar		
		2.1.2.01.06.0037	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	429.269	90 kali	30.125	91 kali	69.842	-	-	-	-	181 kali	99.966	50,28%	23,29%	50,28%	23,29%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.06.0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	72.860	10 Kali	2.400	10 Kali	10.812	-	-	-	-	20 Kali	13.212	33,33%	18,13%	33,33%	18,13%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.06.0040	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	63.500	4 lembaga	5.040	0 lembaga	10.812	-	-	-	-	4 lembaga	15.852	100,00%	24,96%	100,00%	24,96%			Kec. Jambangan		
		2.1.2.01.06.0041	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	520.439	90 kali	34.141	49 kali	83.808	-	-	-	-	139 kali	117.949	38,61%	22,66%	38,61%	22,66%			Kec. Karangpilang		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		2.1.2.01.06.004.2	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	80.140	18 Kali	4.320	6 Kali	12.024	-	-	-	-	24 Kali	16.344	40,00%	20,39%	40,00%	20,39%			Kec. Karangpilang				
		2.1.2.01.06.004.4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	71.170	4 lembaga	1.350	0 lembaga	12.024	-	-	-	-	4 lembaga	13.374	100,00%	18,79%	100,00%	18,79%			Kec. Karangpilang				
		2.1.2.01.06.004.5	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	476.981	90 kali	34.442	90 kali	76.557	-	-	-	-	180 kali	110.998	50,00%	23,27%	50,00%	23,27%			Kec. Kenjeran				
		2.1.2.01.06.004.6	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	81.570	15 Kali	3.600	5 Kali	12.044	-	-	-	-	20 Kali	15.644	33,33%	19,18%	33,33%	19,18%			Kec. Kenjeran				
		2.1.2.01.06.004.8	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	71.760	4 lembaga	4.590	0 lembaga	12.044	-	-	-	-	4 lembaga	16.634	100,00%	23,18%	100,00%	23,18%			Kec. Kenjeran				
		2.1.2.01.06.004.9	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	327.672	90 kali	29.810	90 kali	55.762	-	-	-	-	180 kali	85.572	50,00%	26,12%	50,00%	26,12%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.06.005.0	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 kali	82.785	15 kali	4.500	5 kali	11.788	-	-	-	-	20 kali	16.288	33,33%	19,68%	33,33%	19,68%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.06.005.2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan			4 lembaga	72.705	4 lembaga	1.500	0 lembaga	11.788	-	-	-	-	4 lembaga	13.288	100,00%	18,28%	100,00%	18,28%			Kec. Krembangan				
		2.1.2.01.06.005.3	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	334.068	90 kali	25.983	90 kali	48.256	-	-	-	-	180 kali	74.239	50,00%	22,22%	50,00%	22,22%			Kec. Lakarsantri				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		2.1.2.01.06.0054	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				60 Kali	88.122	31 Kali	1.080	9 Kali	12.948	-	-	-	-	40 Kali	14.028	66,67%	15,92%	66,67%	15,92%			Kec. Lakarsantri			
		2.1.2.01.06.0056	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan				4 lembaga	72.642	4 lembaga	1.860	0 lembaga	12.948	-	-	-	-	4 lembaga	14.808	100,00%	20,38%	100,00%	20,38%			Kec. Lakarsantri			
		2.1.2.01.06.0057	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja				408 kali	548.898	91 kali	28.190	91 kali	79.093	-	-	-	-	182 kali	107.283	44,61%	19,55%	44,61%	19,55%			Kec. Mulyorejo			
		2.1.2.01.06.0058	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				60 Kali	119.206	15 Kali	5.400	5 Kali	17.308	-	-	-	-	20 Kali	22.708	33,33%	19,05%	33,33%	19,05%			Kec. Mulyorejo			
		2.1.2.01.06.0060	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan				4 lembaga	103.606	4 lembaga	6.000	0 lembaga	17.308	-	-	-	-	4 lembaga	23.308	100,00%	22,50%	100,00%	22,50%			Kec. Mulyorejo			
		2.1.2.01.06.0061	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja				360 kali	289.142	91 kali	29.613	91 kali	49.415	-	-	-	-	182 kali	79.029	50,56%	27,33%	50,56%	27,33%			Kec. Pabean Cantian			
		2.1.2.01.06.0062	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				60 Kali	100.192	15 Kali	4.500	15 Kali	14.796	-	-	-	-	30 Kali	19.296	50,00%	19,26%	50,00%	19,26%			Kec. Pabean Cantian			
		2.1.2.01.06.0064	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan				4 lembaga	91.252	4 lembaga	3.000	0 lembaga	14.796	-	-	-	-	4 lembaga	17.796	100,00%	19,50%	100,00%	19,50%			Kec. Pabean Cantian			
		2.1.2.01.06.0065	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja				360 kali	436.546	90 kali	25.535	90 kali	63.226	-	-	-	-	180 kali	88.761	50,00%	20,33%	50,00%	20,33%			Kec. Pakal			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12=8+9+10+11	13=12/7*100		14=6+12	15=14/5*100									
		2.1.2.01.06.0066	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	96.430	15 Kali	3.600	5 Kali	15.116	-	-	-	-	20 Kali	18.716	33,33%	19,41%	33,33%	19,41%			Kec. Pakal		
		2.1.2.01.06.0068	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	88.270	4 lembaga	1.500	0 lembaga	15.116	-	-	-	-	4 lembaga	16.616	100,00%	18,82%	100,00%	18,82%			Kec. Pakal		
		2.1.2.01.06.0069	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					408 kali	464.199	102 kali	34.180	102 kali	76.230	-	-	-	-	204 kali	110.410	50,00%	23,79%	50,00%	23,79%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.06.0070	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	127.014	15 Kali	5.400	15 Kali	16.408	-	-	-	-	30 Kali	21.808	50,00%	17,17%	50,00%	17,17%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.06.0072	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	118.194	4 lembaga	2.010	0 lembaga	16.408	-	-	-	-	4 lembaga	18.418	100,00%	15,58%	100,00%	15,58%			Kec. Rungkut		
		2.1.2.01.06.0073	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	449.028	90 kali	28.572	90 kali	68.239	-	-	-	-	180 kali	96.811	50,00%	21,56%	50,00%	21,56%			Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.06.0074	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah					60 Kali	99.259	15 Kali	3.600	5 Kali	19.300	-	-	-	-	20 Kali	22.900	33,33%	23,07%	33,33%	23,07%			Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.06.0076	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan					4 lembaga	91.579	4 lembaga	3.360	0 lembaga	18.100	-	-	-	-	4 lembaga	21.460	100,00%	23,43%	100,00%	23,43%			Kec. Sambikerep		
		2.1.2.01.06.0077	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja					360 kali	419.847	90 kali	29.709	90 kali	67.585	-	-	-	-	180 kali	97.294	50,00%	23,17%	50,00%	23,17%			Kec. Sawahan		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		2.1.2.01.06.0078	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				60 Kali	88.334	15 Kali	5.400	5 Kali	11.640	-	-	-	-	20 Kali	17.040	33,33%	19,29%	33,33%	19,29%			Kec. Sawahan			
		2.1.2.01.06.0080	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan				4 lembaga	79.184	4 lembaga	7.590	0 lembaga	11.640	-	-	-	-	4 lembaga	19.230	100,00%	24,29%	100,00%	24,29%			Kec. Sawahan			
		2.1.2.01.06.0081	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja				360 kali	539.117	91 kali	30.755	91 kali	94.260	-	-	-	-	182 kali	125.015	50,56%	23,19%	50,56%	23,19%			Kec. Semampir			
		2.1.2.01.06.0082	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				60 Kali	82.708	15 Kali	4.500	15 Kali	11.500	-	-	-	-	30 Kali	16.000	50,00%	19,35%	50,00%	19,35%			Kec. Semampir			
		2.1.2.01.06.0084	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan				4 lembaga	76.648	4 lembaga	3.000	0 lembaga	11.500	-	-	-	-	4 lembaga	14.500	100,00%	18,92%	100,00%	18,92%			Kec. Semampir			
		2.1.2.01.06.0085	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja				360 kali	470.439	78 kali	22.685	78 kali	81.970	-	-	-	-	156 kali	104.654	43,33%	22,25%	43,33%	22,25%			Kec. Simokerto			
		2.1.2.01.06.0086	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah				60 Kali	75.693	15 Kali	4.500	15 Kali	8.328	-	-	-	-	30 Kali	12.828	50,00%	16,95%	50,00%	16,95%			Kec. Simokerto			
		2.1.2.01.06.0088	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan				4 lembaga	66.273	4 lembaga	4.500	0 lembaga	8.328	-	-	-	-	4 lembaga	12.828	100,00%	19,36%	100,00%	19,36%			Kec. Simokerto			
		2.1.2.01.06.0089	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja				408 kali	462.206	102 kali	33.500	102 kali	67.731	-	-	-	-	204 kali	101.231	50,00%	21,90%	50,00%	21,90%			Kec. Sukolilo			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.06.0090	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	87.056	15 Kali	6.300	0 Kali	11.284	-	-	-	-	15 Kali	17.584	25,00%	20,20%	25,00%	20,20%			Kec. Sukolilo		
		2.1.2.01.06.0092	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	73.706	4 lembaga	2.940	0 lembaga	11.284	-	-	-	-	4 lembaga	14.224	100,00%	19,30%	100,00%	19,30%			Kec. Sukolilo		
		2.1.2.01.06.0093	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	568.464	90 kali	29.852	90 kali	86.644	-	-	-	-	180 kali	116.496	50,00%	20,49%	50,00%	20,49%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.06.0094	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	81.342	15 Kali	5.400	5 Kali	9.652	-	-	-	-	20 Kali	15.052	33,33%	18,50%	33,33%	18,50%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.06.0096	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	66.222	4 lembaga	2.160	0 lembaga	9.652	-	-	-	-	4 lembaga	11.812	100,00%	17,84%	100,00%	17,84%			Kec. Sukomanunggal		
		2.1.2.01.06.0097	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	463.834	91 kali	30.125	91 kali	78.475	-	-	-	-	182 kali	108.599	50,56%	23,41%	50,56%	23,41%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.06.0098	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	108.825	28 Kali	8.640	0 Kali	11.308	-	-	-	-	28 Kali	19.948	46,67%	18,33%	46,67%	18,33%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.06.0100	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	93.795	4 lembaga	3.240	0 lembaga	11.308	-	-	-	-	4 lembaga	14.548	100,00%	15,51%	100,00%	15,51%			Kec. Tambaksari		
		2.1.2.01.06.0101	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	443.402	90 kali	34.134	87 kali	68.887	-	-	-	-	177 kali	103.021	49,17%	23,23%	49,17%	23,23%			Kec. Tandes		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.1.2.01.06.010 2	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	85.423	15 Kali	5.400	15 Kali	12.100	-	-	-	-	30 Kali	17.500	50,00%	20,49%	50,00%	20,49%			Kec. Tandes		
		2.1.2.01.06.010 4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	73.063	4 lembaga	2.130	0 lembaga	12.100	-	-	-	-	4 lembaga	14.230	100,00%	19,48%	100,00%	19,48%			Kec. Tandes		
		2.1.2.01.06.010 5	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	473.597	90 kali	29.561	86 kali	77.198	-	-	-	-	176 kali	106.758	48,89%	22,54%	48,89%	22,54%			Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.06.010 6	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	62.788	12 Kali	3.600	0 Kali	7.988	-	-	-	-	12 Kali	11.588	20,00%	18,46%	20,00%	18,46%			Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.06.010 8	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	53.368	4 lembaga	3.000	0 lembaga	7.988	-	-	-	-	4 lembaga	10.988	100,00%	20,59%	100,00%	20,59%			Kec. Tegalsari		
		2.1.2.01.06.010 9	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	468.828	90 kali	29.810	90 kali	62.738	-	-	-	-	180 kali	92.548	50,00%	19,74%	50,00%	19,74%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2.01.06.011 0	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	94.001	10 Kali	3.000	6 Kali	8.888	-	-	-	-	16 Kali	11.888	26,67%	12,65%	26,67%	12,65%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2.01.06.011 2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	84.461	4 lembaga	2.700	0 lembaga	8.888	-	-	-	-	4 lembaga	11.588	100,00%	13,72%	100,00%	13,72%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.1.2.01.06.011 3	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	347.964	89 kali	33.965	89 kali	60.326	-	-	-	-	178 kali	94.291	49,44%	27,10%	49,44%	27,10%			Kec. Wiyung		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.06.0114	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	98.246	15 Kali	3.600	15 Kali	15.064	-	-	-	-	30 Kali	18.664	50,00%	19,00%	50,00%	19,00%			Kec. Wiyung		
		2.1.2.01.06.0116	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	90.086	4 lembaga	1.500	0 lembaga	15.064	-	-	-	-	4 lembaga	16.564	100,00%	18,39%	100,00%	18,39%			Kec. Wiyung		
		2.1.2.01.06.0117	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	506.120	90 kali	27.380	91 kali	69.068	-	-	-	-	181 kali	96.448	50,28%	19,06%	50,28%	19,06%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.06.0118	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	83.103	15 Kali	4.500	13 Kali	11.568	-	-	-	-	28 Kali	16.068	46,67%	19,34%	46,67%	19,34%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.06.0120	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo			4 Lembaga	73.083	4 Lembaga	1.500	0 Lembaga	11.568	-	-	-	-	4 Lembaga	13.068	100,00%	17,88%	100,00%	17,88%			Kec. Wonocolo		
		2.1.2.01.06.0121	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja			360 kali	690.174	90 kali	30.278	91 kali	122.564	-	-	-	-	181 kali	152.841	50,28%	22,15%	50,28%	22,15%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.06.0122	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah			60 Kali	86.088	15 Kali	5.040	15 Kali	12.064	-	-	-	-	30 Kali	17.104	50,00%	19,87%	50,00%	19,87%			Kec. Wonokromo		
		2.1.2.01.06.0124	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan			4 lembaga	74.808	4 lembaga	3.360	0 lembaga	11.704	-	-	-	-	4 lembaga	15.064	100,00%	20,14%	100,00%	20,14%			Kec. Wonokromo		
82	Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	2.1.2.01.07	Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD		7.897.835	N/A		9.178.415		601.002		3.382.670		-		-		939.269		10,23%		939.269		11,89%			
				Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%		100,00 %		100%		-		-	-	-	-	-		-		100,00 %		100,00 %		-		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7	8	9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2.01.07.0001	Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas					6 dokumen	4.244.776	0 dokumen	180.067	0 dokumen	57.111	-	-	-	-	0 dokumen	237.179	0,00%	5,59%	0,00%	5,59%			Sekretariat DPRD
		2.1.2.01.07.0002	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan					930 kali	2.774.429	182 kali	296.528	192 kali	218.368	-	-	-	-	374 kali	514.895	40,22%	18,56%	40,22%	18,56%			Sekretariat DPRD
		2.1.2.01.07.0003	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan					45 kali	2.159.210	4 kali	124.407	1 kali	62.789	-	-	-	-	5 kali	187.196	11,11%	8,67%	11,11%	8,67%			Sekretariat DPRD
83	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1.2.01.08	Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD			1.179.293		N/A		1.266.647		231.755		2.053.080		-	-	-		437.063		34,51%		437.063		37,06%	
				Persentase BUMD yang berhasil dibina	67%		N/A		67%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		2.1.2.01.08.0001	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi					9 BUMD	1.266.647	0 BUMD	231.755	0 BUMD	205.308	-	-	-	-	0 BUMD	437.063	0,00%	34,51%	0,00%	34,51%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
		2.1.2.01.09	Program Penataan Daerah Otonom			5.108.645		72.095.112		6.514.523		713.359		6.867.600		-	-	-		1.400.120		21,49%		1.400.120		27,41%	
				Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
				Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	85,65%		N/A		85,65%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
				Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	45,16%		N/A		45,16%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
				Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60%		N/A		60%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
				Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan			113,48%		-		-		-		-		-							113,48%			
				Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update			100%		-		-		-		-		-							100,00%			
		2.1.2.01.09.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					2 dokumen	761.847	0 dokumen	82.392	1 dokumen	136.271	-	-	-	-	1 dokumen	218.663	50,00%	28,70%	50,00%	28,70%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2.1.2.01.09.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan					1 kali	1.830.681	0 kali	199.386	1 kali	53.428	-	-	-	-	1 kali	252.814	100,00%	13,81%	100,00%	13,81%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2.1.2.01.09.0003	Fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya					720 kali	436.550	114 kali	49.794	62 kali	70.040	-	-	-	-	176 kali	119.833	24,44%	27,45%	24,44%	27,45%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16
		2.1.2.01.09.0004	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan					115 objek	424.259	0 objek	44.094	0 objek	40.640	-	-	-	-	0 objek	84.733	0,00%	19,97%	0,00%	19,97%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2.1.2.01.09.0005	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan					16 kali	1.577.229	0 kali	208.031	1 kali	221.393	-	-	-	-	1 kali	429.424	6,25%	27,23%	6,25%	27,23%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2.1.2.01.09.0006	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan					185 lembaga	564.613	0 lembaga	61.993	185 lembaga	93.253	-	-	-	-	185 lembaga	155.246	100,00%	27,50%	100,00%	27,50%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2.1.2.01.09.0007	Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan					1 dokumen	919.344	0 dokumen	67.670	0 dokumen	71.736	-	-	-	-	0 dokumen	139.406	0,00%	15,16%	0,00%	15,16%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		2.1.2.01.10	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			2.343.228	2.731.161		2.333.782		218.056		4.029.050		-		-		620.961		26,61%		620.961		26,50%		
				Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	74,29%		N/A		74,29%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-	
				Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	50%		N/A		50%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-	
				Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70%		N/A		70%		-		-		-		-		-		-	N/A		N/A		-	
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan			100%		-		-		-		-		-							100,00%			
				Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi			125,29%		-		-		-		-		-							125,29%			
				Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD			100%		-		-		-		-		-							100,00%			
				Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun			100%		-		-		-		-		-							100,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.10.0001	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring			254 lembaga	277.096	0 lembaga	20.660	0 lembaga	83.247	-	-	-	-	0 lembaga	103.908	0,00%	37,50%	0,00%	37,50%			Bagian Organisasi		
		2.1.2.01.10.0002	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun			1 dokumen	430.957	0 dokumen	71.945	0 dokumen	97.570	-	-	-	-	0 dokumen	169.515	0,00%	39,33%	0,00%	39,33%			Bagian Organisasi		
		2.1.2.01.10.0003	Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun			1 dokumen	337.675	0 dokumen	39.093	0 dokumen	46.134	-	-	-	-	0 dokumen	85.227	0,00%	25,24%	0,00%	25,24%			Bagian Organisasi		
		2.1.2.01.10.0004	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi			155 POS	555.817	0 POS	86.358	0 POS	158.801	-	-	-	-	0 POS	245.159	0,00%	44,11%	0,00%	44,11%			Bagian Organisasi		
		2.1.2.01.10.0005	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat			254 lembaga	732.237	0 lembaga	0	0 lembaga	17.152	-	-	-	-	0 lembaga	17.152	0,00%	2,34%	0,00%	2,34%			Bagian Organisasi		
		2.1.2.01.11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			5.613.658		5.757.981		5.578.157		883.866		9.490.070		-		1.832.873		32,86%		1.832.873		32,65%			
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
				Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
				Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%		104,29 %		100%		-		-		-		-		-		104,29 %		104,29 %		-		
				Persentase Produk hukum yang disebarluaskan			100%		-		-		-		-		-						100,00%				
				Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti			100%		-		-		-		-		-						100,00%				
				Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi			100%		-		-		-		-		-						100,00%				
				Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan			104,29%		-		-		-		-		-						104,29%				
		2.1.2.01.11.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah			12 dokumen	290.311	3 dokumen	10.024	3 dokumen	48.588	-	-	-	-	6 dokumen	58.612	50,00%	20,19%	50,00%	20,19%			Bagian Hukum		
		2.1.2.01.11.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani			65 permasalahan hukum	2.706.815	12 permasalahan hukum	453.090	15 permasalahan hukum	401.852	-	-	-	-	27 permasalahan hukum	854.942	41,54%	31,58%	41,54%	31,58%			Bagian Hukum		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.01.11.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun			70 rancangan produk hukum	1.393.665	16 rancangan produk hukum	223.916	19 rancangan produk hukum	320.631	-	-	-	-	35 rancangan produk hukum	544.546	50,00%	39,07%	50,00%	39,07%			Bagian Hukum		
		2.1.2.01.11.0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi			70 produk hukum	1.187.365	13 produk hukum	196.836	18 produk hukum	177.937	-	-	-	-	31 produk hukum	374.773	44,29%	31,56%	44,29%	31,56%			Bagian Hukum		
		2.1.2.01.12	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		14.568.228		14.138.886	16.854.676		2.819.167	28.738.230		-				5.692.990		33,78%		5.692.990		39,08%				
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%		100,00 %	100%	-		-	-	-	-	-	-	-		100,00 %			100,00 %		-			
				Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar		100%	-	-	-		-	-	-	-	-	-						100,00%					
		2.1.2.01.12.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	16.854.676	100%	2.819.167	100%	2.873.823	-	-	-	-	100%	5.692.990	100,00%	33,78%	100,00%	33,78%			Bagian Umum Dan Protokol		
84	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	2.1.2.01.13	Program Pengelolaan Bangunan Gedung		19.155.141	N/A		15.539.695		2.606.587	28.588.340		-				5.465.421		35,17%		5.465.421		28,53%				
				Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100%		103,06 %	100%	-		-	-	-	-	-	-	-		103,06 %			103,06 %		-			
		2.1.2.01.13.0001	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola			24 lokasi	15.539.695	24 lokasi	2.606.587	24 lokasi	2.858.834	-	-	-	-	24 lokasi	5.465.421	100,00%	35,17%	100,00%	35,17%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
85	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1.2.01.14	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat		1.221.316	N/A		1.364.986		90.740	1.288.200		-				219.560		16,09%		219.560		17,96%				
				Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100%	N/A	100%		-		-	-	-	-	-	-	-		N/A		N/A		-				
		2.1.2.01.14.0001	Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun			2 dokumen	634.788	0 dokumen	7.200	0 dokumen	48.576	-	-	-	-	0 dokumen	55.776	0,00%	8,79%	0,00%	8,79%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.01.14.0002	Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun			1 dokumen	328.884	0 dokumen	52.640	0 dokumen	34.152	-	-	-	-	0 dokumen	86.792	0,00%	26,39%	0,00%	26,39%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				
		2.1.2.01.14.0003	Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun			1 dokumen	401.314	0 dokumen	30.900	0 dokumen	46.092	-	-	-	-	0 dokumen	76.992	0,00%	19,18%	0,00%	19,18%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat				
		2.1.2.01.15	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan		11.610.448	N/A		11.453.917		2.281.435		24.010.920		-		-		4.682.527		40,88%		4.682.527		40,33%					
			Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85%		88,90 %	85%	-	-		-		-		-	-	-			88,90 %		104,59 %		-					
		2.1.2.01.15.0001	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa			2030 kali	10.150.171	534 kali	2.118.388	494 kali	2.259.003	-	-	-	-	1028 kali	4.377.391	50,64%	43,13%	50,64%	43,13%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		2.1.2.01.15.0002	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan			89 kali	512.246	25 kali	65.095	8 kali	85.390	-	-	-	-	33 kali	150.485	37,08%	29,38%	37,08%	29,38%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		2.1.2.01.15.0003	Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun			9 dokumen	791.499	2 dokumen	97.952	1 dokumen	56.700	-	-	-	-	3 dokumen	154.652	33,33%	19,54%	33,33%	19,54%			Bagian Hubungan Masyarakat				
		2.1.2.01.16	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan		4.862.954	N/A		9.278.080		1.575.936		23.247.360		-		-		3.900.672		42,04%		3.900.672		80,21%					
			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 75%	94%		N/A	94%	-	-		-		-		-	-	-		-		N/A		N/A		-				
		2.1.2.01.16.0001	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun			16 dokumen	2.033.848	4 dokumen	358.400	5 dokumen	538.801	-	-	-	-	9 dokumen	897.201	56,25%	44,11%	56,25%	44,11%			Bagian Administrasi Pembangunan				
		2.1.2.01.16.0002	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya			72 lembaga	2.120.392	72 lembaga	331.764	72 lembaga	557.565	-	-	-	-	73 lembaga	889.329	101,39%	41,94%	101,39%	41,94%			Bagian Administrasi Pembangunan				
		2.1.2.01.16.0003	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara			6 sistem	2.099.609	0 sistem	380.107	6 sistem	500.814	-	-	-	-	6 sistem	880.921	100,00%	41,96%	100,00%	41,96%			Bagian Administrasi Pembangunan				
		2.1.2.01.16.0004	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun			6 dokumen	3.024.232	1 dokumen	505.664	2 dokumen	727.556	-	-	-	-	3 dokumen	1.233.221	50,00%	40,78%	50,00%	40,78%			Bagian Administrasi Pembangunan				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.1.2.01.17	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset		44.496.499	N/A		79.873.922		8.514.940		157.993.930		-		-		24.314.333		30,44%		24.314.333		54,64%			
				Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	88%		92,15 %		88%		-		-		-		-			92,15 %		104,72 %		-			
				Persentase pemanfaatan aset	96%		99,82 %		96%		-		-		-		-			99,82 %		103,98 %		-			
				Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	80%		60,00 %		80%		-		-		-		-			60,00 %		75,00 %		-			
		2.1.2.01.17.0001	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah				6 Berkas	3.118.540	1 Berkas	593.776	0 Berkas	678.443	-	-	-	-	1 Berkas	1.272.220	16,67%	40,80%	16,67%	40,80%		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.1.2.01.17.0002	Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor				72 lembaga	2.186.386	72 lembaga	201.651	72 lembaga	275.218	-	-	-	-	72 lembaga	476.870	100,00%	21,81%	100,00%	21,81%		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.1.2.01.17.0003	Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa yang terselesaikan				900 dokumen	5.746.510	274 dokumen	1.377.400	9 dokumen	1.124.598	-	-	-	-	283 dokumen	2.501.997	31,44%	43,54%	31,44%	43,54%		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.1.2.01.17.0004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya				2346 unit	7.291.561	724 unit	1.187.352	378 unit	758.889	-	-	-	-	1102 unit	1.946.240	46,97%	26,69%	46,97%	26,69%		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.1.2.01.17.0005	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadatkan				10091 stel	3.843.228	0 stel	132.825	1955 stel	412.068	-	-	-	-	1955 stel	544.893	19,37%	14,18%	19,37%	14,18%		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.1.2.01.17.0006	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadatkan				45615 unit	57.687.697	1343 unit	5.021.936	1357 unit	12.550.177	-	-	-	-	2700 unit	17.572.113	5,92%	30,46%	5,92%	30,46%		Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.1.2.01.18	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian			732.265	N/A		536.177		39.600		978.910		-		-		137.491		25,64%		137.491		18,78%		
				Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100%		40,00 %		100%		-		-		-		-		-			40,00 %		40,00 %		-	
		2.1.2.01.18.0001	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah				12 laporan	318.838	3 laporan	37.000	3 laporan	36.192	-	-	-	-	6 laporan	73.192	50,00%	22,96%	50,00%	22,96%		Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)(Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16		
		2.1.2.01.18.0002	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro					4 dokumen	217.338	0 dokumen	2.600	1 dokumen	61.699	-	-	-	-	1 dokumen	64.299	25,00%	29,58%	25,00%	29,58%			Bagian Administrasi Perencanaan Dan Usaha Daerah		
		2.1.2.01.19	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			344.572		N/A		334.427		73.621		384.000		-	-	-		112.021		33,50%		112.021		32,51%			
				Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	84,72%		N/A		84,72%		-		-		-	-	-	-	-		-		N/A		N/A		-		
		2.1.2.01.19.0001	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun					2 dokumen	334.427	0 dokumen	73.621	1 dokumen	38.400	-	-	-	-	1 dokumen	112.021	50,00%	33,50%	50,00%	33,50%			Bagian Organisasi		
		2.1.2.01.20	Program Peningkatan Kerjasama Daerah			8.483.922		N/A		19.447.081		432.159		3.843.890		-	-	-		816.547		4,20%		816.547		9,62%			
				Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditandatangani	95%		N/A		95%		-		-		-	-	-	-	-		-		N/A		N/A		-		
				Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditandatangani	87,50%		N/A		87,50%		-		-		-	-	-	-	-		-		N/A		N/A		-		
				Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	85%		N/A		85%		-		-		-	-	-	-	-		-		N/A		N/A		-		
		2.1.2.01.20.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah mitra Kerjasama dalam negeri yang difasilitasi					20 lembaga	820.971	5 lembaga	121.148	9 lembaga	88.533	-	-	-	-	14 lembaga	209.681	70,00%	25,54%	70,00%	25,54%			Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.1.2.01.20.0002	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi					10 lembaga	12.022.843	1 lembaga	125.000	2 lembaga	75.444	-	-	-	-	3 lembaga	200.444	30,00%	1,67%	30,00%	1,67%			Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.1.2.01.20.0003	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi					63 orang	5.383.580	63 orang	49.911	0 orang	22.944	-	-	-	-	63 orang	72.855	100,00%	1,35%	100,00%	1,35%			Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.1.2.01.20.0004	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi					29 lembaga	1.219.687	0 lembaga	136.100	9 lembaga	197.468	-	-	-	-	9 lembaga	333.568	31,03%	27,35%	31,03%	27,35%			Bagian Administrasi Kerjasama		
		2.1.2.02	Keuangan																										
86	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	2.1.2.02.01	Program Penagihan Pajak Daerah			4.673.777		N/A		3.216.279		755.605		8.639.130		-	-	-		1.619.518		50,35%		1.619.518		34,65%			
				Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	84,50%		N/A		84,50%		-		-		-	-	-	-	-		-		N/A		N/A		-		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.02.01.000 1	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan diawasi	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan diawasi			7201 berkas	798.577	2185 berkas	307.662	1793 berkas	169.176	-	-	-	-	3978 berkas	476.838	55,24%	59,71%	55,24%	59,71%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2.02.01.000 2	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan diawasi	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan diawasi			11224 berkas	618.184	2806 berkas	172.882	1522 berkas	110.705	-	-	-	-	4328 berkas	283.587	38,56%	45,87%	38,56%	45,87%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2.02.01.000 3	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan diawasi			196762 berkas	1.799.517	59385 berkas	275.061	122660 berkas	584.032	-	-	-	-	182045 berkas	859.094	92,52%	47,74%	92,52%	47,74%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		4.141.317	6.497.663		3.526.819	517.475	5.469.120		-	-	-	-	-	1.064.387		30,18%		1.064.387		25,70%				
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawab an keuangan	90%		N/A	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A		N/A		-				
			Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan		125%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							125,00%				
		2.1.2.02.02.000 1	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang diayani	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang diayani			72000 berkas	2.230.269	19820 berkas	270.555	23282 berkas	234.934	-	-	-	-	43102 berkas	505.490	59,86%	22,66%	59,86%	22,66%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2.02.02.000 2	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola			245 dokumen	318.907	62 dokumen	95.412	59 dokume n	82.997	-	-	-	-	121 dokumen	178.409	49,39%	55,94%	49,39%	55,94%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2.02.02.000 3	Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD yang disusun			22 dokumen	977.644	7 dokumen	151.508	5 dokume n	228.981	-	-	-	-	12 dokumen	380.489	54,55%	38,92%	54,55%	38,92%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.02.03	Program Peningkatan Pendapatan dan Penetapan Objek Pajak Daerah		24.133.807	N/A	18.899.077	4.070.711	46.463.120	-	-	8.717.023	46,12%	8.717.023	36,12%												
				Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	84%	N/A	84%	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-											
		2.1.2.02.03.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi			34900 objek pajak	3.841.689	14392 objek pajak	996.171	9265 objek pajak	926.360	-	-	-	23657 objek pajak	1.922.531	67,79%	50,04%	67,79%	50,04%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			
		2.1.2.02.03.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi			6555 objek pajak	6.046.041	7142.66666667 objek pajak	1.428.560	4772.66666667 objek pajak	1.429.626	-	-	-	5957.66666667 objek pajak	2.858.187	90,89%	47,27%	90,89%	47,27%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			
		2.1.2.02.03.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi			695022 objek pajak	9.011.348	695618 objek pajak	1.645.980	2568 objek pajak	2.290.325	-	-	-	698186 objek pajak	3.936.305	100,46%	43,68%	100,46%	43,68%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			
		2.1.2.02.04	Program Perencanaan Anggaran Daerah		1.461.556	N/A	1.376.617	152.763	2.139.300	-	-	366.693	26,64%	366.693	25,09%												
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75%	N/A	75%	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-											
		2.1.2.02.04.0001	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah			4 dokumen	279.042	1 dokumen	34.669	1 dokumen	63.102	-	-	-	2 dokumen	97.770	50,00%	35,04%	50,00%	35,04%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			
		2.1.2.02.04.0002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun			4 dokumen	313.020	1 dokumen	35.895	1 dokumen	44.407	-	-	-	2 dokumen	80.302	50,00%	25,65%	50,00%	25,65%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			
		2.1.2.02.04.0003	Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun			5 Laporan	784.555	1 Laporan	82.199	0 Laporan	106.422	-	-	-	1 Laporan	188.621	20,00%	24,04%	20,00%	24,04%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah			
		2.1.2.03	Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah																								
87	Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	2.1.2.03.01	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		699.114	N/A	1.033.999	99.162	1.698.080	-	-	268.970	26,01%	268.970	38,47%												
				Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100%	N/A	100%	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	-											

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e)/Kegiatan(Outpu t)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.03.01.0001	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan			12 dokumen	257.606	3 dokumen	36.037	3 dokumen	54.684	-	-	-	-	6 dokumen	90.720	50,00%	35,22%	50,00%	35,22%			Inspektorat		
		2.1.2.03.01.0002	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP			50 kali	555.638	18 kali	63.126	18 kali	95.508	-	-	-	-	36 kali	158.634	72,00%	28,55%	72,00%	28,55%			Inspektorat		
		2.1.2.03.01.0003	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)			1 Laporan	220.755	0 Laporan	0	0 Laporan	19.616	-	-	-	-	0 Laporan	19.616	0,00%	8,89%	0,00%	8,89%			Inspektorat		
		2.1.2.03.02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I		825.459	N/A		852.389		64.612		1.346.620		-		-		199.274		23,38%		199.274		24,14%			
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
		2.1.2.03.02.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	427.195	14 lembaga	11.505	11 lembaga	67.256	-	-	-	-	25 lembaga	78.761	71,43%	18,44%	71,43%	18,44%			Inspektorat		
		2.1.2.03.02.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	425.194	18 lembaga	53.107	18 lembaga	67.406	-	-	-	-	18 lembaga	120.513	100,00%	28,34%	100,00%	28,34%			Inspektorat		
		2.1.2.03.03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II		750.867	N/A		683.005		5.832		1.484.090		-		-		154.241		22,58%		154.241		20,54%			
				Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
		2.1.2.03.03.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan			35 lembaga	343.719	20 lembaga	4.523	11 lembaga	47.962	-	-	-	-	28 lembaga	52.485	80,00%	15,27%	80,00%	15,27%			Inspektorat		
		2.1.2.03.03.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja			18 lembaga	339.286	18 lembaga	1.310	18 lembaga	100.447	-	-	-	-	32 lembaga	101.757	177,78%	29,99%	177,78%	29,99%			Inspektorat		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
		2.1.2.03.04	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III			796.045		N/A		768.096		0		0		-		-		0		0,00%		0		0,00%			
				Persentase penanganan disiplin aparaturnya wilayah III	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100%		100,00 %		100%		-		-		-		-		-		-		100,00 %		100,00 %		-		
		2.1.2.03.04.0001	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan				35 lembaga	394.789	21 lembaga	0	3 lembaga	0	-	-	-	-	23 lembaga	0	65,71%	0,00%	65,71%	0,00%			Inspektorat			
		2.1.2.03.04.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja				18 lembaga	373.307	19 lembaga	0	18 lembaga	0	-	-	-	-	19 lembaga	0	105,56%	0,00%	105,56%	0,00%			Inspektorat			
		2.1.2.03.05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV			722.275		N/A		616.693		4.657		794.320		-		-		84.089		13,64%		84.089		11,64%			
				Persentase penanganan disiplin aparaturnya wilayah IV	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		2.1.2.03.05.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan				35 lembaga	309.347	16 lembaga	3.886	5 lembaga	40.926	-	-	-	-	19 lembaga	44.812	54,29%	14,49%	54,29%	14,49%			Inspektorat			
		2.1.2.03.05.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja				18 lembaga	307.346	18 lembaga	772	18 lembaga	38.506	-	-	-	-	18 lembaga	39.278	100,00%	12,78%	100,00%	12,78%			Inspektorat			
		2.1.2.04	Pengawasan																										
88	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	2.1.2.04.01	Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan			1.466.168		N/A		1.448.212		0		0		-		-		0		0,00%		0		0,00%			
				Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
				Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek	99%		97,19 %		99%		-		-		-		-		-		-		97,19 %		98,17 %		-		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) (Kegiatan(Output))	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.04.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah			72 PD	869.944	0 PD	0	0 PD	0	-	-	-	-	0 PD	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.04.01.0002	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi			4 dokumen	578.267	0 dokumen	0	1 dokumen	0	-	-	-	-	1 dokumen	0	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%			Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.04.02	Program Pengembangan Data dan Informasi		1.443.668			1.427.446		233.097		4.069.800		-		-		640.077		44,84%		640.077		44,34%			
				Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		2.1.2.04.02.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola			17 data urusan	1.427.446	0 data urusan	233.097	0 data urusan	406.980	-	-	-	-	0 data urusan	640.077	0,00%	44,84%	0,00%	44,84%			Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.04.03	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		5.088.738		N/A		4.168.479		389.126		7.108.420		-		-		1.099.969		26,39%		1.099.969		21,62%		
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-		
		2.1.2.04.03.0001	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	36.764	2 dokumen	0	0 dokumen	0	-	-	-	-	2 dokumen	0	16,67%	0,00%	16,67%	0,00%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2.04.03.0002	Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun			5 dokumen	772.574	2 dokumen	170.193	2 dokumen	338.323	-	-	-	-	3 dokumen	508.515	60,00%	65,82%	60,00%	65,82%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah		
		2.1.2.04.03.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	236.919	2 dokumen	15.600	0 dokumen	22.152	-	-	-	-	2 dokumen	37.752	16,67%	15,93%	16,67%	15,93%			Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	920.898	2 dokumen	8.485	0 dokumen	127.344	-	-	-	-	2 dokumen	135.829	16,67%	14,75%	16,67%	14,75%			Bagian Umum Dan Protokol		
		2.1.2.04.03.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	195.795	2 dokumen	14.570	0 dokumen	30.888	-	-	-	-	2 dokumen	45.458	16,67%	23,22%	16,67%	23,22%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.1.2.04.03.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	210.811	2 dokumen	18.243	0 dokumen	32.329	-	-	-	-	2 dokumen	50.572	16,67%	23,99%	16,67%	23,99%			Dinas Kesehatan		
		2.1.2.04.03.0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	381.256	2 dokumen	123.036	0 dokumen	31.688	-	-	-	-	2 dokumen	154.724	16,67%	40,58%	16,67%	40,58%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
		2.1.2.04.03.0008	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	305.397	2 dokumen	19.133	0 dokumen	18.112	-	-	-	-	2 dokumen	37.245	16,67%	12,20%	16,67%	12,20%			Dinas Pendidikan		
		2.1.2.04.03.0009	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	275.159	2 dokumen	10.690	0 dokumen	38.571	-	-	-	-	2 dokumen	49.261	16,67%	17,90%	16,67%	17,90%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.1.2.04.03.0010	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	306.312	2 dokumen	5.919	0 dokumen	51.820	-	-	-	-	2 dokumen	57.739	16,67%	18,85%	16,67%	18,85%			Inspektorat		
		2.1.2.04.03.0011	Reviu Dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu			2 dokumen	388.012	0 dokumen	3.258	1 dokumen	19.616	-	-	-	-	1 dokumen	22.874	50,00%	5,90%	50,00%	5,90%			Inspektorat		
		2.1.2.04.03.0012	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	25.000	2 dokumen	0	0 dokumen	0	-	-	-	-	2 dokumen	0	16,67%	0,00%	16,67%	0,00%			RSUD Bhakti Dharma Husada		
		2.1.2.04.03.0013	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah			12 dokumen	113.581	2 dokumen	0	0 dokumen	0	-	-	-	-	2 dokumen	0	16,67%	0,00%	16,67%	0,00%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie		
89	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	2.1.2.04.04	Program Perencanaan Kota		2.160.881	N/A		1.998.564		245.945		2.649.560		-		-		510.901		25,56%		510.901		23,64%			
				Persentase penyusunan rencana induk sektoral	92,86%	84,62 %		92,86%		-	-		-	-	-	-				84,62 %		91,12 %		-			
		2.1.2.04.04.0001	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase			1 dokumen	1.110.558	0 dokumen	91.758	0 dokumen	124.341	-	-	-	-	0 dokumen	216.099	0,00%	19,46%	0,00%	19,46%			Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.04.04.0002	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan			1 dokumen	888.006	0 dokumen	154.188	0 dokumen	140.614	-	-	-	-	0 dokumen	294.802	0,00%	33,20%	0,00%	33,20%			Badan Perencanaan Pembangunan		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
90	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	2.1.2.04.05	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1.405.610		24.160.015		1.418.704		254.654		2.651.950		-		-		519.850		36,64%		519.850		36,98%			
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-			N/A			N/A		-		
				Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaannya tahunannya berkualitas			133,33%		-		-		-		-		-								133,33%				
				Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaannya tahunannya berkualitas			133,33%		-		-		-		-		-								133,33%				
				Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparat pemerintah yang dokumen perencanaannya tahunannya berkualitas			133,33%		-		-		-		-		-								133,33%				
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral			100%		-		-		-		-		-								100,00%				
		2.1.2.04.05.0001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun				9 dokumen	1.418.704	1 dokumen	254.654	2 dokumen	265.195	-	-	-	-	3 dokumen	519.850	33,33%	36,64%	33,33%	36,64%				Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.04.06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			2.455.628		N/A		2.513.619		302.333		4.646.390		-		-		766.972		30,51%		766.972		31,23%			
				Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80%		100,00 %		80%		-		-		-		-		-			100,00 %			125,00 %		-		
		2.1.2.04.06.0001	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun				6 dokumen	734.862	0 dokumen	25.655	1 dokumen	95.161	-	-	-	-	1 dokumen	120.816	16,67%	16,44%	16,67%	16,44%				Badan Perencanaan Pembangunan		
		2.1.2.04.06.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun				2 dokumen	524.774	0 dokumen	106.504	1 dokumen	107.373	-	-	-	-	1 dokumen	213.877	50,00%	40,76%	50,00%	40,76%				Badan Perencanaan Pembangunan		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.1.2.04.06.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun			2 dokumen	587.173	0 dokumen	64.005	1 dokumen	126.897	-	-	-	-	1 dokumen	190.902	50,00%	32,51%	50,00%	32,51%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.04.06.0004	Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun			2 dokumen	666.810	0 dokumen	106.168	0 dokumen	135.209	-	-	-	-	0 dokumen	241.377	0,00%	36,20%	0,00%	36,20%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.04.07	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah		1.880.697	N/A		1.815.706		343.615		2.828.390		-		-		626.454		34,50%		626.454		33,31%					
				Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	80%		100,00 %		80%		-	-	-	-	-	-	-			100,00 %		125,00 %		-					
		2.1.2.04.07.0001	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota			1 dokumen	988.186	0 dokumen	287.903	1 dokumen	173.552	-	-	-	-	1 dokumen	461.455	100,00%	46,70%	100,00%	46,70%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.04.07.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup			1 dokumen	827.520	0 dokumen	55.712	0 dokumen	109.287	-	-	-	-	0 dokumen	164.999	0,00%	19,94%	0,00%	19,94%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.04.08	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan		1.920.031	N/A		1.807.930		258.551		3.918.490		-		-		650.400		35,97%		650.400		33,87%					
				Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	80%		100,00 %		80%		-	-	-	-	-	-	-			100,00 %		125,00 %		-					
		2.1.2.04.08.0001	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi			12 kali	643.816	3 kali	114.176	3 kali	155.484	-	-	-	-	6 kali	269.660	50,00%	41,88%	50,00%	41,88%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.04.08.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat			1 dokumen	543.833	0 dokumen	80.610	0 dokumen	116.774	-	-	-	-	0 dokumen	197.384	0,00%	36,30%	0,00%	36,30%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.1.2.04.08.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun			2 dokumen	620.281	1 dokumen	63.765	0 dokumen	119.591	-	-	-	-	1 dokumen	183.356	50,00%	29,56%	50,00%	29,56%			Badan Perencanaan Pembangunan				
		2.2	Unsur Manajemen																										
		2.2.2	Non Pelayanan Dasar																										

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.2.2.01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																										
91	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah	2.2.2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		530.459.990		463.904.827		551.904.777		83.090.761		1.085.301.150		-		-				191.620.876		34,72%		191.620.876		36,12%		
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	87%		88,92 %		87%		-		-		-		-				-			88,92 %		102,21 %		-	
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran			117%		-		-		-		-		-									117,00%			
		2.2.2.01.01.000 1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	1.449.505	7%	273.215	6%	297.701	-	-	-	-	7%	570.916	7,00%	39,39%	7,00%	39,39%					Badan Kepegawaian dan Diklat	
		2.2.2.01.01.000 2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	1.381.174	4%	295.898	6%	325.138	-	-	-	-	6%	621.037	6,00%	44,96%	6,00%	44,96%					Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
		2.2.2.01.01.000 3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	2.112.946	5%	256.467	5%	523.932	-	-	-	-	6%	780.399	6,00%	36,93%	6,00%	36,93%					Badan Penganggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
		2.2.2.01.01.000 4	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	7.459.922	6%	1.366.860	6%	1.628.356	-	-	-	-	7%	2.995.216	7,00%	40,15%	7,00%	40,15%					Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
		2.2.2.01.01.000 5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	2.663.415	6%	0	5%	0	-	-	-	-	6%	0	6,00%	0,00%	6,00%	0,00%					Badan Perencanaan Pembangunan	
		2.2.2.01.01.000 6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	1.137.114	6%	226.912	4%	255.109	-	-	-	-	6%	482.021	6,00%	42,39%	6,00%	42,39%					Bagian Administrasi Kerjasama	
		2.2.2.01.01.000 7	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	856.135	7%	160.085	3%	218.896	-	-	-	-	7%	378.981	7,00%	44,27%	7,00%	44,27%					Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
		2.2.2.01.01.000 8	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	926.547	5%	0	4%	0	-	-	-	-	5%	0	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%					Bagian Administrasi Pembangunan	
		2.2.2.01.01.000 9	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	591.398	4%	0	4%	0	-	-	-	-	5%	0	5,00%	0,00%	5,00%	0,00%					Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
		2.2.2.01.01.001 0	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	843.374	8%	0	5%	0	-	-	-	-	8%	0	8,00%	0,00%	8,00%	0,00%					Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	
		2.2.2.01.01.001 1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran				100%	2.578.334	8%	0	7%	0	-	-	-	-	8%	0	8,00%	0,00%	8,00%	0,00%					Bagian Hubungan Masyarakat	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.2.2.01.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	666.349	6%	0	6%	0	-	-	-	-	6%	0	6,00%	0,00%	6,00%	0,00%			Bagian Hukum				
		2.2.2.01.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.571.029	4%	0	6%	0	-	-	-	-	6%	0	6,00%	0,00%	6,00%	0,00%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset				
		2.2.2.01.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	242.100	3%	0	3%	0	-	-	-	-	3%	0	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%			Bagian Organisasi				
		2.2.2.01.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	88.685.623	8%	9.545.678	8%	15.830.513	-	-	-	-	8%	25.376.191	8,00%	28,61%	8,00%	28,61%			Bagian Umum Dan Protokol				
		2.2.2.01.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	9.673.259	7%	1.859.455	5%	1.754.189	-	-	-	-	7%	3.613.643	7,00%	37,36%	7,00%	37,36%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau				
		2.2.2.01.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	10.176.919	8%	2.036.241	7%	2.455.972	-	-	-	-	8%	4.492.213	8,00%	44,14%	8,00%	44,14%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
		2.2.2.01.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.844.831	8%	450.745	5%	653.722	-	-	-	-	8%	1.104.466	8,00%	38,82%	8,00%	38,82%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga				
		2.2.2.01.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	3.706.235	6%	599.873	4%	873.128	-	-	-	-	6%	1.473.001	6,00%	39,74%	6,00%	39,74%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		2.2.2.01.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	103.646.401	6%	18.941.792	6%	27.321.303	-	-	-	-	7%	46.263.095	7,00%	44,64%	7,00%	44,64%			Dinas Kesehatan				
		2.2.2.01.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	3.632.426	6%	777.186	4%	790.183	-	-	-	-	6%	1.567.369	6,00%	43,15%	6,00%	43,15%			Dinas Kelahahan Pangan dan Pertanian				
		2.2.2.01.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.268.830	8%	596.208	5%	359.921	-	-	-	-	8%	956.128	8,00%	42,14%	8,00%	42,14%			Dinas Komunikasi dan Informatika				
		2.2.2.01.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.964.505	8%	396.569	4%	382.118	-	-	-	-	8%	778.687	8,00%	39,64%	8,00%	39,64%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				
		2.2.2.01.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.392.230	8%	321.685	5%	323.227	-	-	-	-	8%	644.912	8,00%	46,32%	8,00%	46,32%			Dinas Lingkungan Hidup				
		2.2.2.01.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	31.382.522	5%	8.641.355	5%	9.283.681	-	-	-	-	5%	17.925.036	5,00%	57,12%	5,00%	57,12%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan				
		2.2.2.01.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	3.774.263	7%	781.773	7%	646.130	-	-	-	-	7%	1.427.903	7,00%	37,83%	7,00%	37,83%			Dinas Pemadam Kebakaran				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.2.2.01.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.994.540	8%	377.650	3%	313.159	-	-	-	-	8%	690.809	8,00%	34,64%	8,00%	34,64%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa- tupint		
		2.2.2.01.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	21.622.238	6%	1.077.065	6%	1.804.251	-	-	-	-	6%	2.881.316	6,00%	13,33%	6,00%	13,33%			Dinas Pendidikan		
		2.2.2.01.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	5.690.211	7%	850.402	6%	795.296	-	-	-	-	7%	1.645.698	7,00%	28,92%	7,00%	28,92%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah		
		2.2.2.01.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	3.951.126	5%	698.760	6%	920.589	-	-	-	-	6%	1.619.349	6,00%	40,98%	6,00%	40,98%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		2.2.2.01.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	3.780.228	8%	950.394	6%	842.633	-	-	-	-	8%	1.793.027	8,00%	47,43%	8,00%	47,43%			Dinas Perdagangan		
		2.2.2.01.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	13.069.610	4%	2.204.632	7%	2.749.948	-	-	-	-	7%	4.954.581	7,00%	37,91%	7,00%	37,91%			Dinas Perhubungan		
		2.2.2.01.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.612.189	7%	520.597	5%	653.639	-	-	-	-	7%	1.174.237	7,00%	44,95%	7,00%	44,95%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		2.2.2.01.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	8.574.027	7%	1.223.319	5%	1.414.588	-	-	-	-	7%	2.637.908	7,00%	30,77%	7,00%	30,77%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang		
		2.2.2.01.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	4.517.009	6%	939.477	7%	1.178.170	-	-	-	-	7%	2.117.647	7,00%	46,88%	7,00%	46,88%			Dinas Sosial		
		2.2.2.01.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.082.784	8%	465.596	5%	542.708	-	-	-	-	8%	1.008.304	8,00%	48,41%	8,00%	48,41%			Dinas Tenaga Kerja		
		2.2.2.01.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.342.524	8%	270.926	6%	312.629	-	-	-	-	8%	583.555	8,00%	43,47%	8,00%	43,47%			Inspektorat		
		2.2.2.01.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.184.300	7%	153.876	4%	146.215	-	-	-	-	7%	300.091	7,00%	25,34%	7,00%	25,34%			Kec. Asemrowo		
		2.2.2.01.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.522.971	7%	188.607	4%	164.383	-	-	-	-	7%	352.989	7,00%	23,18%	7,00%	23,18%			Kec. Benowo		
		2.2.2.01.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.760.289	8%	219.101	5%	203.384	-	-	-	-	8%	422.485	8,00%	24,00%	8,00%	24,00%			Kec. Bubutan		
		2.2.2.01.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.663.683	7%	253.873	6%	265.491	-	-	-	-	7%	519.364	7,00%	31,22%	7,00%	31,22%			Kec. Bulak		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.2.2.01.01.004 2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.384.669	7%	179.278	5%	181.511	-	-	-	-	7%	360.789	7,00%	26,06%	7,00%	26,06%			Kec. Dukuh Pakis		
		2.2.2.01.01.004 3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.718.401	6%	307.445	4%	243.288	-	-	-	-	6%	550.733	6,00%	32,05%	6,00%	32,05%			Kec. Gayungan		
		2.2.2.01.01.004 4	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.652.028	6%	235.058	4%	241.856	-	-	-	-	6%	476.914	6,00%	28,87%	6,00%	28,87%			Kec. Genteng		
		2.2.2.01.01.004 5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.139.019	7%	271.503	4%	233.759	-	-	-	-	7%	505.262	7,00%	23,62%	7,00%	23,62%			Kec. Gubeng		
		2.2.2.01.01.004 6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.347.795	6%	163.262	4%	211.870	-	-	-	-	7%	375.131	7,00%	27,83%	7,00%	27,83%			Kec. Gunung Anyar		
		2.2.2.01.01.004 7	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.427.329	6%	250.988	5%	230.826	-	-	-	-	7%	481.814	7,00%	33,76%	7,00%	33,76%			Kec. Jambangan		
		2.2.2.01.01.004 8	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.352.193	7%	151.817	4%	143.177	-	-	-	-	7%	294.993	7,00%	21,82%	7,00%	21,82%			Kec. Karangpilang		
		2.2.2.01.01.004 9	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.666.459	6%	233.951	6%	231.085	-	-	-	-	7%	465.036	7,00%	27,91%	7,00%	27,91%			Kec. Kenjeran		
		2.2.2.01.01.005 0	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.079.757	7%	292.170	7%	285.393	-	-	-	-	7%	577.563	7,00%	27,77%	7,00%	27,77%			Kec. Krembangan		
		2.2.2.01.01.005 1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.633.051	7%	174.034	4%	159.826	-	-	-	-	7%	333.860	7,00%	20,44%	7,00%	20,44%			Kec. Lakarsantri		
		2.2.2.01.01.005 2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.276.436	5%	246.929	5%	250.517	-	-	-	-	5%	497.447	5,00%	21,85%	5,00%	21,85%			Kec. Mulyorejo		
		2.2.2.01.01.005 3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.884.208	7%	281.169	3%	262.860	-	-	-	-	7%	544.029	7,00%	28,87%	7,00%	28,87%			Kec. Pabean Cantian		
		2.2.2.01.01.005 4	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.588.787	7%	224.303	5%	247.740	-	-	-	-	7%	472.044	7,00%	29,71%	7,00%	29,71%			Kec. Pakal		
		2.2.2.01.01.005 5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.082.672	7%	350.716	4%	288.508	-	-	-	-	7%	639.224	7,00%	30,69%	7,00%	30,69%			Kec. Rungkut		
		2.2.2.01.01.005 6	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.460.934	7%	205.617	6%	220.769	-	-	-	-	7%	426.386	7,00%	29,19%	7,00%	29,19%			Kec. Sambikerep		
		2.2.2.01.01.005 7	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.760.830	7%	413.897	5%	401.001	-	-	-	-	8%	814.898	8,00%	29,52%	8,00%	29,52%			Kec. Sawahan		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
		2.2.2.01.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.394.517	7%	284.983	7%	321.161	-	-	-	-	7%	606.144	7,00%	25,31%	7,00%	25,31%			Kec. Semampir				
		2.2.2.01.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.651.795	7%	189.689	5%	179.365	-	-	-	-	7%	369.053	7,00%	22,34%	7,00%	22,34%			Kec. Simokerto				
		2.2.2.01.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.400.948	8%	465.053	5%	252.498	-	-	-	-	8%	717.551	8,00%	29,89%	8,00%	29,89%			Kec. Sukolilo				
		2.2.2.01.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.998.376	6%	298.575	4%	257.039	-	-	-	-	6%	555.614	6,00%	27,80%	6,00%	27,80%			Kec. Sukomanunggal				
		2.2.2.01.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.588.264	6%	351.650	4%	341.991	-	-	-	-	6%	693.641	6,00%	26,80%	6,00%	26,80%			Kec. Tambaksari				
		2.2.2.01.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.892.746	7%	249.301	4%	203.737	-	-	-	-	7%	453.038	7,00%	23,94%	7,00%	23,94%			Kec. Tandes				
		2.2.2.01.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.567.615	7%	245.248	4%	241.229	-	-	-	-	7%	486.477	7,00%	18,95%	7,00%	18,95%			Kec. Tegalsari				
		2.2.2.01.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.775.947	5%	221.598	4%	150.754	-	-	-	-	5%	372.351	5,00%	20,97%	5,00%	20,97%			Kec. Tenggilis Mejoyo				
		2.2.2.01.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.687.780	6%	230.430	5%	263.017	-	-	-	-	7%	493.447	7,00%	29,24%	7,00%	29,24%			Kec. Wiyung				
		2.2.2.01.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	1.778.253	5%	176.091	4%	213.240	-	-	-	-	6%	389.331	6,00%	21,89%	6,00%	21,89%			Kec. Wonocolo				
		2.2.2.01.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.050.008	6%	262.728	4%	252.344	-	-	-	-	6%	515.072	6,00%	25,13%	6,00%	25,13%			Kec. Wonokromo				
		2.2.2.01.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	40.202.448	6%	5.431.777	6%	7.846.284	-	-	-	-	6%	13.278.061	6,00%	33,03%	6,00%	33,03%			RSUD Bhakti Dharma Husada				
		2.2.2.01.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	65.557.904	7%	8.041.734	8%	11.436.622	-	-	-	-	8%	19.478.356	8,00%	29,71%	8,00%	29,71%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie				
		2.2.2.01.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	2.148.143	8%	409.860	7%	518.751	-	-	-	-	8%	928.610	8,00%	43,23%	8,00%	43,23%			Satuan Polisi Pamong Praja				
		2.2.2.01.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran			100%	29.760.353	8%	4.327.636	8%	5.987.797	-	-	-	-	8%	10.315.432	8,00%	34,66%	8,00%	34,66%			Sekretariat DPRD				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.2.2.01.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan			95.269.436		N/A		104.291.980		9.794.341		104.049.310		-		20.199.272		19,37%		20.199.272		21,20%			
				Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%		99,30 %		100%		-		-		-		-		-		99,30 %		99,30 %		-		
				Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		99,35 %		100%		-		-		-		-		-		99,35 %		99,35 %		-		
		2.2.2.01.02.000 1	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	441.545	2%	29.367	2%	70.404	-	-	-	-	2%	99.771	2,00%	22,60%	2,00%	22,60%			Badan Kepegawaian dan Diklat	
		2.2.2.01.02.000 2	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	336.971	1%	3.525	2%	43.891	-	-	-	-	2%	47.416	2,00%	14,07%	2,00%	14,07%			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	
		2.2.2.01.02.000 3	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	1.158.170	1%	178.276	1%	306.695	-	-	-	-	1%	484.971	1,00%	41,87%	1,00%	41,87%			Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	
		2.2.2.01.02.000 4	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	5.342.168	3%	1.409.722	3%	703.585	-	-	-	-	3%	2.113.307	3,00%	39,56%	3,00%	39,56%			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
		2.2.2.01.02.000 5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	487.583	3%	64.355	2%	80.974	-	-	-	-	3%	145.329	3,00%	29,81%	3,00%	29,81%			Badan Perencanaan Pembangunan	
		2.2.2.01.02.000 6	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	265.687	2%	45.384	1%	29.789	-	-	-	-	2%	75.173	2,00%	28,29%	2,00%	28,29%			Bagian Administrasi Kerjasama	
		2.2.2.01.02.000 7	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	153.936	2%	14.145	2%	20.936	-	-	-	-	2%	35.082	2,00%	22,79%	2,00%	22,79%			Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
		2.2.2.01.02.000 8	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	1.947.303	3%	181.741	3%	436.833	-	-	-	-	3%	618.575	3,00%	31,77%	3,00%	31,77%			Bagian Administrasi Pembangunan	
		2.2.2.01.02.000 9	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	239.621	2%	12.802	2%	23.258	-	-	-	-	2%	36.060	2,00%	15,05%	2,00%	15,05%			Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	
		2.2.2.01.02.001 0	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	178.490	2%	14.765	2%	31.806	-	-	-	-	2%	46.571	2,00%	26,09%	2,00%	26,09%			Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	
		2.2.2.01.02.001 1	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	516.627	2%	51.923	2%	64.774	-	-	-	-	2%	116.697	2,00%	22,59%	2,00%	22,59%			Bagian Hubungan Masyarakat	
		2.2.2.01.02.001 2	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran				100%	288.589	2%	25.118	2%	49.885	-	-	-	-	2%	75.004	2,00%	25,99%	2,00%	25,99%			Bagian Hukum	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2.2.2.01.02.0013	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1.670.053	1%	11.410	1%	57.101	-	-	-	-	1%	68.511	1,00%	4,10%	1,00%	4,10%			Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset		
		2.2.2.01.02.0014	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	132.148	2%	11.762	1%	18.793	-	-	-	-	2%	30.555	2,00%	23,12%	2,00%	23,12%			Bagian Organisasi		
		2.2.2.01.02.0015	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran			100%	4.685.376	2%	806.808	2%	494.076	-	-	-	-	2%	1.300.884	2,00%	27,76%	2,00%	27,76%			Bagian Umum dan Protokol		
		2.2.2.01.02.0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	2.305.936	2%	342.480	1%	262.719	-	-	-	-	2%	605.199	2,00%	26,25%	2,00%	26,25%			Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		
		2.2.2.01.02.0017	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	654.875	3%	87.957	2%	66.478	-	-	-	-	3%	154.436	3,00%	23,58%	3,00%	23,58%			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
		2.2.2.01.02.0018	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	671.287	1%	28.148	1%	62.287	-	-	-	-	1%	90.435	1,00%	13,47%	1,00%	13,47%			Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		
		2.2.2.01.02.0019	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	674.569	2%	48.635	1%	72.203	-	-	-	-	2%	120.838	2,00%	17,91%	2,00%	17,91%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
		2.2.2.01.02.0020	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	6.046.080	4%	826.079	3%	640.320	-	-	-	-	4%	1.466.398	4,00%	24,25%	4,00%	24,25%			Dinas Kesehatan		
		2.2.2.01.02.0021	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1.843.515	3%	160.596	3%	171.632	-	-	-	-	3%	332.229	3,00%	18,02%	3,00%	18,02%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		2.2.2.01.02.0022	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1.379.691	2%	125.423	3%	192.381	-	-	-	-	3%	317.804	3,00%	23,03%	3,00%	23,03%			Dinas Komunikasi dan Informatika		
		2.2.2.01.02.0023	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	598.192	3%	80.106	1%	84.764	-	-	-	-	3%	164.870	3,00%	27,56%	3,00%	27,56%			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
		2.2.2.01.02.0024	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	468.333	2%	46.132	2%	65.861	-	-	-	-	2%	111.992	2,00%	23,91%	2,00%	23,91%			Dinas Lingkungan Hidup		
		2.2.2.01.02.0025	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	4.633.175	1%	252.058	1%	692.439	-	-	-	-	2%	944.497	2,00%	20,39%	2,00%	20,39%			Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan		
		2.2.2.01.02.0026	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1.635.298	3%	172.026	2%	173.425	-	-	-	-	3%	345.451	3,00%	21,12%	3,00%	21,12%			Dinas Pemadam Kebakaran		
		2.2.2.01.02.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	536.224	2%	29.660	1%	59.988	-	-	-	-	2%	89.648	2,00%	16,72%	2,00%	16,72%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
		2.2.2.01.02.0028	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	3.029.155	3%	210.522	3%	162.093	-	-	-	-	4%	372.615	4,00%	12,30%	4,00%	12,30%			Dinas Pendidikan				
		2.2.2.01.02.0029	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	2.176.099	3%	140.178	3%	145.916	-	-	-	-	3%	286.094	3,00%	13,15%	3,00%	13,15%			Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah				
		2.2.2.01.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	892.996	3%	83.848	2%	98.990	-	-	-	-	3%	182.838	3,00%	20,47%	3,00%	20,47%			Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		2.2.2.01.02.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1.562.842	4%	289.687	2%	120.575	-	-	-	-	4%	410.262	4,00%	26,25%	4,00%	26,25%			Dinas Perdagangan				
		2.2.2.01.02.0032	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	4.740.355	4%	1.047.649	3%	1.064.448	-	-	-	-	4%	2.112.098	4,00%	44,56%	4,00%	44,56%			Dinas Perhubungan				
		2.2.2.01.02.0033	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	790.306	3%	133.182	1%	50.425	-	-	-	-	3%	183.606	3,00%	23,23%	3,00%	23,23%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
		2.2.2.01.02.0034	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1.807.210	3%	296.422	1%	223.163	-	-	-	-	3%	519.585	3,00%	28,75%	3,00%	28,75%			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		2.2.2.01.02.0035	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	1.002.970	3%	237.887	2%	92.346	-	-	-	-	3%	330.233	3,00%	32,93%	3,00%	32,93%			Dinas Sosial				
		2.2.2.01.02.0036	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	497.737	2%	52.043	1%	53.434	-	-	-	-	2%	105.476	2,00%	21,19%	2,00%	21,19%			Dinas Tenaga Kerja				
		2.2.2.01.02.0037	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	498.822	3%	81.319	2%	64.582	-	-	-	-	3%	145.901	3,00%	29,25%	3,00%	29,25%			Inspektorat				
		2.2.2.01.02.0038	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	314.733	2%	22.128	1%	45.425	-	-	-	-	2%	67.552	2,00%	21,46%	2,00%	21,46%			Kec. Asemrowo				
		2.2.2.01.02.0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	284.717	2%	21.174	1%	42.243	-	-	-	-	2%	63.416	2,00%	22,27%	2,00%	22,27%			Kec. Benowo				
		2.2.2.01.02.0040	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	287.452	2%	26.641	2%	37.852	-	-	-	-	2%	64.494	2,00%	22,44%	2,00%	22,44%			Kec. Bubutan				
		2.2.2.01.02.0041	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	373.663	2%	32.525	2%	55.653	-	-	-	-	2%	88.178	2,00%	23,60%	2,00%	23,60%			Kec. Bulak				
		2.2.2.01.02.0042	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	302.982	2%	25.033	2%	49.674	-	-	-	-	2%	74.707	2,00%	24,66%	2,00%	24,66%			Kec. Dukuh Pakis				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) e/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.2.2.01.02.004 3	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	313.563	2%	32.470	1%	37.390	-	-	-	-	2%	69.859	2,00%	22,28%	2,00%	22,28%			Kec. Gayungan		
		2.2.2.01.02.004 4	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	322.567	2%	29.341	1%	50.798	-	-	-	-	2%	80.139	2,00%	24,84%	2,00%	24,84%			Kec. Genteng		
		2.2.2.01.02.004 5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	642.252	2%	59.220	1%	51.775	-	-	-	-	2%	110.995	2,00%	17,28%	2,00%	17,28%			Kec. Gubeng		
		2.2.2.01.02.004 6	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	326.766	2%	19.613	2%	50.793	-	-	-	-	2%	70.406	2,00%	21,55%	2,00%	21,55%			Kec. Gunung Anyar		
		2.2.2.01.02.004 7	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	393.093	2%	29.050	2%	53.032	-	-	-	-	2%	82.082	2,00%	20,88%	2,00%	20,88%			Kec. Jambangan		
		2.2.2.01.02.004 8	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	289.333	2%	16.619	1%	38.345	-	-	-	-	2%	54.964	2,00%	19,00%	2,00%	19,00%			Kec. Karangpilang		
		2.2.2.01.02.004 9	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	294.503	2%	26.318	2%	43.820	-	-	-	-	2%	70.139	2,00%	23,82%	2,00%	23,82%			Kec. Kenjeran		
		2.2.2.01.02.005 0	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	607.357	2%	48.634	2%	56.295	-	-	-	-	2%	104.930	2,00%	17,28%	2,00%	17,28%			Kec. Krembangan		
		2.2.2.01.02.005 1	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	298.990	2%	25.652	1%	41.711	-	-	-	-	2%	67.363	2,00%	22,53%	2,00%	22,53%			Kec. Lakarsantri		
		2.2.2.01.02.005 2	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	378.195	2%	26.089	1%	42.372	-	-	-	-	2%	68.461	2,00%	18,10%	2,00%	18,10%			Kec. Mulyorejo		
		2.2.2.01.02.005 3	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	327.073	2%	28.095	1%	49.451	-	-	-	-	2%	77.545	2,00%	23,71%	2,00%	23,71%			Kec. Pabean Cantian		
		2.2.2.01.02.005 4	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	299.391	2%	20.485	2%	53.156	-	-	-	-	2%	73.641	2,00%	24,60%	2,00%	24,60%			Kec. Pakal		
		2.2.2.01.02.005 5	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	289.214	2%	16.147	2%	42.845	-	-	-	-	2%	58.992	2,00%	20,40%	2,00%	20,40%			Kec. Rungkut		
		2.2.2.01.02.005 6	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	281.901	2%	24.240	1%	42.075	-	-	-	-	2%	66.315	2,00%	23,52%	2,00%	23,52%			Kec. Sambikerep		
		2.2.2.01.02.005 7	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	305.857	2%	28.844	2%	49.173	-	-	-	-	2%	78.017	2,00%	25,51%	2,00%	25,51%			Kec. Sawahan		
		2.2.2.01.02.005 8	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	395.709	2%	38.429	2%	59.858	-	-	-	-	2%	98.288	2,00%	24,84%	2,00%	24,84%			Kec. Semampir		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) /Kegiatan(Output)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.2.2.01.02.0059	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	273.432	2%	26.100	2%	36.634	-	-	-	-	2%	62.734	2,00%	22,94%	2,00%	22,94%			Kec. Simokerto		
		2.2.2.01.02.0060	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	392.179	2%	38.012	2%	67.373	-	-	-	-	2%	105.385	2,00%	26,87%	2,00%	26,87%			Kec. Sukolilo		
		2.2.2.01.02.0061	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	273.416	2%	29.331	1%	29.702	-	-	-	-	2%	59.033	2,00%	21,59%	2,00%	21,59%			Kec. Sukomanunggal		
		2.2.2.01.02.0062	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	413.675	2%	36.885	2%	58.120	-	-	-	-	2%	95.005	2,00%	22,97%	2,00%	22,97%			Kec. Tambaksari		
		2.2.2.01.02.0063	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	358.175	2%	16.970	2%	38.485	-	-	-	-	2%	55.455	2,00%	15,48%	2,00%	15,48%			Kec. Tandes		
		2.2.2.01.02.0064	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	380.289	2%	31.923	1%	41.958	-	-	-	-	2%	73.881	2,00%	19,43%	2,00%	19,43%			Kec. Tegalsari		
		2.2.2.01.02.0065	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	302.734	2%	14.125	1%	32.853	-	-	-	-	2%	46.978	2,00%	15,52%	2,00%	15,52%			Kec. Tenggilis Mejoyo		
		2.2.2.01.02.0066	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	292.429	2%	20.392	1%	49.178	-	-	-	-	2%	69.570	2,00%	23,79%	2,00%	23,79%			Kec. Wiyung		
		2.2.2.01.02.0067	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	335.575	2%	29.045	1%	40.980	-	-	-	-	2%	70.024	2,00%	20,87%	2,00%	20,87%			Kec. Wonocolo		
		2.2.2.01.02.0068	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	380.203	2%	33.026	1%	43.337	-	-	-	-	2%	76.363	2,00%	20,08%	2,00%	20,08%			Kec. Wonokromo		
		2.2.2.01.02.0069	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	6.800.292	2%	248.891	4%	1.037.509	-	-	-	-	4%	1.286.401	4,00%	18,92%	4,00%	18,92%			RSUD Bhakti Dharma Husada		
		2.2.2.01.02.0070	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	15.789.738	4%	256.466	3%	259.462	-	-	-	-	4%	515.928	4,00%	3,27%	4,00%	3,27%			RSUD Dr. Mohamad Soewandie		
		2.2.2.01.02.0071	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	2.614.746	3%	419.323	2%	295.151	-	-	-	-	3%	714.474	3,00%	27,32%	3,00%	27,32%			Satuan Polisi Pamong Praja		
		2.2.2.01.02.0072	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran			100%	12.065.852	2%	363.965	2%	327.183	-	-	-	-	2%	691.149	2,00%	5,73%	2,00%	5,73%			Sekretariat DPRD		
		2.2.2.02	Sarana dan Prasarana Perkantoran																								
92	Meningkatkan kompetensi ASN	2.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai		4.236.650	N/A		5.962.103		1.377.669		734.360		-		-		1.451.105		24,34%		1.451.105		34,25%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)		K	Rp.(000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16													
				Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
		2.2.2.02.01.0001	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola			8326 data	544.160	2197 data	0	1100 data	0	-	-	-	-	3297 data	0	39,60%	0,00%	39,60%	0,00%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.01.0002	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya			268 orang	1.591.467	165 orang	736.289	56 orang	27.068	-	-	-	-	221 orang	763.357	82,46%	47,97%	82,46%	47,97%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.01.0003	Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya			7226 orang	583.670	5392 orang	0	907 orang	0	-	-	-	-	6220 orang	0	86,08%	0,00%	86,08%	0,00%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.01.0004	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN			4 tahap	3.242.806	1 tahap	641.380	0 tahap	46.368	-	-	-	-	1 tahap	687.748	25,00%	21,21%	25,00%	21,21%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.02	Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM			6.374.461		N/A		6.380.454		880.067		1.281.680		-		1.008.235		15,80%		1.008.235		15,82%					
				Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	50,03%		80,18 %		50,03%		-		-		-		-		-		80,18 %		160,27 %		-				
				Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65,06%		74,30 %		65,06%		-		-		-		-		-		74,30 %		114,21 %		-				
		2.2.2.02.02.0001	Pelaksanaan Asesmen Pegawai	Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai			5 kali	450.617	3 kali	0	0 kali	0	-	-	-	-	3 kali	0	60,00%	0,00%	60,00%	0,00%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.02.0002	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural			2 jenis	911.606	2 jenis	70.394	0 jenis	27.684	-	-	-	-	2 jenis	98.078	100,00%	10,76%	100,00%	10,76%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.02.0003	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial			2 jenis	2.647.304	0 jenis	0	0 jenis	0	-	-	-	-	0 jenis	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.02.0004	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis			2 jenis	2.054.027	2 jenis	809.673	0 jenis	100.484	-	-	-	-	2 jenis	910.157	100,00%	44,31%	100,00%	44,31%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.02.0005	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)			3 materi	316.900	0 materi	0	0 materi	0	-	-	-	-	0 materi	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.03	Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai			2.526.050		N/A		2.430.370		395.884		4.261.780		-		822.063		33,82%		822.063		32,54%					
				Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100%		N/A		100%		-		-		-		-		-		N/A		N/A		-				
		2.2.2.02.03.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaian			500 orang	225.378	0 orang	19.590	0 orang	40.176	-	-	-	-	0 orang	59.766	0,00%	26,52%	0,00%	26,52%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.03.0002	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian			8326 berkas	669.375	2895 berkas	103.059	923 berkas	129.187	-	-	-	-	3818 berkas	232.246	45,86%	34,70%	45,86%	34,70%			Badan Kepegawaian dan Diklat				
		2.2.2.02.03.0003	Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan			118 berkas	977.074	9 berkas	181.382	31 berkas	159.223	-	-	-	-	40 berkas	340.605	33,90%	34,86%	33,90%	34,86%			Badan Kepegawaian dan Diklat				

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcom e)/Kegiatan(Outp ut)	Target RPJMD tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	I		II		III		IV		K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	14=6+12	15=14/5*100	16											
		2.2.2.02.03.0004	Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai			296 orang	558.543	15 orang	91.853	11 orang	97.592	-	-	-	-	26 orang	189.445	8,78%	33,92%	8,78%	33,92%			Badan Kepegawaian dan Diklat		

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran umum, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 serta tahun berjalan di tahun 2020, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Belum optimalnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja.
2. Belum optimalnya kunjungan destinasi wisata.
3. Masih adanya permasalahan perempuan dan anak.
4. Masih perlunya peningkatan sistem manajemen transportasi serta penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan
5. Masih perlunya peningkatan sistem sarana, prasarana dan utilitas perkotaan.
6. Masih perlunya peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
7. Masih perlunya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
8. Masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
9. Masih ditemukannya anak dengan kondisi stunting
10. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam rangka pencegahan penyakit menular dan tidak menular
11. Masih perlunya peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
12. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
13. Masih perlunya meningkatkan rata-rata lama sekolah.
14. Masih ditemukannya pelanggaran Perda dan kejadian gangguan ketentraman umum.
15. Kurang optimalnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal.
16. Masih perlunya pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik.
17. Belum optimalnya pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.

18. Perlunya penanganan dan pemulihan dampak bencana nasional pandemi covid-19.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Pendidikan

1. Masih terdapat sarana dan prasarana lembaga PAUD yang kurang optimal.
2. Masih belum meratanya keberadaan sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kota Surabaya.
3. Masih terdapat sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah yang belum sesuai standar.
4. Masih terdapat guru SD maupun SMP yang belum memenuhi kompetensi dan memiliki sertifikasi .
5. Masih kurangnya minat pengelola lembaga kursus dan pelatihan untuk mendaftarkan akreditasi lembaganya.

2.3.2.2 Kesehatan

1. Masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
2. Masih ditemukannya balita dengan kondisi gizi kurang, gizi buruk, dan *stunting*.
3. Cakupan pelayanan untuk ibu hamil, ibu nifas, bayi, balita dan anak masih perlu ditingkatkan sesuai standar.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan sesuai standar.
5. Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah belum tercapai secara optimal
6. Masih terdapat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) binaan Pemerintah Kota Surabaya yang belum memenuhi syarat higienis sanitasi.

7. Masih ditemukannya bahan pangan segar serta sampel makanan jadi/olahan yang belum memenuhi syarat keamanan pangan yang berlaku.
8. Optimalisasi upaya preventif dan promotif terhadap pandemi Covid-19 guna menurunkan dampak dari pandemi tersebut.
9. Peningkatan penanganan terhadap penderita penyakit menular antara lain Covid-19, HIV, TB, dan lain-lain, serta penyakit tidak menular seperti hipertensi, kanker, diabetes, dll.

2.3.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Masih adanya bangunan yang belum memiliki IMB atau bangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Hal ini salah satunya disebabkan jumlah bangunan dan kecepatan pelaksanaan pembangunan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan dan sarana prasana penunjang pelaksanaan pengawasan di lapangan.
2. Masih diperlukan untuk melengkapi penyusunan Rencana Induk pada beberapa sektor.
3. Masih terjadinya genangan di beberapa titik di Surabaya karena curah hujan tinggi serta masih adanya jaringan drainase yang belum berfungsi optimal.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan pada gedung pemerintah dan swasta.
5. Penyediaan layanan air bersih terkendala lahan yang bukan menjadi wewenang Pemerintah Kota.
6. Penambahan ruas jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

2.3.2.4 Perhubungan

1. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum termasuk waktu tunggu kendaraan umum, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

2. Masih adanya kejadian kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas.

2.3.2.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi.
2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (*unmeet need*).
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.

2.3.2.6 Pangan

1. Masih ditemukannya bahan pangan segar beredar dinyatakan tidak aman karena rendahnya kesadaran masyarakat.
2. Masih adanya sampel makanan yang belum memenuhi syarat keamanan makanan.
3. Kurang optimalnya ketahanan pangan masyarakat, terutama dalam menghadapi pandemi covid-19.

2.3.2.7 Perdagangan

1. Masih adanya UMKM yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya.
2. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal.
3. Masih diperlukannya penerapan protokol kesehatan sektor perdagangan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal.

2.3.2.8 Kepemudaan dan Olahraga

1. Terbatasnya calon peserta yang akan menjadi kader dikarenakan kurangnya minat masyarakat dan waktu pengkaderan yang sering berbenturan dengan jadwal kegiatan pribadi (sekolah, kuliah, dll).
2. Kurang meratanya sarana prasarana olah raga yang tersedia dan dalam kondisi baik, terutama pada kampung-kampung padat penduduk.

2.3.2.9 Tenaga Kerja

1. Adanya pemutusan hubungan kerja sebagai dampak pandemik covid-19.
2. Masih diperlukannya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
3. Masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan.
4. Kurangnya *soft skill* tenaga kerja lokal Surabaya dalam dunia kerja.
5. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja.

2.3.2.10 Sosial

1. Perlunya *update* pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat terdampak Covid-19, agar bantuan sosial tepat sasaran.
2. Masih ditemukannya PMKS yang bukan penduduk Kota Surabaya.
3. Perlunya penanganan PMKS secara optimal.
4. Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

2.3.2.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terdapat permasalahan perempuan dan anak antara lain *trafficking* dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya dapat dipicu dari dampak pandemi Covid-19.
2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.

2.3.2.12 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Masih adanya temuan pelanggaran peraturan.
2. Masih terdapat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
4. Masih kurangnya partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

5. Masih adanya warga yang belum berperan untuk disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemik covid-19.
6. Masih perlunya upaya peningkatan partisipasi warga dalam mewujudkan Kampung Tangguh Wani Covid-19 (wani sehat, wani jogo, wani sejahtera, dan wani ngandani).

2.3.2.13 Pertanian

1. Penyediaan tanah dan / atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum masih diperlukan koordinasi dengan instansi lain (Pemerintah Propinsi, BPN, dll) terkait proses pengumpulan dan verifikasi data.
2. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.

2.3.2.14 Lingkungan Hidup

1. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
2. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R.
3. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.
4. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan.
5. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif.
6. Masih adanya kegiatan / usaha yang belum menerapkan konservasi energi.
7. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani, antara lain terkait limbah, kebisingan dan polusi udara dari kegiatan usaha dan transportasi.

2.3.2.15 Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Penyediaan kapasitas rumah susun belum sebanding dengan jumlah pemohon/calon penghuni rumah susun.
2. Masih perlunya pembenahan atau rehabilitasi jalan dan saluran lingkungan serta sarana dan prasarana permukiman.
3. Masih diperlukannya peningkatan kualitas lingkungan dan rumah layak huni.
4. Masih diperlukannya peningkatan sarana prasarana permukiman antara lain penyediaan air layak minum dan sanitasi.

2.3.2.16 Kebudayaan

1. Masih ada bangunan cagar budaya yang belum terpelihara dengan baik, karena pelibatan pemilik/pengelola cagar budaya dalam pengembangan kawasan sejarah/cagar budaya masih belum optimal.
2. Masih adanya kelompok seni terdaftar yang belum layak tampil.
3. Masih adanya hotel, restoran dan ruang publik yang belum menampilkan budaya lokal.

2.3.2.17 Perpustakaan

1. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat.
2. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan *digital*, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi *new normal*.

2.3.2.18 Penanaman Modal

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan data investasi.
2. Masih kurang optimalnya pertumbuhan ijin realisasi investasi.

2.3.2.19 Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah

1. Masih perlunya peningkatan sinergi antar lembaga dalam menindaklanjuti dan melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi *new normal*.
2. Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Masih adanya keterbatasan dalam pemenuhan peta penegasan batas wilayah terutama akibat kondisi pandemi covid-19 karena diperlukan koordinasi intensif dan pengecekan lapangan bersama dengan masyarakat.
4. Masih perlunya evaluasi peraturan yang berlaku dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan perkembangan kota dan kondisi masyarakat.
5. Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar.

2.3.2.20 Pengawasan

1. Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah.

2.3.2.21 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Belum terbangunnya integrasi sistem informasi kepegawaian dengan instansi pusat.
2. Belum optimalnya penerapan sistem merit.
3. Belum terbangunnya sistem pengembangan pola karir dan kompetensi pegawai.

2.3.2.22 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

1. Masih adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu pada beberapa Perangkat Daerah.

2. Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal.

2.3.2.23 Sarana dan Prasarana Perkantoran

1. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang dalam kondisi kurang baik.
2. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran yang kurang sesuai pemenuhannya.

2.3.2.24 Statistik

1. Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi.

2.3.2.25 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran.
2. Masih adanya penduduk meninggal yang belum memperoleh akte kematian.
3. Masih adanya warga yang belum bisa mengakses layanan secara online pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3.2.26 Kearsipan

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib sistem tata kearsipan

2.3.2.27 Komunikasi dan Informatika serta Persandian

1. Masih perlunya peningkatan sarana prasarana dan jaringan utilitas untuk menunjang sistem informasi perkotaan.
2. Masih diperlukan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem satu data dan satu peta.

2.3.2.28 Keuangan

1. Masih adanya piutang pendapatan daerah yang belum tertagih.

2. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan.
3. Belum optimalnya pendapatan dari DAK dikarenakan keterlambatan dan perubahan petunjuk teknis.
4. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 karena dampak covid-19.

2.3.2.29 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitas akses permodalan untuk usaha mikro.
2. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutukan dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM.
3. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi.

2.3.2.30 Pertanian

1. Belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (*urban farming*), peternakan dan perikanan sebagai peningkatan ketahanan pangan terutama pada saat pandemi covid-19.
2. Masih kurang optimalnya lembaga pertanian atau kelompok tani dalam mengembangkan budidaya, distribusi dan pemasaran produk pertanian, peternakan dan perikanan.
3. Masih kurang optimalnya pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana produksi oleh pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura binaan.
4. Masih terdapat pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang belum mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna dalam proses budidaya.
5. Masih adanya hewan ternak yang belum mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.
6. Masih terdapat pembudidaya ternak binaan yang belum menggunakan Teknologi Tepat Guna.

2.3.2.31 Kelautan dan Perikanan

1. Masih belum optimalnya pembudidaya perikanan dan kelautan binaan yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan.
2. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang belum sepenuhnya diaplikasikan oleh pembudidaya perikanan.

2.3.2.32 Pariwisata

1. Menurunnya kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi covid-19.
2. Belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata.
3. Menurunnya pengunjung hotel dan restoran serta pengguna sarana wisata (*travel agent* dll) sebagai dampak pandemi covid-19.
4. Menurunnya jumlah kegiatan seni dan budaya sebagai dampak pandemi covid-19.
5. Masih belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 Dan Tahun 2019

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cermin produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).

Tabel III.1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya
Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	913.363,56	928.398,16
B	Pertambangan dan Penggalian	32.568,38	33.531,33
C	Industri Pengolahan	101.196.564,52	109.245.937,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.311.134,20	2.362.300,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	771.856,00	791.147,83
F	Konstruksi	52.920.129,31	54.649.310,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149.167.327,31	161.141.233,33
H	Transportasi dan Pergudangan	28.811.194,17	31.240.415,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87.056.324,46	95.537.038,24
J	Informasi dan Komunikasi	28.390.748,22	30.770.585,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.140.646,05	29.413.339,89
L	Real Estate	13.775.255,11	14.947.568,30
M,N	Jasa Perusahaan	13.571.273,11	14.930.184,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.345.115,74	8.154.990,77

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
P	Jasa Pendidikan	12.897.475,91	14.007.607,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.053.612,67	4.443.228,45
R,S,T, U	Jasa lainnya	7.599.869,06	8.159.192,66
	Produk Domestik Regional Bruto	538.954.457,78	580.756.010,68

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

Pada Tabel III.1 terlihat bahwa perekonomian Kota Surabaya berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp580.756.010,68 juta. Dari sisi produksi, perekonomian Kota Surabaya didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi yang relatif besar bagi perekonomian di Kota Surabaya. Pada tahun 2019 lapangan usaha kategori ini sebesar Rp161.141.233,33 juta, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan yang memberikan nilai tambah terhadap perekonomian Kota Surabaya sebesar Rp109.245.937,20 juta. Urutan selanjutnya yang memberikan kontribusi PDRB terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai PDRB sebesar Rp95.537.038,24 juta.

Tabel III.2
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya
Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	581.426,57	576.221,53
B	Pertambangan dan Penggalian	20.762,58	20.782,09
C	Industri Pengolahan	73.328.747,38	77.312.368,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.540.006,38	1.546.272,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	583.121,24	605.979,60
F	Konstruksi	38.480.421,60	40.576.452,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.870.324,37	116.343.590,22
H	Transportasi dan Pergudangan	19.046.861,58	20.497.977,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.419.739,39	62.898.688,76
J	Informasi dan Komunikasi	25.613.455,86	27.531.903,71

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.541.116,14	19.187.832,54
L	Real Estate	10.165.858,67	10.784.959,46
M,N	Jasa Perusahaan	8.867.969,79	9.474.538,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.697.025,94	4.867.861,44
P	Jasa Pendidikan	9.064.164,83	9.668.100,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.023.591,50	3.254.593,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.495.449,09	5.821.770,58
	Produk Domestik Regional Bruto	387.340.042,93	410.969.893,88

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

Bila dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan tahun dasar (*constant price*). PDRB atas dasar konstan juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sekaligus dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian daerah. Pola PDRB atas dasar harga konstan Kota Surabaya saat ini sama dengan pola PDRB atas dasar harga berlaku. Pada Tabel III.2, nilai PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kategori dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan nilai PDRB kategori yang lainnya, yaitu sebesar Rp116.343.590,22 juta. Pada urutan berikutnya adalah kategori industri pengolahan dengan PRDB atas dasar harga konstan sebesar Rp77.312.368,81 juta, serta kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai PDRB sebesar Rp62.898.688,76 juta.

b. Sumbangan Sektoral

Perekonomian Kota Surabaya terus tumbuh pesat. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Surabaya demi memudahkan arus perekonomian Kota Surabaya. Tentunya dengan kondisi tersebut dapat mendorong sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yakni lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian pada tahun 2019 sebesar 28,31 persen.

Menggeliatnya sektor perdagangan tersebut juga didorong oleh perilaku masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi. Proporsi konsumsi masyarakat sendiri memiliki peran penting dari total komponen pembentuk perekonomian Kota Surabaya dari sisi permintaan. Hal ini sekaligus menimbulkan maraknya berbagai macam makanan dan minuman di warung hingga restoran yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Tingginya tingkat konsumsi tersebut turut berkontribusi dalam menstimulus tingginya peran lapangan usaha industri pengolahan dan penyediaan makan minum di Kota Surabaya, dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,81 persen dan 15,30 persen.

Selain Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; serta penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar selanjutnya di Kota Surabaya yakni lapangan usaha konstruksi. Berbeda dengan Kota Surabaya yang terdahulu, perkembangan Kota Surabaya saat ini berubah sangat dinamis, pembangunan infrastruktur dan banyaknya bangunan tinggi dan megah mulai dari hunian, kantor, maupun *mall* yang telah dibangun di Kota Surabaya. Banyaknya pembangunan baru salah satunya dipengaruhi oleh tingginya permintaan akan hunian maupun tempat hiburan sebagai dampak dari urbanisasi dan gaya hidup penduduk Kota Surabaya. Berdasarkan keterkaitan tersebut, kategori konstruksi menjadi kategori lapangan usaha paling dominan keempat dengan kontribusi sebesar 9,87 persen terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya setiap tahunnya.

Tabel III.3

**Peranan Ekonomi Per Kategori Terhadap PDRB Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)**

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Persen	Persen
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,14
B	Pertambangan dan Penggalan	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	18,93	18,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,40	0,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15
F	Konstruksi	9,93	9,87

Kategori	Uraian	2018	2019*
		Persen	Persen
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,37	28,31
H	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,08	15,30
J	Informasi dan Komunikasi	6,61	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	4,67
L	Real Estate	2,62	2,62
M,N	Jasa Perusahaan	2,29	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,21	1,18
P	Jasa Pendidikan	2,34	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,42	1,42
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Catatan : *) data sementara

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terus menunjukkan kecenderungan yang positif. Kota Surabaya dengan karakteristik perdagangan dan jasa memiliki potensi produktivitas yang cukup besar, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai 6,10% sebagaimana disajikan dalam Tabel III.4.

Tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya disebabkan oleh tingginya konsumsi masyarakat, teknologi yang kian maju dengan diikuti informasi masyarakat yang semakin *up to date*, upaya Pemerintah Kota Surabaya yang giat melakukan pembinaan dan memfasilitasi para UMKM dengan sentra wisata kuliner guna mendorong masyarakat Kota Surabaya menjadi lebih mandiri dalam berwirausaha, tenaga kerja yang berkompeten dan diimbangi oleh tersedianya lapangan kerja serta investor yang masuk ke Kota Surabaya untuk berinvestasi dengan semakin banyaknya proyek infrastruktur publik maupun non infrastruktur yang akan dibangun guna percepatan pembangunan Kota Surabaya.

Tabel III.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan 2019 (dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2018	6,20
2019*	6,10

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

*) data sementara

d. Tingkat Inflasi

Pada Tabel III.6, menurut data yang diperoleh tingkat inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 2,21 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan inflasi tahun 2018 yaitu sebesar 3,03 persen.

Berdasarkan pemantauan harga komoditas utama yang memberikan sumbangan untuk membentuk inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 antara lain; telur ayam ras, bawang merah, dan tarif kereta api.

Tabel III.5
Komoditi Penyumbang Inflasi Terbesar Kota Surabaya
Tahun 2019

No	Jenis Komoditi/Barang	Sumbangan Inflasi (%)
1	Telur ayam ras	15,03
2	Bawang merah	8,61
3	Tarif kereta api	6,54
4	Mujair	5,39
5	Kontrak rumah	5,34
6	Angkutan udara	3,29
7	Tomat sayur	2,35
8	Sewa rumah	2,21
9	Semangka	2,07
10	Melon	1,75

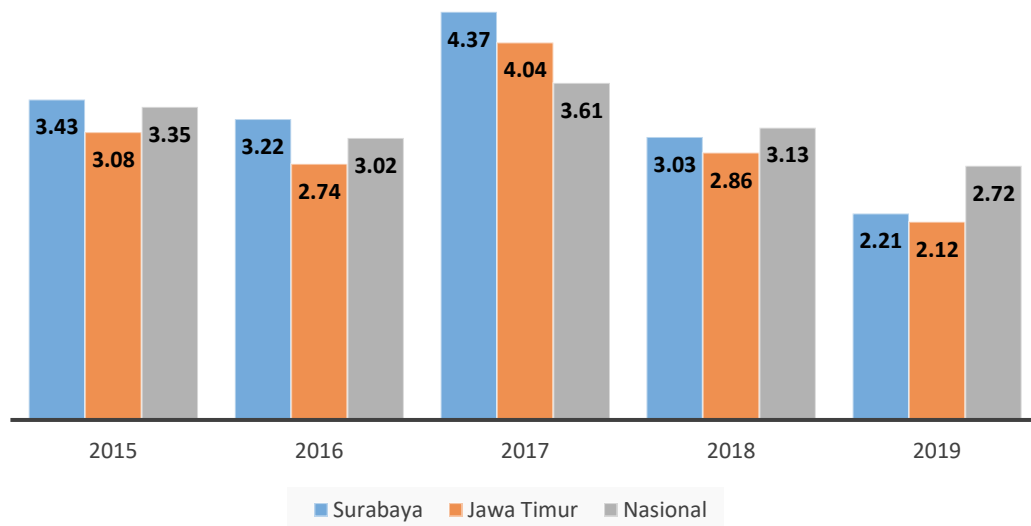
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Tabel III.6
Tingkat Inflasi Kota Surabaya
Tahun 2018 dan Tahun 2019 (dalam persen)

Tahun	Inflasi
2018	3,03
2019	2,21

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, 2020

Gambar III.1
Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2019
(dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

Untuk mengetahui fluktuasi harga barang dan jasa di Kota Surabaya dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan oleh Gambar III.1 di atas. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar grafik, pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2019 cukup baik yakni 2,21 persen lebih rendah dibandingkan Nasional yakni sebesar 2,72 persen, walaupun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,12 persen.

e. Investasi

Kota Surabaya berkembang menjadi kota bisnis yang berkembang sangat pesat dengan perkembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan sarana dan prasarana yang memadai, hal ini menjadikan Kota Surabaya bukan hanya menjadi tempat hunian, melainkan juga menjadi target pasar para pelaku usaha seperti investor. Daya tarik yang kuat sebagai dampak dari pesatnya perkembangan Kota Surabaya di berbagai aspek baik aspek ekonomi maupun non ekonomi juga menjadi pertimbangan para investor untuk memilih Kota Surabaya sebagai sasaran target investasinya.

Investasi yang ditanamkan di Surabaya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Kota Surabaya. Keberadaan para investor tersebut tentunya akan memberikan *multiplier* efek terhadap sektor lainnya sebagai hasil dari keterkaitan antar sektor dari aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Tabel III.7
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya
Tahun 2016 – 2019

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2016	Rp 3.798.072.400.000	USD 253.204.826,67
2017	Rp 3.972.132.680.000	USD 264.808.845
2018	Rp 4.740.232.464.443	USD 316.015.498
2019**	Rp 19.219.900.015.699	USD 1.281.326.668

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2019

Dari Tabel III.7 terlihat bahwa nilai investasi Kota Surabaya tahun 2019 yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp19.219.900.015.699. Sementara investasi dari penanaman modal asing (PMA) USD1.281.326.668. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, investasi PMDN di Kota Surabaya pada tahun 2019 tersebut berasal dari penanaman modal pada sektor-sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; sektor Industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta lapangan usaha konstruksi.

Peningkatan realisasi nilai investasi pada tahun 2019 di kota Surabaya merupakan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menggunakan sistem aplikasi OSS (*One Single Submission*) untuk mendukung kemudahan berusaha diseluruh Indonesia yang telah dicanangkan Presiden RI dalam Peraturan Presiden RI No 91 Tahun 2017 tentang percepatan kemudahan berusaha. Dengan adanya sistem aplikasi OSS orang yang akan membuka usaha di Surabaya tidak perlu datang ke Surabaya karena sudah bisa mendapatkan NIB

(Nomor Induk Berusaha) secara online. Untuk mendapatkan NIB persyaratan yang dibutuhkan hanya KTP bagi WNI dan *Passport* untuk WNA kemudian akte pendirian badan usaha yang dimiliki. Setelah mendapat NIB kemudian melengkapi persyaratan–persyaratan untuk berusaha di kota Surabaya seperti IMB, TDUP, dsb. Persyaratan–persyaratan tersebut bisa diupload ke aplikasi OSS sehingga calon investor tidak perlu datang berkali–kali ke kota Surabaya.

f. Ekspor

Aktivitas perdagangan baik skala domestik maupun internasional juga berkembang cukup baik dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Kota Surabaya. Ditengah kondisi ekonomi global yang cukup berfluktuatif, aktivitas perdagangan di Kota Surabaya masih berjalan dengan pesat dan jauh lebih baik dari pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Pada tahun 2018 nilai ekspor Kota Surabaya sebesar USD18.156.429.939 lebih kecil dari nilai impor Kota Surabaya pada tahun 2018 yaitu sebesar USD18.892.345.417. Sedangkan pada tahun 2019 Kota Surabaya mengalami *surplus* neraca perdagangan, hal ini dapat dilihat pada table III.8 yaitu nilai ekspor Kota Surabaya sebesar USD18.120.064.879 lebih besar dari nilai impor pada tahun 2019 yaitu sebesar USD17.368.048.068.

Tabel III.8
Ekspor Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2019

Tahun		2017	2018	2019
Ekspor	Nilai (US \$)	18.268.869.178	18.156.429.939	18.120.064.879
Impor	Nilai (US \$)	16.956.900.232	18.892.345.417	17.368.048.068

Sumber data: Bank Indonesia, BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, diolah, 2020

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 6,12 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,25 persen sehingga TPT Kota Surabaya pada tahun 2019 sebesar 5.87 persen. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya gencar memberikan bursa kerja lapangan pekerjaan, dalam satu tahun Dinas Tenaga Kerja mengadakan 7 bursa kerja, 2 *Grand Job Fair*, dan 5 *Mini Job Fair* yang diadakan di gedung-gedung milik

Pemerintah Kota dan juga kecamatan-kecamatan yang mudah dijangkau masyarakat pencari kerja. Dinas Tenaga Kerja juga memberikan pelatihan dan sertifikasi sehingga pencari kerja mempunyai kompetensi dan lebih mudah terserap di pasar tenaga kerja.

Tabel III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya
Tahun 2018 dan Tahun 2019

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2018	6,12%
2019	5,87%

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2020

Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan dapat diukur dari pengukuran ILOR (*Incremental Labor Output Ratio*) . ILOR menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja pada suatu wilayah. ILOR dapat dilihat sebagai perbandingan antara perubahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan penambahan output perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama kurun waktu 3 tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR pada tahun 2014 dan 2015 besarnya sama yaitu 0,01. Sementara nilai ILOR Surabaya pada tahun 2016 dan 2017 besarnya sama yaitu 0,02.

Tabel III.10
Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya
Tahun 2014-2016 dan Perkiraan Tahun 2017 dan 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018**
ILOR	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01-0,03

Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, diolah, Februari 2019

Catatan : **) data angka proyeksi Bappeko

3.1.2 Prospek Ekonomi Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perlambatan ekonomi yang terjadi tahun 2019 secara global dipengaruhi oleh melemahnya permintaan di beberapa negara-negara di dunia. Ditengah pelemahan ekonomi tersebut, persepsi positif perekonomian global akan membaik

ditahun 2020 diindikasikan dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan meningkat. Hal itu ditunjukkan oleh proyeksi yang dilakukan lembaga-lembaga berkompeten yang beberapa kali merubah proyeksi ekonomi tahun 2020. Namun, prospek pemulihan ekonomi dunia yang sedikit memberi harapan positif tersebut harus tertahan oleh akibat dampak wabah Covid19 yang meluas ke berbagai negara di awal tahun 2020.

Mempertimbangkan terjadinya pandemic Covid-19, perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2019, yakni tumbuh kisaran 1,71 persen sampai dengan 3,53 persen. Pelemahan ekonomi dipengaruhi oleh melemahnya perekonomian dunia sebagai dampak adanya pandemi Covid19. Disamping itu, perlambatan diperkirakan berasal dari penurunan konsumsi masyarakat akibat penurunan maupun kehilangan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Ditambah lagi, dampak penanganan melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta penerapan protokol kesehatan yang salah satunya melalui physical distancing, berdampak terhadap berkurangnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor utamanya sektor-sektor dominan Kota Surabaya, seperti perdagangan dan jasa; menurunnya investasi dan perlambatan ekspor karena turunnya permintaan mitra dagang Kota Surabaya dan rendahnya kepercayaan konsumen terhadap prospek ekonomi kedepan akibat ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid19. Tidak berhenti sampai disitu, ketidakpastian berakhirnya Covid19 juga akan berdampak terhadap ketahanan pangan di Kota Surabaya. Seperti yang diketahui, karakteristik wilayah Kota Surabaya yang merupakan pusat perdagangan dan jasa, dimana selama ini kebutuhan akan pangan untuk masyarakat Kota Surabaya mayoritas disokong oleh wilayah-wilayah penghasil pertanian di sekitar wilayah Kota Surabaya.

Selanjutnya pada tahun 2021 ekonomi Kota Surabaya diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0 persen hingga 7,0 persen. Perkiraan tersebut dapat dicapai dengan asumsi jika pandemi Covid19 dapat teratasi dan berangsur membaik ditahun 2021. Dari sisi pemantauan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,0 \pm 1$

persen. Begitu pula pada tahun 2021 juga diperkirakan diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,0 \pm 1$ persen.

Dalam rangka pemulihan tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya berupaya keras dalam penanganan dan perbaikan pasca Covid19, antara lain melalui langkah-langkah berikut:

- Perbaikan dalam aspek kesehatan melalui peningkatan kesadaran akan perilaku sehat, penerapan protokol kesehatan serta kualitas sistem kesehatan kota;
- Meningkatkan kembali produktivitas ekonomi di Kota Surabaya melalui peningkatan kembali aktivitas ekonomi, utamanya pada pada sektor-sektor penggerak terbesar perekonomian Kota Surabaya seperti perdagangan dan jasa. Hal tersebut juga didukung oleh perbaikan dalam aspek pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur kota.;
- Meningkatkan kembali konsumsi masyarakat yang tertunda akibat Covid19 dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang diwujudkan melalui peningkatan produktivitas ekonomi di Kota Surabaya;
- Memfasilitasi tenaga kerja yang terdampak Covid19 baik disektor formal maupun informal untuk dapat kembali produktif;
- Meningkatkan ketahanan pangan Kota Surabaya dengan menjaga stabilitas harga tetap rendah maupun menjamin ketersediaan pangan di Surabaya;

Melalui strategi-strategi tersebut maka pada tahun 2021 ekonomi Kota Surabaya diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0 persen hingga 7,0 persen. Dari sisi pemantauan harga, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,0 \pm 1$ persen. Begitu pula pada tahun 2021 juga diperkirakan diperkirakan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,0 \pm 1$ persen.

Meskipun diperkirakan masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, namun kondisi perekonomian Kota Surabaya tahun 2021 masih diperkirakan tetap tumbuh optimis. Hal ini dikarenakan pemulihan konsumsi masyarakat, prospek investasi yang bagus, peningkatan penyerapan tenaga kerja, kinerja ekspor juga

diperkirakan terakselerasi sejalan dengan perbaikan kondisi global yang diperkirakan membaik. Dari faktor domestik, kinerja sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; serta penyedia akomodasi dan makan minum diperkirakan masih memberikan nilai tambah terbesar terhadap perekonomian Kota Surabaya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mempedomani target sasaran dan program yang tertuang dalam tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2021 :

1. Pengembangan efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
3. Dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
6. Penyesuaian rencana penerimaan dari dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mengacu realisasi pada tahun 2020 dimana terdapat perubahan akibat pandemi covid - 19
7. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien

Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Surabaya tersaji pada tabel III.11

Tabel III.11
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya
Tahun 2017 s.d Tahun 2022

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah	4.973.031.004.728	5.381.920.253.810	5.584.627.122.979	5.535.188.169.410	5.924.019.869.001
Pajak Daerah	3.817.402.592.324	4.018.722.251.948	4.313.465.165.227	4.442.976.688.357	4.658.104.515.867
Retribusi Daerah	346.798.583.545	396.244.802.736	370.797.682.018	331.334.000.692	418.295.943.002
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	140.036.260.033	268.575.571.841	167.501.717.512	172.056.350.058	172.056.350.058
Lain-Lain PAD yang sah	668.793.568.826	698.377.627.285	732.862.558.222	588.821.130.302	675.563.060.074
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.973.031.004.728	5.381.920.253.810	5.584.627.122.979	5.535.188.169.410	5.924.019.869.001
Dana Perimbangan	2.088.869.968.843	2.001.327.643.447	2.266.326.381.130	1.991.105.020.000	2.207.987.883.065
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	478.358.706.741	366.599.677.176	499.291.555.130	392.585.075.000	440.953.057.065
Dana Alokasi Umum	1.211.713.876.000	1.254.344.402.000	1.330.442.744.000	1.209.468.472.000	1.330.442.744.000
Dana Alokasi Khusus	398.797.386.102	380.383.564.271	436.592.082.000	389.051.473.000	436.592.082.000
Jumlah Dana Perimbangan	2.088.869.968.843	2.001.327.643.447	2.266.326.381.130	1.991.105.020.000	2.207.987.883.065

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya

Tahun 2021

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.113.318.147.099	1.381.905.123.526	1.232.133.349.605	1.120.098.828.960	1.404.434.560.091
Hibah	181.544.145.050	193.272.300.435	183.711.200.000	207.145.000.000	207.145.000.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	880.120.602.049	1.099.625.542.091	950.443.102.605	818.613.653.960	1.099.625.542.091
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.903.400.000	3.371.400.000	4.020.429.000	3.705.400.000	3.705.400.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	48.750.000.000	85.635.881.000	93.958.618.000	90.634.775.000	93.958.618.000
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.113.318.147.099	1.381.905.123.526	1.232.133.349.605	1.120.098.828.960	1.404.434.560.091
Jumlah Pendapatan	8.175.219.120.670	8.765.153.020.783	9.083.086.853.714	8.646.392.018.370	9.536.442.312.157

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2020

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah kota dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penjadwalan ulang terhadap target program dan kegiatan tahun 2020, sehingga pada kebijakan belanja pada tahun 2021 selain diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan tahun 2020 juga untuk memenuhi target program dan kegiatan tahun 2020 yang tertunda.

Berdasarkan data realisasi tahun 2017, tahun 2018, realisasi tahun 2019, target tahun 2020 dan proyeksi tahun 2021 serta perkiraan maju tahun 2022 belanja daerah Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel III.12

Tabel III.12
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Kota Surabaya
Tahun 2017 s.d Tahun 2022

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Belanja Tidak Langsung					
Belanja Pegawai	1.857.794.385.641	2.067.878.541.557	2.245.785.024.378	2.225.785.024.378	2.279.436.096.569
Belanja Hibah	81.167.517.434	96.586.053.683	378.514.602.241	226.393.761.419	226.393.761.419
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah	9.254.742.990	2.218.293.630	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah	2.158.290.000	1.774.968.000	8.677.850.000	8.677.850.000	8.677.850.000
Belanja Tidak Terduga	6.085.899.644	1.574.969.146	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.956.460.835.709	2.170.032.826.016	2.648.727.476.619	2.476.606.635.797	2.530.257.707.988
Belanja Langsung					
Belanja Pegawai	483.644.287.890	490.676.214.454	470.104.960.728	490.030.108.470	495.280.682.284
Belanja Barang dan Jasa	3.306.763.333.391	3.747.642.075.280	4.121.863.608.160	4.570.641.860.880	4.775.099.858.171
Belanja Modal	2.430.061.039.309	2.754.304.824.082	3.081.529.510.506	2.277.103.522.748	2.345.416.628.033
Jumlah Belanja Langsung	6.220.468.660.590	6.992.623.113.816	7.673.498.079.394	7.337.775.492.098	7.615.797.168.488
Jumlah Belanja	8.176.929.496.299	9.162.655.939.832	10.322.225.556.013	9.814.382.127.895	10.146.054.876.476

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2020

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya tahun 2020 diarahkan pada SILPA dan diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan anggaran.

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Surabaya tahun 2021 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2017 – 2021) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.13.

Tabel III.13
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017 s.d Tahun 2022

Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Penerimaan Pembiayaan	1.201.995.194.680	1.200.317.972.689	1.249.138.702.299	1.177.990.109.525	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	1.201.993.194.680	1.200.284.819.051	1.249.138.702.299	1.177.990.109.525	609.612.564.319
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.000.000	33.153.638			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.201.995.194.680	1.200.317.972.689	1.249.138.702.299	1.177.990.109.525	609.612.564.319
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA)	1.200.284.819.051	802.815.053.640			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2020

3.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kota Surabaya untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya.

Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut: (1) *fiscal engineering* yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep *expenditure reform* melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan *cost recovery*. (2) *Creative Financing* yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui sinergi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, antara lain yakni:

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
 - a. Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS)/ *Public Private Partnership* (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti *build operate and transfer* (BOT), *build transfer operate* (BTO) maupun bentuk lainnya;
 - b. Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program

pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kota Surabaya melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Surabaya. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pengolahan, dimana sektor industri pengolahan merupakan sektor kedua dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.

2. Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah.
3. Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah.
4. Pengembangan kerjasama melalui pinjaman maupun hibah luar negeri yang digunakan pada bidang-bidang strategis utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, serta mengacu pada RKP Tahun 2021 serta RPJMN 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu:

***" Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global
Berbasis Ekologi"***

Adapun makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Sentosa* adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri;
- b. *Berkarakter* menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila;
- c. *Berdaya saing global* bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global;
- d. *Berbasis ekologi* adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko

bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan Kota Surabaya, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1.

Tabel IV.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
1	2	3		4	
1	Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	1.1	Mengurangi pengangguran	1.1.1	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis
			1.2	1.2.1	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan
				1.2.2	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional
				1.2.3	Meningkatkan derajat kesehatan
				1.2.4	Meningkatkan ketahanan pangan
				1.2.5	Meningkatkan kualitas pendidikan
				1.2.6	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan
				1.2.7	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
				1.2.8	Meningkatkan minat baca masyarakat
		1.3	Penurunan penduduk miskin	1.3.1	Meningkatkan kesejahteraan PMKS
2	Memelihara keamanan dan ketertiban umum	2.1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	2.1.1	Meningkatkan ketertiban umum
				2.1.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat
				2.1.3	Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
				2.1.4	Meningkatkan perlindungan masyarakat
3	Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	3.1	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	3.1.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang hijau
				3.1.2	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
				3.1.3	Meningkatkan kualitas udara dan air
				3.1.4	Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah
		3.2	Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	3.2.1	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan
				3.2.2	Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur
				3.2.3	Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sectoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
				3.2.4	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya
				3.2.5	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
				3.2.6	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi
				3.2.7	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
				3.2.8	Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum
				3.2.9	Pengembangan sistem penanggulangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	MISI	TUJUAN		SASARAN	
					bencana yang antisipatif dan tanggap
				3.2.10	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan
				3.2.11	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
				3.2.12	Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas
4	Memantapkan dan Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	4.1	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	4.1.1	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat
				4.1.2	Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya
5	Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	5.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi local, serta pengembangan inovasi produk dan jasa	5.1.1	Mendorong pemantapan daya saling usaha mikro dan koperasi
				5.1.2	Meningkatkan realisasi investasi
				5.1.3	Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi
6	Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	6.1	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	6.1.1	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni bagi MBR
				6.1.2	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
				6.1.3	Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh
7	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	7.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,	7.1.1	Meningkatkan akuntabilitas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	penyelenggaraan pemerintahan daerah 7.1.2 Meningkatkan cakupan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik 7.1.3 Meningkatkan kompetensi ASN 7.1.4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7.1.5 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 7.1.6 Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan 7.1.7 Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021 disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Prioritas yang telah dirumuskan tersebut dikaitkan dengan sasaran pembangunan kota dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Surabaya juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Sasaran pembangunan kota tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Kepala Perangkat Daerah. Dengan terjadinya pandemic Covid-19 pada tahun 2020, Prioritas Pembangunan pada Rancangan Awal RKPD mengalami penyesuaian untuk penanganan serta pemulihan aspek sosial, ekonomi dan keuangan akibat terjadinya Covid-19.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kota Surabaya selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kota Surabaya yang telah tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tersebut masih relevan, untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global;
2. Terpeliharanya stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan bermasyarakat;
3. Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi;
4. Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat;
5. Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional;
6. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global;
7. Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020, mengakibatkan perubahan pada hampir seluruh aspek utamanya aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Perubahan yang terjadi akibat Covid-19 mengakibatkan perlunya penyesuaian prioritas pembangunan Kota Surabaya tahun 2021, sehingga prioritas pembangunan Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk dan jasa serta industri kreatif
2. Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui pendidikan dan sistem kesehatan yang berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha
4. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan masyarakat
5. Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan
7. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Hubungan keterkaitan antara isu strategis Kota Surabaya dengan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Hubungan Keterkaitan Isu Strategis Kota Surabaya dengan
Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional	Pemulihan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan Inovasi Produk dan Jasa serta Industri Kreatif
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global	Penataan Ruang yang Terintegrasi dan Memperhatikan Daya Dukung Kota serta Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Terpadu dan Efisien
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Sistem Kesehatan yang Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung	Penguatan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	ISU STRATEGIS KOTA SURABAYA	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021
		tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat	
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global	Peningkatan Ketahanan Pangan
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang Ramah Lingkungan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Terpeliharanya stabilitas, ketentraman, dan ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan bermasyarakat Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021, telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2016-2021), mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan yang ada di dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

**Tabel IV.3
Keselarasan Kebijakan RPJMD Kota Surabaya dan Prioritas Pembangunan
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021**

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021
Mewujudkan visi pembangunan: Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	1. Pemulihan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan Inovasi Produk dan Jasa serta Industri Kreatif
	2. Penataan Ruang yang Terintegrasi dan Memperhatikan Daya Dukung Kota serta Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Terpadu dan Efisien
	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Sistem Kesehatan yang Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha
	4. Penguatan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat
	5. Peningkatan Ketahanan Pangan
	6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang Ramah Lingkungan
	7. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum
	8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel IV.4
Keselarasn Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya, Sasaran
Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target Kota Surabaya	Target Jawa Timur	Target Nasional
Indeks Pembangunan Manusia	81-82	72,08-72,57	73,26
Presentase Penduduk Miskin	4,71-4,6%	10,19-9,77	8,0-8,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,30%-5,90%	3,77-3,75	4,8-5,0
Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	1,04		
Indeks Infrastruktur Kota	0,84		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	65,10	67.11-67.47*	
Indeks Budaya Lokal	81,50%		
Pertumbuhan Ekonomi	6,3-6,8	5,56-5,58	5,4-5,0
Indeks Gini	0,38-0,37	0,3688-0,3683	0,372-0,375
Presentase luas Kawasan permukiman kumuh	0%		
Indeks reformasi birokrasi	A		

*IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada semester pertama tahun 2020, membutuhkan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak yang diakibatkan pada segala aspek utamanya aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Guna menjembatani kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2016-2021) yang memasuki tahun kelima dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur dan kondisi terkini akibat terjadinya pandemic Covid-19, maka diperluan penyesuaian tema pembangunan dimana pada Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2021 tema pembangunan Kota Surabaya adalah ***“Mewujudkan visi Pembangunan : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”*** disesuaikan menjadi ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Surabaya”***

**Keterkaitan Tema RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kota Surabaya
Tahun 2021**



TEMA RKP 2021

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana"



TEMA RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2021

"Mempercepat pemulihan ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Jawa Timur, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dan Optimalisasi Agrobis berbasis Sinergitas Desa-Kota"



TEMA RKPD KOTA SURABAYA 2021

"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus pembangunan Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Surabaya"

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Tabel IV.5
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2021 yang Mendukung Prioritas Pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata		Pemulihan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan Inovasi Produk dan Jasa serta Industri Kreatif	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Dinas Perdagangan
					Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	
				Program Pengembangan Produk Usaha Mikro	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Pengembangan Sentra Usaha	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	
					Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	
				Program Pengembangan Usaha Koperasi	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	
				Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	
					Pengawasan Koperasi	
					Penilaian Kinerja Koperasi	
				Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal	Pengelolaan Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	
					Penyelenggaraan Promosi Investasi	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Distribusi Perdagangan	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Dinas Perdagangan
					Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	
					Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi promosi wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	
					Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	
					Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	
				Program Pengembangan Destinasi Wisata	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	
					Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	
					Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	
					Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	
					Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	
					Peningkatan Destinasi Wisata	
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata (DAK)	
				Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	
					Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Penguatan Konektivitas antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta		Penataan Ruang yang Terintegrasi dan Memperhatikan Daya Dukung Kota	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau	Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pengembangan Dekorasi Kota	
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Menjamin Pemerataan	Peningkatan Layanan Infrastruktur		serta Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Terpadu dan Efisien	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	
				Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
					Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	
					Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	
					Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	
					Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	
					Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	
				Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Car Free Day	
					Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	
					Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Upaya Konservasi Energi	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	
				Program Kebersihan	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	
					Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	
					Operasional Pengangkutan Sampah	
				Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	
				Program Pengelolaan Sampah dan Limbah	Penanganan Limbah B3	
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	
					Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	
					Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	
				Program Pengelolaan Air Limbah Kota	Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	
					Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	
				Program Penataan Ruang	Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
					Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	
					Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Karya dan Tata Ruang
				Program Pengendalian Bidang Bangunan	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	
					Pengawasan Bangunan	
					Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	
				Program Pengamanan Aset Infrastruktur	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Perencanaan Kota	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	
				Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	
					Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	
				Program Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	
					Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	
					Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	
				Program Pengelolaan Aset Tanah	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	
					Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	
				Program Pengelolaan Bangunan Gedung	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	
				Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	
					Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	
				Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	
					Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	
				Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	
					Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	
				Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	
					Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	
				Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	
					Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Penanggulangan Bencana Alam	Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Operasional Pemadaman Kebakaran Pengendalian Bahaya Kebakaran Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
				Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Pembangunan Prasarana Transportasi Pemeliharaan Prasarana Transportasi Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Dinas Perhubungan
				Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Pengelolaan Transportasi Umum Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Dinas Perhubungan
				Program Perancangan dan Pengawasan Pematuan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematuan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematuan Kota	
				Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
					Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	
					Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	
					Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	
				Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
					Pengadaan Perlengkapan Jalan	
					Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Penyelenggaraan Perparkiran	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Sistem Kesehatan yang Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
					Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	
					Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (DBHCHT)	
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	
					Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	
					Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	
					Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru (DBHCHT)	
					Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (DBHCHT)	
					Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja	
					Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	
					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	
					Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	
				Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	
				Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	
				Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	
					Penyediaan Sarana Olahraga	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
					Perbaikan Prasarana Olahraga	
				Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	
					Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	
				Program Jaminan Kesehatan	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (DBHCHT))	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
				Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan) Pelayanan kesehatan keluarga Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
					Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
					Surveilans dan Imunisasi	
				Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	
					Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	
					Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	
				Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit Promosi Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
					Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Pelayanan Medik Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(DBHCHT)	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) Pelayanan Kesehatan Primer Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Dinas Kesehatan
				Program Sumber Daya Kesehatan	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK) Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan(DBHCHT)	
				Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Mutu Pendidik PAUD Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan Sekolah Dasar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	
				Program Pengembangan Sekolah Menengah	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	
				Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	
				Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK) Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK) Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Pembinaan Layanan Baca	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan	Pengelolaan Layanan Baca	
					Pengembangan Minat dan Budaya Baca	
				Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
				Program Peningkatan Prestasi Pemuda	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	
					Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	
				Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	
					Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	
				Program Keluarga Berencana	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	
					Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	
					Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	
					Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	
					Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	
				Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	
					Pembinaan Keluarga Sejahtera	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	
					Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	
					Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	
				Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	
					Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	
					Pembinaan Pengembangan Kampunge Arek Suroboyo	
					Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	
					Penyelenggaraan Operasional Shelter	
				Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Fasilitasi Pemakaman	Dinas Sosial
					Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	
					Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	
				Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	Pembinaan dan Pemulangan PMKS	
					Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi anak	
					Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi lanjut usia	
					Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	
					Peningkatan peran serta lanjut usia	
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	
					Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
				Program Pengendalian Layanan Sosial	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	
					Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal		Penguatan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat	Program Partisipasi Kepahlawanan	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	Dinas Sosial
					Pemeliharaan TMP dan MPN	
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	
					Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	
				Program Perlindungan Budaya Lokal	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	
					Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi		Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	
					Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	
					Pembibitan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	
				Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	
					Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	
					Pengembangan Diversifikasi Pangan	
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	
				Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup		Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang Ramah Lingkungan	Program Pengelolaan Rusunawa	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengelolaan Rumah Susun	
				Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
					Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	
					Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	
				Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Sosial
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur		Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	
					Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	
				Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial	Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
					Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	
				Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	
				Program Kesatuan Bangsa	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	
					Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	
					Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	
				Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum	Kerjasama pengendalian keamanan kota Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Partisipasi Keagamaan	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Dinas Sosial
				Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pembinaan Potensi Masyarakat	
					Pengendalian Perlindungan Masyarakat	
			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Kec. Asemrowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Dukuh	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Kec. Genteng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Kec. Pabean Cantian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringan Sari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Kec. Sambikerep

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandés	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Kec. Wonocolo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	
				Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	31 Kecamatan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	
					Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	Kec. Benowo
				Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	31 Kecamatan
				Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	31 Kecamatan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Seluruh PD
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	
				Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	
				Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
				Program Penataan Daerah Otonom	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Evaluasi Perkembangan Kelurahan	
					Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	
					Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	
					Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	
					Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	
					Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
					Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	
					Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	
					Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	
					Survey Kepuasan Masyarakat	
					Evaluasi Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
					Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Publikasi Produk Hukum	
				Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Dan Protokol
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Bagian Hubungan Masyarakat
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Bagian Administrasi Pembangunan
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya Pengadaan Sarana Kedinasan	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bagian Organisasi
				Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Bagian Administrasi Kerjasama
					Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	
					Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	
					Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	
				Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	
				Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pengelolaan Data Pegawai	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pengembangan Wawasan Aparatur	
					Penilaian Kinerja Pegawai	
					Seleksi Penerimaan ASN	
				Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	Pelaksanaan Asesmen Pegawai	
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	
					Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	
				Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	
					Penataan Administrasi Kepegawaian	
					Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	
					Pengelolaan Disiplin Pegawai	
				Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	
				Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	
					Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
					Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	
					Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan
					Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pelayanan Perizinan Konstruksi	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pembinaan Penataan Kearsipan	Pembinaan Sistem Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	
					Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	
				Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Pemutakhiran Data Kependudukan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	Penyusunan Data Statistik Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik Pengelolaan Saluran Komunikasi	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan Pembangunan Sarana Prasarana TIK Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi Pengelolaan Pusat Data	
				Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan	Layanan Informasi Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT) Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT) Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Operasional UPTD Metrologi legal Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Dinas Perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	
				Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	
				Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan 3. Bagian Umum Dan Protokol 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 7. Dinas Pendidikan 8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 9. Inspektorat 10. RSUD Bhakti Dharma Husada 11. RSUD Dr. Mohamad Soewandie
					Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Inspektorat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	
					Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	
				Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	
				Program Penagihan Pajak Daerah	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	
					Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	
					Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	
					Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	
				Program Perencanaan Anggaran Daerah	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	
					Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	
				Program Fasilitas Informasi dan Protokol DPRD	Fasilitas Reses DPRD	Sekretariat DPRD
					Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	
					Penerimaan Studi Banding	
					Pengendalian Keamanan	
				Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	Publikasi Kegiatan DPRD	
					Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
				Program Fasilitas Rapat dan Perundang-Undangan DPRD	Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	
					Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	
					Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	
				Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Inspektorat
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
					Survey Penilaian Integritas (SPI)	
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PROVINSI JATIM	NAWA BHAKTI	PRIORITAS KOTA SURABAYA	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	

4.2.4 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021

Tabel IV.6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	57,00%
	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	98,35%
			Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan sesuai standar	92,68%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			pendidikan yang memenuhi standar		
			Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	2,01
			Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,04
			Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	0,933
			Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	80,16
			Meningkatkan minat baca masyarakat	Indeks minat baca masyarakat	0,6
			Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	20,00%
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			perlindungan perempuan dan anak		
			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	100,00%
	Penurunan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	45,00%
Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	6,98
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	4,00%
			Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan	100,00%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	62,6
Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	11,20%
			Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan	57,63
			Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Udara Ambien	90,28
			Meningkatkan kualitas udara dan air	Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	85,00%
			Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	21,90%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	69,07%
	Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	Indeks Infrastruktur Kota	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	31,25%
			Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur	1,50%
			Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	41,38%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	100,00%
			Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	75,22%
			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	17,51%
			Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Tingkat Keandalan Jaringan Jalan	0,42
			Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	100,00%
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana	92,83%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	30,00%
			Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	42,00%
			Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan	39,77%
			Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq$ 0,95	78,00%
Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Indeks Budaya Lokal	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	100,00%
			Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	90,95%
Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui	Indeks gini	Mendorong pemantapan daya	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	32,00%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa		saing usaha mikro dan koperasi		
			Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	62,00%
			Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp74.719.784.275.973
			Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp13.751.240,92
			Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp19.161.012,50
		Pertumbuhan Ekonomi	Mendorong pemantapan daya	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	32,00%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			saing usaha mikro dan koperasi		
			Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	62,00%
			Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp74.719.784.275.973
			Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp13.751.240,92
			Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp19.161.012,50
Memantapkan sarana dan prasarana	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan	Persentase luas kawasan	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan	Persentase pemanfaatan	100,00%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	permukiman kumuh prioritas	perumahan layak huni	rusunawa yang tepat sasaran	
			Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	11.437,03 Ha
			Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	100,00%
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	>80-90
			Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	92,35%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	71,97%
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	88,31%
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	76-100 (Baik)
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	98,00%
			Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
			Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	80,12%
			Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100,00%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Misi	Tujuan		Sasaran		
	Narasi Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2021
			Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	16,80%
			Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	1,15

4.2.5 Pokok Pikiran DPRD

RKPD Kota Surabaya Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam table IV.7 sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Tabel IV.7
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dalam dokumen RKPD
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
A	Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	BOX CULVERT	30 m	JL. POGOT BARU GG 9 RT 09 RW 06 KEL. TANAH KALI KEDINDING KEC KENJERAN	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
2	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	BOX CULVERT	120 m	GEMOL GG. II GANG JERUK	WIYUNG	JAJAR TUNGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
3	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	BOX CULVERT	200 m	GEMOL 1 A SISI UTARA	WIYUNG	JAJAR TUNGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
4	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	BOX CULVERT	166 m	GEMOL KALI	WIYUNG	JAJAR TUNGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
5	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Box Culvert	120 m	Bulak banteng kidul Gg. 2/7	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
6	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	BOX CULVERT	282 m	JL. KALILOM LOR TIMUR 1B SURABAYA	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
7	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	BOX CULVERT	200 m	JL. POGOT BARU RT 01 RW 06 KEL. TANAH KALI KEDINDING KEC. KENJERAN	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
8	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan	BOX CULVERT	200 m	JL. POGOT BARU RT 02 RW 06 KEL.	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	permukiman yang ditingkatkan			TANAH KALI KEDINDING KEC. KENJERAN				
9	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	GORONG-GORONG	21.2 m	Karangpoh Indah lebar RT 06 RW 01 (Depan Parkir Mobil)	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
10	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	GORONG-GORONG	199.1 m	Tandes Kidul Gang Makam RT02 RW01	TANDES	TANDES KIDUL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
11	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	GORONG-GORONG	284 m	Tandes Kidul RT03 RW02	TANDES	TANDES KIDUL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
12	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	GORONG-GORONG	110 m	Karangpoh Indah gg 2 RT 06 RW 01	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
13	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	GORONG-GORONG	110 m	Karangpoh Indah gg 6 RT 06 RW 01	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
14	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	GORONG-GORONG	290 m	Tandes Kidul Gang Sawah RT01 RW02	TANDES	TANDES KIDUL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
15	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Gorong-gorong (40 x 60 x 300)	280 m	Tanah Merah Utara Gg. 1	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
16	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	10 m	JL. POGOT BARU GG 9 TENGAH RT 09 RW 06 KEL. TANAH KALI KEDINDING KEC KENJERAN	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
17	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	25.7 9 m	Simo Pomahan Baru Gang Pertolongan 1 (Penghubung Gang 5-4)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
18	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	37.3 2 m	Simo Pomahan Baru Gang Pertolongan 3 (Penghubung Gang 6-7)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
19	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	32 m	Karangpoh Indah gg 3 RT 06 RW 01 (Halaman Lapangan Volly)	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
20	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	45.0 5 m	Simo Pomahan Baru Gang Pertolongan 2 (Penghubung Gang 5-6)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
21	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	40 m	MADE RT 02 RW 02	SAMBIKEREP	MADE	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
22	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	90 m	Jl. Raya Tandes Lor RT05 RW08	TANDES	TANDES KIDUL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
23	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	79.2 m 7	Simo Pomahan Baru Gang 5 (Barat)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
24	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	50 m	Penjaringans ari (Masjid At Taqwa)	RUNGKUT	PENJARINGAN SARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
25	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	PAVING	58 m	GEMOL GG I D GG. NANAS RT 1 RW 03	WIYUNG	JAJAR TUNGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan							
26	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	78.3 m 9	Simo Pomahan Baru Gang 5 (Timur)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
27	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	50 m	KEMLATEN XII B SURABAYA	KARANG PILANG	KEBRAON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
28	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving	115 m	Sumber mulyo	Bubutan	Gundih	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
29	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving	115 m	Sumber mulyo	Bubutan	Gundih	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
30	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	45 m	JL. WONOREJO III NO. 7 RT 9 RW 5	TEGALSARI	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
31	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	79 m	JL. WONOREJO III NO. 15 RT 9 RW 5	TEGALSARI	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
32	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	150 m	KEDURUS III MASJID BELAKANG POS SURABAYA	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
33	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	274 m	BOGANGIN BARU BLOK D RT 07 RW 05 KEL KEDURUS KEC KARANG PILANG BELAKANG PAK SLIMIN ALMARHUM	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
34	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	163 m	LEBAK TIMUR 3E RT 05 RW 10 KEL. GADING KEC. TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
35	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	190 m	Jln, Wonorejo Timur GG I	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
36	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	232 m	Ngaglik Kuburan	Genteng	Kapasari	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
37	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	113 m	JL. TEMBAAN GANG 1 DAN 6 RT 01 RT 06 RW 07	BUBUTAN	BUBUTAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
38	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	PAVING	200 m	Jl. Margomulyo PLN RT06 RW08	ASEMROWO	GREGES	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan							
39	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	83 m	JL. MANUKAN BHAKTI VII RT 02 RW 03	TANDES	MANUKAN KULON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
40	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	180 m	MADE RT 01 RW 05	SAMBIKEREP	MADE	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
41	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	280 m	MADE RT 02 RW 05	SAMBIKEREP	MADE	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
42	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	190 m	KEDURUS PILANG MUKTI SURABAYA	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
43	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	127 m	JL. MANUKAN BHAKTI V RT 01 RW 03	TANDES	MANUKAN KULON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
44	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	123.6 m	Tandes Kidul Gang Makam RT03 RW01	TANDES	TANDES KIDUL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
45	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	210 m	JL. GUNDIH III RT 07 RW 01	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
46	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	190 m	REJOSARI BARU, RT 06 RW 03 KEL. BENOWO KEC. PAKAL	PAKAL	BENOWO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
47	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	PAVING	120.31 m	Jl Jemurwonosari Gg Lebar	WONOCOLO	JEMUR WONOSARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan			Gg 3-A, RT1 RW 9				
48	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	200 m	JL. POGOT BARU RT 02 RW 06 KEL. TANAH KALI KEDINDING KEC. KENJERAN	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
49	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	200 m	JL. POGOT BARU RT 01 RW 06 KEL. TANAH KALI KEDINDING KEC. KENJERAN	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
50	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	270 m	RT 01 RW 04 KEL. BANGKINGAN KEC. LAKARSANTRI	LAKAR SANTRI	BANGKINGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
51	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	PAVING	270 m	RT 02 RW 04 KEL. BANGKINGAN KEC.	LAKAR SANTRI	BANGKINGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		yang ditingkatkan			LAKARSANTRI				
52	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING	303 m	RT 03 RW 04 KEL. BANGKINGAN KEC. LAKARSANTRI	LAKARSANTRI	BANGKINGAN	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
53	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving + Saluran	276 m	JL. SEMEMI JAYA BARU 7-A RT 07 RW 01	BENOWO	SEMEMI	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
54	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving + Saluran Dua Sisi	80 m	JL. MANUKAN BHAKTI X RT 05 RW 03	TANDES	MANUKAN KULON	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
55	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving + Saluran Dua Sisi	81 m	JL. MANUKAN BHAKTI III RT 04 RW 03	TANDES	MANUKAN KULON	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
56	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving + Saluran Dua Sisi	85 m	JL. MANUKAN BHAKTI VI RT 02 RW 03	TANDES	MANUKAN KULON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
57	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving + Saluran Dua Sisi	163 m	JL. MANUKAN BHAKTI I RT 01 RW 03	TANDES	MANUKAN KULON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
58	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Paving + Saluran Satu Sisi	83 m	JL. MANUKAN BHAKTI IX RT 05 RW 03	TANDES	MANUKAN KULON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
59	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING DAN BOX CULVERT	103 m	DK KARANGAN V C	WIYUNG	BABATAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
60	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	PAVING DAN BOX CULVERT	160 m	JL. DK. TLOGO TANJUNG GG	LAKAR SANTRI	BANGKINGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan			3 B SURABAYA				
61	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	PAVING DAN SALURAN	60 m	JL. TEMBUSAN KENDUNG JAYA GANG 6A KE 6C	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
62	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	pavingisasi	100 m	jalan kunti gang 1 depan balai rw 8	SEMAMPIR	SIDOTOPO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
63	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pavingisasi	490 m	JL. GAYUNGAN PTT NO. 29	GAYUNGAN	GAYUNGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
64	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	48 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 74)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
65	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	12 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 84)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
66	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	35 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 74)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
67	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	16 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 18)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
68	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	17 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 84)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
69	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	15 m	Gang Bapak Roni RT 02 RW 03 Jl. Wonoayu	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)		Kel. Medokan Ayu				
70	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	37 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 90)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
71	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	27 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 80)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
72	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	22 m	Bogorami Makam E Buntu	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
73	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	25 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 74)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
74	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	35 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 12)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
75	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	35 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 14)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
76	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	21 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 90)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
77	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	37 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 48)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
78	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	20 m	Tambak Medokan Ayu Gg 2A	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
79	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	40 m	Bogorami Makam 1A	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
80	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	41 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 40-B)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
81	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	43 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 46)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
82	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	45 m	Klampis ngasem gang 1, Pertolongan No.1	SUKOLILO	KLAMPIS NGASEM	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
83	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	11 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 74)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
84	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	48 m	Jl. Lebak Agung 3 (Gang Kecil No. 84)	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
85	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	50 m	TUWOWO 3 BUNTU	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
86	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	51 m	Jl Jatisrono RT 1 RW 14 Ujung, Semampir	SEMAMPIR	UJUNG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
87	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	79 m	KAPAS LOR WETAN 6A	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
88	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	40 m	RT 03 RW 05	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
89	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	88 m	Simo Katrungan Kidul VII/3 Musholla	SAWAHAN	BANYU URIP	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
90	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	90 m	TUWOWO GG. 3E	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
91	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	100 m	Jl. Sukomanunggal 1/22 RT 03 RW 02 Kel. Sukomanunggal	SUKOMANU NGGAL	SUKO MANUNGGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
92	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	100 m	Kalijudan Gang 9 Randu	MULYOOREJO	KALIJUDAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
93	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	103 m	Jl.Kalilom Lor gang Nanas	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
94	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	50 m	Baruk Tengah di sisi Pos RW	RUNGKUT	KEDUNG BARUK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
95	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	114 m	Bulak Banteng Lor Gg. 2	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
96	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	115 m	Jl. Bulak Banteng Madya XI	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
97	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	90 m	Tambak Wedi Lama Gg. Masjid	KENJERAN	TAMBAK WEDI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
98	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	120 m	TUWOWO GG. MUSHOLLAH /3A	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
99	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	75 m	JL. DUKUH KUPANG BARAT GANG 31	DUKUH PAKIS	DUKUH KUPANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
100	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	63.8 m	JL. DUKUH KUPANG BARAT GANG 22	DUKUH PAKIS	DUKUH KUPANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
101	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	97 m	Kedinding Tengah Baru Gg. 3	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
102	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	82 m	Jl. sukodono Gang 3	SEMAMPIR	AMPEL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
103	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	140 m	Jalan Tambak Wedi Gg. Salon	KENJERAN	TAMBAK WEDI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
104	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	30 m	Dupak Timur III	BUBUTAN	JEPARA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
105	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	120 m	Jl. Benowo Sawah Gang 5 Timur	PAKAL	BENOWO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
106	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	160 m	Jl. Bulak Kalitintang Baru Blok F	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
107	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	124 m	Jl. Bulak Banteng Madya X	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
108	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	125 m	TUWOWO REJO 5	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
109	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	105 m	Bulak Banteng Lor masjid 2B	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
110	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	132 m	KAPAS LOR WETAN 2	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
111	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	110 m	Jl. Kedinding Lor Gang Kamboja Sisi Utara	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
112	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	188 m	Simo Gunung IA	SAWAHAN	BANYU URIP	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
113	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	190 m	KAPASMADYA 40	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
114	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	150 m	Bulak Banteng Sekolah Gg 4A	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
115	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	200 m	Jl. Wonokusumo Jaya Baru 2	SEMAMPIR	PEGIRIAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
116	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	200 m	Kapasmadya 4.I	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
117	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	200 m	Kapasmadya 4D	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
118	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	200 m	KAPASMADYA A 4P	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
119	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	126 m	Jl. Bulak Banteng Wetan Gang 17 A	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
120	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	110 m	Bulak Banteng Madya Gg. 13	SEMAMPIR	SIDOTOPO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
121	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	210 m	KAPASMADY A 4F	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
122	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	210 m	Kapasmadya 4H	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
123	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	210 m	Kapasmadya 4N	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
124	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	166 m	Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 6	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
125	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	169 m	Jl. Dukuh Bulak Banteng Sekolahan 8A	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
126	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	170 m	Jl Kedurus Gg Apel	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
127	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	170 m	Jl Kedurus Gg Manggis	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
128	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	140 m	Jagalan gang 4	GENTENG	PENELEH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
129	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	225 m	Kapasmadya Kali	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
130	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	70 m	JL PAKAL MADYA JAYA I-C	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
131	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	150 m	JL. KREMBANGA N BHAKTI	KREMBANGA N	KEMAYORAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
132	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	188 m	Jl. Bulak Kalitunjang Baru Gg Tengah	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
133	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	192 m	KAPASMADY A 4J	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
134	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	110 m	RW 5 Wonokromo	WONOKROMO	WONOKROMO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
135	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	255 m	Jl. Bulak Banteng Lor (Gang Bhineka 2)	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
136	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	200 m	TUWOWO 3B & TUWOWO 3C	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
137	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	171 m	Jl. Kalijudan Mulia	MULYOREJO	KALIJUDAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
138	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	174 m	Jl. Bulak Kalitintang Baru Blok C	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
139	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	177.5 m	JL. DUKUH KUPANG BARAT GANG 24	DUKUH PAKIS	DUKUH KUPANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
140	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	150 m	Jl. Kedinding Tengah Jaya 3 Timur	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
141	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	220 m	BIBIS KARAH	JAMBANGAN	KARAH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
142	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	290 m	KAPAS BARU 10A	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
143	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	80 m	JL PAKAL ASRI II	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
144	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	80 m	JL PAKAL TIMUR ASRI I	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
145	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	182.5 m	SONO INDAH 2 & 8	SUKOMANU NGGAL	SONO KWIJENAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
146	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	225 m	kalilom lor timur 3A	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
147	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	228 m	Jl. Bulak Banteng Madya VIII	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
148	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	300 m	KAPAS BARU 10	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
149	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	232 m	Tanah Merah Utara Gg. 7	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
150	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	247 m	Jl. Lebak Jaya 1	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
151	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	192 m	Jl. Bulak Kalitintang Baru Blok B	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
152	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	80 m	Demak Timur 1/14	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
153	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	245 m	Jl. Bulak Banteng Madya V	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
154	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	324 m	Jl. Lebak Rejo Utara VI	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
155	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	250 m	Jl. Bulak Banteng Wetan Gang 1	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
156	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	255 m	Jl. Bulak Banteng Wetan Gang 11	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
157	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	265 m	KAPAS LOR WETAN 3	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
158	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	150 m	Jl. Ketintang Timur PTT V C RT05/RW01, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan	GAYUNGAN	KETINTANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
159	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	183 m	Jl. Kalilom Lor Baru Gg II RW 8 Kel Tanah Kali Kedinding	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
160	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	266 m	Jl. Bulak Banteng Wetan Gang 9	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
161	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	160 m	Jl Gayung Kebonsari Injoko XIV RT01/RW05, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan	GAYUNGAN	KETINTANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
162	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	222 m	Jalan Tambak Wedi Gg. Rajawali	KENJERAN	TAMBAK WEDI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
163	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	229 m	Jl. Bulak Banteng Gang Tanjung 1	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
164	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	283 m	Bulak Rukem 1C	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
165	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	330 m	Suko Manunggal Baru PJKA	SUKOMANUNGGAL	SUKO MANUNGGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
166	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	284 m	KAPAS BARU	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
167	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	265 m	Jl. Bulak Banteng Wetan Gang 10	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
168	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	270 m	Jl. Bulak Kalitintang Baru Blok A	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
169	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	316 m	Wonorejo permai timur 10	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
170	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	120 m	RT 03/RW 03 dan RT 05/RW 03 Kelurahan Bangkingan	LAKAR SANTRI	BANGKINGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
171	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	170 m	TUWOWO REJO 3	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
172	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	430 m	Wonorejo	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
173	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	143 m	RT 01 RW 10	GUBENG	MOJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
174	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	750 m	TUWOWO KALI REJO	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
175	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	342 m	Jl. Lebak Rejo Utara 2	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
176	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	230 m	Jl. Lebak Rejo Utara	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
177	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	280 m	Jl Kebonsari LVK X RT05/RW03, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan	JAMBANGAN	KEBONSARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
178	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	375 m	Jl. Raya Sutorejo (Depan Masjid Thoriqul Jannah)	BULAK	SUKOLILO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
179	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	240 m	kalilom lor timur Gg. 3	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
180	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	170 m	Jl. Lebak Rejo Utara 3	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
181	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	630 m	KAPAS BARU 11	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
182	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	290 m	Wonorejo Selatan I Rungkut	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
183	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	310 m	Jl. Lebak Rejo Utara 7	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
184	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	200 m	Jl. Margodadi 2	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
185	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	265 m	RT 05/RW 01 Kelurahan Sumberejo	PAKAL	SUMBER REJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
186	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	400 m	Sambisari 2 RT 02 RW 03	SAMBIKEREP	LONTAR	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
187	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	650 m	Jalan Simorejo Sari A	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
188	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	288 m	RT 03/RW 04 Kelurahan Sambikerep	SAMBIKEREP	SAMBIKEREP	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
189	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	550 m	Jl. Bendul merisi permai lingkungan RW 9	WONOCOLO	BENDUL MERISI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
190	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	450 m	Raya Gunung Anyar Sawah	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
191	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	350 m	Jl. Kutisari Indah Utara IX	TENGGILIS MEJOYO	KUTISARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
192	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	293 m	Jl. Tenggilis Kauman	TENGGILIS MEJOYO	KENDANGSARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
193	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	60 m	Balai RW 10	JAMBANGAN	KARAH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
194	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar	450 m	dukuh bulak banteng gang suropati 2	PABEAN CANTIAN	PERAK TIMUR	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	1 m (Tebal 6 cm)						
195	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	370 m	Petemon 3	SAWAHAN	PETEMON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
196	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	390 m	jalan wonorejo permai selatan VI	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
197	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m (Tebal 6 cm)	440 m	Graha Sunan Ampel	WIYUNG	WIYUNG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
198	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	20 m	Jl. Rangkah VI Komplek 24	TAMBAKSARI	RANGKAH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
199	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	35 m	JL PAKAL TIMUR BARU II-C	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
200	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	120 m	Pogot VIII	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
201	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	45 m	Jl. Rangkah VI Gang Mawar	TAMBAKSARI	RANGKAH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
202	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	40 m	JL. RANGKAH VI GANGGLORI A	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
203	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	70 m	JL PAKAL TIMUR BARU II-A	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
204	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	30 m	JL. Dupak Masigit PJKA IX	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
205	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	30 m	JL. Dupak Masigit PJKA VIII	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
206	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	30 m	JL. Dupak Masigit PJKA X	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
207	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	101 m	JL BABATAN GANG 4B SURABAYA	WIYUNG	BABATAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
208	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	100 m	JL. KALILOM LOR INDAH GANG SALAK	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
209	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	70 m	JL PAKAL MADYA JAYA I-A	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
210	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	80 m	JL PAKAL TIMUR BARU III	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
211	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	80 m	Tenggumung Wetan gang 5D	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
212	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	130 m	Tenggumung Wetan Gg 5 Gayam	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
213	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	90 m	JL PAKAL TIMUR BARU GG MUSHOLLAH	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
214	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	120 m	JL. KALILOM LOR INDAH GANG PISANG	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
215	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	80 m	Kapasmadya Indah	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
216	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	100 m	JL PAKAL TIMUR BARU II-B	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
217	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	300 m	Dukuh Setro Baru Utara	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
218	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	100 m	Jl. Leboh Agung VI	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
219	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	100 m	Jl. Leboh Agung VII	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
220	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	112 m	Bulak Kali Tinjang 2E	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
221	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	142.5 m	Jl. Lebak Timur VIIIA	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
222	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	110 m	Kapasmadya Barat 8	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
223	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	120 m	JL. RANGKAH GANG VI SAYUR	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
224	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	112 m	Jl. Leboh Agung VIII	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
225	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	140.7 m	Jl. Lebak Timur VIII	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
226	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	150 m	Jalan protokol kalilom lor indah	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
227	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	150 m	Jl Simo Rukun GG 9 Sisi BRT	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
228	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	130 m	JL PAKAL TIMUR BARU I-A	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
229	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	130 m	Tenggumung Wetan Gg 5C	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
230	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	120 m	Kapasmadya Barat 7	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
231	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	120 m	TUWOWO REJO 4	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
232	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	132 m	TUWOWO REJO 6	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
233	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	140 m	JL. RANGKAH VI GANG SEKOLAHAN	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
234	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	190 m	KAPASMADYA A 3	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
235	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	226 m	Jl. Setro 5 Utara	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
236	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	180 m	Kapasmadya Barat 2	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
237	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	180 m	Kapasmadya Barat 6	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
238	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	140 m	Jl. Simo Kalangan RT 06 RW 07 Kel Simo Mulyo	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
239	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	194 m	Kapasmadya Barat	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
240	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	195 m	Jl Simo Rukun GG 9 Sisi Timur	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
241	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	210 m	kalilom lor 3	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
242	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	254.1 m	Jl. Setro 5	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
243	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	263 m	Bulak Banteng Lor Masjid 1	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
244	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	200 m	Tenggumung Wetan Gg 5	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
245	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	259 m	Jl. Setro 5A Utara	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
246	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	262 m	kalilom lor indah gg.Semanggi	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
247	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	225 m	Bulak Banteng Lor 4	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
248	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	293 m	JL Sawah Gede I	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
249	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	230 m	Petukangan Tengah	SEMAMPIR	AMPEL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
250	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	315 m	KETINTANG BARU GG 18	GAYUNGAN	KETINTANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
251	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	370 m	PETEMON 3 A	SAWAHAN	PETEMON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
252	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	310 m	JL SUMBERREJO MAKMUR SAWAH IV	PAKAL	SUMBER REJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
253	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	310 m	Siwalankerto Selatan I	WONOCOLO	SIWALANKERTO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
254	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	340 m	Jl. Setro Timur	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
255	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	300 m	Jl. Sukomanunggal 5 RT 06 RW 02 Kel. Sukomanunggal Kec.	SUKOMANUNGGAL	SUKOMANUNGGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi		Sukomanunggal				
256	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	300 m	Jl. Tanjungsari 4 RT 09 RT 10 RW 02 Kel. Tanjungsari	SUKOMANUNGGAL	TANJUNGSARI	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
257	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	368 m	Jl. Setro Baru V	TAMBAKSARI	GADING	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
258	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	400 m	JL PAKAL TIMUR BARU	PAKAL	PAKAL	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
259	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	320 m	Jl. Dukuh Kupang Utara RT 08 RW 08 Kel. Putat Jaya	SAWAHAN	PUTAT JAYA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
260	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	280 m	Bulak Rukem 3/25	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
261	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	450 m	Dukuh Bulak Banteng Suropati 4	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
262	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	527 m	Jl. Lebak Jaya 2A	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
263	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	332 m	RT 04 RW 03	LAKAR SANTRI	JERUK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
264	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	400 m	Dukuh Bulak Banteng Suropati 5A	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
265	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	620 m	Kapasmadya 5	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
266	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	350 m	Jl. Simo Rejo 2/41 RT 02 RW 02 Kel. Simo Mulyo	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
267	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	450 m	Jl Gumuk Galeng	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Dua Sisi						
268	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Dua Sisi	430 m	Kedungmangu Selatan	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
269	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	33 m	JL BANGKINGAN TIMUR II GG.MELATI SURABAYA	LAKAR SANTRI	BANGKINGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
270	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	45 m	JL BANGKINGAN TIMUR II GG.TERATAI SURABAYA	LAKAR SANTRI	BANGKINGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
271	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	65 m	Tambak Asri Gang Kembang Turi 3	KREMBANGAN	MOROKREMBANGAN	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
272	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	130 m	TUWOWO 2	TAMBAKSARI	KAPASMADYABARU	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
273	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	129 m	Jl. Bulak Banteng Baru Gang Flamboyan 3	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
274	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	130 m	Jalan Pagesangan 3A	JAMBANGAN	PAGESANGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
275	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	139 m	Jl. Bulak Banteng Baru Gang Melati 3	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
276	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	96 m	jojoran 1 blok C	GUBENG	MOJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
277	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	171 m	Jl.Randu Timur Gang 1	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
278	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	173 m	Jl. Bulak Banteng Baru Gang Kemuning 2	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
279	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	170 m	Jl Kedinding Gg. Tanjung RT 20 RW 01	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
280	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	180 m	Tambak Asri Gang 18	KREMBANGAN	MOROKREMBANGAN	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
281	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	381 m	Pogot Gang 4 (RT 8 RW 5)	KENJERAN	TANAH KALIKEDINDING	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021
282	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	250 m	rt 10 rw 08 wonorejo selatan 8	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKPKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
283	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	226 m	Tambak wedi jaya 1	KENJERAN	TAMBAK WEDI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
284	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	330 m	Jl. Bronggalan Sawah 4I	TAMBAKSARI	PACAR KEMBANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
285	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	260 m	JL. DUPAK MASIGIT PJKA	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
286	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	248 m	Jl. Bulak Banteng Gang Tengah	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
287	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	358 m	Pogot Gang 10 (RT 15 RW 5)	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
288	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 +	377 m	Jl. Pogot 1 Buntu	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
289	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	450 m	Dukuh Bulak Banteng Suropati I	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
290	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 30/40 + Cover Satu Sisi	370 m	rt 10 rw 08 wonorejo selatan 7	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
291	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	30 m	Beji PDAM VII	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
292	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	40 m	Kendung Gg. X C	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
293	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	30 m	wonosari wetan baru gg 1-A	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
294	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	82 m	Wonoayu Gang Buntu	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
295	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	60 m	Kapas Madya Barat gg 9	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
296	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	100 m	Komplek Perum Medokan Sawah Timur	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
297	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	70 m	Beji PDAM III	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
298	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	70 m	Beji Rahayu 6 A	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
299	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	80 m	Rejosari Gg. Delima	PAKAL	BENOWO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
300	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	90 m	Jl Bangkingan Gg. Rowo 3	LAKAR SANTRI	JERUK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
301	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	97 m	Kedinding Tengah Baru Gg. 2	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
302	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	90 m	Beji PDAM V	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
303	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	100 m	Kendung Gg. X A	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
304	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	110 m	Beji PDAM I	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
305	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	110 m	JL Kemlaten 12f	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
306	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	120 m	Beji PDAM IV	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
307	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	120 m	Beji PDAM VI	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
308	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	200 m	wonosari wetan gg 1-B	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
309	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	190 m	Kapas Madya Barat 3	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
310	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	225 m	JL DUPAK BARU RW 05	BUBUTAN	JEPARA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
311	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	260 m	Kapas Madya gg 6	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
312	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	340 m	Rungkut Menanggal II	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT MENANGGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
313	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	300 m	Kedung Mangu Selatan gg 2	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
314	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	135 m	Jl Kebonsari LVK V RT05/RW03 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan	JAMBANGAN	KEBONSARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
315	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	210 m	JL. Tambak Pring Timur	ASEMROWO	ASEMROWO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
316	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	290 m	Kalilom Lor Indah gg Flamboyan	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
317	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	310 m	Lebak Rejo Utara Gg VI No. 9	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
318	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	244 m	Klakah rejo II B /20	BENOWO	KANDANGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
319	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	280 m	Tanah Merah Utara Gg. 1	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
320	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	390 m	Jl. Kalikepiting Jaya VI	TAMBAKSARI	PACAR KEMBANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
321	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 +	520 m	Jl. Dukuh Pakis V	DUKUH PAKIS	DUKUH PAKIS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Cover Satu Sisi						
322	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 1 m + Saluran 40/60 + Cover Satu Sisi	678 m	Jl Manyar Sambongan	GUBENG	KERTAJAYA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
323	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	pembangunan saluran dan box calpext di sisi timur	320 m	sepanjang jalan sencaki	SEMAMPIR	SIDOTOPO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
324	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	38.5 m	cumpat kulon indah kemuning gg 4	BULAK	KEDUNG COWEK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
325	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	45 m	Klampis ngasem Gg 1, Pertolongan No. 1	SUKOLILO	KLAMPIS NGASEM	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
326	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	57 m	Jl. Tambak Asri IX	KREMBANGAN	MOROKREMBANGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
327	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	40 m	Bogorami Makam 1A	BULAK	BULAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
328	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	80 m	Jl. Tanjungsari 4 Gg Mawar RT 06 RW 02	SUKOMANU NGGAL	TANJUNGSARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	30/40 + Cover Gandar 5 ton		Kel. Tanjungsari				
329	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	60 m	KAPAS LOR 2	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
330	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	60 m	cumpat kulon indah kemuning gg 2	BULAK	KEDUNG COWEK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
331	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	140 m	Jl. simorejosari A Gg. 6 No. 81	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
332	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	80 m	Jl. Gundih 1 (Sebelah Utara)	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
333	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	170 m	Jl. simo magerejo tengah 1	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
334	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	95 m	Jl. Tambak Asri Gg. XII (BLK)	KREMBANGA N	MOROKREMBANGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
335	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	190 m	Jl Kedurus Pilang Asri	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	30/40 + Cover Gandar 5 ton						
336	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	114 m	Bulak Banteng Lor Gg. 2	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
337	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	120 m	Bulak Banteng Lor Gg. 4	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
338	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	120 m	Jl. Gundih 1 (Sebelah Selatan)	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
339	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	143.63 m	Jalan Ngagel Dadi II B	WONOKROMO	NGAGEL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
340	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	340 m	KETINTANG BARU 2 KAV 10 NO.19	GAYUNGAN	KETINTANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
341	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	80 m	Kedinding Tengah Baru Gg. 5	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
342	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	190 m	Jl. Simo Sidomulyo	SAWAHAN	PETEMON	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	30/40 + Cover Gandar 5 ton						
343	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	200 m	JL. MARGORUK UN RIL	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
344	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	224 m	Ngaglik Kuburan	Genteng	Kapasari	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
345	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	160 m	Tambakwedi Baru Barat Gang Madu	KENJERAN	TAMBAK WEDI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
346	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	297 m	Bulak banteng kidul Gg. 2 dan Gg. 9	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
347	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	430 m	JL. SIMO REJOSARI A GG. 6 NO. 81	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
348	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	200 m	Wonorejo Selatan Baru RT. 01 RW.VIII	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
349	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	400 m	Jl. Asem Jaya V	BUBUTAN	TEMBOK DUKUH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	30/40 + Cover Gandar 5 ton						
350	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	220 m	Bulak Banteng Lor 1	KENJERAN	BULAK BANTENG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
351	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	205 m	Jl. Bulak Banteng Baru Gang Kenanga 1	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
352	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	270 m	Jl. Tembok Dukuh IX	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
353	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	540 m	DUKUH KUPANG BARAT 1 BUNTU 3	DUKUH PAKIS	DUKUH KUPANG	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
354	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	390 m	Jl. Mustika Baru	WONOKROMO	NGAGEL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
355	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	480 m	Medayu Utara VIII-A, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut (Sisi timur menuju makam RT 4 RW XI)	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
356	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 30/40 + Cover Gandar 5 ton	480 m	RT 4 RW 11 Medayu Utara VIII A	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
357	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	30 m	Kendung Rejo Gang VIII A	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
358	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	30 m	Kendung Rejo Gang VIII B	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
359	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	70 m	Beji Selatan	PAKAL	PAKAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	40/60 + Cover Gandar 5 ton						
360	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	80 m	Kendung Rejo Gang VIII	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
361	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	50 m	Baruk Tengah di sisi Pos RW	RUNGKUT	KEDUNG BARUK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
362	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	100 m	Kendung Rejo Gang VI	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
363	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	120 m	Kendung Rejo Gang V	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
364	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	90 m	RT 01 RW 02	LAKAR SANTRI	JERUK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
365	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	84 m	Depan SMPN di wilayah RT 2 RW 2	SUKOMANU NGGAL	SUKO MANUNGGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
366	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	180 m	JL Kedurus Gg Buyut	KARANG PILANG	KEDURUS	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	40/60 + Cover Gandar 5 ton						
367	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	110 m	Jl. Kutisari Selatan I	TENGGILIS MEJOYO	KUTISARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
368	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	100 m	KAPASMADYA BARAT 7A	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
369	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	100 m	Slmo Tamba'an	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
370	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	440 m	KAPAS MADYA 1G	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
371	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	172 m	JL MARGODADI	BUBUTAN	GUNDIH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
372	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	190 m	Jl. Karangpoh	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
373	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	150 m	JL. Bratang Gede Gg 6	WONOKROMO	NGAGELREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	40/60 + Cover Gandar 5 ton						
374	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	370 m	SEMEMI JAYA 9A	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
375	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	180 m	JL DUPAK BARU RW 05	BUBUTAN	JEPARA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
376	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	213 m	Jalan Wonorejo Gang Masjid	RUNGKUT	WONOREJO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
377	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	160 m	Kendung Rejo Gang I	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
378	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	200 m	JL DUPAK BARU RW 05	BUBUTAN	JEPARA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
379	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	220 m	JL DUPAK BARU RW 05	BUBUTAN	JEPARA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
380	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	190 m	Gang IV Ketintang	WONOKROMO	WONOKROMO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	40/60 + Cover Gandar 5 ton						
381	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	230 m	Wonocolo Gg. 3 RT 03/RW 04	WONOCOLO	JEMUR WONOSARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
382	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	350 m	RT 05/RW 06 Kelurahan Lontar	SAMBIKEREP	LONTAR	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
383	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	269 m	kalilom lor indah Gg. Kenongo	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
384	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	215 m	Jl. Bibis Tama RT 05/RW 07	TANDES	MANUKAN WETAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
385	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	231 m	RW 06 Kelurahan Lontar	SAMBIKEREP	LONTAR	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
386	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	320 m	Gunung Anyar Tambak 2	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR TAMBAK	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
387	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	280 m	Balai RW 04 Kutisari Indah Barat, Jl. Kutisari	TENGGILIS MEJOYO	KUTISARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	40/60 + Cover Gandar 5 ton		Indah Barat V No. 5 - Pasar Baru				
388	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	410 m	KAPAS MADYA 1D	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
389	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	430 m	KAPAS MADYA 1E	TAMBAKSARI	GADING	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
390	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	410 m	Bangkingan Timur 06 RT 06 RW 01	LAKAR SANTRI	BANGKINGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
391	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	570 m	KAPASMADYA 2 SELATAN	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
392	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	500 m	Kendung Gang 3	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
393	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	500 m	RW 08 Bambe Dukuh Menanggal	GAYUNGAN	DUKUH MENANGGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
394	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	Pembangunan Saluran U-Ditch	860 m	Kendangsari	TENGGILIS MEJOYO	KENDANGSARI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan	40/60 + Cover Gandar 5 ton						
395	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Pembangunan Saluran U-Ditch 40/60 + Cover Gandar 5 ton	450 m	jl Sidosermo Airdas	WONOCOLO	SIDOSERMO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
396	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	pengerukan got/saluran	160.3 m	kunti dalam no 26-a	SEMAMPIR	SIDOTOPO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
397	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	pengerukan got/saluran	93 m	sumbo gang 3	SEMAMPIR	SIDOTOPO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
398	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	pengerukan got/saluran	152 m	sumbo 1 / 21	SEMAMPIR	SIDOTOPO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan							
399	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	27 m	Griya Amerta	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
400	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	45.0 m 5	Simo Pomahan Baru Gang Pertolongan 2 (Penghubung Gang 5-6)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
401	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	45 m	Jl. Makmur III RT02 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
402	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	79.2 m 7	Simo Pomahan Baru Gang 5 (Barat)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
403	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	78.3 m 9	Simo Pomahan Baru Gang 5 (Timur)	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO BARU	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
404	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	100 m	Jl. Tubanan Lama GG Punden RT02 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
405	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	60 m	Jl. Raya Tubanan Indah II GG Tegal Mulyo RT03 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
406	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	78.5 m	Selatan langgar Hidayatusshi byan RT 03 RW 03	TENGILIS	PANJANG JIWO	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
407	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	SALURAN	60 m	Jl. Tubanan Indah GG Musholla RT02 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan							
408	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	70 m	Jl. Tubanan Indah GG Punden RT02 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
409	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	80 m	Jl. Tubanan Makmur IV RT02 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
410	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	80 m	Jl. Tubanan Makmur IV-V RT02 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
411	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	170 m	GG Mawar 10 RT04 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
412	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	269 m	Jl. Tubanan Indah 05 RT05 RW09	TANDES	KARANGPOH	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
413	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	SALURAN	298 m	RAAY DARMO BARU BARAT	SUKOMANU NGGAL	SUKO MANUNGGAL	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
414	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Saluran	394 m	Gubeng Kertajaya III	GUBENG	AIRLANGGA	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
415	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	Saluran	490 m	JL. GAYUNGAN PTT NO. 29	GAYUNGAN	GAYUNGAN	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021
416	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman	SALURAN TYPE 6	220 m	SEMEMI JAYA BARU JALAN PROTOKOL	BENOWO	SEMEMI	DPRKP CKTR	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Kawasan Permukiman	yang ditingkatkan			UTARA REL 1 ANTARA RW. 9 DAN RW. 1				
B	Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan								
1	Pemeliharaan/R rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	Overlay Jalan Flexible Pavement	294 m 2	Simorejo V No.01	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
2	Pemeliharaan/R rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	Pembangunan Jembatan Bentang 6 m	15 m 2	Jembatan RT 02/RW 06 Kel. Pakis Kec. Sawahan	SAWAHAN	PAKIS	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
3	Pemeliharaan/R rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	Pembangunan Jembatan Bentang 6 m	24 m 2	Jl. Petemon Sidomulyo 5 No. 9	SAWAHAN	PETEMON	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direh abilitasi	Pembangu nan Jembatan Bentang 6 m	10.5 m 2	Jl. Gadel Tengah 4 RT 05/RW 06	TANDES	KARANGPOH	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
5	Pemeliharaan/R ehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direh abilitasi	Pembangu nan Jembatan Bentang 6 m	27.7 m 2 2	Kampung Simokalanga n Gang 1 RT 01/RW 07	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
6	Pemeliharaan/R ehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direh abilitasi	Pembangu nan Jembatan Bentang 8 m	12 m 2	Juwingan 128	GUBENG	KERTAJAYA	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
7	Pemeliharaan/R ehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direh abilitasi	Pembangu nan Jembatan Bentang 8 m	10 m 2	Jl. Margorukun Tengah RT.03	BUBUTAN	GUNDIH	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
C	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota								
1	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 200 - 40/120	210 m	Jembatan masuk ke DLLAJ	WIYUNG	WIYUNG	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
2	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 200 - 40/120	105 m	Jalan Mbah Tanjung Alang	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
3	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 200 - 40/120	105 m	Mbah Tanjung Alang Gunung Anyar	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
4	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali	100 m	DEPAN SMK BAHROL ULUM	SAWAHAN	BANYU URIP	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			200 - 40/120						
5	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 200 - 40/120	75 m	Gunung Anyar Harapan	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
6	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 300 - 40/120	150 m	Jl. Sutorejo Barat Komplek Perumahan Sutorejo Indah	MULYOREJO	DUKUH SUTOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
7	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 300 - 40/120	200 m	Rungkut Menanggal III	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT MENANGGAL	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
8	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Plengsengan Saluran	230 m	Rungkut Menanggal IV	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT MENANGGAL	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	Batu Kali 300 - 40/120						
9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 300 - 40/120	475 m	Jalan Wonorejo Permai Selatan VII RW 5, 2, 9, 1	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Plengsengan Saluran Batu Kali 700 - 40/120	600 m	Rungkut Mapan Timur s/d Barat	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT TENGAH	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	1 m	Juwingan 128	GUBENG	KERTAJAYA	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
12	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	376 m	Baruk Utara IX Bag Selatan	KEDUNG BARUK	RUNGKUT	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
13	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	50 m	BANYU URIP KIDUL KIDUL (BELAKANG KANTOR KELURAHAN BUKID)	BANYU URIP	SAWAHAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
14	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	50 m	Jalan wonorejo gang Tembusan	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
15	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	67 m	Jl. Rungkut Tengah Gg 6 B	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT TENGAH	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	60/80 + Cover Gandar 5 ton						
16	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	80 m	BANYU URIP KIDUL 2 MOLIN	SAWAHAN	BANYU URIP	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
17	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	84 m	Jalan Wonorejo gang 2	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
18	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	100 m	Jl Lidah Kulon	LAKAR SANTRI	LIDAH KULON	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
19	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	105 m	Blok A sisi Utara Jl. Jetis Kulon I	WONOKROMO	WONOKROMO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
20	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	108 m	Jalan Wonorejo gang 1	WONOREJO	RUNGKUT	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
21	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	124 m	JL. Pulosari 3L	DUKUH PAKIS	GUNUNGSARI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
22	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	124 m	Kedung Mangu Timur 7/12	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	60/80 + Cover Gandar 5 ton						
23	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	114 m	Jl Kebonsari LVK IX RT05/RW03, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan	JAMBANGAN	KEBONSARI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
24	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	136 m	Jalan Wonorejo gang langgar	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
25	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	170 m	Jl Sumberan	WIYUNG	BALAS KLUMPRIK	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
26	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	200 m	Jl. Rungkut Tengah Gg 6 A	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT TENGAH	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
27	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	185 m	KEDUNG REJO	BENOWO	SEMEMI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
28	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	185 m	KEDUNG REJO	SEMEMI	BENOWO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
29	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	204 m	Jl. Rungkut Tengah Gg 6	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT TENGAH	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	60/80 + Cover Gandar 5 ton						
30	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	200 m	BANYU URIP KIDUL 2/37 (DEPAN BALAI RW)	SAWAHAN	BANYU URIP	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
31	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	200 m	Bulak Rukem Timur 1H	BULAK	BULAK	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
32	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	200 m	Bulak Rukem Timur 2E RT 05 RW 07	BULAK	BULAK	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
33	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	300 m	RAYA KUPANG JAYA (sisi selatan)	SUKOMANU NGGAL	SUKO MANUNGGAL	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
34	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	270 m	Bulak Setro 4 RT 04 RW 05	BULAK	BULAK	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
35	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	300 m	Jl. Lapangan Benowo	PAKAL	BENOWO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
36	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	350 m	sidotopo wetan 2/70	KENJERAN	SIDOTOPO WETAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	60/80 + Cover Gandar 5 ton						
37	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	160 m	Kutisari Selatan I	TENGGILIS MEJOYO	KUTISARI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
38	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	350 m	Jl. Jemurwonosari Gang Masjid	JEMUR WONOSARI	WONOCOLO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
39	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	350 m	Jl. Jemurwonosari gang masjid	JEMUR WONOSARI	WONOCOLO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
40	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	350 m	Jl.Jemurwon osari Gg masjid	WONOCOLO	JEMUR WONOSARI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
41	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	350 m	Jl.Jemurwon osari Gg masjid	WONOCOLO	JEMUR WONOSARI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
42	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	350 m	Jl.Jemurwon osari Gg masjid	WONOCOLO	JEMUR WONOSARI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
43	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	376 m	Baruk Utara IX Bag Selatan	RUNGKUT	KEDUNG BARUK	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	60/80 + Cover Gandar 5 ton						
44	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	425 m	KAPAS MADYA 1-D	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
45	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	425 m	KAPAS MADYA 1-E	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
46	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	553 m	KUPANG JAYA II	SUKOMANU NGGAL	SONO KWIJENAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
47	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	600 m	KUPANG JAYA I	SUKOMANU NGGAL	SONO KWIJENAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
48	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	740 m	KUPANG JAYA I DAN II	SONO KWIJENAN	SUKOMANUNG GAL	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
49	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 60/80 + Cover Gandar 5 ton	945 m	Jl. Raya Kutisari Indah	TENGGILIS MEJOYO	KUTISARI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
50	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	130 0 m	Raya Rungkut Menanggal Harapan	GUNUNG ANYAR	RUNGKUT MENANGGAL	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	60/80 + Cover Gandar 5 ton						
51	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	5 m	Simorejo Gang 21	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
52	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	8 m	KAPAS MADYA 1	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
53	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	9.6 m	Wonorejo permai timur 10	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
54	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	66 m	Jl. Cumpat Gang Kemuning	BULAK	KEDUNG COWEK	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
55	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	65 m	JL SUMBERREJO MAKMUR GANG I SURABAYA	KANDANGAN	BENOWO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
56	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	84 m	Jl Menanggal I RT03/RW01 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan	GAYUNGAN	MENANGGAL	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
57	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	80 m	TENGGER RAYA VI SURABAYA	BENOWO	KANDANGAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	80/100 + Cover Gandar 5 ton						
58	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	90 m	Jl. Panduk II A Protokol RW 04	TENGGILIS MEJOYO	PANJANG JIWO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
59	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	90.9 090 9 m	jalan wonorejo permai (ruko)	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
60	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	90.9 090 9 m	Raya Wonorejo Selatan	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
61	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	90.9 m 090 9	wonorejo permai sebelah utara ruko jalan kendal sari depan kebon bibit	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
62	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	120 m	Jl. Kalijudan 1-11	TAMBAKSARI	PACAR KEMBANG	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
63	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	120 m	Jl. Kalikepiting 131-137	TAMBAKSARI	PACAR KEMBANG	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
64	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	120 m	Kapas Madya Barat gg 9A	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	80/100 + Cover Gandar 5 ton						
65	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	130 m	wonosari wetan 1-A/16	SEMAMPIR	WONOKUSUM O	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
66	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	162 m	Tambak Wedi Baru Barat Gg Madu	KENJERAN	TAMBAK WEDI	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
67	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	205 m	Jl. Simo Kalangan RT 08 RW 07 Kel. Simo Mulyo	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
68	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	210 m	Jl. Kalikeping bhaskara 1-41	TAMBAKSARI	PACAR KEMBANG	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
69	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	240 m	Simo Pomahan Baru Barat Masjid	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
70	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	272.727 3 m	Dukuh Setro Baru Utara	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
71	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangunan Saluran U-Ditch	300 m	depan ruko nirwana eksekutif	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	80/100 + Cover Gandar 5 ton						
72	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	300 m	Jl. Raya Semampir Sisi Timur	SUKOLILO	MEDOKAN SEMAMPIR	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
73	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	300 m	Jl. Simokatrungan (Pasar Simo)	SAWAHAN	KUPANG KRAJAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
74	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	300 m	RAYA KUPANG JAYA (sisi selatan)	SUKOMANU NGGAL	SONO KWIJENAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
75	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangu nan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	300 m	RAYA KUPANG JAYA (sisi selatan)	SUKOMANU NGGAL	SONO KWIJENAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
76	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangu nan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	300 m	RAYA KUPANG JAYA (sisi selatan)	SUKOMANU NGGAL	SONO KWIJENAN	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
77	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangu nan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	167 m	Raya Gunung Anyar Timur	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
78	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi	Pembangu nan Saluran U-Ditch	370 m	wonorungku t utara II	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
		Saluran Drainase dan Boezem	80/100 + Cover Gandar 5 ton						
79	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	176 m	RT 01 RW 03 Sekitar Jl. Kembang Kuning yang belum selesai	SAWAHAN	PAKIS	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
80	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	400 m	KAPAS JAYA BUNTU	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
81	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	465 m	wonorungku t utara l batas wilayah RW 02 dan 09	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
82	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	525 m	Jl. Raya Wonorejo Timur	RUNGKUT	WONOREJO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
83	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	823 m	Raya Gunung Anyar Sawah	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
84	Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/R ehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Pembangunan Saluran U-Ditch 80/100 + Cover Gandar 5 ton	120 0 m	Karang Asem Gg 4	TAMBAKSARI	PLOSO	DPUB MP	Teralokasi pada TA 2021
D	Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi								
1	Pemasangan Penerangan	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan	1 Titik	BANYU URIP KIDUL MOLIN 2 B	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
	Jalan Umum Hemat Energi		n Jalan Umum Type 4	i k					
2	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	1 Titik	Jl Banyu Urip Kidul 1A	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
3	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	1 Titik	Jl. Kalijudan X/29	MULYOREJO	KALIJUDAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
4	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	BANYU URIP KIDUL 1	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
5	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	BANYU URIP KIDUL 1	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
6	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	BANYU URIP KIDUL 1A	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
7	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	BANYU URIP KIDUL 1B	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
8	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	BANYU URIP KIDUL 2A	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
9	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	BANYU URIP KIDUL 2C	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
10	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	2 Titik	Jl Manyar Adi (depan balai RW)	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
11	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	Klakah rejo II B /20	BENOWO	KANDANGAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
12	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	Klakah rejo II B /20	BENOWO	KANDANGAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
13	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	2 Titik	BANYU URIP KIDUL MOLIN 2 B	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
14	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	BANYU URIP KIDUL	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
15	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	BANYU URIP KIDUL GG 2	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
16	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	BANYU URIP KIDUL GG 2	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
17	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	BANYU URIP KIDUL GG 2	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
18	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	Bulak Banteng Lor 3	KENJERAN	BULAK BANTENG	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
19	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	3 Titik	Jalan Krakatau 22	SAWAHAN	PETEMON	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
20	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	Jl Manyar Adi	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
21	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	Jl. RT IV RW 3 Kel. Kenjeran, Bulak	BULAK	KENJERAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
22	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	medokan ayu	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
23	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	DEPAN SMK BAHARUL ULUM	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
24	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	RT 11 RW 01	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
25	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	Jalan Simorejo Timur	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
26	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	Juwingan 25 A	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
27	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	3 Titik	Jl. Wiyung	WIYUNG	WIYUNG	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
28	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	4 Titik	Jl Kupang Krajan 6	SAWAHAN	KUPANG KRAJAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
29	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	JL PUTAT JAYA SEKOLAHAN	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
30	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	kedurus Gang 1 tembusan	KARANG PILANG	KEDURUS	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
31	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Juwingan 128	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
32	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Jl. Simorejo Timur 3 No. 68	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
33	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur II	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
34	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur III	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
35	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur III (TAMAN)	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
36	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur V	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
37	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	4 Titik	Darmo Permai Timur V	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
38	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur VI	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
39	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur VIII	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
40	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur X, XI	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
41	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	Darmo Permai Timur XIII	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
42	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	4 Titik	TUWOWO GG. 3E	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
43	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	BANYU URIP 1C	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
44	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	BANYUURIP KIDUL GG 2	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
45	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	Bulak Banteng Lor Gg. Sekolah RT 01	KENJERAN	BULAK BANTENG	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
46	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	5 Titik	Jl Gubeng Kertajaya VIII C	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
47	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	jl tambak medokan ayu gang bumi ayu	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
48	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	RT 07 RW 10	SEMAMPIR	PEGIRIAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
49	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	Simo Katrungan Kidul (Musholla)	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
50	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	Sumberrejo Makmur Gang 7	PAKAL	SUMBER REJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
51	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	TUWOWO 3E	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
52	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	TUWOWO KALI REJO	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
53	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	KAPAS LOR WETAN 3	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
54	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	Jl Pogot Gg 9b No 14 (Lapangan RW)	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
55	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	5 Titik	Darmo Permai Timur III (PASAR)	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
56	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	Darmo Permai Timur IV	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
57	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	5 Titik	Darmo Permai Timur VII	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
58	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Beji Rahayu	PAKAL	PAKAL	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
59	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Beji RT 02/RW 04	PAKAL	PAKAL	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
60	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Dukuh Setro Baru Utara	TAMBAKSARI	DUKUH SETRO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
61	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Jl Manyar Dukuh	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
62	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	jl tambak medokan gang 6B	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
63	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	jl tambak medokan gang 6C	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
64	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	6 Titik	Jl. sukodono Gang 4	SEMAMPIR	AMPEL	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
65	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	kalilom lor timur Gg. 3	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
66	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Simo Katrungan Kidul III	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
67	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Simo Katrungan Kidul IV	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
68	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Simo Katrungan Kidul V	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
69	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	Darmo Permai Timur IX	SUKOMANU NGGAL	PUTAT GEDE	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
70	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	6 Titik	TUWOWO 3B DAN 3C	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
71	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	Jl Kupang Krajan 3	SAWAHAN	KUPANG KRAJAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
72	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	Jl. Girilaya 8 RT 08 RW 08 Kel. Banyu Urip	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
73	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	7 Titik	Klampis Ngasem Gang Buntu	SUKOLILO	KLAMPIS NGASEM	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
74	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	TUWOWO 3B & TUWOWO 3C	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
75	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	Petemon 3	SAWAHAN	PETEMON	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
76	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	Dukuh Bulak Banteng Suropati 5	KENJERAN	BULAK BANTENG	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
77	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	Jl Manyar Dukuh	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
78	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	Jl Manyar Dukuh	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
79	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	jl tambak medokan gang X	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
80	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	kedung tarukan baru 4 raya	GUBENG	MOJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
81	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	7 Titik	Kapasmadya Indah	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
82	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	7 Titik	Pulosari 1	DUKUH PAKIS	GUNUNGSARI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
83	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Klampis ngasem Gg 1	SUKOLILO	KLAMPIS NGASEM	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
84	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	RT 09 RW 02	KENJERAN	TANAH KALI KEDINDING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
85	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Simo Katrungan Kidul I	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
86	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Sumberrejo Makmur Gang 10	PAKAL	SUMBER REJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
87	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Sumberrejo Makmur Gang 8	PAKAL	SUMBER REJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
88	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Sumberrejo Makmur Gang 9	PAKAL	SUMBER REJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
89	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Jl tambak medokan gang IX	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
90	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Jl Pakal Madya Barat Gang Petuyo RT03 RW 03 Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal	PAKAL	PAKAL	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
91	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Jl Krembangan Bhakti	KREMBANGAN	KEMAYORAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
92	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Jl Krembangan Bhakti	KREMBANGAN	KEMAYORAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
93	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	JL RAYA KEDUNG MAKAM	BENOWO	SEMEMI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
94	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Jl Simo Rukun gg 8 sisi timur	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
95	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	8 Titik	Jl Simo Rukun gg 9 sisi timur	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
96	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Jl Tambak Asri X, XI, XII, XII (BLK)	KREMBANGAN	MOROKREMBANGAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
97	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	8 Titik	Jl. Sukomanunggal III RT 04 RW 02 Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal	SUKOMANUNGGAL	SUKOMANUNGGAL	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
98	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	9 Titik	TUWOWO 3A	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
99	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	9 Titik	KEDUNG JAYA GANG V	BENOWO	SEMEMI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
100	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	9 Titik	Petukangan Tengah	SEMAMPIR	AMPEL	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
101	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	9 Titik	Kelurahan Tandes	TANDES	TANDES	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
102	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	9 Titik	Jl Simo Rukun gg 8 sisi barat	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
103	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	9 Titik	Jl Simo Rukun gg 9 sisi barat	SUKOMANU NGGAL	SIMOMULYO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
104	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	10 Titik	Simo Katrungan Kidul Langgar	SAWAHAN	BANYU URIP	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
105	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	10 Titik	Babat Jerawat RT 01/RT 04	PAKAL	BABAT JERAWAT	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
106	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	10 Titik	Pengampon 6	PABEAN CANTIAN	BONGKARAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
107	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	Bulak Rukem Timur 1H	BULAK	BULAK	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
108	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	Jl Kupang Krajan 5	SAWAHAN	KUPANG KRAJAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
109	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	Jl. Kauman Madya	PAKAL	SUMBER REJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
110	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	Kauman Gg Belakang	PAKAL	SUMBER REJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
111	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	MAKAM SEMEMI	BENOWO	SEMEMI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
112	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	Pengampon 6 Bongkaran	PABEAN CANTIAN	BONGKARAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
113	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	11 Titik	Jl. Pulosari	DUKUH PAKIS	GUNUNGSARI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
114	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	Jl Manyar Sambongan Makam Islam	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
115	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	11 Titik	Wilayah RW 02 Kelurahan Kedung Cowek	BULAK	KEDUNG COWEK	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
116	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	12 Titik	Jl. Asem Jaya V	BUBUTAN	TEMBOK DUKUH	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
117	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	12 Titik	Kapasmadya E-1	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
118	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	13 Titik	Jl. Kauman Madya	PAKAL	SUMBER REJO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
119	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	14 Titik	RT 04 RW 10	PAKAL	BABAT JERAWAT	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
120	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	14 Titik	Kapasmadya 2B	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
121	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	14 Titik	Kapasmadya 2D	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
122	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	14 Titik	Kapasmadya 2F	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
123	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	14 Titik	Kapasmadya 2G	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
124	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	15 Titik	Rejosari	PAKAL	BENOWO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
125	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	15 Titik	Rejosari	PAKAL	BENOWO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
126	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	15 Titik	Jl Tambak Dalam Kel. Genting Kalianak Kec. Asemrowo	ASEMROWO	GENTING KALIANAK	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
127	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	15 Titik	Jl. Demak Jaya 3 RT 05 RT 06	BUBUTAN	TEMBOK DUKUH	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
128	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	16 Titik	Pengampon Gg 7	PABEAN CANTIAN	BONGKARAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
129	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	16 Titik	Kapasmadya 2C	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
130	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	17 Titik	Jl Manyar Sambongan - Jl Manyar Dukuh	GUBENG	KERTAJAYA	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
131	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	17 Titik	Pengampon Gg 4	PABEAN CANTIAN	BONGKARAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
132	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	17 Titik	TUWOWO REJO 1	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
133	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	17 Titik	KAPAS MADYA 1A 1	TAMBAKSARI	GADING	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
134	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	17 Titik	KAPAS MADYA 1-A1	TAMBAKSARI	KAPASMADYA BARU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
135	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	17 Titik	RT 02 RW 08 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes	TANDES	TANDES	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
136	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	20 Titik	Jl. Bendul Merisi Permai Blok F, Blok E, Blok G	WONOCOLO	BENDUL MERISI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
137	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	21 Titik	Dukuh Bulak Banteng Suropati 5D	KENJERAN	BULAK BANTENG	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
138	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	21 Titik	Jl. Bendul Merisi Permai Blok F, E, G	WONOCOLO	BENDUL MERISI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
139	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	21 Titik	Jl. Bendul Merisi Permai Blok, F, E, G	WONOCOLO	BENDUL MERISI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
140	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan	21 Titik	Jl. Bendul merisi permai Blok, F,E,G	WONOCOLO	BENDUL MERISI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
			Umum Type 4						
141	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	21 Titik	Jl. Bendul merisi permai blok. E,F,G	WONOCOLO	BENDUL MERISI	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
142	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	21 Titik	RT 06 RW 08 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes	TANDES	TANDES	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
143	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	21 Titik	Tengger Raya I	BENOWO	KANDANGAN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
144	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	21 Titik	Jl. Kali Bakri	BENOWO	TAMBAK OSOWILANGUN	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
145	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	22 Titik	Jl. Babat Jerawat	PAKAL	BABAT JERAWAT	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
146	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	30 Titik	RW 09 Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes	TANDES	TANDES	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
147	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Type 4	41 Titik	Jl Medokan Sawah Timur RT06 & RT07/RW08	RUNGKUT	MEDOKAN AYU	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
148	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan PJU	2 Titik	Tengger Raya VI No.38	Benowo	Kandangan	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
149	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	Pemasangan PJU	11 Titik	Kandangan gunung bakti	Benowo	Kandangan	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pekerjaan	Volume	LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PD	Validasi /Keterangan
150	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	penerangan (PJU) gantung	8 Titik	sumbo 1 / 21	SEMAMPIR	SIDOTOPO	DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
151	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	PJU	8 Titik	Kedinding Tengah Baru Gg. 2			DKRTH	Teralokasi pada TA 2021
E	Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas								Teralokasi pada TA 2021
1	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan	Pemasangan Pelican Crossing Traffic Light (PCTL) 2 Tiang	1 Unit	JL ALAS MALANG	BENOWO	SEMEMI	DISHUB	Teralokasi pada TA 2021
2	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan	Pemasangan Pelican Crossing Traffic Light (PCTL) 2 Tiang	1 Unit	Jl. Raya Sutorejo (Depan Masjid Thoriqul Jannah)	MULYOOREJO	DUKUH SUTOREJO	DISHUB	Teralokasi pada TA 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Kota Surabaya merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Selain itu, dengan terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, rencana kerja dan pendanaan pada RKPD Kota Surabaya 2021 disusun dengan memperhatikan penjadwalan ulang program dan kegiatan serta anggaran pada tahun 2020.

Rencana Program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan secara detail pada Tabel V.1 tentang Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Surabaya Tahun 2021 serta Tabel V.2 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel V.1
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Surabaya Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pemulihan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan Inovasi Produk dan Jasa serta Industri Kreatif	Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	Program Distribusi Perdagangan	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	300 lokasi	Gudang di kota Surabaya	Dinas Perdagangan
					Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	31 Kelompok	Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
					Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	217 kali	31 wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
				Program Pemasaran Pariwisata	Fasilitasi promosi wisata	246 kali	Dalam dan luar propinsi Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali	THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	41 kali	Gedung Balai Pemuda, Museum Sepuluh Nopember dan Tugu Pahlawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	66 kali	Gedung pertemuan di Kota Surabaya; regional dan nasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pengembangan Destinasi Wisata	Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	770 kali	Balai Pemuda Surabaya, Jl. Gubernur Suryo No.15 Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	4 kali	Convention Hall Lt. 4 Gedung Siola	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	3 lokasi	THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	3 lokasi	Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Peningkatan Destinasi Wisata	6 kali	Jl. Pahlawan s/d Taman Bungkul, Kawasan Kota Lama, sepanjang Jl. Tunjungan, Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	6 lokasi	museum yang dikelola Pemkot Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata (DAK)	280 orang	Convention Hall Lt. 4 Gedung Siola	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	12 kali	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	6 lokasi	Tempat - tempat usaha jasa dan sarana pariwisata di kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Meningkatkan realisasi investasi	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3500 perusahaan	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengelolaan Data Investasi	45151 data	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	4 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyelenggaraan Promosi Investasi	3 kali	Wilayah Jawa serta luar Jawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	330 Orang	Surabaya, Jawa Timur, Jakarta dan Luar Jawa	Dinas Perdagangan
					Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	12 lokasi	Sentra Usaha Mikro Jahit Bukit Barisan, Sentra Usaha Alas Kaki dan Sleeper eks lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Design and Fashion Batik eks Lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Mikro Merr, Sentra Usaha Mikro Tunjungan, Stand Usaha Mikro KBS, Stand Usaha Mikro JMP, Stand Usaha Park and Ride, Surabaya North Quay, Stand Usaha Delta, Stand Usaha Bandara 2 Juanda dan Stand Usaha RSUD Bakti Dharma Husada	Dinas Perdagangan
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	11 Jenis	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
				Program Pengembangan Produk Usaha Mikro	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	858 orang	Kantor Dinas Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Pengembangan Sentra Usaha	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	60 sentra usaha	di lokasi sentra sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	49 sentra usaha	Sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengembangan Usaha Koperasi	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	175 koperasi	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	178 Orang	Kota Surabaya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	50 kelompok	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Pengawasan Koperasi	629 koperasi	Lokasi koperasi yang dimonitoring	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Penilaian Kinerja Koperasi	35 koperasi	Lokasi koperasi yang akan ditingkatkan dan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	175 orang	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Penataan Ruang yang Terintegrasi dan Memperhatikan Daya Dukung Kota serta Infrastruktur dan Utilitas Kota yang Terpadu dan Efisien	Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Program Kebersihan	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	104 Kegiatan	9 wilayah rayon kebersihan Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Selatan 1, Rayon Selatan 2, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Barat	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	364 lokasi	9 Wilayah Rayon Kebersihan: Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Barat, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Selatan 1 dan Rayon Selatan 2	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	550 lokasi	saluran primer, sekunder, tersier dan rumah pompa di kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Operasional Pengangkutan Sampah	267 lokasi	5 Wilayah pengangkutan sampah di Kota Surabaya: Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	3 kali	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengelolaan Sampah dan Limbah	Penanganan Limbah B3	1 Kegiatan	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	21 unit	Workshop alat berat/ kendaraan DKRT dan ATPM alat berat/ kendaraan	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	1688 unit	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	1 rekening	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	183 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	14 lokasi	14 Lokasi Pemakaman Yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Program Pengelolaan Air Limbah Kota	Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	96 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSA/TP S 3R	39 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Program Penataan Ruang	Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	2 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	12250 Persil	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	3 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	9 Dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pengendalian Bidang Bangunan	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	7169 data	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pengawasan Bangunan	300 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	4 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Program Pengamanan Aset Infrastruktur	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	40 bidang	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	149069 unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	365 Kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	7 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	48 kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
				Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengadaan Perlengkapan Jalan	1200 unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	13 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Perparkiran	1821 Lokasi	Titik Parkir TJU dan TKP di Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	10 izin	Menyebar di 31 Kecamatan Wilayah Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematasan
			Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	12 Kasus	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	18 obyek	Wilayah Tanah Aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	8 kali	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
				Program Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	100 bidang	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan dan Sidoarjo)	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	75 dokumen	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan dan Sidoarjo)	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
				Program Pengelolaan Aset Tanah	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	7000 izin	Seluruh tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	1 dokumen	Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	8000 lokasi	Di Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
				Program Pengelolaan Bangunan Gedung	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	25 lokasi	Bangunan sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain : Gedung Serba Guna Arief Rahman Hakim, Gedung Siola, Gedung Wanita Candra Kencana, Rumah Peristirahatan Prigen, Jl. Walikota Mustajab No. 84, Eks Gedung Tunjungan Center Lantai 6, dan 19 lokasi JPO	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	4600 titik	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	6674 rekening	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	73680 titik	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	2 dokumen	di wilayah Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	220 unit	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	24 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	1466 lokasi	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	12 dokumen	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	37 dokumen	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	5 lokasi	JLLB, JLLT, Manukan Wonorejo, Candi Lontar, Prof. Dr. Moestopo	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	4 dokumen	Seluruh Wilayah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	4 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Program Penanggulangan Bencana Alam	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	8 jenis	Kantor BPB Linmas	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana	10 Jenis	Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Gedung pertemuan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	31 Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Operasional Pemadaman Kebakaran	832 orang	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Dinas Pemadam Kebakaran
					Pengendalian Bahaya Kebakaran	62 kali	Sekolah, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan	Dinas Pemadam Kebakaran
					Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	60 kali	Gedung Diklat / Instansi, Sentra Wisata Kuliner dan Pasar	Dinas Pemadam Kebakaran
				Program Pencegahan dan Pengurangan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1650 orang	Gedung Pemerintah Kota Surabaya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	500 orang	Gedung Pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya dan Kelurahan di Kota Surabaya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	210 unit	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Dinas Pemadam Kebakaran
					Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	400 bangunan	Bangunan gedung di Kota Surabaya	Dinas Pemadam Kebakaran
					Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	764 unit	Kantor Dinas Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Dinas Pemadam Kebakaran

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Pembangunan Prasarana Transportasi	2 bangunan	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pemeliharaan Prasarana Transportasi	36 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	14 Lokasi	Terminal Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	8 Paket	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
				Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Pengelolaan Transportasi Umum	28 Unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5 Kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	8 unit	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	365 kali	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
					Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	10 Dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
			Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	61 unit	Rumah pompa yang menyebar di Saluran primer dan sekunder di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	24 lokasi	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	22 dokumen	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	52 dokumen	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Program Perencanaan Kota	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	1 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanian	1 dokumen	Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	12 lokasi	Tahura Balas Klumprik, Tahura Pakal 1, Tahura Pakal 2, Tahura Sumurwelut 1, Tahura Sumurwelut 2, Tahura Sambikerep, Tahura Lempung (Herbal), Tahura Waru Gunung, SPT Jeruk, Kebun Raya Mangrove Wonorejo, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Kebun Anggrek Sememi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau	Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	425 lokasi	Taman dan jalur hijau yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pengembangan Dekorasi Kota	15 lokasi	Seluruh Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	39 lokasi	Taman Kota yang Tersebar dan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	3 Lingkungan	Kota Surabaya	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	10 unit	Gedung Milik pemerintah kota Surabaya yang dilakukan konservasi energi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	4 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Upaya Konservasi Energi	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	120 lembaga	Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya dan Usaha dan/atau Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatkan kualitas udara dan air	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	400 Unit	Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	178 lokasi	Lokasi IPAL Milik Pemerintah Kota Surabaya dan IPAL komunal	Dinas Lingkungan Hidup
					Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	365 data	2 Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yakni Kebun Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari	Dinas Lingkungan Hidup
					Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	778 data	Perairan Pesisir di Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	50 obyek	Lokasi sumber dampak dan yang terdampak	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	254 lembaga	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	224 sampel	31 Titik/lokasi air badan air (184 Sampel) , 40 Titik/lokasi lokasi pengujian udara ambien di Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Car Free Day	113 kali	Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan ; Jl. Jimerto, Jl Jemur Andayani, Jl. Kertajaya; Jl. Kembang Jepun	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	12 kali	Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kampus	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	7 dokumen	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat melalui Pendidikan dan Sistem Kesehatan yang Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat dengan Menciptakan Seluas-luasnya Kesempatan Berusaha	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	100 orang	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	15 lembaga	Surabaya, Luar Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pembinaan Keluarga Sejahtera	1240 orang	di Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	1350 orang	di Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	1 bangunan	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna No.21 Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	2 lembaga	Mall Pelayanan Publik, Jln. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	926 orang	Gedung Siola	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	431 lembaga	Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	154 kampung	154 Kelurahan yang ada di kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	Kota Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyelenggaraan Operasional Shelter	2 lembaga	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	29 kali	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	2 dokumen	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Keluarga Berencana	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	31 Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208 orang	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	650 orang	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	52 unit	DP5A, ULP, BKKBN	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	4 unit	Surabaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	300 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	110 Kasus	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	300 lembaga	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	1 dokumen	Pasar Sopenyono, Pasar Balongsari, Pasar Wonokromo dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja (DBHCHT)	80 lembaga	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	1050 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	50 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	1000 orang	Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Pembinaan/Pelatihan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Calon Wirausaha Baru (DBHCHT)	200 orang	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair (DBHCHT)	7 kali	Gedung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	250 orang	Kecamatan	Dinas Tenaga Kerja
				Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja	120 orang	Perusahaan di wilayah Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
					Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	604 orang	Tempat Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi	Dinas Tenaga Kerja
					Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	976 orang	Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	1 dokumen	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	11 bangunan	Puskesmas/Puskesmas Pembantu serta RSUD yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	13 Dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
			Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	58 bangunan	Fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	160 bangunan	Gedung Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	27 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	11 unit	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	90 unit	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyediaan Sarana Olahraga	6 jenis	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	58 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Perbaikan Prasarana Olahraga	133 unit	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	41 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	25 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	26 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	10 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	29 kali	Kota Surabaya	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Meningkatkan derajat kesehatan	Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	4 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	200 orang	Eksternal dan Internal	RSUD dr. Mohamad Soewandhie

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	3 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	1 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	90 jenis	63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	18 jenis	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2 jenis	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	154 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Surveilans dan Imunisasi	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	64 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	75 kali	RSUD BDH	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Promosi Kesehatan Rumah Sakit	115 kali	RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	5442 sampel	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	13514 orang	RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pelayanan Medik Rumah Sakit	2218 orang	RSUD Bhakti Dharma Husada dan domisili pasien RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Pelayanan Gizi Rumah Sakit	28340 orang	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	180 kali	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	155 kali	RSUD dr. Moahamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	1 jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	1 aplikasi	Seluruh Layanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	63 Lembaga	Seluruh Wilayah Kerja Puskesmas Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	3 jenis	rsud bhakti dharma husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(DBHCHT)	1 jenis	RSUD BDH	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	13 lembaga	13 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Primer	64 lembaga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	134 lembaga	Rumah Sakit, Klinik Utama di Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	900 lokasi	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	64 lembaga	Rumah ABK dan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan
				Program Sumber Daya Kesehatan	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	5 dokumen	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	27 kali	Kantor Dinas Kesehatan dan Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	50 jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	2 item	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	1 Jenis	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	3 item	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2 jenis	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Jaminan Kesehatan	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	580000 orang	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (DBHCHT))	328544 orang	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	691 kunjungan	Puskesmas/Puskesmas PONED/RS Pemerintah/ RS TNI/POLRI	Dinas Kesehatan
					Pelayanan kesehatan keluarga	64 Lembaga	Wilayah Kerja Puskesmas di Kota Surabaya	Dinas Kesehatan
					Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	375 orang	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Meningkatkan kualitas pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	13000 orang	TPA/TPQ hasil verifikasi dari Kemenag	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	2 kali	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Facilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	34 lembaga	PKBM yang ditunjuk	Dinas Pendidikan
					Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	289 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	12 kali	Seluruh lembaga sekolah di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1337 lembaga	Lembaga PAUD di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	12.010 orang	Lembaga PAUD di Kota Surabaya dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	18 kali	Kota Surabaya dan Luar Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	3 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	2 lembaga	Lembaga PAUD penerima DAK PAUD	Dinas Pendidikan
					Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	4 lembaga	4 PKBM	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	2 lembaga	Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan Sekolah Dasar	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	301 lembaga	SD Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	93864 orang	Semua sekolah Dasar di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Sekolah	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	698 lembaga	SD Negeri di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Dinas Pendidikan
					Facilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	73 lembaga	Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Kelas Layanan khusus dan Sekolah Inklusi serta Pusat Layanan Disabilitas	Dinas Pendidikan
					Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	259 lembaga	Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti akreditasi	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	669 lembaga	Satuan Pendidikan Penyelenggara Pembelajaran dan Penilaian	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	301 lembaga	SD Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	10 lembaga	Lembaga SD Negeri Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
				Program Pengembangan Sekolah Menengah	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	63 lembaga	SMP Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	40993 orang	Semua Sekolah Menengah di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara kegiatan Ujian Nasional	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	317 lembaga	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	37 lembaga	Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	294 lembaga	SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	245 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	63 lembaga	SMP Negeri di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	Lembaga SMP Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan
				Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	2 kali	Dinas Pendidikan dan lembaga SD Negeri dan SMP Negeri pelaksana PPDB	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	2567 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	363 lembaga	Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri	Dinas Pendidikan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	1 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	2031 orang	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	957 lembaga	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
					Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Dinas Pendidikan
			Meningkatkan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Layanan Baca	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	500 lembaga	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Perpustakaan Binaan, Yayasan, Perpustakaan Non Pemerintah dan Balai Pemuda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Minat dan Layanan Perpustakaan	Pengelolaan Layanan Baca	1494 lokasi	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda), Sekolah, Taman di Kota Surabaya, Balai RW, Kelurahan dan Kecamatan, Yayasan, Panti Asuhan, TK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengembangan Minat dan Budaya Baca	239 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya, Taman Flora, Balai Pemuda, dan Lokasi pameran oleh Pemerintah Kota di wilayah Kota Surabaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	22460 Buku	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda) serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Program Peningkatan Prestasi Pemuda	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	710 orang	Rumah Kreatif Studio Musik Gelanggang Remaja	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	1050 Orang	Gedung Fasilitas Umum/Publik	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	4820 peserta	Gedung Fasilitas Umum / Publik dan Gedung Milik Pemerintah	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	29 kali	Gedung Instansi Pemerintah dan Gedung Fasilitas Umum / Publik	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Fasilitasi Pemakaman	960 Orang	31 Kecamatan	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	24 Kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	4416 Kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
				Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	Pembinaan dan Pemulangan PMKS	1420 orang	Kantor Dinas Sosial, UPTD Dinas Sosial dan Luar Kota Surabaya	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	12 kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	12 kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	12 kali	31 Kecamatan	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	95 orang	Kantor UPTD Babat Jerawat Jalan Raya Babat Jerawat Nomor 139 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	160 orang	Kantor UPTD Griya Werda Jalan Jambangan Baru Tol Nomor 15 A Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	Kantor UPTD Kampung Anak Negeri Jalan Wonorejo Timur Nomor 130 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1100 orang	Kantor UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Jalan Keputih tegal No.32 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	Kantor UPTD Pondok Sosial Kalijudan Jalan Villia Kalijudan Indah 15 Kavling 2-4 Surabaya	Dinas Sosial
					Peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	Kota Surabaya	Dinas Sosial

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	17 lembaga	Kota Surabaya	Dinas Sosial
					Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	45 kali	Kantor Dinas Sosial dan Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Sosial
				Program Pengendalian Layanan Sosial	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	4 kali	31 kecamatan	Dinas Sosial
					Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	31 Kecamatan	Dinas Sosial
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal	Penguatan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Program Partisipasi Kepahlawanan	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	62 kali	31 kecamatan	Dinas Sosial
					Pemeliharaan TMP dan MPN	7 lokasi	TMP Kusuma Bangsa, TMP Ngagel, TMP 10 Nopember, MPN WR. Soepratman, MPN Dr. Soetomo, MPN Bung Tomo, MPN KH. Mas Mansyur	Dinas Sosial
			Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	440 kali	Balai Budaya Surabaya, Balai Pemuda Surabaya, Ruang publik (taman, Jalan Tunjungan, dan Balai Pemuda)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	3 kali	Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	14 lokasi	Taman - taman milik Pemerintah Kota Surabaya dan tempat - tempat usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Perlindungan Budaya Lokal	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	250 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	9 kali	Jl. Tunjungan, Tempat Tempat Yang Berhubungan dengan Histori Kepahlawanan Arek Arek Surabaya, Obyek Obyek Bersejarah di Kota Surabaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	15 laporan	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budaya Peternakan	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	8 kali	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	6 jenis	Sentra Pertanian Terpadu Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	300 orang	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pembibitan	13 jenis	Miniagrowisata, STA Karah dan Jambangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125 orang	DKPP, Taman Surya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	30 kali	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	2060 sampel	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	11 kali	Putat Jaya Lebar B/27, Putat Jaya 2A/19 dan Cumpat No. 1A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengembangan Diversifikasi Pangan	28 kali	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	72 kali	Taman Kota dan ruang publik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	524 orang	31 Kecamatan di Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	5 Jenis	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	349 unit	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	48 unit	Kawasan pesisir Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	12 laporan	Kawasan Pesisir di Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	1562 kali	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan dan Permukiman yang Ramah Lingkungan	Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	842 Unit	31 Kecamatan	Dinas Sosial
			Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	Program Pengelolaan Rusunawa	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	3981 lokasi	Rumah Ber-SIP dan Rumah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah memiliki Izin Pemakaian Rumah serta pengawasan dan pemanfaatan rumah susun	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pengelolaan Rumah Susun	105 blok	Rusunawa Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	149 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	7 bangunan	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	200 Lokasi	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	173 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	16 dokumen	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	Meningkatkan perlindungan masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	Tempat pelatihan militer	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pembinaan Potensi Masyarakat	81 kali	Balai Kota Surabaya, Taman Makam Pahlawan	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pengendalian Perlindungan Masyarakat	793 orang	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat serta seluruh wilayah Kota Surabaya	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
			Meningkatkan ketertiban umum	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	480 kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	192 Kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	84 Kali	Gedung Instansi Pemerintah dan 31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial	Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1368 kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	1368 Kali	31 Kecamatan Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	96 kali	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
					Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	228 Kali	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Program Kesatuan Bangsa	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	750 orang	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	31 lembaga	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 kali	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
				Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum	Kerjasama pengendalian keamanan kota	194 kali	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	54 kali	Kota Surabaya	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Meningkatkan nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Program Partisipasi Keagamaan	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	Gedung milik Pemerintah Kota, Gedung Tempat Ibadah, dan 31 Kecamatan	Dinas Sosial
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6 Berkas	Kota Surabaya	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	72 lembaga	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	900 dokumen	Kantor Unit Layanan Pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2897 unit	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	8891 stel	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pengadaan Sarana Kedinasan	3805 unit	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
					Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	4 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, Kantor Perangkat Daerah Terkait, Tempat Pelaku Usaha Mikro	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	2 dokumen	Kantor Bagian Organisasi dan PD terkait	Bagian Organisasi
				Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	20 lembaga	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama dan/atau di Kota lokasi mitra kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, serta lokasi lain yang dirancang oleh pengurus Asosiasi Kerjasama Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Kerjasama
					Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	10 lembaga	di wilayah Indonesia dan di wilayah mitra kerja sama luar negeri	Bagian Administrasi Kerjasama
					Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	88 orang	kota/lembaga di luar negeri	Bagian Administrasi Kerjasama
					Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	35 lembaga	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Bagian Administrasi Kerjasama
				Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	139 Lembaga	Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT	183 Lembaga	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	3 kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	414 Lembaga	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	157 Lembaga	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	195 Lembaga	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	197 Lembaga	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	364 Lembaga	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	488 Lembaga	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	217 Lembaga	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	168 Lembaga	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	220 Lembaga	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	460 Lembaga	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	430 Lembaga	Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	200 Lembaga	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	347 Lembaga	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	377 Lembaga	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	226 Lembaga	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	488 Lembaga	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	259 Lembaga	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	627 Lembaga	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	636 Lembaga	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	356 Lembaga	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	439 Lembaga	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	323 Lembaga	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	749 Lembaga	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	371 Lembaga	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	366 Lembaga	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	185 Lembaga	Kecamatan Tenggiling Mejoyo	Kec. Tenggiling Mejoyo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Tenggiling Mejoyo	Kec. Tenggiling Mejoyo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	211 Lembaga	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	280 Lembaga	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	574 Lembaga	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
				Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	5 Kelurahan	Kec. Krembangan
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
				Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	kecamatan asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Benowo	Kec. Benowo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 Lembaga	Kantor Kecamatan Bulak	Kec. Bulak
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	Kantor Kecamatan Gayungan	Kec. Gayungan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kota Surabaya	Kec. Gayungan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Genteng	Kec. Genteng
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Genteng	Kec. Genteng

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	6 lembaga	Kantor Kecamatan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	Wilayah Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	6 lembaga	Kantor Kecamatan Krembangan dan Kelurahan se Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Pakal	Kec. Pakal
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Rungkut	Kec. Rungkut
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	6 lembaga	Kantor Kecamatan Sawahan	Kec. Sawahan
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Semampir	Kec. Semampir
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	120 Kali	Kantor Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Simokerto	Kec. Simokerto
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	6 lembaga	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Wilayah Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	6 lembaga	Kantor Kecamatan Tandes	Kec. Tandes
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Wiyung	Kec. Wiyung
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Wilayah Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 Lembaga	Kantor Kecamatan Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	Kantor Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	4 lembaga	Kantor Kecamatan Wonokromo	Kec. Wonokromo
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Bagian Administrasi Kerjasama
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Hukum	Bagian Hukum
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Bagian Umum Dan Protokol
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Sosial	Dinas Sosial
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Inspektorat	Inspektorat
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kecamatan Benowo	Kec. Benowo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Bulak	Kec. Bulak
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Genteng	Kec. Genteng
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	kantor kecamatan krembangan	Kec. Krembangan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Pakal	Kec. Pakal
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Semampir	Kec. Semampir
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Tandes	Kec. Tandes
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
					Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	100%	Kantor Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Bagian Administrasi Kerjasama
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Hukum	Bagian Hukum

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	Kantor Bagian Umum dan Protokol	Bagian Umum dan Protokol
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Sosial	Dinas Sosial
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Inspektorat	Inspektorat
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Asemrowo	Kec. Asemrowo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Benowo	Kec. Benowo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Bubutan	Kec. Bubutan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Bulak	Kec. Bulak
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Gayungan	Kec. Gayungan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Genteng	Kec. Genteng
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Gubeng	Kec. Gubeng
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Jambangan	Kec. Jambangan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Karangpilang	Kec. Karangpilang
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Kenjeran	Kec. Kenjeran
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kecamatan Krembangan	Kec. Krembangan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Mulyorejo	Kec. Mulyorejo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Pabean Cantian	Kec. Pabean Cantian

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Pakal	Kec. Pakal
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Rungkut	Kec. Rungkut
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Sawahan	Kec. Sawahan
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Semampir	Kec. Semampir
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Simokerto	Kec. Simokerto
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Sukolilo	Kec. Sukolilo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Tandes	Kec. Tandes
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Wiyung	Kec. Wiyung
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Wonocolo	Kec. Wonocolo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Kec. Wonokromo	Kec. Wonokromo
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
					Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	Kantor Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9 BUMD	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah serta Kantor 9 BUMD	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
				Program Penataan Daerah Otonom	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta 31 kecamatan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Evaluasi Perkembangan Kelurahan	1 kali	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kelurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	720 kali	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	115 objek	Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	16 kali	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gedung pertemuan di Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	185 lembaga	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
					Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
				Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	254 lembaga	Kantor Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah terkait	Bagian Organisasi
					Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	1 dokumen	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	1 dokumen	Kantor Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
					Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	155 POS	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Organisasi
					Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	Unit Pelayanan di Kota Surabaya, Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya atau gedung pertemuan lainnya	Bagian Organisasi
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Evaluasi Produk Hukum Daerah	12 dokumen	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Bagian Hukum
					Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	65 permasalahan hukum	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Bagian Hukum
					Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	70 rancangan produk hukum	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Bagian Hukum
					Publikasi Produk Hukum	70 produk hukum	Kantor Bagian Hukum, Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Hukum
				Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	Lokasi Aktivitas Walikota dan Wakil Walikota	Bagian Umum Dan Protokol

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat	2 dokumen	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	1 dokumen	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
					Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	1 dokumen	Kota Surabaya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	2298 kali	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	89 kali	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
					Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	9 dokumen	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Bagian Hubungan Masyarakat
				Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	16 dokumen	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
					Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	72 lembaga	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
					Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	6 sistem	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
					Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	6 dokumen	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Bagian Administrasi Pembangunan
				Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	7 Lembaga	Kelurahan Asem Rowo	Kec. Asemrowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	4 Lembaga	Kelurahan Genting Kalianak	Kec. Asemrowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	6 Lembaga	Kelurahan Tambak Sarioso	Kec. Asemrowo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	9 Lembaga	Kelurahan Kandangan	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	3 Lembaga	Kelurahan Romokalisari	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	7 Lembaga	Kelurahan Sememi	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	4 Lembaga	Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Kec. Benowo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	6 Lembaga	Kelurahan Alun-alun Contong	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	9 Lembaga	Kelurahan Bubutan	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	11 Lembaga	Kelurahan Gundih	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	8 Lembaga	Kelurahan Jepara	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Dukuh	12 Lembaga	Kelurahan Tembok Dukuh	Kec. Bubutan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	7 Lembaga	Kelurahan Bulak	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	3 Lembaga	Kelurahan Kedung Cowek	Kec. Bulak

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	3 Lembaga	Kelurahan Kenjeran	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	7 Lembaga	Kelurahan Sukolilo Baru	Kec. Bulak
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	6 Lembaga	Kelurahan Dukuh Kupang	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	5 Lembaga	Kelurahan Dukuh Pakis	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	6 Lembaga	Kelurahan Gunung Sari	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	7 Lembaga	Kelurahan Pradah Kalikendal	Kec. Dukuh Pakis
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	9 Lembaga	Kelurahan Dukuh Menanggal	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	4 Lembaga	Kelurahan Gayungan	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	8 Lembaga	Kelurahan Ketintang	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	6 Lembaga	Kelurahan Menanggal	Kec. Gayungan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	4 Lembaga	Kelurahan Embong Kaliasin	Kec. Genteng

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	11 Lembaga	Kelurahan Genteng	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	12 Lembaga	Kelurahan Kapasari	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	8 Lembaga	Kelurahan Ketabang	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	15 Lembaga	Kelurahan Peneleh	Kec. Genteng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	8 Lembaga	Kelurahan Airlangga	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	8 Lembaga	Kelurahan Baratajaya	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	3 Lembaga	Kelurahan Gubeng	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	11 Lembaga	Kelurahan Kertajaya	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	12 Lembaga	Kelurahan Mojo	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	8 Lembaga	Kelurahan Pucang Sewu	Kec. Gubeng
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	8 Lembaga	Kelurahan Gunung Anyar	Kec. Gunung Anyar

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	8 Lembaga	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	4 Lembaga	Kelurahan Rungkut Menanggal	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	9 Lembaga	Kelurahan Rungkut Tengah	Kec. Gunung Anyar
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	7 Lembaga	Kelurahan Jambangan	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	12 Lembaga	Kelurahan Karah	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	3 Lembaga	Kelurahan Kebonsari	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	4 Lembaga	Kelurahan Pagesangan	Kec. Jambangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	4 Lembaga	Kelurahan Karang Pilang	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	12 Lembaga	Kelurahan Kebraon	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	11 Lembaga	Kelurahan Kedurus	Kec. Karangpilang
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	3 Lembaga	Kelurahan Waru Gunung	Kec. Karangpilang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	8 Lembaga	Kelurahan Bulak Banteng	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	2 Lembaga	Kelurahan Sidotopo Wetan	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	5 Lembaga	Kelurahan Tambak Wedi	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	10 Lembaga	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Kec. Kenjeran
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	5 Lembaga	Kelurahan Dupak	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	8 Lembaga	Kelurahan Kemayoran	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	13 Lembaga	Kelurahan Krembangan Selatan	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	8 Lembaga	Kelurahan Morokrembangan	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	7 Lembaga	Kelurahan Perak Barat	Kec. Krembangan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	5 Lembaga	Kelurahan Bangkingan	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	3 Lembaga	Kelurahan Jeruk	Kec. Lakarsantri

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	4 Lembaga	Kelurahan Lakarsantri	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	7 Lembaga	Kelurahan Lidah Kulon	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	5 Lembaga	Kelurahan Lidah Wetan	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	3 Lembaga	Kelurahan Sumurwelut	Kec. Lakarsantri
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	10 Lembaga	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	10 Lembaga	Kelurahan Kalijudan	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	8 Lembaga	Kelurahan Kalisari	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	4 Lembaga	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	13 Lembaga	Kelurahan Manyar Sabrangan	Kec. Mulyorejo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	11 Lembaga	Kelurahan Mulyorejo	Kec. Mulyorejo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	10 Lembaga	Kelurahan Bongkaran	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	10 Lembaga	Kelurahan Krembangan Utara	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	8 Lembaga	Kelurahan Nyamplungan	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	9 Lembaga	Kelurahan Perak Timur	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	10 Lembaga	Kelurahan Perak Utara	Kec. Pabean Cantian
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	10 Lembaga	Kelurahan Babat Jerawat	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	5 Lembaga	Kelurahan Benowo	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	6 Lembaga	Kelurahan Pakal	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	8 Lembaga	Kelurahan Sumber Rejo	Kec. Pakal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	13 Lembaga	Kelurahan Kalirungkut	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	10 Lembaga	Kelurahan Kedung Baruk	Kec. Rungkut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	15 Lembaga	Kelurahan Medokan Ayu	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringan Sari	15 Lembaga	Kelurahan Penjaringan Sari	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	12 Lembaga	Kelurahan Rungkut Kidul	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	11 Lembaga	Kelurahan Wonorejo	Kec. Rungkut
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	4 Lembaga	Kelurahan Bringin	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	12 Lembaga	Kelurahan Lontar	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	7 Lembaga	Kelurahan Made	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	7 Lembaga	Kelurahan Sambikerep	Kec. Sambikerep
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	9 Lembaga	Kelurahan Banyu Urip	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	7 Lembaga	Kelurahan Kupang Krajan	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	12 Lembaga	Kelurahan Pakis	Kec. Sawahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	18 Lembaga	Kelurahan Petemon	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	14 Lembaga	Kelurahan Putat Jaya	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	10 Lembaga	Kelurahan Sawahan	Kec. Sawahan
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	17 Lembaga	Kelurahan Ampel	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	11 Lembaga	Kelurahan Pegirian	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	11 Lembaga	Kelurahan Sidotopo	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	14 Lembaga	Kelurahan Ujung	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	16 Lembaga	Kelurahan Wonokusumo	Kec. Semampir
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	10 Lembaga	Kelurahan Kapasan	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	7 Lembaga	Kelurahan Sidodadi	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	14 Lembaga	Kelurahan Simokerto	Kec. Simokerto

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	10 Lembaga	Kelurahan Simolawang	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	11 Lembaga	Kelurahan Tambakrejo	Kec. Simokerto
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	7 Lembaga	Kelurahan Gebang Putih	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	5 Lembaga	Kelurahan Keputih	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	9 Lembaga	Kelurahan Klampis Ngasem	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	9 Lembaga	Kelurahan Medokan Semampir	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	9 Lembaga	Kelurahan Menur Pumpungan	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	9 Lembaga	Kelurahan Nginden Jangkungan	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	13 Lembaga	Kelurahan Semolowaru	Kec. Sukolilo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	4 Lembaga	Kelurahan Putat Gede	Kec. Sukomanunggal

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	7 Lembaga	Kelurahan Simomulyo	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	10 Lembaga	Kelurahan Simomulyo Baru	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	4 Lembaga	Kelurahan Sonokwijenan	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	5 Lembaga	Kelurahan Sukomanunggal	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	4 Lembaga	Kelurahan Tanjungsari	Kec. Sukomanunggal
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	5 Lembaga	Kelurahan Dukuh Setro	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	11 Lembaga	Kelurahan Gading	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	9 Lembaga	Kelurahan Kapasmadya Baru	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	11 Lembaga	Kelurahan Pacarkeling	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	11 Lembaga	Kelurahan Pacarkembang	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	11 Lembaga	Kelurahan Ploso	Kec. Tambaksari

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	9 Lembaga	Kelurahan Rangkah	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	9 Lembaga	Kelurahan Tambaksari	Kec. Tambaksari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	7 Lembaga	Kelurahan Balongsari	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	4 Lembaga	Kelurahan Banjar Sugihan	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	9 Lembaga	Kelurahan Karang Poh	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	14 Lembaga	Kelurahan Manukan Kulon	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	6 Lembaga	Kelurahan Manukan wetan	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	9 Lembaga	Kelurahan Tandes	Kec. Tandes
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	14 Lembaga	Kelurahan Dr. Soetomo	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	10 Lembaga	Kelurahan Kedungdoro	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	6 Lembaga	Kelurahan Keputran	Kec. Tegalsari

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	6 Lembaga	Kelurahan Tegalsari	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	11 Lembaga	Kelurahan Wonorejo	Kec. Tegalsari
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	5 Lembaga	Kelurahan Kendangsari	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	6 Lembaga	Kelurahan Kutisari	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	8 Lembaga	Kelurahan Panjang Jiwo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	6 Lembaga	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Kec. Tenggilis Mejoyo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	8 Lembaga	Kelurahan Babatan	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	9 Lembaga	Kelurahan Balas Klumprik	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	5 Lembaga	Kelurahan Jajar Tunggal	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	11 Lembaga	Kelurahan Wiyung	Kec. Wiyung
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	13 Lembaga	Kelurahan Bendul Merisi	Kec. Wonocolo

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	9 Lembaga	Kelurahan Jemur Wonosari	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	10 Lembaga	Kelurahan Margorejo	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	6 Lembaga	Kelurahan Sidosermo	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	7 Lembaga	Kelurahan Siwalankerto	Kec. Wonocolo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	11 Lembaga	Kelurahan Darmo	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	11 Lembaga	Kelurahan Jagir	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	5 Lembaga	Kelurahan Ngagel	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	12 Lembaga	Kelurahan Ngagel Rejo	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	12 Lembaga	Kelurahan Sawunggaling	Kec. Wonokromo
					Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	9 Lembaga	Kelurahan Wonokromo	Kec. Wonokromo
			Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	43 Bangunan	Bangunan Kantor Pemerintahan serta Pelayanan Publik yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	300 bangunan	Gedung Pemerintah yang perlu dilakukan pemeliharaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	39 Dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan kompetensi ASN	Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	Pelaksanaan Asesmen Pegawai	5 kali	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	2 jenis	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	2 jenis	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	2 jenis	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	3 materi	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
				Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1005 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penataan Administrasi Kepegawaian	8437 berkas	Badan Kepegawaian dan Diklat	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	118 berkas	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pengelolaan Disiplin Pegawai	596 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
				Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pengelolaan Data Pegawai	8326 data	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Pengembangan Wawasan Aparatur	365 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Penilaian Kinerja Pegawai	7226 orang	BKD	Badan Kepegawaian dan Diklat
					Seleksi Penerimaan ASN	4 tahap	surabaya	Badan Kepegawaian dan Diklat
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan	Layanan Informasi Kearsipan	40 kali	Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Taman dan Gedung Kota Surabaya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	11000 pelaku usaha	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	60000 berkas	Kantor pelayanan perizinan terpadu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	2 kali	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	5 kali	Kota Surabaya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	52 kali	Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	15 item	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Depo Arsip Balas Klumprik dan Dukuh Kupang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	255 berkas	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Operasional UPTD Metrologi legal	16 Jenis	Kantor UPTD Metrologi Legal	Dinas Perdagangan
					Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	24570 unit	Lokasi UTTP, Kantor UPTD Metrologi Legal, dan Pasar/Kecamatan	Dinas Perdagangan
					Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	4500 unit	Tempat usaha yang menggunakan peralatan UTTP	Dinas Perdagangan
				Program Pelayanan Perizinan Konstruksi	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	700 berkas	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	104682 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	3250 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	200000 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	398986 berkas	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	40930 berkas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	7169 berkas	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	50 berkas	Kota Surabaya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	1000 berkas	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Dinas Tenaga Kerja
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	100 izin	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
					Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	2.000 berkas	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
					Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	100 izin	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	400 berkas	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha jasa dan sarana pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	169 berkas	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha rekreasi dan hiburan umum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	400 berkas	Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
					Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	1552 Lembaga	Wilayah-wilayah perdagangan di Kota Surabaya	Dinas Perdagangan
				Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	180 rekomendasi	Kota Surabaya	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	2 kali	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pembinaan Penataan Kearsipan	Pembinaan Sistem Kearsipan	130 lembaga	Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	399 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	72 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	15 aplikasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	165 Aplikasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Pemutakhiran Data Kependudukan	146684 data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8 sistem	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	Penyusunan Data Statistik Daerah	1 dokumen	Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	3000 berkas	Wilayah pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Saluran Komunikasi	19 Saluran	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	11 kali	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	5 dokumen	Wilayah Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	4 Jenis	instansi pemerintah penyelenggara event, OPD Pemerintah Kota Surabaya penyelenggara event, Studio Radio di wilayah administratif Kota Surabaya, Studio Televisi yang memiliki jangkauan bisa diakses masyarakat surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	1389 unit	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pembangunan Sarana Prasarana TIK	136 lokasi	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	4 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	100 persen	Kota Surabaya	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Pengelolaan Pusat Data	2 Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	4 Jenis	Kota Surabaya	Dinas Perhubungan
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	12 dokumen	kantor BPKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	5 dokumen	kantor BPKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Bagian Umum Dan Protokol
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor Inspektorat	Inspektorat
					Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	2 dokumen	Inspektorat Kota Surabaya	Inspektorat
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	RSUD Bhakti Dharma Husada
					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. Mohamad Soewandhie
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	9 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	6 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	1 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	12 kali	Kecamatan, Puskesmas, lokasi-lokasi tertentu terkait Forum Kota Sehat di Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / Ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	2 dokumen	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Badan Perencanaan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	4 dokumen	Bappeko	Badan Perencanaan Pembangunan
				Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	17 data urusan	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Badan Perencanaan Pembangunan
			Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	34900 objek pajak	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	6555 objek pajak	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	695022 objek pajak	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
				Program Perencanaan Anggaran Daerah	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	4 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	5 Laporan	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
				Program Penagihan Pajak Daerah	Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPI dan Parkir	7201 berkas	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	11224 berkas	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	196762 berkas	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	72000 berkas	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	245 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
					Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	22 dokumen	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD	Fasilitasi Reses DPRD	3 kali	Daerah Pemilihan masing masing anggota DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	Lokasi Tujuan Kunjungan Kerja di Jawa Timur, luar Jawa Timur, luar negeri	Sekretariat DPRD
					Penerimaan Studi Banding	240 kali	Gedung DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Pengendalian Keamanan	264 kali	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Publikasi Kegiatan DPRD	5 media	Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya, media cetak, media on line, media radio, media televisi dan media majalah	Sekretariat DPRD
				Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38 kali	Wilayah Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur	Sekretariat DPRD
				Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD	Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
					Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	930 kali	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR 2021	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA 2021	SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	TARGET	LOKASI	PERANGKAT DAERAH
					Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	45 kali	Kantor DPRD Kota Surabaya	Sekretariat DPRD
			Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	12 dokumen	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Inspektorat
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	50 kali	Inspektorat	Inspektorat
					Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan	Inspektorat	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	35 lembaga	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	18 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn I	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	35 lembaga	Perangkat Daerah / Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irbn II	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	18 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn II	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	35 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn III	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	18 lembaga	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irbn III	Inspektorat
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	35 lembaga	Perangkat Daerah/Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan Wilayah Kerja Irbn 4	Inspektorat
					Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	18 lembaga	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irbn IV	Inspektorat

Tabel V.2
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Urusan Pemerintahan				5.673.615.736.277	5.881.004.631.144	
1.1	Urusan Wajib				5.633.868.319.890	5.839.709.694.135	
1.1.1	Pelayanan Dasar				3.936.431.075.744	4.072.898.280.304	
1.1.1.1	Pendidikan				1.013.474.089.998	1.047.539.162.133	
1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A	87,10%	137.287.926.909	141.369.967.771	
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	89,66%			
			Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	91,37%			
			Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	74,50%			
			Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	79,75%			
			Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional	0,20%			
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	2,00%			
			Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	4,50%			
			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46,12%			
1.1.1.01.01.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	TPA/TPQ hasil verifikasi dari Kemenag	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu	13000 orang	54.155.601.002	55.780.067.515	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0002	Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2 kali	358.081.942	361.776.346	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	PKBM yang ditunjuk	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan	34 lembaga	4.483.419.551	4.631.154.477	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0004	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	289 lembaga	353.953.342	358.030.288	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0011	Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	4 PKBM	Jumlah SKB yang mendapatkan peningkatan sarana	4 lembaga	802.729.000	826.810.868	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0005	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Seluruh lembaga sekolah di Kota Surabaya	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan	12 kali	2.514.862.431	2.589.767.047	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0006	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga PAUD di Kota Surabaya	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1337 lembaga	4.272.330.790	4.393.452.659	Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.01.01.0007	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Lembaga PAUD di Kota Surabaya dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	12.010 orang	39.977.802.816	41.170.088.845	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Kota Surabaya dan Luar Kota Surabaya	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan	18 kali	2.415.734.412	2.481.797.786	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0009	Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	3 kali	27.607.797.623	28.420.632.574	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0010	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Lembaga PAUD penerima DAK PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	2 lembaga	118.800.000	122.770.947	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0012	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Kota Surabaya	Jumlah PAUD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana	2 lembaga	226.814.000	233.618.419	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02	Program Pengembangan Sekolah Dasar		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	100,00%	308.291.110.058	317.812.486.751	
			Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	93,19%			
			Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	0,15%			
1.1.1.01.02.0001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD negeri	SD Negeri di Kota Surabaya	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	301 lembaga	134.428.955.142	138.456.032.141	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Semua sekolah Dasar di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Sekolah	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD	93864 orang	499.349.808	507.365.046	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	SD Negeri di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	698 lembaga	151.735.807.340	156.280.495.105	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0004	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Kelas Layanan khusus dan Sekolah Inklusi serta Pusat Layanan Disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	73 lembaga	9.052.002.740	9.643.879.402	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang mengikuti akreditasi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	259 lembaga	336.405.238	339.110.940	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan Penyelenggara Pembelajaran dan Penilaian	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	669 lembaga	479.922.422	487.354.839	Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	SD Negeri di Kota Surabaya	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar	301 lembaga	7.947.900.576	8.178.951.138	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	SD Negeri dan SD Swasta di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5 kali	750.409.792	767.130.430	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0009	Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Lembaga SD Negeri Penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	10 lembaga	3.060.357.000	3.152.167.710	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03	Program Pengembangan Sekolah Menengah		Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	100,00%	159.127.802.335	164.046.878.384	
			Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	96,04%			
			Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	0,30%			
1.1.1.01.03.0001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	SMP Negeri di Kota Surabaya	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	63 lembaga	73.125.255.142	75.312.528.142	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Semua Sekolah Menengah di Kota Surabaya yang terdaftar sebagai penyelenggara Kegiatan Ujian Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah	40993 orang	367.359.165	371.148.285	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	317 lembaga	64.832.774.950	66.771.273.545	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0004	Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Seluruh Lembaga Sekolah dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	37 lembaga	7.898.767.668	8.327.702.343	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0005	Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	SMP di Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah	294 lembaga	448.824.142	455.816.812	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Kantor Dinas Pendidikan	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	245 lembaga	331.330.027	334.038.273	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0007	Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	SMP Negeri di Kota Surabaya	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah	63 lembaga	8.279.167.392	8.521.070.358	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0008	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali	2.080.159.849	2.136.211.706	Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.01.03.0009	Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Lembaga SMP Negeri Penerima DAK Fisik Sekolah Menengah	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga	1.764.164.000	1.817.088.920	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana		Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	100,00%	160.446.643.022	166.399.041.397	
1.1.1.01.04.0001	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya yang memerlukan rehab serta pembangunan baru	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	58 bangunan	117.599.157.789	121.260.115.338	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.04.0002	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Gedung Pendidikan milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara	160 bangunan	41.131.665.790	43.374.710.324	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.04.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun	27 dokumen	1.715.819.443	1.764.215.735	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Sekolah		Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	83,18%	101.586.402.748	110.119.450.369	
			Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	88,88%			
1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Dinas Pendidikan dan lembaga SD Negeri dan SMP Negeri pelaksana PPDB	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan	2 kali	1.723.892.872	1.768.785.403	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.05.0002	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	2567 lembaga	2.353.404.344	2.417.182.213	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.05.0003	Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Negeri	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	363 lembaga	97.509.105.532	105.933.482.753	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan		Persentase guru PAUD yang kompeten	100,00%	146.734.204.926	147.791.337.461	
			Persentase guru SD yang kompeten	100,00%			
			Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	100,00%			
			Persentase guru SMP yang kompeten	100,00%			
			Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	100,00%			
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	85,00%			
			Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	90,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	100,00%			
1.1.1.01.06.0001	Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan	1 kali	833.125.522	842.720.313	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0002	Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2031 orang	2.034.439.571	2.082.632.001	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0003	Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	957 lembaga	142.731.123.211	143.709.243.781	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.06.0004	Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Kantor Dinas Pendidikan, SD dan SMP di Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2 dokumen	1.135.516.622	1.156.741.366	Dinas Pendidikan
1.1.1.2	Kesehatan				1.053.448.943.772	1.085.560.064.483	
1.1.1.02.01	Program Jaminan Kesehatan		Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100,00%	206.403.458.670	212.592.941.192	
1.1.1.02.01.0001	Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	580000 orang	198.750.596.770	204.710.493.435	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.01.0002	Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (DBHCHT))	Puskesmas dan Jaringannya se-Kota Surabaya dan FKTL (fasilitas kesehatan tingkat lanjutan) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	328544 orang	7.652.861.900	7.882.447.757	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	100,00%	19.723.309.508	20.309.928.732	
1.1.1.02.02.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	90 jenis	17.458.956.508	17.977.645.146	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.02.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	18 jenis	2.264.353.000	2.332.283.586	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.03	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100,00%	36.174.798.660	37.260.042.619	
1.1.1.02.03.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan	2 jenis	36.174.798.660	37.260.042.619	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.04	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	100,00%	82.576.129.196	85.053.413.071	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.04.0001	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan	2 jenis	82.576.129.196	85.053.413.071	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.05	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	99,01%	21.160.775.913	22.181.336.426	
			Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100,00%			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	97,74%			
			Prevalensi balita gizi buruk	0,10%			
			Prevalensi balita gizi kurang	8,23%			
			Prevalensi balita stunting	8,89%			
1.1.1.02.05.0001	Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Puskesmas/Puskesmas Poned/RS Pemerintah/ RS TNI/POLRI	Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	691 kunjungan	3.433.898.000	3.536.914.936	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0002	Pelayanan kesehatan keluarga	Wilayah Kerja Puskesmas di Kota Surabaya	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga	64 Lembaga	12.684.642.004	13.252.070.141	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0003	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	375 orang	5.042.235.909	5.392.351.349	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06	Program Pencegahan dan Pengendalian		Cakupan imunisasi dasar lengkap	97,80%	31.465.937.076	32.428.767.339	
			Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100,00%			
			Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100,00%			
1.1.1.02.06.0001	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 lembaga	27.901.219.769	28.775.047.320	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0002	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	154 lembaga	2.782.007.527	2.856.794.824	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0003	Surveilans dan Imunisasi	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi	63 lembaga	782.709.780	796.925.195	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07	Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat		Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	100,00%	66.910.721.816	69.399.412.625	
			Persentase rumah sehat	86,44%			
			Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	84,90%			
1.1.1.02.07.0001	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan UPTD Gudang Farmasi	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan	64 lembaga	31.163.575.000	32.596.046.290	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0002	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	63 lembaga	20.191.455.733	20.792.270.565	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.07.0003	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 lembaga	11.336.729.785	11.671.902.838	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.07.0004	Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63 lembaga	4.218.961.298	4.339.192.932	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.08	Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	80,00%	21.328.176.793	21.968.022.087	
			Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	60,00%			
1.1.1.02.08.0001	Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	RSUD BDH	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan	75 kali	20.709.466.554	21.330.750.547	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0002	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan	115 kali	618.710.239	637.271.540	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.09	Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie		Persentase SDM RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	52,00%	33.707.942.159	34.719.180.418	
1.1.1.02.09.0001	Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan	4 jenis	671.893.860	692.050.673	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.09.0002	Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Eksternal dan Internal	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja	200 orang	33.036.048.299	34.027.129.745	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.10	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan		Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	100,00%	284.938.656.101	293.533.599.772	
1.1.1.02.10.0001	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Puskesmas/Puskesmas Pembantu serta RSUD yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi	11 bangunan	284.232.827.631	292.809.674.740	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.10.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	13 Dokumen	705.828.470	723.925.032	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.11	Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap		Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	98,07%	1.826.894.088	1.876.887.466	
1.1.1.02.11.0001	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	5442 sampel	1.826.894.088	1.876.887.466	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma		Average Length of Stay (AVLOS)	4 Hari	5.535.066.785	5.702.080.244	
			Bed Turn Over Ratio (BTO)	45 Kali			
			Turn Over Interval (TOI)	3 Hari			
1.1.1.02.12.0001	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	13514 orang	3.127.986.939	3.221.826.547	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.12.0002	Pelayanan Medik Rumah Sakit	RSUD Bhakti Dharma Husada dan domisili pasien RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik	2218 orang	2.407.079.846	2.480.253.697	RSUD Bhakti Dharma Husada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad		Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	1,00%	13.726.280.807	14.138.069.226	
			Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	1,00%			
1.1.1.02.13.0001	Pelayanan Gizi Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit	28340 orang	7.499.994.040	7.724.993.859	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.13.0002	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan	180 kali	674.080.925	694.303.351	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.13.0003	Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	RSUD dr. Moahamad Soewandhie	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan	155 kali	5.552.205.842	5.718.772.016	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	83,75%	27.901.306.904	28.900.087.301	
1.1.1.02.14.0001	Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	1 jenis	3.487.360.999	3.591.981.828	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.14.0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Seluruh Layanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1 aplikasi	557.762.612	569.624.969	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.14.0003	Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Seluruh Wilayah Kerja Puskesmas Kota Surabaya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	63 Lembaga	23.856.183.293	24.738.480.504	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	96,40%	33.721.872.505	34.733.528.671	
1.1.1.02.15.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	3 jenis	32.537.182.505	33.513.297.971	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.15.0002	Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	1 jenis	1.184.690.000	1.220.230.700	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	90,00%	42.211.244.050	43.477.581.369	
1.1.1.02.16.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	rsud bhakti dharma husada	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran	3 jenis	38.681.935.308	39.842.393.364	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.16.0002	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (DBHCHT)	RSUD BDH	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1 jenis	3.529.308.742	3.635.188.005	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.17	Program Standarisasi		Persentase puskesmas yang terakreditasi	100,00%	93.114.153.361	95.350.322.889	
1.1.1.02.17.0001	Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	13 Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	13 lembaga	1.067.297.000	1.099.315.907	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.17.0002	Pelayanan Kesehatan Primer	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	64 lembaga	89.589.640.806	91.690.990.244	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.02.17.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Rumah Sakit, Klinik Utama di Kota Surabaya	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi	134 lembaga	437.404.280	447.905.169	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.17.0004	Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	900 lokasi	1.384.240.708	1.462.996.731	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.17.0005	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Rumah ABK dan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	64 lembaga	635.570.567	649.114.838	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18	Program Sumber Daya Kesehatan		Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard	100,00%	31.022.219.380	31.934.863.036	
			Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	98,18%			
1.1.1.02.18.0001	Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 dokumen	259.234.708	261.366.511	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0002	Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Kantor Dinas Kesehatan dan Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan	27 kali	4.578.989.954	4.709.627.211	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0007	Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	Seluruh Wilayah Kerja 63 Puskesmas	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	3 item	605.619.000	623.787.568	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0003	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	50 jenis	21.285.759.717	21.918.687.265	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0004	Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan	2 item	3.602.763.000	3.710.845.890	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.18.0005	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	1 Jenis	689.853.001	710.548.591	Dinas Kesehatan
1.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.126.514.696.721	1.165.934.026.202	
1.1.1.03.01	Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur		Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	100,00%	1.663.811.340	1.730.324.674	
1.1.1.03.01.0001	Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Kota Surabaya	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang infrastruktur	180 rekomendasi	1.663.811.340	1.730.324.674	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02	Program Penataan Ruang		Indeks Pelayanan Tata Ruang	95,00%	13.340.006.479	14.201.242.440	
1.1.1.03.02.0001	Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Kota Surabaya	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen	2.359.597.841	2.535.707.206	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.02.0002	Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Kota Surabaya	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan	12250 Persil	6.743.778.732	7.231.467.053	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.03.02.0003	Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat	3 dokumen	3.045.561.173	3.185.694.369	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.02.0004	Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	9 Dokumen	1.191.068.733	1.248.373.812	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan		Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	15,48%	290.824.277.197	300.116.962.440	
			Persentase jaringan jalan yang terbangun	0,71%			
			Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	34,36%			
1.1.1.03.03.0001	Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	di wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen fasilitasi penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum	2 dokumen	293.924.659	295.323.461	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak	220 unit	28.695.421.239	29.627.716.911	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0004	Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun	24 lokasi	205.431.678.703	211.624.670.328	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.03.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	1466 lokasi	56.403.252.596	58.569.251.740	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU		Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	85,90%	278.284.754.500	286.855.630.559	
1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	4600 titik	135.698.174.531	139.755.320.559	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	6674 rekening	125.954.625.285	129.719.464.828	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah titik PJU yang dipelihara	73680 titik	16.631.954.684	17.380.845.172	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.1.03.05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota		Lama genangan	22,10 menit	505.537.571.958	524.874.526.112	
			Luas genangan	500 Ha			
			Tinggi genangan	12,10 cm			
1.1.1.03.05.0001	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Rumah pompa yang menyebar di Saluran primer dan sekunder di Kota Surabaya	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak	61 unit	62.139.546.810	64.059.013.348	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.05.0002	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	24 lokasi	254.874.688.244	262.532.633.793	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.05.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025 lokasi	188.523.336.904	198.282.878.971	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.06	Program Pengendalian Bidang Bangunan		Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	60,79%	3.897.800.495	4.076.676.974	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100,00%			
1.1.1.03.06.0001	Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Kota Surabaya	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	7169 data	1.246.201.688	1.318.447.889	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.06.0002	Pengawasan Bangunan	Kota Surabaya	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	300 lokasi	1.939.308.330	2.030.086.908	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.06.0003	Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	Kota Surabaya	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 dokumen	712.290.477	728.142.177	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07	Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan		Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	100,00%	15.235.760.540	15.747.407.968	
1.1.1.03.07.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	12 dokumen	9.347.391.663	9.650.526.144	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.07.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	37 dokumen	5.888.368.877	6.096.881.824	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.08	Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan		Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	100,00%	16.118.226.922	16.662.348.691	
1.1.1.03.08.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Saluran primer, sekunder dan tersier di Kota Surabaya	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	22 dokumen	9.051.344.242	9.351.865.687	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.08.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Kantor Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	52 dokumen	7.066.882.680	7.310.483.004	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.09	Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas		Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100,00%	1.612.487.290	1.668.906.344	
1.1.1.03.09.0001	Fasilitasi Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Menyebar di 31 Kecamatan Wilayah Kota Surabaya	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10 izin	1.612.487.290	1.668.906.344	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.4	Perumahan dan Kawasan				492.593.306.860	509.737.653.377	
1.1.1.04.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	75,00%	5.247.877.195	5.532.222.451	
1.1.1.04.01.0001	Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Kota Surabaya	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	7169 berkas	4.670.205.658	4.942.737.783	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0002	Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Kota Surabaya	jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	50 berkas	577.671.537	589.484.668	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.04.02	Program Pelayanan Perizinan Konstruksi		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	93,00%	359.659.595	378.646.674	
1.1.1.04.02.0001	Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	700 berkas	359.659.595	378.646.674	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.03	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung		Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	100,00%	189.868.955.339	196.479.054.031	
1.1.1.04.03.0002	Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Bangunan Kantor Pemerintahan serta Pelayanan Publik yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi	43 Bangunan	155.357.937.722	160.085.133.745	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.03.0003	Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Gedung Pemerintah yang perlu dilakukan pemeliharaan	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara	300 bangunan	32.002.253.646	33.812.971.687	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah	39 Dokumen	2.508.763.971	2.580.948.599	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.04	Program Pengelolaan		Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	100,00%	28.457.263.374	29.874.154.213	
1.1.1.04.04.0001	Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Rumah Ber-SIP dan Rumah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah memiliki Izin Pemakaian Rumah serta pengawasan dan pemanfaatan rumah susun	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3981 lokasi	8.883.587.128	9.176.594.842	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.04.0002	Pengelolaan Rumah Susun	Rusunawa Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105 blok	19.573.676.246	20.697.559.371	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.05	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	73,80%	268.659.551.357	277.473.576.008	
			Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	50,83%			
1.1.1.04.05.0001	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	149 lokasi	164.410.749.404	169.444.049.279	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0003	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Kota Surabaya	Jumlah rumah yang dibangun	7 bangunan	73.508.921.594	75.722.005.512	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0004	Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi	200 Lokasi	22.629.429.431	23.922.022.576	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.05.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	173 dokumen	6.138.520.689	6.361.199.467	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.04.05.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Kota Surabaya	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan yang disusun	16 dokumen	1.971.930.239	2.024.299.174	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				149.833.752.750	159.384.867.514	
1.1.1.05.01	Program Kesatuan Bangsa		Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	80,00%	1.797.346.318	1.835.412.221	
1.1.1.05.01.0001	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kota Surabaya	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan	750 orang	372.491.999	378.701.039	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.01.0002	Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	Kota Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	31 lembaga	361.273.594	365.374.844	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.01.0003	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 kali	1.063.580.725	1.091.336.338	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02	Program Penanganan Strategis Gangguan		Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	100,00%	5.509.205.444	5.657.273.006	
1.1.1.05.02.0001	Kerjasama pengendalian keamanan kota	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota	194 kali	4.696.100.788	4.827.495.327	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0002	Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota	54 kali	813.104.656	829.777.679	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana Alam		Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	100,00%	4.602.942.550	4.831.934.610	
1.1.1.05.03.0001	Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Kantor BPB Linmas	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	8 jenis	283.769.202	287.617.544	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0002	Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana	Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, Gedung pertemuan lainnya	jenis kejadian bencana yang manajemen tanggap bencanaanya dikembangkan	10 Jenis	2.937.025.152	3.125.369.162	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	31 Kecamatan	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100%	1.382.148.196	1.418.947.904	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.04	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran		Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	50,5	44.010.923.279	47.046.004.906	
			Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100,00%			
1.1.1.05.04.0001	Operasional Pemadaman Kebakaran	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	832 orang	39.950.923.282	42.902.856.616	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.04.0002	Pengendalian Bahaya Kebakaran	Sekolah, Puskesmas, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan	62 kali	1.723.067.873	1.748.543.895	Dinas Pemadam Kebakaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.04.0003	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Gedung Diklat / Instansi, Sentra Wisata Kuliner dan Pasar	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat	60 kali	2.336.932.124	2.394.604.395	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.05	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Persentase kelurahan tangguh bencana	100,00%	2.140.496.104	2.213.444.458	
1.1.1.05.05.0001	Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	Gedung Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	1650 orang	1.591.544.853	1.654.812.952	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.05.0002	Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Gedung Pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya dan Kelurahan di Kota Surabaya	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	500 orang	548.951.251	558.631.506	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.06	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi		Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	1.797.518.689	1.853.153.619	
1.1.1.05.06.0001	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	480 kali	1.797.518.689	1.853.153.619	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.07	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah		Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	1.893.954.795	1.935.148.779	
1.1.1.05.07.0001	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	192 Kali	947.531.391	969.724.713	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.07.0002	Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Gedung Instansi Pemerintah dan 31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah penindakan pelanggaran Perda	84 Kali	946.423.404	965.424.066	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.08	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial		Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100,00%	34.390.197.894	36.899.420.834	
1.1.1.05.08.0001	Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1368 kali	29.487.010.286	31.914.433.362	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.08.0002	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	31 Kecamatan Kota Surabaya	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	1368 Kali	4.903.187.608	4.984.987.472	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.09	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja		Persentase aparat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	100,00%	1.809.342.994	1.837.323.120	
1.1.1.05.09.0001	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	96 kali	505.395.915	507.337.916	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.09.0002	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Taman Surya dan fasilitas olahraga di wilayah Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	228 Kali	1.303.947.079	1.329.985.204	Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.05.10	Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat		Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	77,72%	38.600.630.140	41.602.502.720	
1.1.1.05.10.0001	Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Tempat pelatihan militer	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat	100 orang	339.145.243	345.856.685	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.10.0002	Pembinaan Potensi Masyarakat	Balai Kota Surabaya, Taman Makam Pahlawan	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat	81 kali	1.088.036.181	1.114.434.027	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.10.0003	Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat serta seluruh wilayah Kota Surabaya	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	793 orang	37.173.448.716	40.142.212.008	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.11	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran		Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	83,00%	13.281.194.543	13.673.249.241	
1.1.1.05.11.0001	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	210 unit	3.101.717.123	3.195.654.498	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.11.0002	Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Bangunan gedung di Kota Surabaya	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	400 bangunan	786.152.740	807.394.581	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.05.11.0003	Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Kantor Dinas Kebakaran Kota Surabaya dan Rayon I s/d Rayon V	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	764 unit	9.393.324.680	9.670.200.162	Dinas Pemadam Kebakaran
1.1.1.6	Sosial				100.566.285.643	104.742.506.595	
1.1.1.06.01	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah		Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	100,00%	5.021.103.696	5.316.028.234	
			Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	50,00%			
1.1.1.06.01.0001	Fasilitasi Pemakaman	31 Kecamatan	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitasi Pemakaman	960 Orang	957.949.739	984.236.109	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0002	Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	31 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan	24 Kali	1.309.681.835	1.371.402.445	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0003	Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	31 Kecamatan	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan	4416 Kali	2.753.472.122	2.960.389.680	Dinas Sosial
1.1.1.06.02	Program Partisipasi Keagamaan		Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	100,00%	15.688.861.387	16.164.697.034	
1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Gedung milik Pemerintah Kota, Gedung Tempat Ibadah, dan 31 Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102 kali	15.688.861.387	16.164.697.034	Dinas Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.06.03	Program Partisipasi Kepahlawanan		Persentase lembaga/organisasi/kelompok keahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan keahlawanan	100,00%	7.647.000.092	7.951.446.319	
1.1.1.06.03.0001	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial keahlawanan	31 kecamatan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial keahlawanan	62 kali	6.043.638.975	6.233.832.228	Dinas Sosial
1.1.1.06.03.0002	Pemeliharaan TMP dan MPN	TMP Kusuma Bangsa, TMP Ngagel, TMP 10 Nopember, MPN WR. Soepratman, MPN Dr. Soetomo, MPN Bung Tomo, MPN KH. Mas Mansyur	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	7 lokasi	1.603.361.117	1.717.614.091	Dinas Sosial
1.1.1.06.04	Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi		Persentase pemulangan PMKS	35,00%	35.959.613.840	37.732.069.679	
			Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	100,00%			
1.1.1.06.04.0001	Pembinaan dan Pemulangan PMKS	Kantor Dinas Sosial, UPTD Dinas Sosial dan Luar Kota Surabaya	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan	1420 orang	2.434.223.406	2.560.741.218	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0002	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	31 Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 kali	941.671.316	975.791.549	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0003	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	31 Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 kali	982.721.352	1.021.703.548	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0004	Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	31 Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12 kali	1.021.146.599	1.054.234.981	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0005	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Kantor UPTD Babat Jerawat Jalan Raya Babat Jerawat Nomor 139 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	95 orang	1.465.969.646	1.526.908.190	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0006	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Kantor UPTD Griya Werdha Jalan Jambangan Baru Tol Nomor 15 A Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	160 orang	5.977.249.839	6.324.616.923	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Kantor UPTD Kampung Anak Negeri Jalan Wonorejo Timur Nomor 130 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45 orang	2.430.983.002	2.554.677.006	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Kantor UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Jalan Keputih tegal No.32 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1100 orang	17.363.650.045	18.215.133.503	Dinas Sosial

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.1.06.04.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Kantor UPTD Pondok Sosial Kalijudan Jalan Villa Kalijudan Indah 15 Kavling 2-4 Surabaya	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	2.582.571.082	2.717.784.198	Dinas Sosial
1.1.1.06.04.0010	Peningkatan peran serta lanjut usia	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia	34 kali	759.427.553	780.478.563	Dinas Sosial
1.1.1.06.05	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan		Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	62,00%	816.053.590	835.698.603	
1.1.1.06.05.0001	Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Kota Surabaya	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan	17 lembaga	192.483.591	195.732.415	Dinas Sosial
1.1.1.06.05.0002	Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kantor Dinas Sosial dan Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan PSKS yang dibina	45 kali	623.569.999	639.966.188	Dinas Sosial
1.1.1.06.06	Program Pengendalian Layanan Sosial		Persentase data kesejahteraan sosial yang termanfaatkan	100,00%	3.424.457.495	3.634.737.499	
1.1.1.06.06.0001	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Masalah Sosial	31 kecamatan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4 kali	783.697.655	820.125.672	Dinas Sosial
1.1.1.06.06.0002	Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	31 Kecamatan	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154 Kelurahan	2.640.759.840	2.814.611.827	Dinas Sosial
1.1.1.06.07	Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak		Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	100,00%	32.009.195.543	33.107.829.227	
1.1.1.06.07.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	31 Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	842 Unit	32.009.195.543	33.107.829.227	Dinas Sosial
1.1.2	Non Pelayanan Dasar				1.697.437.244.146	1.766.811.413.831	
1.1.2.1	Tenaga Kerja				17.338.699.234	18.014.195.170	
1.1.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	80,00%	197.626.052	198.341.103	
1.1.2.01.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses	1000 berkas	197.626.052	198.341.103	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	7,77%	2.926.960.864	3.029.639.015	
1.1.2.01.02.0001	Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial	300 orang	809.951.970	836.879.736	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	448.798.511	469.434.854	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0003	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	300 lembaga	424.552.936	442.559.199	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0004	Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya	Pasar Sopotnyono, Pasar Balongsari, Pasar Wonokromo dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1.243.657.447	1.280.765.226	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5,20%	3.211.801.273	3.361.564.933	
1.1.2.01.03.0003	Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja	1050 orang	1.000.921.010	1.067.141.811	Dinas Tenaga Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.01.03.0004	Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha	50 orang	488.310.433	515.048.120	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0005	Fasilitasi Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja	Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Surabaya	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja	1000 orang	181.787.850	182.225.950	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0006	Pembinaan/Pelatihan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Calon Wirausaha Baru (DBHCHT)	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi perluasan kesempatan kerja	200 orang	518.240.241	533.787.443	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0001	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja (DBHCHT)	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek	80 lembaga	76.911.439	79.218.781	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0007	Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair (DBHCHT)	Gedung yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah even job fair yang diselenggarakan	7 kali	522.673.720	539.113.463	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0008	Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri	250 orang	422.956.581	445.029.366	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja		Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	77,00%	11.002.311.045	11.424.650.119	
			Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90,00%			
1.1.2.01.04.0002	Fasilitasi Magang bagi Pencari Kerja	Perusahaan di wilayah Kota Surabaya	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	120 orang	561.207.050	570.049.315	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0003	Fasilitasi Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	Tempat Uji Kompetensi yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi	604 orang	3.535.240.909	3.745.319.269	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0004	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja	976 orang	6.692.315.370	6.893.084.818	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0005	Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun	1 dokumen	213.547.716	216.196.717	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.10	Penanaman Modal				8.305.153.854	8.789.724.572	
1.1.2.10.01	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal		Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	42,00%	1.250.533.777	1.315.756.576	
1.1.2.10.01.0003	Pengelolaan Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya	Jumlah data investasi yang dikelola	45151 data	498.621.669	520.134.436	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.01.0001	Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	3500 perusahaan	751.912.108	795.622.140	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi		Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	24,00%	1.228.226.892	1.273.890.413	
1.1.2.10.02.0001	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kota Surabaya	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal	4 dokumen	633.123.488	657.677.343	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.10.02.0002	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Wilayah Jawa serta luar Jawa	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali	595.103.404	616.213.070	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal		Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	75,00%	5.826.393.185	6.200.077.583	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	80,00%			
1.1.2.10.03.0004	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Kota Surabaya	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 kali	16.385.765	16.877.334	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0005	Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Kota Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 pelaku usaha	1.055.545.601	1.099.437.998	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0006	Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Kantor pelayanan perizinan terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60000 berkas	4.719.393.075	5.047.641.446	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0007	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2 kali	11.772.125	12.125.288	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.10.03.0008	Penyampaian Informasi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Kota Surabaya	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	5 kali	23.296.619	23.995.517	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.1.2.11	Kepemudaan dan Olahraga				92.649.824.927	95.858.519.817	
1.1.2.11.01	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	154 kelurahan	57.006.106.332	59.163.061.120	
1.1.2.11.01.0001	Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	11 unit	10.377.758.650	11.151.709.068	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.01.0002	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	90 unit	29.850.329.883	30.740.597.178	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.01.0003	Penyediaan Sarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	6 jenis	765.599.529	785.461.584	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.01.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun	58 dokumen	2.805.195.641	2.886.245.579	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.01.0005	Perbaikan Prasarana Olahraga	Kota Surabaya	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	133 unit	13.207.222.629	13.599.047.711	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.11.02	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Akumulasi prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	1.690 medali	29.870.725.857	30.759.765.989	
1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	41 kali	21.940.113.924	22.595.258.888	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0002	Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional	25 kali	2.988.121.577	3.074.451.103	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0003	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	26 kali	1.506.297.475	1.551.980.851	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0004	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	10 kali	2.187.626.043	2.251.553.181	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.02.0005	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	29 kali	1.248.566.838	1.286.521.966	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.03	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	35,00%	3.740.128.177	3.846.106.850	
1.1.2.11.03.0001	Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Gedung Fasilitas Umum / Publik dan Gedung Milik Pemerintah	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	4820 peserta	1.505.733.576	1.547.680.946	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.03.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Gedung Instansi Pemerintah dan Gedung Fasilitas Umum / Publik	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	29 kali	2.234.394.601	2.298.425.904	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.04	Program Peningkatan Prestasi Pemuda		Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	12,00%	2.032.864.561	2.089.585.858	
			Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	30,00%			
1.1.2.11.04.0001	Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Rumah Kreatif Studio Musik Gelanggang Remaja	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif	710 orang	714.747.648	734.225.854	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.11.04.0002	Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Gedung Fasilitas Umum/Publik	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	1050 Orang	1.318.116.913	1.355.360.004	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
1.1.2.12	Kebudayaan				8.633.946.272	8.895.154.878	
1.1.2.12.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal		Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	100,00%	6.870.186.035	7.077.208.608	
			Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59,00%			
1.1.2.12.01.0001	Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Balai Budaya Surabaya, Balai Pemuda Surabaya, Ruang publik (taman, Jalan Tunjungan, dan Balai Pemuda)	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	440 kali	6.238.614.853	6.426.113.702	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.01.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali	396.081.138	405.504.753	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.12.01.0003	Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Taman - taman milik Pemerintah Kota Surabaya dan tempat - tempat usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring	14 lokasi	235.490.044	245.590.153	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.02	Program Perlindungan Budaya Lokal		Persentase cagar budaya yang terpelihara	91,69%	1.763.760.237	1.817.946.270	
1.1.2.12.02.0001	Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Kota Surabaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	250 lokasi	1.088.252.112	1.125.268.172	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.12.02.0002	Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jl. Tunjungan, Tempat Tempat Yang Berhubungan dengan Histori Kepahlawanan Arek Arek Surabaya, Obyek Obyek Bersejarah di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah	9 kali	675.508.125	692.678.098	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.13	Perpustakaan				27.665.245.601	29.684.743.132	
1.1.2.13.01	Program Pembinaan Layanan Baca		Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	51,60%	838.251.642	864.901.781	
1.1.2.13.01.0001	Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Gedung di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Perpustakaan Binaan, Yayasan, Perpustakaan Non Pemerintah dan Balai Pemuda	Jumlah layanan baca yang dilakukan pembinaan	500 lembaga	838.251.642	864.901.781	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.13.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan		Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	10,00%	22.257.625.999	24.113.847.124	
			Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	10,00%			
1.1.2.13.02.0001	Pengelolaan Layanan Baca	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda), Sekolah, Taman di Kota Surabaya, Balai RW, Kelurahan dan Kecamatan, Yayasan, Panti Asuhan, TK	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	21.616.220.472	23.462.425.372	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.13.02.0002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya, Taman Flora, Balai Pemuda, dan Lokasi pameran oleh Pemerintah Kota di wilayah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	239 kali	641.405.527	651.421.752	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.13.03	Program Peningkatan Minat dan Baca		Persentase penambahan koleksi buku	100,00%	4.569.367.960	4.705.994.227	
1.1.2.13.03.0001	Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Perpustakaan Umum Kota Surabaya (Rungkut dan Balai Pemuda) serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat	22460 Buku	4.569.367.960	4.705.994.227	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14	Kearsipan				3.964.424.774	4.156.683.431	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.14.01	Program Pembinaan Penataan Kearsipan		Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	100,00%	459.891.077	470.365.979	
1.1.2.14.01.0001	Pembinaan Sistem Kearsipan	Perangkat Daerah	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan	130 lembaga	459.891.077	470.365.979	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14.02	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	81,50	284.476.528	290.547.437	
1.1.2.14.02.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Kelurahan, Kecamatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Taman dan Gedung Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	284.476.528	290.547.437	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14.03	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	100,00%	3.220.057.169	3.395.770.015	
			Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	100,00%			
1.1.2.14.03.0001	Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	52 kali	2.118.029.152	2.267.048.546	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.14.03.0002	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Depo Arsip Balas Klumprik dan Dukuh Kupang	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	15 item	1.102.028.017	1.128.721.469	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.1.2.15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				17.738.967.344	18.816.117.486	
1.1.2.15.01	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro		Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	100,00%	6.589.839.609	6.992.105.615	
1.1.2.15.01.0001	Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Surabaya, Jawa Timur, Jakarta dan Luar Jawa	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	330 Orang	2.712.526.314	2.840.607.871	Dinas Perdagangan
1.1.2.15.01.0003	Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	Sentra Usaha Mikro Jahit Bukit Barisan, Sentra Usaha Alas Kaki dan Sleeper eks lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Design and Fashion Batik eks Lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Mikro Merr, Sentra Usaha Mikro Tunjungan, Stand Usaha Mikro KBS, Stand Usaha Mikro JMP, Stand Usaha Park and Ride, Surabaya North Quay, Stand Usaha Delta, Stand Usaha Bandara 2 Juanda dan Stand Usaha RSUD Bakti Dharma Husada	Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola	12 lokasi	3.753.327.295	4.023.792.166	Dinas Perdagangan
1.1.2.15.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan	11 Jenis	123.986.000	127.705.578	Dinas Perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.15.02	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro		Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	40,00%	995.521.651	1.046.245.636	
1.1.2.15.02.0002	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Kantor Dinas Koperasi	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	858 orang	995.521.651	1.046.245.636	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.03	Program Pengembangan Sentra Usaha		Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	63,00%	6.553.469.335	7.040.222.541	
1.1.2.15.03.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	di lokasi sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi	60 sentra usaha	3.943.621.431	4.239.584.012	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.03.0003	Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Sentra usaha yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan	49 sentra usaha	2.609.847.904	2.800.638.529	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.04	Program Pengembangan Usaha Koperasi		Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	80,00%	1.029.107.583	1.067.193.020	
1.1.2.15.04.0001	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	175 koperasi	611.749.583	637.314.288	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.04.0003	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Kota Surabaya	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	178 Orang	417.358.000	429.878.732	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.05	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi		Persentase koperasi berklasifikasi AAB	72,95%	2.060.148.525	2.148.018.029	
1.1.2.15.05.0001	Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi	50 kelompok	664.631.090	689.583.851	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.05.0002	Pengawasan Koperasi	Lokasi koperasi yang dimonitoring	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	629 koperasi	1.118.514.927	1.179.272.172	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.05.0003	Penilaian Kinerja Koperasi	Lokasi koperasi yang akan diperingkat dan Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya	35 koperasi	277.002.508	279.162.006	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.15.06	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro		Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	8,50%	510.880.641	522.332.645	
1.1.2.15.06.0001	Fasilitasi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan	175 orang	510.880.641	522.332.645	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
1.1.2.16	Statistik				291.944.327	301.532.902	
1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Data		Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	100,00%	291.944.327	301.532.902	
1.1.2.16.01.0001	Penyusunan Data Statistik Daerah	Surabaya	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun	1 dokumen	291.944.327	301.532.902	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				6.355.858.438	6.643.462.985	
1.1.2.02.01	Program Keadilan dan Kesenjangan Gender serta Pemberdayaan Perempuan		Persentase keluhan yang responsif gender	41,56%	2.347.248.299	2.425.440.490	
			Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.02.01.0001	Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Surabaya	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	29 kali	1.037.561.143	1.067.389.882	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	DP5A, Gedung Siola, Surabaya	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289 lembaga	955.644.809	988.850.569	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.01.0003	Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	354.042.347	369.200.039	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02	Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74,98%	4.008.610.139	4.218.022.495	
			Persentase kelurahan ramah anak	100,00%			
			Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%			
1.1.2.02.02.0001	Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Gedung Siola	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 orang	158.697.196	160.753.512	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Kota Surabaya	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga	835.604.853	878.036.691	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0003	Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	154 Kelurahan yang ada di kota Surabaya	Jumlah kampung Kampung Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung	582.367.914	596.578.752	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0004	Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Kota Surabaya	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus	1.125.788.642	1.189.266.672	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.02.02.0005	Penyelenggaraan Operasional Shelter	Shelter Laki-Laki : Jl. Gayung Kebonsari VIII/58 Shelter perempuan :Jl. Gayungsari Barat XII GA-GB 15	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	1.306.151.534	1.393.386.868	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.3	Pangan				3.004.234.138	3.129.101.805	
1.1.2.03.01	Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan		Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	63,60%	704.977.748	729.941.036	
1.1.2.03.01.0001	Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring	15 laporan	704.977.748	729.941.036	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.02	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan		Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	1,00	2.299.256.390	2.399.160.769	
			Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	89,75%			
			Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.03.02.0001	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa	2060 sampel	1.027.040.370	1.072.781.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.02.0002	Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	Putat Jaya Lebar B/27, Putat Jaya 2A/19 dan Cumpat No. 1A	Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan	11 kali	809.571.800	854.155.594	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.03.02.0003	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan	28 kali	462.644.220	472.223.675	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.4	Pertanahan				587.515.413.947	605.349.227.465	
1.1.2.04.01	Program Penanganan Sengketa Tanah dan		Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	100,00%	4.394.208.559	4.544.687.756	
1.1.2.04.01.0001	Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	12 Kasus	1.438.988.972	1.486.307.332	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0002	Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Wilayah Tanah Aset yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	18 obyek	1.437.321.873	1.483.829.552	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0003	Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	8 kali	1.517.897.714	1.574.550.872	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	17,07 Ha	259.437.256.967	267.246.089.318	
1.1.2.04.02.0001	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	JLLB, JLLT, Manukan Wonorejo, Candi Lontar, Prof. Dr. Moestopo	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	5 lokasi	259.437.256.967	267.246.089.318	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.2.04.03	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	48,05 Ha	307.341.789.088	316.588.573.141	
1.1.2.04.03.0001	Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Seluruh Wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	4 dokumen	5.204.882.991	5.391.361.962	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0002	Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan Non Infrastruktur	Kota Surabaya	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	4 lokasi	302.136.906.097	311.197.211.179	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.04	Program Pengamanan Aset		Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	39,74%	9.156.811.373	9.496.919.110	
			Persentase tanah aset yang tersertifikasi	45,29%			
1.1.2.04.04.0001	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan dan Sidoarjo)	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bidang	5.087.762.716	5.281.492.307	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.04.0002	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Kota Surabaya	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	1.220.990.885	1.264.059.032	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.04.04.0003	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Aset Tanah dan/atau Bangunan Milik Kota Surabaya baik yang berada di kota Surabaya maupun di luar kota Surabaya (Gresik, Pasuruan dan Sidoarjo)	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	75 dokumen	2.848.057.772	2.951.367.771	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.05	Program Pengamanan Aset Infrastruktur		Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya yang diamankan	3,50%	1.481.602.329	1.526.926.220	
1.1.2.04.05.0001	Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Kota Surabaya	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan	40 bidang	1.481.602.329	1.526.926.220	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.2.04.06	Program Pengelolaan Aset Tanah		Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	100,00%	5.703.745.631	5.946.031.920	
1.1.2.04.06.0001	Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Seluruh tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	7000 izin	2.425.492.868	2.525.881.421	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.06.0002	Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	1 dokumen	1.982.053.176	2.054.625.670	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.06.0003	Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Di Kota Surabaya	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8000 lokasi	1.296.199.587	1.365.524.829	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.5	Lingkungan Hidup				591.863.895.857	620.597.250.980	
1.1.2.05.01	Program Kebersihan		Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	85,95%	216.859.130.668	229.408.071.376	
1.1.2.05.01.0001	Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	9 wilayah rayon kebersihan Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Selatan 1, Rayon Selatan 2, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Barat	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan	104 Kegiatan	4.048.860.662	4.261.224.117	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0002	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	9 Wilayah Rayon Kebersihan: Rayon Pusat 1, Rayon Pusat 2, Rayon Timur 1, Rayon Timur 2, Rayon Barat, Rayon Utara 1, Rayon Utara 2, Rayon Selatan 1 dan Rayon Selatan 2	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	364 lokasi	109.583.312.934	117.291.362.441	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0003	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	saluran primer, sekunder, tersier dan rumah pompa di kota surabaya	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran	550 lokasi	22.400.230.504	24.118.714.204	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.01.0004	Operasional Pengangkutan Sampah	5 Wilayah pengangkutan sampah di Kota Surabaya: Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Utara dan Surabaya Selatan	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	80.826.726.568	83.736.770.614	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	80,00%	2.665.684.785	2.809.739.687	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.02.0001	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	100 izin	436.087.975	456.056.634	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.02.0002	Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan	2.000 berkas	1.615.109.869	1.708.094.128	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.02.0003	Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	100 izin	614.486.941	645.588.925	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	10,93%	5.632.833.680	5.828.660.539	
1.1.2.05.03.0001	Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Kota Surabaya	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	3 kali	5.632.833.680	5.828.660.539	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.04	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga		Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	85,00%	2.255.952.167	2.333.851.704	
1.1.2.05.04.0001	Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Kota Surabaya	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	400 Unit	2.255.952.167	2.333.851.704	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.05	Program Pengelolaan Air Limbah Kota		Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	100,00%	26.539.898.834	28.251.064.299	
1.1.2.05.05.0001	Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	Kota Surabaya	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi	7.294.477.369	7.627.386.698	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.05.0002	Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Kota Surabaya	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	39 lokasi	19.245.421.465	20.623.677.601	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.06	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya		Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	60,19%	19.718.222.645	20.730.039.257	
1.1.2.05.06.0001	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	Tahura Balas Klumprik, Tahura Pakal 1, Tahura Pakal 2, Tahura Sumurwelut 1, Tahura Sumurwelut 2, Tahura Sambikerep, Tahura Lempung (Herbal), Tahura Waru Gunung, SPT Jeruk, Kebun Raya Mangrove Wonorejo, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Kebun Anggrek Sememi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara	12 lokasi	19.718.222.645	20.730.039.257	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.1.2.05.07	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau		Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	10,24%	112.629.241.245	118.505.994.090	
1.1.2.05.07.0001	Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Taman dan jalur hijau yang tersebar di 31 kecamatan Kota Surabaya	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	425 lokasi	76.398.699.503	80.151.329.799	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.07.0002	Pengembangan Dekorasi Kota	Seluruh Wilayah Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	15 lokasi	11.653.224.116	12.142.062.576	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.07.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	Taman Kota yang Tersebar dan dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Jumlah taman yang dipelihara	39 lokasi	24.577.317.626	26.212.601.715	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.08	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah		Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	38,46%	10.362.226.983	10.694.024.252	
1.1.2.05.08.0001	Penanganan Limbah B3	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 Kegiatan	10.362.226.983	10.694.024.252	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.09	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan		Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	95,00%	4.088.819.743	4.271.592.826	
1.1.2.05.09.0001	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Lokasi IPAL Milik Pemerintah Kota Surabaya dan IPAL komunal	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	178 lokasi	367.508.976	379.621.296	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0002	Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	2 Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yakni Kebun Bibit Wonorejo dan Kantor Kelurahan Kebonsari	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak	365 data	1.127.556.284	1.169.167.674	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0003	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Perairan Pesisir di Kota Surabaya	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak	778 data	478.058.240	497.437.586	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0004	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Lokasi sumber dampak dan yang terdampak	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 obyek	597.113.968	621.696.638	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0005	Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Kegiatan usaha di Kota Surabaya yang menjadi target pengawasan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 lembaga	1.020.251.234	1.079.856.833	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.09.0006	Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	31 Titik/lokasi air badan air (184 Sampel) , 40 Titik/lokasi lokasi pengujian udara ambien di Kota Surabaya	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	224 sampel	498.331.041	523.812.799	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.10	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup		Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	100,00%	3.367.440.041	3.539.495.769	
			Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	75,00%			
1.1.2.05.10.0001	Pelaksanaan Car Free Day	Jl. Raya Darmo; Jl. Tunjungan ; Jl. Jimerto, Jl. Jemur Andayani, Jl. Kertajaya; Jl. Kembang Jepun	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	113 kali	1.534.858.940	1.619.462.333	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.10.0002	Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Ruang/gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya serta sekolah adiwiyata, pondok pesantren dan kampus	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	12 kali	1.051.756.758	1.098.618.412	Dinas Lingkungan Hidup
1.1.2.05.10.0003	Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	7 dokumen	780.824.343	821.415.024	Dinas Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.05.11	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka		Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	38,46%	187.744.445.066	194.224.717.181	
1.1.2.05.11.0002	Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Workshop alat berat/ kendaraan DKRTH dan ATPM alat berat/ kendaraan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola	21 unit	11.075.971.729	11.451.103.351	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0003	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Kota Surabaya	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan	1688 unit	21.243.402.531	21.887.760.852	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0004	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Kota Surabaya	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1 rekening	130.233.750.145	134.135.287.752	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0005	Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana pendukungnya	Kota Surabaya	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	183 lokasi	8.823.332.647	9.365.935.750	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.05.11.0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	14 Lokasi Pemakaman Yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara	14 lokasi	16.367.988.014	17.384.629.476	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.1.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				16.977.436.904	17.699.896.003	
1.1.2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil		Cakupan penerbitan akte kelahiran	99,94%	2.040.553.926	2.159.614.283	
			Cakupan penerbitan akte kematian	89,51%			
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	100,00%			
			Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	100,00%			
1.1.2.06.01.0001	Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan kematian yang dilayani	104682 berkas	1.464.863.684	1.562.339.084	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.01.0002	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah berkas permohonan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3250 berkas	575.690.242	597.275.199	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.02	Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk		Cakupan penerbitan KTP	95,00%	12.179.561.563	12.665.657.475	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00%			
1.1.2.06.02.0001	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan	200000 berkas	8.968.908.999	9.237.976.266	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.02.0002	Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani	398986 berkas	2.363.846.961	2.533.219.405	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.06.02.0003	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen	40930 berkas	846.805.603	894.461.804	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.03	Program Pemanfaatan Data Kependudukan		Persentase peningkatan inovasi pelayanan	66,66%	815.175.324	843.462.190	
			Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	20,00%			
1.1.2.06.03.0001	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	2 kali	422.028.854	436.179.145	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.03.0002	Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 dokumen	393.146.470	407.283.045	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.04	Program Pengelolaan Data Administrasi		Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	90,00%	1.942.146.091	2.031.162.055	
1.1.2.06.04.0001	Pemutakhiran Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	data kependudukan yang di mutakhirkan	146684 data	564.722.723	590.019.717	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.06.04.0002	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	8 sistem	1.377.423.368	1.441.142.338	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.1.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				11.882.190.308	12.325.371.774	
1.1.2.07.01	Program Keluarga Berencana		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,22%	8.289.928.815	8.545.649.169	
			Persentase peserta KB aktif	80,95%			
			Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,78%			
			Persentase peserta KB baru	97,94%			
1.1.2.07.01.0001	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Kecamatan	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 lembaga	3.961.732.000	4.086.078.185	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.01.0002	Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	31 Kecamatan dan Gedung milik Pemkot Surabaya	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208 orang	1.983.578.323	2.047.933.242	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.01.0006	Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Surabaya	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	4 unit	40.375.000	41.586.250	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Rumah Sakit, Fasilitas Kesehatan, Puskesmas dan Bakti Sosial Kecamatan	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650 orang	1.257.271.492	1.291.670.336	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.07.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	DP5A, ULP, BKKBN	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	52 unit	1.046.972.000	1.078.381.156	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga		Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100,00%	3.592.261.493	3.779.722.605	
			Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10,33%			
1.1.2.07.02.0001	Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Surabaya	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	100 orang	1.028.162.994	1.093.540.589	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0002	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Surabaya, Luar Surabaya	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15 lembaga	618.053.346	650.364.891	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0003	Pembinaan Keluarga Sejahtera	di Kota Surabaya	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1240 orang	593.222.817	619.465.060	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0004	Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	di Kota Surabaya	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350 orang	375.923.505	384.260.004	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0005	Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jl. Klakah Rejo Gang Sampurna No.21 Surabaya	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan	305.315.315	319.892.195	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.07.02.0006	Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Mall Pelayanan Publik, Jln. Tunjungan No. 1-3, Lantai 2, Surabaya	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga	671.583.516	712.199.866	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.1.2.8	Perhubungan				228.892.588.687	239.335.359.412	
1.1.2.08.01	Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	80,00%	6.762.410.193	6.956.390.355	
1.1.2.08.01.0001	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Kota Surabaya	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan	4 Jenis	6.762.410.193	6.956.390.355	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.02	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi		Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	100,00%	67.779.314.894	70.802.385.044	
1.1.2.08.02.0001	Pembangunan Prasarana Transportasi	Kota Surabaya	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	2 bangunan	25.093.354.357	25.840.502.287	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.02.0002	Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Kota Surabaya	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara	36 lokasi	7.451.791.857	7.752.734.590	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.02.0003	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Terminal Kota Surabaya	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14 Lokasi	30.970.356.998	32.738.488.824	Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.08.02.0004	Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Kota Surabaya	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	8 Paket	4.263.811.682	4.470.659.343	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan		Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	94,00%	25.064.195.859	26.528.203.408	
1.1.2.08.03.0001	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Surabaya	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor	149069 unit	8.507.330.466	8.982.372.502	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03.0002	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Kota Surabaya	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan	365 Kali	11.603.450.797	12.310.088.039	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03.0003	Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	Kota Surabaya	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan	7 Jenis	3.771.181.055	3.998.502.020	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.03.0004	Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Kota Surabaya	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	48 kali	1.182.233.541	1.237.240.847	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04	Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan		Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	100,00%	42.395.194.843	44.503.094.719	
			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	40,00%			
			Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	90,30 menit			
1.1.2.08.04.0001	Pengelolaan Transportasi Umum	Kota Surabaya	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	28 Unit	25.095.216.693	26.475.862.808	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0002	Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Kota Surabaya	Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5 Kali	8.737.770.659	9.138.648.563	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0003	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Kota Surabaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang	2 kali	807.387.760	825.033.830	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0004	Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Kota Surabaya	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan	8 unit	2.434.181.029	2.533.669.557	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0005	Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Kota Surabaya	Transportasi Umum Perkotaan yang Diselenggarakan	365 kali	1.816.701.769	1.915.176.548	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.04.0006	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Kota Surabaya	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	10 Dokumen	3.503.936.933	3.614.703.413	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu		Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	40,00 km/jam	86.891.472.898	90.545.285.886	
			Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2,00%			
1.1.2.08.05.0001	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Surabaya	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	31.991.536.274	33.251.146.352	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05.0002	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Kota Surabaya	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan	1200 unit	24.635.053.183	25.357.784.499	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05.0003	Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13 dokumen	3.791.664.451	3.942.728.976	Dinas Perhubungan
1.1.2.08.05.0004	Penyelenggaraan Perparkiran	Titik Parkir TJU dan TKP di Kota Surabaya	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan	1821 Lokasi	26.473.218.990	27.993.626.059	Dinas Perhubungan
1.1.2.9	Komunikasi dan Informatika serta Persandian				74.357.419.534	77.215.072.019	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.09.01	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	58,37%	36.623.333.525	38.000.448.466	
1.1.2.09.01.0001	Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Kota Surabaya	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan	399 lokasi	29.809.364.433	30.905.178.833	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.01.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kota Surabaya	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan	72 lokasi	738.847.765	764.559.276	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.01.0003	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Kota Surabaya	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	15 aplikasi	818.819.113	868.633.752	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.01.0004	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Kota Surabaya	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	165 Aplikasi	5.256.302.214	5.462.076.605	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02	Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik		Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	32.414 Kunjungan	6.529.455.469	6.787.870.786	
1.1.2.09.02.0001	Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Wilayah pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani	3000 berkas	996.642.786	1.038.386.982	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02.0002	Pengelolaan Saluran Komunikasi	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19 Saluran	830.472.417	871.980.951	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02.0003	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial	11 kali	1.408.537.100	1.457.413.479	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02.0004	Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	5 dokumen	679.649.771	714.218.773	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.02.0005	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	instansi pemerintah penyelenggara event, OPD Pemerintah Kota Surabaya penyelenggara event, Studio Radio di wilayah administratif Kota Surabaya, Studio Televisi yang memiliki jangkauan bisa diakses masyarakat surabaya	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	4 Jenis	2.614.153.395	2.705.870.601	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	100,00%	31.204.630.540	32.426.752.767	
1.1.2.09.03.0001	Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Kota Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola	1389 unit	2.324.860.467	2.419.678.829	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03.0002	Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Kota Surabaya	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	136 lokasi	11.119.040.091	11.447.428.416	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.1.2.09.03.0003	Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Kota Surabaya	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	4 Jenis	10.944.691.580	11.486.773.987	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03.0004	Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Kota Surabaya	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100 persen	3.744.349.041	3.890.183.663	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.09.03.0005	Pengelolaan Pusat Data	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pusat Data yang dikelola	2 Lokasi	3.071.689.361	3.182.687.872	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2	Urusan Pilihan				39.747.416.387	41.294.937.009	
1.2.2	Non Pelayanan Dasar				39.747.416.387	41.294.937.009	
1.2.2.1	Pariwisata				14.890.905.922	15.407.780.715	
1.2.2.01.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	65,00%	853.848.587	882.909.948	
1.2.2.01.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses	400 berkas	437.658.668	452.824.475	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.01.0002	Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Tempat-tempat usaha rekreasi dan hiburan umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses	169 berkas	416.189.919	430.085.473	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02	Program Pemasaran Pariwisata		Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	52,27%	6.079.391.430	6.289.291.230	
1.2.2.01.02.0001	Fasilitasi promosi wisata	Dalam dan luar propinsi Jawa Timur	Jumlah fasilitasi promosi wisata	246 kali	2.589.471.238	2.689.083.841	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02.0002	Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali	1.094.735.164	1.121.782.141	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02.0003	Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Gedung Balai Pemuda, Museum Sepuluh Nopember dan Tugu Pahlawan Pemuda	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda	41 kali	1.370.394.363	1.428.796.285	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.02.0004	Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Gedung pertemuan di Kota Surabaya; regional dan nasional	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	66 kali	1.024.790.665	1.049.628.963	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03	Program Pengembangan Destinasi Wisata		Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	76,92%	7.457.840.245	7.722.608.273	
1.2.2.01.03.0006	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	museum yang dikelola Pemkot Surabaya	Jumlah museum yang dipelihara	6 lokasi	700.000.000	721.548.858	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0001	Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	Balai Pemuda Surabaya, Jl. Gubernur Suryo No.15 Surabaya	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi	770 kali	475.652.768	486.284.713	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0002	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Convention Hall Lt. 4 Gedung Siola	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan	4 kali	257.217.463	266.790.574	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0003	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	THP Kenjeran, Wisata Air Kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	3 lokasi	2.008.845.835	2.097.500.751	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.01.03.0004	Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	3 lokasi	1.919.594.776	1.985.138.780	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0005	Peningkatan Destinasi Wisata	Jl. Pahlawan s/d Taman Bungkul, Kawasan Kota Lama, sepanjang Jl. Tunjungan, Jawa Timur	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata	6 kali	1.840.659.403	1.901.798.502	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.03.0007	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata (DAK)	Convention Hall Lt. 4 Gedung Siola	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisata	280 orang	255.870.000	263.546.095	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.04	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata		Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	100,00%	499.825.660	512.971.264	
1.2.2.01.04.0001	Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	12 kali	307.433.793	316.144.898	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.01.04.0002	Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Tempat - tempat usaha jasa dan sarana pariwisata di kota Surabaya	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi	6 lokasi	192.391.867	196.826.366	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.2	Energi dan Sumber Daya Mineral				3.343.427.549	3.437.939.177	
1.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif		Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	13 lingkungan	313.301.763	319.976.909	
1.2.2.02.01.0001	Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	3 Lingkungan	313.301.763	319.976.909	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
1.2.2.02.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota		Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	49 Unit	2.489.325.109	2.556.705.044	
1.2.2.02.02.0001	Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Gedung Milik pemerintah kota Surabaya yang dilakukan konservasi energi	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	10 unit	2.184.758.389	2.246.079.614	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.02.02.0002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	4 dokumen	304.566.720	310.625.430	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
1.2.2.02.03	Program Upaya Konservasi Energi		Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	164 kegiatan dan /atau usaha	540.800.677	561.257.224	
1.2.2.02.03.0001	Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Gedung Milik Pemerintah Kota Surabaya dan Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi	120 lembaga	540.800.677	561.257.224	Dinas Lingkungan Hidup
1.2.2.3	Perdagangan				6.877.295.443	7.128.315.765	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.03.01	Program Distribusi Perdagangan		Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	17 kali	2.368.692.411	2.462.125.672	
			Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	31 kali/kejadian			
			Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	85,00%			
1.2.2.03.01.0001	Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Gudang di kota Surabaya	Jumlah gudang yang dimonitor	300 lokasi	490.649.918	505.275.024	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.01.0002	Pembinaan terhadap pelaku distribusi perdagangan	Kota Surabaya	Jumlah Pelaku Distribusi Perdagangan yang dibina	31 Kelompok	798.970.511	839.327.915	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.01.0003	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	31 wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	217 kali	1.079.071.982	1.117.522.733	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.02	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	80,00%	1.654.255.224	1.726.376.840	
1.2.2.03.02.0001	Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan Kota Surabaya	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan	400 berkas	579.945.513	595.595.547	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.02.0002	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Wilayah-wilayah perdagangan di Kota Surabaya	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1552 Lembaga	1.074.309.711	1.130.781.293	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00%	2.854.347.808	2.939.813.253	
1.2.2.03.03.0001	Operasional UPTD Metrologi legal	Kantor UPTD Metrologi Legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	16 Jenis	1.086.374.655	1.100.829.689	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.03.0002	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Lokasi UTTP, Kantor UPTD Metrologi Legal, dan Pasar/Kecamatan	Jumlah alat UTTP yang dilayani	24570 unit	1.320.222.691	1.370.040.976	Dinas Perdagangan
1.2.2.03.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Tempat usaha yang menggunakan peralatan UTTP	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4500 unit	447.750.462	468.942.588	Dinas Perdagangan
1.2.2.4	Kelautan dan Perikanan				5.193.216.226	5.465.351.162	
1.2.2.04.01	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan		Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00%	360.802.700	367.472.642	
1.2.2.04.01.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	30 kali	360.802.700	367.472.642	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.04.02	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan		Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	16,00%	4.832.413.526	5.097.878.520	
1.2.2.04.02.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan	349 unit	1.238.688.510	1.307.846.590	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.04.02.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kawasan pesisir Surabaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan	48 unit	3.271.038.271	3.463.297.939	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.04.02.0003	Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Kawasan Pesisir di Kota Surabaya	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir	12 laporan	322.686.745	326.733.991	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.5	Pertanian				9.442.571.247	9.855.550.190	
1.2.2.05.01	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	80,00%	285.181.006	286.479.493	
1.2.2.05.01.0001	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses	255 berkas	285.181.006	286.479.493	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.02	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	88,50%	885.023.237	928.150.194	
1.2.2.05.02.0001	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis	1562 kali	885.023.237	928.150.194	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.03	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya		Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00%	884.989.776	924.178.736	
1.2.2.05.03.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	8 kali	295.003.881	300.470.758	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.03.0002	Penyediaan Sarana Budidaya Peternakan	Sentra Pertanian Terpadu Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	589.985.895	623.707.978	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.04	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	80,00%	4.349.412.670	4.573.662.041	
1.2.2.05.04.0001	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura	300 orang	409.185.465	428.565.419	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.04.0002	Pembibitan	Miniagrowisata, STA Karah dan Jambangan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan	13 jenis	2.899.037.495	3.058.354.424	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.04.0003	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	DKPP, Taman Surya	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125 orang	1.041.189.710	1.086.742.198	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.05	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan		Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	67,60%	680.640.541	690.036.698	
1.2.2.05.05.0001	Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Taman Kota dan ruang publik	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	72 kali	680.640.541	690.036.698	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1.2.2.05.06	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	17,00%	2.357.324.017	2.453.043.028	
1.2.2.05.06.0001	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	31 Kecamatan di Surabaya	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan	524 orang	1.047.819.919	1.097.149.420	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.2.2.05.06.0002	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Wilayah Kota Surabaya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara	5 Jenis	1.309.504.098	1.355.893.608	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Fungsi Penunjang				1.664.159.755.821	1.734.792.537.344	
2.1	Fungsi Manajemen				989.335.095.517	1.018.068.177.012	
2.1.2	Non Pelayanan Dasar				989.335.095.517	1.018.068.177.012	
2.1.2.1	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah				946.002.201.292	972.566.250.014	
2.1.2.01.01	Program Fasilitas Informasi dan Protokol DPRD		Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100,00%	95.556.865.862	98.547.693.679	
2.1.2.01.01.0001	Fasilitasi Reses DPRD	Daerah Pemilihan masing masing anggota DPRD Kota Surabaya	Jumlah Fasilitas Reses	3 kali	13.974.056.413	14.539.602.048	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0002	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Lokasi Tujuan Kunjungan Kerja di Jawa Timur, luar Jawa Timur, luar negeri	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185 kali	58.200.813.227	59.940.943.280	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0003	Penerimaan Studi Banding	Gedung DPRD Kota Surabaya	Jumlah studi banding yang difasilitasi	240 kali	3.643.902.642	3.747.325.402	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0004	Pengendalian Keamanan	Kantor DPRD Kota Surabaya	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	264 kali	1.358.872.719	1.393.744.582	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.01.0005	Publikasi Kegiatan DPRD	Kantor Sekretariat DPRD Kota Surabaya, media cetak, media on line, media radio, media televisi dan media maialah	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD	5 media	18.379.220.861	18.926.078.367	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.02	Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan		Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	100,00%	601.986.517.267	618.306.680.884	
2.1.2.01.02.0001	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	5.299.928.783	5.446.860.428	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.417.588.567	1.448.050.005	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0003	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	1.596.773.500	1.632.610.486	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0004	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandangan	Kelurahan Kandangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.812.325.015	3.912.668.577	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0005	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.145.652.790	1.167.154.981	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0006	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	5.091.068.951	5.230.833.198	Kec. Benowo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0007	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Kelurahan Tambak Oso Wilangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.149.000.424	1.170.502.615	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0008	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.155.511.406	2.209.266.885	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0009	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.645.652.524	3.744.204.237	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0010	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.380.840.201	5.531.355.544	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0011	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	6.157.308.244	6.331.117.629	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0012	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Dukuh	Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	6.279.831.524	6.457.224.607	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0013	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.652.957.106	3.751.508.819	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0014	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.147.488.043	1.170.782.084	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0015	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.804.499.464	1.847.503.847	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0016	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.823.000.751	2.896.466.573	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0017	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.854.643.147	2.929.900.818	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0018	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.529.615.186	2.594.121.761	Kec. Dukuh Pakis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0019	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.742.142.023	2.812.024.146	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0020	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.981.055.267	3.058.104.788	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0021	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.216.117.641	2.271.664.970	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0022	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	3.322.667.239	3.410.467.856	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0023	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.055.673.995	3.136.307.214	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0024	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.635.895.818	2.703.986.092	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0025	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	3.842.100.959	3.946.028.220	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0026	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	2.888.878.545	2.964.136.216	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0027	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.197.311.096	4.311.989.453	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0028	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.789.907.392	3.892.042.803	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0029	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	4.910.341.468	5.048.313.866	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0030	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.640.810.534	4.769.823.685	Kec. Gubeng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0031	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	Kelurahan Baratajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.744.885.869	3.847.021.280	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0032	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	3.061.599.058	3.142.232.277	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0033	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.147.206.306	5.290.554.252	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0034	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	7.357.153.813	7.566.800.184	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0035	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.415.085.286	3.506.469.601	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0036	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.011.921.102	4.123.015.760	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0037	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.852.679.020	2.927.936.691	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0038	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.337.712.447	2.396.843.474	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0039	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.179.435.707	3.263.652.625	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0040	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.139.141.019	2.191.104.649	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0041	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	3.606.908.794	3.703.668.657	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0042	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	2.079.412.708	2.129.584.489	Kec. Jambangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0043	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.986.804.397	2.035.184.328	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0044	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.864.227.775	1.909.024.008	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0045	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	Kelurahan Kebraon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.790.915.015	4.923.511.865	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0046	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.611.730.082	4.738.951.384	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0047	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.429.841.287	1.460.302.725	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0048	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.604.457.687	4.729.887.140	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0049	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	2 Lembaga	9.222.068.848	9.487.262.548	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0050	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	3.693.468.984	3.793.812.546	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0051	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	9.016.750.856	9.274.777.159	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0052	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	4.846.927.800	4.981.316.499	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0053	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.787.199.489	4.919.796.339	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0054	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	4.279.577.569	4.397.839.624	Kec. Krembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0055	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	6.280.407.264	6.457.800.347	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0056	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	4.428.829.623	4.550.675.377	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0057	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.080.810.460	2.132.774.090	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0058	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.574.274.102	1.610.111.088	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0059	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.335.360.858	1.364.030.447	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0060	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.516.040.966	3.611.008.980	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0061	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.122.835.444	2.174.799.074	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0062	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3 Lembaga	1.275.075.017	1.303.744.606	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0063	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.516.827.943	3.611.795.957	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0064	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	Kelurahan Kalijudan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.554.605.406	2.619.111.981	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0065	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.018.749.752	4.128.052.561	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0066	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.660.282.194	1.699.702.879	Kec. Mulyorejo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0067	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	3.571.588.146	3.668.348.009	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0068	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.047.813.181	4.157.115.990	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0069	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.477.462.717	3.570.638.882	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0070	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.550.870.688	4.676.300.141	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0071	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	3.577.472.168	3.674.232.031	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0072	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.955.289.206	4.062.800.165	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0073	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	5.357.481.845	5.506.205.339	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0074	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	5.961.012.336	6.127.654.323	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0075	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.520.007.939	2.582.722.665	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0076	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.078.672.120	2.128.843.901	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0077	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.496.770.297	2.559.485.023	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0078	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	2.459.843.202	2.522.557.928	Kec. Rungkut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0079	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	5.511.510.795	5.665.609.837	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0080	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	3.306.606.693	3.394.407.310	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0081	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringan Sari	Kelurahan Penjaringan Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15 Lembaga	6.464.762.149	6.647.530.780	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0082	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	4.048.803.619	4.158.106.428	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0083	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.803.814.242	3.907.741.503	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0084	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.461.447.676	1.493.700.963	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0085	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.755.442.627	5.916.709.066	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0086	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.118.459.097	2.170.422.727	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0087	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	5.224.331.270	5.369.471.065	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0088	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	5.817.953.554	5.981.011.843	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0089	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	4.117.705.655	4.230.592.162	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0090	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.944.185.762	6.110.827.749	Kec. Sawahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0091	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	18 Lembaga	7.696.385.363	7.916.782.830	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0092	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	7.247.919.750	7.453.982.422	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0093	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.203.532.523	4.318.210.880	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0094	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	17 Lembaga	5.500.142.439	5.654.241.481	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0095	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	6.065.777.238	6.236.002.924	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0096	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	6.097.425.549	6.269.443.084	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0097	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	7.291.991.769	7.499.846.291	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0098	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	16 Lembaga	10.369.783.941	10.670.814.628	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0099	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	3.499.612.118	3.594.580.132	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0100	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.198.551.038	3.282.767.956	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0101	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	5.141.763.194	5.285.111.140	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0102	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.126.381.906	4.239.268.413	Kec. Simokerto

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0103	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	3.950.288.319	4.057.799.278	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0104	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	1.855.063.775	1.899.860.008	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0105	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	3.021.549.995	3.102.183.214	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0106	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.228.814.928	3.314.823.695	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0107	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.945.554.661	4.053.065.620	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0108	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.706.641.417	3.806.984.979	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0109	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.033.362.971	4.142.665.780	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0110	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	4.542.837.771	4.668.267.224	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0111	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	1.445.099.170	1.477.352.457	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0112	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	3.383.450.708	3.474.835.023	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0113	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	6.171.031.101	6.344.840.486	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0114	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.515.437.567	2.579.944.142	Kec. Sukomanunggal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0115	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.281.295.524	2.338.634.702	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0116	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	3.177.220.189	3.261.437.107	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0117	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	4.193.396.905	4.308.075.262	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0118	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	Kelurahan Gading	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.985.246.235	6.153.680.072	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0119	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	5.832.909.613	5.997.759.751	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0120	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.062.473.259	5.202.237.506	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0121	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	7.093.235.833	7.293.922.957	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0122	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	6.071.822.857	6.243.840.392	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0123	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.357.200.550	3.446.793.016	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0124	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.969.864.948	5.107.837.346	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0125	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.462.713.742	2.525.428.468	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0126	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4 Lembaga	2.131.192.187	2.184.947.666	Kec. Tandes

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0127	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	3.690.159.963	3.788.711.676	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0128	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	7.778.533.422	8.000.722.738	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0129	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.435.865.431	2.496.788.308	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0130	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.550.522.053	2.615.028.628	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0131	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14 Lembaga	4.609.017.774	4.736.239.076	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0132	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedundoro	Kelurahan Kedundoro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	4.586.969.463	4.712.398.916	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0133	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.213.218.309	3.297.435.227	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0134	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.419.251.553	3.510.635.868	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0135	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.768.554.396	4.899.359.397	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0136	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	Kelurahan Kendangsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.399.275.242	2.460.198.119	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0137	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	Kelurahan Kutisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	3.047.803.304	3.126.644.674	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0138	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	2.960.057.893	3.037.107.414	Kec. Tenggilis Mejoyo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0139	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.454.214.305	2.516.929.031	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0140	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	Kelurahan Babatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga	4.450.838.752	4.572.684.506	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0141	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	2.737.308.865	2.808.982.838	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0142	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	1.934.658.900	1.981.246.982	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0143	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	Kelurahan Wiyung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	2.711.126.943	2.781.009.066	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0144	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13 Lembaga	3.839.627.207	3.943.554.468	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0145	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	4.171.349.464	4.284.235.971	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0146	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10 Lembaga	2.525.604.365	2.590.110.940	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0147	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	Kelurahan Sidosermo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga	2.465.876.054	2.528.590.780	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0148	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7 Lembaga	2.737.870.000	2.807.752.123	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0149	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	Kelurahan Darmo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	5.572.151.326	5.726.250.368	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0150	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga	4.608.811.057	4.736.032.359	Kec. Wonokromo

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.02.0151	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5 Lembaga	2.757.233.415	2.828.907.388	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0152	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	7.835.837.366	8.059.818.532	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0153	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12 Lembaga	5.538.686.026	5.692.785.068	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0154	Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga	6.102.018.832	6.274.036.367	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.03	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	100,00%	84.412.576.371	86.649.267.393	
2.1.2.01.03.0001	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Asemrowo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	139 Lembaga	1.197.408.569	1.226.982.051	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.03.0002	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	126.157.353	126.416.553	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.03.0003	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Benowo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	183 Lembaga	1.450.989.791	1.491.297.140	Kec. Benowo
2.1.2.01.03.0004	Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur, Anggrek dan Hidroponik)	Kecamatan Benowo	Pengembangan Kampung Edukasi	3 kali	71.737.319	71.926.319	Kec. Benowo
2.1.2.01.03.0005	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Benowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	166.776.546	166.949.346	Kec. Benowo
2.1.2.01.03.0006	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Bubutan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	414 Lembaga	3.104.899.741	3.192.656.855	Kec. Bubutan
2.1.2.01.03.0007	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	60.859.564	61.291.564	Kec. Bubutan
2.1.2.01.03.0008	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Bulak	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	157 Lembaga	1.344.387.106	1.378.217.719	Kec. Bulak
2.1.2.01.03.0009	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	116.380.000	116.552.800	Kec. Bulak
2.1.2.01.03.0010	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	195 Lembaga	1.628.392.232	1.670.651.671	Kec. Dukuh Pakis

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.03.0011	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	131.238.529	131.584.129	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.03.0012	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Gayungan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	197 Lembaga	1.601.502.652	1.644.033.131	Kec. Gayungan
2.1.2.01.03.0013	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.580.000	129.925.600	Kec. Gayungan
2.1.2.01.03.0014	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Genteng	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	364 Lembaga	2.346.648.588	2.413.492.507	Kec. Genteng
2.1.2.01.03.0015	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	74.179.362	74.611.362	Kec. Genteng
2.1.2.01.03.0016	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Gubeng	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488 Lembaga	3.555.762.474	3.656.875.849	Kec. Gubeng
2.1.2.01.03.0017	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	135.446.603	135.965.003	Kec. Gubeng
2.1.2.01.03.0018	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	217 Lembaga	1.614.718.651	1.658.770.525	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.03.0019	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	169.624.757	169.797.557	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.03.0020	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Jambangan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	168 Lembaga	1.395.887.548	1.432.249.574	Kec. Jambangan
2.1.2.01.03.0021	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	62.420.000	62.538.800	Kec. Jambangan
2.1.2.01.03.0022	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Karangpilang	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	220 Lembaga	1.690.180.000	1.734.478.000	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.03.0023	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.580.000	129.925.600	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.03.0024	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Kenjeran	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	460 Lembaga	3.016.600.574	3.099.448.314	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.03.0025	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	165.743.459	166.089.059	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.03.0026	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Krembangan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	430 Lembaga	3.216.614.918	3.307.075.355	Kec. Krembangan
2.1.2.01.03.0027	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Krembangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	161.362.453	161.794.453	Kec. Krembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.03.0028	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	200 Lembaga	1.600.843.959	1.643.278.989	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.03.0029	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	169.352.551	169.870.951	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.03.0030	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	347 Lembaga	2.678.865.817	2.753.583.585	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.03.0031	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.258.339	129.529.775	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.03.0032	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	377 Lembaga	2.833.594.117	2.914.046.815	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.03.0033	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	129.505.242	129.834.372	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.03.0034	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Pakal	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	226 Lembaga	1.827.561.788	1.876.884.075	Kec. Pakal
2.1.2.01.03.0035	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	121.938.723	122.284.323	Kec. Pakal
2.1.2.01.03.0036	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Rungkut	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488 Lembaga	3.653.294.866	3.758.420.004	Kec. Rungkut
2.1.2.01.03.0037	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	166.403.575	166.921.975	Kec. Rungkut
2.1.2.01.03.0038	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sambikerep	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	259 Lembaga	2.042.917.599	2.098.510.734	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.03.0039	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	136.869.431	137.318.240	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.03.0040	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sawahan	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	627 Lembaga	4.841.815.996	4.974.242.569	Kec. Sawahan
2.1.2.01.03.0041	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	138.720.741	139.239.141	Kec. Sawahan
2.1.2.01.03.0042	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Semampir	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	636 Lembaga	4.647.254.630	4.781.188.637	Kec. Semampir
2.1.2.01.03.0043	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	131.427.692	131.859.692	Kec. Semampir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.03.0044	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Simokerto	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	356 Lembaga	2.684.072.406	2.760.138.650	Kec. Simokerto
2.1.2.01.03.0045	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	73.746.367	74.227.969	Kec. Simokerto
2.1.2.01.03.0046	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sukolilo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	439 Lembaga	3.403.734.672	3.498.439.832	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.03.0047	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	135.536.000	136.140.800	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.03.0048	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	323 Lembaga	2.428.566.933	2.496.829.785	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.03.0049	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	126.966.016	127.311.616	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.03.0050	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tambaksari	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	749 Lembaga	5.100.669.895	5.247.066.442	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.03.0051	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	138.705.000	139.425.000	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.03.0052	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tandes	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	371 Lembaga	2.895.032.615	2.974.453.707	Kec. Tandes
2.1.2.01.03.0053	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	133.422.857	133.941.257	Kec. Tandes
2.1.2.01.03.0054	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tegalsari	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	366 Lembaga	2.815.649.185	2.893.497.429	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.03.0055	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	59.187.692	59.619.692	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.03.0056	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	185 Lembaga	1.466.404.102	1.506.021.845	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.03.0057	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	159.992.926	160.418.334	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.03.0058	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Wiyung	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	211 Lembaga	1.847.007.351	1.892.765.638	Kec. Wiyung
2.1.2.01.03.0059	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	131.972.759	132.318.359	Kec. Wiyung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.03.0060	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Wonocolo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	280 Lembaga	2.170.059.879	2.230.636.993	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.03.0061	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	135.742.038	136.282.038	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.03.0062	Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Kecamatan Wonokromo	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	574 Lembaga	4.256.770.094	4.375.969.165	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.03.0063	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48 Kali	134.633.729	135.152.129	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.04	Program Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	100,00%	3.860.994.255	3.954.937.585	
2.1.2.01.04.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Wilayah Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur	Jumlah kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	38 kali	3.860.994.255	3.954.937.585	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.05	Program Fasilitas Kesejahteraan		Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	100,00%	6.680.526.215	6.753.018.738	
			Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100,00%			
2.1.2.01.05.0001	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	219.877.473	221.976.453	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.05.0004	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Benowo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	240.420.873	242.808.153	Kec. Benowo
2.1.2.01.05.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	208.390.088	210.313.448	Kec. Bubutan
2.1.2.01.05.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	171.152.000	171.851.960	Kec. Bulak
2.1.2.01.05.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	237.364.433	239.893.553	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.05.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	263.580.000	265.440.000	Kec. Gayungan
2.1.2.01.05.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	172.339.946	173.954.606	Kec. Genteng
2.1.2.01.05.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	194.186.603	196.467.203	Kec. Gubeng
2.1.2.01.05.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	193.474.071	193.994.691	Kec. Gunung Anyar

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	200.864.000	203.348.120	Kec. Jambangan
2.1.2.01.05.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	199.592.000	202.037.960	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.05.0034	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	254.474.711	256.474.391	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.05.0037	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5 Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	237.234.453	239.942.613	Kec. Krembangan
2.1.2.01.05.0040	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	259.555.525	262.629.925	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.05.0043	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	170.534.459	172.044.179	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.05.0046	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	222.346.806	224.556.889	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.05.0049	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	153.602.723	154.898.243	Kec. Pakal
2.1.2.01.05.0052	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	202.141.575	203.732.115	Kec. Rungkut
2.1.2.01.05.0055	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	241.141.093	243.699.493	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.05.0058	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	270.600.570	274.043.970	Kec. Sawahan
2.1.2.01.05.0061	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	181.799.692	184.952.452	Kec. Semampir
2.1.2.01.05.0064	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	207.073.219	210.027.979	Kec. Simokerto
2.1.2.01.05.0067	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	259.824.000	263.171.040	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.05.0070	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	165.414.016	166.913.056	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.05.0073	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	236.921.000	240.587.480	Kec. Tambaksari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.05.0076	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	258.042.857	261.313.457	Kec. Tandes
2.1.2.01.05.0079	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	208.079.692	211.034.452	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.05.0082	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	181.747.542	183.666.102	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.05.0085	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	200.256.759	202.650.879	Kec. Wiyung
2.1.2.01.05.0088	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	210.490.038	213.272.478	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.05.0091	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116 Kali	258.003.998	261.321.398	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.06	Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah		Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	100,00%	19.033.918.348	19.192.843.158	
2.1.2.01.06.0001	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	kecamatan asemrowo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	377.885.013	381.227.073	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.06.0002	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Asemrowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	76.770.506	77.094.506	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.06.0004	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Asemrowo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	69.420.506	69.524.006	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.06.0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Benowo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	365.139.291	371.028.639	Kec. Benowo
2.1.2.01.06.0006	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Benowo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	76.628.729	76.844.729	Kec. Benowo
2.1.2.01.06.0008	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Benowo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	70.297.319	70.443.119	Kec. Benowo
2.1.2.01.06.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Bubutan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	438.968.563	442.947.445	Kec. Bubutan
2.1.2.01.06.0010	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Bubutan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	53.659.564	53.875.564	Kec. Bubutan
2.1.2.01.06.0012	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Bubutan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	50.959.564	51.094.564	Kec. Bubutan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.06.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Bulak	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	575.592.640	577.388.219	Kec. Bulak
2.1.2.01.06.0014	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Bulak	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.340.000	81.426.400	Kec. Bulak
2.1.2.01.06.0016	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Bulak	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 Lembaga	80.140.000	80.190.400	Kec. Bulak
2.1.2.01.06.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	364.785.592	368.764.474	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.06.0018	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.063.528	81.495.528	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.06.0020	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	72.453.528	72.627.228	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.06.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Gayungan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	467.649.400	471.628.282	Kec. Gayungan
2.1.2.01.06.0022	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Gayungan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	74.620.000	75.070.000	Kec. Gayungan
2.1.2.01.06.0024	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kota Surabaya	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	65.620.000	65.800.000	Kec. Gayungan
2.1.2.01.06.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Genteng	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	640.652.054	648.368.139	Kec. Genteng
2.1.2.01.06.0026	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Genteng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	77.779.362	78.319.362	Kec. Genteng
2.1.2.01.06.0028	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Genteng	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	65.779.362	65.959.362	Kec. Genteng
2.1.2.01.06.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Gubeng	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	476.420.088	480.398.970	Kec. Gubeng
2.1.2.01.06.0030	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Gubeng	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	80.308.307	80.956.307	Kec. Gubeng

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.06.0032	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Gubeng	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	66.208.307	66.433.307	Kec. Gubeng
2.1.2.01.06.0033	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	374.342.496	378.544.588	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.06.0034	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	70.142.248	70.271.848	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.06.0036	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Gunung Anyar	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	69.572.248	69.684.748	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.06.0037	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Jambangan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	432.129.400	436.108.282	Kec. Jambangan
2.1.2.01.06.0038	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Jambangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	62.420.000	62.538.800	Kec. Jambangan
2.1.2.01.06.0040	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Jambangan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	63.500.000	63.651.200	Kec. Jambangan
2.1.2.01.06.0041	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Karangpilang	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	523.916.800	528.532.504	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.06.0042	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Karangpilang	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	80.140.000	80.572.000	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.06.0044	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Karangpilang	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	71.170.000	71.332.900	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.06.0045	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Kenjeran	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	479.841.642	483.820.524	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.06.0046	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Kenjeran	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	81.570.068	82.002.068	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.06.0048	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Kenjeran	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	72.060.068	72.206.768	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.06.0049	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Krembangan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	349.848.229	354.406.585	Kec. Krembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.06.0050	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Wilayah Kecamatan Krembangan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 kali	71.984.731	72.200.731	Kec. Krembangan
2.1.2.01.06.0052	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Krembangan dan Kelurahan se Kecamatan Krembangan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan	6 lembaga	72.704.731	72.942.331	Kec. Krembangan
2.1.2.01.06.0053	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Lakarsantri	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	243.229.644	245.634.160	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.06.0054	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	70.481.690	70.600.490	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.06.0056	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Lakarsantri	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	76.181.690	76.471.490	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.06.0057	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Mulyorejo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	537.478.977	544.305.029	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.06.0058	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	119.205.569	119.853.569	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.06.0060	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Mulyorejo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	103.605.569	103.785.569	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.06.0061	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	274.104.951	279.679.667	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.06.0062	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	96.820.343	97.259.183	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.06.0064	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Pabean Cantian	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	84.508.593	84.578.080	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.06.0065	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Pakal	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	376.711.941	379.799.272	Kec. Pakal
2.1.2.01.06.0066	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Pakal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	96.430.470	96.862.470	Kec. Pakal
2.1.2.01.06.0068	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Pakal	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	88.270.470	88.457.670	Kec. Pakal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.06.0069	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Rungkut	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	459.177.114	463.867.605	Kec. Rungkut
2.1.2.01.06.0070	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Rungkut	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	107.214.053	107.268.053	Kec. Rungkut
2.1.2.01.06.0072	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Rungkut	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	110.514.053	110.667.053	Kec. Rungkut
2.1.2.01.06.0073	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sambikerep	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	453.797.805	459.070.579	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.06.0074	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sambikerep	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	99.259.312	99.691.312	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.06.0076	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sambikerep	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	91.579.312	91.780.912	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.06.0077	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sawahan	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	405.402.966	408.862.728	Kec. Sawahan
2.1.2.01.06.0078	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	88.334.151	88.982.151	Kec. Sawahan
2.1.2.01.06.0080	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sawahan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	79.184.151	79.557.651	Kec. Sawahan
2.1.2.01.06.0081	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Semampir	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	541.977.092	545.955.974	Kec. Semampir
2.1.2.01.06.0082	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Semampir	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	82.707.692	83.247.692	Kec. Semampir
2.1.2.01.06.0084	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Semampir	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	76.647.692	77.005.892	Kec. Semampir
2.1.2.01.06.0085	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Simokerto	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	444.144.512	447.248.749	Kec. Simokerto
2.1.2.01.06.0086	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Simokerto	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	120 Kali	77.437.007	78.029.328	Kec. Simokerto

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.06.0088	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Simokerto	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	65.278.646	65.506.217	Kec. Simokerto
2.1.2.01.06.0089	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sukolilo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408 kali	424.606.010	429.346.910	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.06.0090	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sukolilo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	87.056.000	87.812.000	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.06.0092	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sukolilo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	73.706.000	74.061.500	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.06.0093	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	609.138.656	618.517.503	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.06.0094	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	70.542.248	70.866.248	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.06.0096	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Sukomanunggal	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	67.302.248	67.529.048	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.06.0097	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tambaksari	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	530.376.600	536.265.948	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.06.0098	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Wilayah Kecamatan Tambaksari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	108.825.000	109.689.000	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.06.0100	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tambaksari	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	93.795.000	94.208.100	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.06.0101	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tandes	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	452.260.808	457.037.946	Kec. Tandes
2.1.2.01.06.0102	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Tandes	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	85.422.857	86.070.857	Kec. Tandes
2.1.2.01.06.0104	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tandes	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	6 lembaga	73.062.857	73.340.057	Kec. Tandes
2.1.2.01.06.0105	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tegalsari	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	476.457.092	480.435.974	Kec. Tegalsari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.06.0106	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Tegalsari	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	62.787.692	63.327.692	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.06.0108	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tegalsari	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	53.367.692	53.625.092	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.06.0109	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	460.635.743	464.283.051	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.06.0110	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	97.128.370	97.654.182	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.06.0112	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	94.635.740	95.086.773	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.06.0113	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Wiyung	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	330.214.368	334.193.250	Kec. Wiyung
2.1.2.01.06.0114	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Wiyung	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	98.245.568	98.677.568	Kec. Wiyung
2.1.2.01.06.0116	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Wiyung	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	90.085.568	90.272.768	Kec. Wiyung
2.1.2.01.06.0117	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	508.980.429	512.959.311	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.06.0118	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Wilayah Kecamatan Wonocolo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi Data Sarana	60 Kali	83.102.672	83.642.672	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.06.0120	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Wonocolo	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo	4 Lembaga	73.082.672	73.322.072	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.06.0121	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Kecamatan Wonokromo	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360 kali	693.034.597	697.013.479	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.06.0122	Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Kantor Kecamatan Wonokromo	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60 Kali	86.088.256	86.736.256	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.06.0124	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Kantor Kecamatan Wonokromo	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4 lembaga	74.808.256	75.117.856	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.07	Program Fasilitas Rapat dan Perundang-Undangan DPRD		Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100,00%	9.466.364.059	9.729.642.979	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.07.0001	Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	Kantor DPRD Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 dokumen	4.398.568.013	4.523.475.611	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.07.0002	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Kantor DPRD Kota Surabaya	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	930 kali	2.850.829.741	2.929.523.355	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.07.0003	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	Kantor DPRD Kota Surabaya	jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali	2.216.966.305	2.276.644.013	Sekretariat DPRD
2.1.2.01.08	Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD		Persentase BUMD yang berhasil dibina	78,00%	1.155.320.897	1.179.911.117	
2.1.2.01.08.0001	Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah serta Kantor 9 BUMD	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD	1.155.320.897	1.179.911.117	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.09	Program Penataan Daerah Otonom		Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100,00%	6.339.878.564	6.564.323.752	
			Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	100,00%			
			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	64,52%			
			Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	60,00%			
2.1.2.01.09.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta 31 kecamatan	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	796.284.489	830.809.482	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.09.0002	Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1 kali	1.609.074.158	1.653.529.548	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.09.0003	Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	Kota Surabaya	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya	720 kali	439.143.217	455.845.330	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.09.0004	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan	115 objek	345.887.517	359.791.959	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.09.0005	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gedung pertemuan di Kota Surabaya	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	16 kali	1.498.650.192	1.555.831.793	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.09.0006	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan	185 lembaga	583.510.532	608.585.781	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.09.0007	Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta kecamatan dan kelurahan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1 dokumen	1.067.328.459	1.099.929.859	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.10	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	100,00%	2.110.593.595	2.196.670.944	
			Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	100,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	70,00%			
2.1.2.01.10.0001	Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Kantor Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah terkait	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring	254 lembaga	298.496.166	307.727.807	Bagian Organisasi
2.1.2.01.10.0002	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	Kantor Bagian Organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun	1 dokumen	285.414.914	296.487.930	Bagian Organisasi
2.1.2.01.10.0003	Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Kantor Bagian Organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun	1 dokumen	388.225.874	405.218.308	Bagian Organisasi
2.1.2.01.10.0004	Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155 POS	471.306.952	503.198.071	Bagian Organisasi
2.1.2.01.10.0005	Survey Kepuasan Masyarakat	Unit Pelayanan di Kota Surabaya, Gedung pertemuan milik Pemerintah Kota Surabaya atau gedung pertemuan lainnya	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	254 lembaga	667.149.689	684.038.828	Bagian Organisasi
2.1.2.01.11	Program Penataan Peraturan Perundang-		Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100,00%	5.379.505.529	5.549.632.310	
			Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100,00%			
			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100,00%			
			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100,00%			
2.1.2.01.11.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah	12 dokumen	292.019.919	293.779.674	Bagian Hukum
2.1.2.01.11.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	65 permasalahan hukum	2.528.771.014	2.610.196.048	Bagian Hukum
2.1.2.01.11.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Kantor Bagian Hukum Kota Surabaya	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 rancangan produk hukum	1.398.682.873	1.444.630.968	Bagian Hukum
2.1.2.01.11.0004	Publikasi Produk Hukum	Kantor Bagian Hukum, Gedung milik Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	70 produk hukum	1.160.031.723	1.201.025.620	Bagian Hukum
2.1.2.01.12	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100,00%	17.230.653.150	17.740.944.009	
2.1.2.01.12.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Lokasi Aktivitas Walikota dan Wakil Walikota	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	17.230.653.150	17.740.944.009	Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.01.13	Program Pengelolaan		Persentase bangunan gedung yang dipelihara	100,00%	16.439.550.945	17.247.757.186	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.13.0001	Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Bangunan sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, antara lain : Gedung Serba Guna Arief Rahman Hakim, Gedung Siola, Gedung Wanita Candra Kencana, Rumah Peristirahatan Prigen, Jl. Walikota Mustajab No. 84, Eks Gedung Tunjungan Center Lantai 6, dan 19 lokasi JPO	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	25 lokasi	16.439.550.945	17.247.757.186	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.01.14	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan		Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	100,00%	1.152.999.745	1.167.521.414	
2.1.2.01.14.0001	Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun	2 dokumen	509.416.293	514.392.127	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.14.0002	Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun	1 dokumen	266.916.168	272.019.413	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.14.0003	Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun	1 dokumen	376.667.284	381.109.874	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.15	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan		Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	85,00%	10.502.315.239	10.799.183.101	
2.1.2.01.15.0001	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa	2298 kali	9.572.548.805	9.851.109.583	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.15.0002	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	89 kali	500.103.346	511.712.623	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.15.0003	Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun	9 dokumen	429.663.088	436.360.895	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.16	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan		Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq 76\%$	94,50%	8.459.563.293	8.859.807.404	
2.1.2.01.16.0001	Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	1.904.219.929	1.955.815.084	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.16.0002	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Gedung pertemuan/rapat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72 lembaga	1.165.920.255	1.217.932.856	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.16.0003	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	2.147.330.499	2.290.731.564	Bagian Administrasi Pembangunan
2.1.2.01.16.0004	Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	3.242.092.610	3.395.327.900	Bagian Administrasi Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.17	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset		Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	90,00%	42.792.093.666	44.302.313.569	
			Persentase pemanfaatan aset	97,00%			
			Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	100,00%			
2.1.2.01.17.0001	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Kota Surabaya	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6 Berkas	3.449.955.353	3.688.400.886	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.17.0002	Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72 lembaga	1.863.072.078	1.933.806.865	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.17.0003	Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Unit Layanan Pengadaan	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	900 dokumen	5.665.667.939	5.930.501.417	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.17.0004	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2897 unit	7.658.261.884	7.878.336.440	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.17.0005	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	8891 stel	3.807.392.149	3.917.352.641	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.17.0006	Pengadaan Sarana Kedinasan	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	3805 unit	20.347.744.263	20.953.915.320	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.1.2.01.18	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	100,00%	570.262.050	581.550.615	
2.1.2.01.18.0001	Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	343.570.275	350.967.735	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.18.0002	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah, Kantor Perangkat Daerah Terkait, Tempat Pelaku Usaha Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	4 dokumen	226.691.775	230.582.880	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.1.2.01.19	Program Peningkatan Akuntabilitas		Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	100,00%	352.267.143	366.411.619	
2.1.2.01.19.0001	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Kantor Bagian Organisasi dan PD terkait	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun	2 dokumen	352.267.143	366.411.619	Bagian Organisasi
2.1.2.01.20	Program Peningkatan Kerjasama Daerah		Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	100,00%	12.519.435.099	12.876.138.558	
			Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	100,00%			
			Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	100,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.01.20.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama dan/atau di Kota lokasi mitra kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, serta lokasi lain yang dirancang oleh pengurus Asosiasi Kerjasama Pemerintah Daerah	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20 lembaga	929.948.183	951.299.666	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.20.0002	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	di wilayah Indonesia dan di wilayah mitra kerja sama luar negeri	Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi	10 lembaga	1.708.943.331	1.755.685.258	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.20.0003	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	kota/lembaga di luar negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi	88 orang	9.077.460.126	9.346.238.555	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.01.20.0004	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	35 lembaga	803.083.459	822.915.079	Bagian Administrasi Kerjasama
2.1.2.2	Kuangan				23.939.833.611	25.591.439.720	
2.1.2.02.01	Program Penagihan Pajak Daerah		Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	85,00%	3.053.355.260	3.272.686.555	
2.1.2.02.01.0001	Penagihan, Pelayanan, Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	7201 berkas	741.371.594	792.364.273	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0002	Penagihan, Pelayanan, Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	11224 berkas	628.228.991	672.396.087	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.01.0003	Penagihan, Pelayanan, Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	196762 berkas	1.683.754.675	1.807.926.195	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	90,00%	2.686.646.386	2.865.126.016	
2.1.2.02.02.0001	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72000 berkas	1.371.290.035	1.456.750.395	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.02.0002	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	245 dokumen	397.645.018	430.196.998	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.02.02.0003	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 dokumen	917.711.333	978.178.623	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.03	Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah		Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	85,00%	17.019.554.061	18.203.134.225	
2.1.2.02.03.0001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	34900 objek pajak	3.894.181.353	4.189.387.569	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.03.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	6555 objek pajak	5.126.384.826	5.470.673.347	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.03.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Kantor UPTB 1, UPTB 2, UPTB 3, UPTB 4, UPTB 5 dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	695022 objek pajak	7.998.987.882	8.543.073.309	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.04	Program Perencanaan Anggaran Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	75,00%	1.180.277.904	1.250.492.924	
2.1.2.02.04.0001	Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	296.529.292	315.168.985	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.04.0002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun	4 dokumen	224.525.329	236.843.292	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.02.04.0003	Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun	5 Laporan	659.223.283	698.480.647	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.3	Pengawasan				3.555.701.322	3.578.337.364	
2.1.2.03.01	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	100,00%	660.691.192	669.928.430	
2.1.2.03.01.0001	Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	12 dokumen	259.829.256	264.231.733	Inspektorat
2.1.2.03.01.0002	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	50 kali	177.698.787	179.231.062	Inspektorat
2.1.2.03.01.0003	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)	1 Laporan	223.163.149	226.465.635	Inspektorat
2.1.2.03.02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	100,00%	862.922.587	866.612.741	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	100,00%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.03.02.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	436.339.631	438.331.058	Inspektorat
2.1.2.03.02.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	426.582.956	428.281.683	Inspektorat
2.1.2.03.03	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	100,00%	674.876.577	678.079.825	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	100,00%			
2.1.2.03.03.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Perangkat Daerah / Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irban II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	334.753.851	336.274.942	Inspektorat
2.1.2.03.03.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	340.122.726	341.804.883	Inspektorat
2.1.2.03.04	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	100,00%	759.147.811	762.837.964	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	100,00%			
2.1.2.03.04.0001	Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	384.452.243	386.443.669	Inspektorat
2.1.2.03.04.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah Irban III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	374.695.568	376.394.295	Inspektorat
2.1.2.03.05	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV		Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	100,00%	598.063.155	600.878.404	
			Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	100,00%			
2.1.2.03.05.0001	Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Perangkat Daerah/Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan Wilayah Kerja Irban 4	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35 lembaga	288.920.325	290.024.611	Inspektorat
2.1.2.03.05.0002	Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan wilayah kerja Irban IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18 lembaga	309.142.830	310.853.793	Inspektorat
2.1.2.4	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan				15.837.359.292	16.332.149.914	

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.04.01	Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan		Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100,00%	1.469.990.154	1.522.938.605	
			Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	100,00%			
2.1.2.04.01.0001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	72 PD	895.869.317	931.551.698	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.01.0002	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Bappeko	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi	4 dokumen	574.120.837	591.386.907	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.02	Program Pengembangan Data dan Informasi		Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100,00%	1.427.406.616	1.501.779.208	
2.1.2.04.02.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah data urusan yang dikelola	17 data urusan	1.427.406.616	1.501.779.208	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.03	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100,00%	3.704.543.507	3.734.234.442	
2.1.2.04.03.0001	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	kantor BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	36.750.482	37.852.996	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.04.03.0002	Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	kantor BPKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	5 dokumen	328.519.750	338.375.342	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.1.2.04.03.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	237.789.012	238.685.348	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.03.0004	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	918.610.366	919.355.236	Bagian Umum Dan Protokol
2.1.2.04.03.0005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	181.228.711	181.557.508	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.1.2.04.03.0006	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	209.886.241	211.312.309	Dinas Kesehatan
2.1.2.04.03.0007	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	383.143.134	390.023.539	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.1.2.04.03.0008	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	274.932.392	276.356.109	Dinas Pendidikan
2.1.2.04.03.0009	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	285.197.135	286.980.428	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.04.03.0010	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor Inspektorat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	316.028.066	316.673.226	Inspektorat
2.1.2.04.03.0011	Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Inspektorat Kota Surabaya	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	2 dokumen	390.479.156	390.823.969	Inspektorat
2.1.2.04.03.0012	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	24.956.900	25.705.606	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.1.2.04.03.0013	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	117.022.162	120.532.826	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.1.2.04.04	Program Perencanaan Kota		Persentase penyusunan rencana induk sektoral	100,00%	1.981.458.067	2.069.263.667	
2.1.2.04.04.0001	Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	1 dokumen	1.110.487.688	1.162.677.095	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.04.0002	Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Kota Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan	1 dokumen	870.970.379	906.586.572	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.05	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	100,00%	1.457.364.312	1.515.157.154	
2.1.2.04.05.0001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	9 dokumen	1.457.364.312	1.515.157.154	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85,00%	2.393.671.255	2.479.659.266	
2.1.2.04.06.0001	Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun	6 dokumen	608.652.908	630.111.236	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisata dan Pertanian yang disusun	2 dokumen	537.811.321	557.835.856	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun	2 dokumen	553.443.755	573.245.810	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.06.0004	Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun	2 dokumen	693.763.271	718.466.364	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.07	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah		Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	85,00%	1.595.530.168	1.650.144.537	
2.1.2.04.07.0001	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	1 dokumen	768.786.280	795.399.594	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.07.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Kota Surabaya	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciaptakarya, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	826.743.888	854.744.943	Badan Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.1.2.04.08	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan		Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	85,00%	1.807.395.213	1.858.973.035	
2.1.2.04.08.0001	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum Kota Sehat	Kecamatan, Puskesmas, lokasi-lokasi tertentu terkait Forum Kota Sehat di Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi	12 kali	644.491.408	664.362.586	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.08.0002	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / Ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	542.491.763	559.899.166	Badan Perencanaan Pembangunan
2.1.2.04.08.0003	Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya / ruang pertemuan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun	2 dokumen	620.412.042	634.711.283	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2	Unsur Manajemen				674.824.660.304	716.724.360.332	
2.2.2	Non Pelayanan Dasar				674.824.660.304	716.724.360.332	
2.2.2.1	Sarana dan Prasarana				660.782.184.171	697.238.082.328	
2.2.2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88,00 %	564.898.518.826	598.899.478.464	
2.2.2.01.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.712.761.268	1.797.933.176	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.495.030.924	1.561.144.191	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.164.995.960	2.249.526.439	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	7.270.800.201	7.702.166.207	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.01.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.727.113.603	2.872.967.107	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.01.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.182.171.183	1.260.292.942	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.01.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	924.119.370	990.718.407	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.01.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.064.392.872	1.106.583.813	Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.01.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	549.658.696	576.266.336	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.01.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	807.176.188	859.297.512	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.01.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.628.742.741	2.816.286.418	Bagian Hubungan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Hukum	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	723.287.980	753.289.270	Bagian Hukum
2.2.2.01.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.795.612.356	1.868.688.361	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.01.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Organisasi	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	297.854.377	310.190.510	Bagian Organisasi
2.2.2.01.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	76.366.806.207	79.143.291.886	Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.01.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	10.360.748.574	10.825.637.066	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.01.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	10.267.907.949	10.984.203.807	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.01.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.099.601.338	3.306.844.888	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2.2.2.01.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.921.972.193	4.187.749.306	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.01.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kesehatan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	103.598.689.418	111.792.544.859	Dinas Kesehatan
2.2.2.01.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.589.152.846	3.799.181.096	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.01.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.244.288.277	2.348.587.839	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.01.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.816.883.868	1.926.110.624	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.01.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.467.755.464	1.544.524.587	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.01.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	34.354.718.099	35.520.176.487	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.01.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.993.038.132	4.183.091.862	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.01.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.963.612.042	2.063.243.282	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.01.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pendidikan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	21.935.434.986	23.603.860.687	Dinas Pendidikan
2.2.2.01.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5.590.903.031	5.825.787.876	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.01.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.993.988.845	4.265.126.868	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.01.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perdagangan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	3.665.760.199	3.905.384.595	Dinas Perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perhubungan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	12.698.827.146	13.210.709.884	Dinas Perhubungan
2.2.2.01.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.565.355.908	2.727.644.186	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.01.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	8.788.532.088	9.211.387.437	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.01.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Sosial	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	5.173.875.283	5.524.407.910	Dinas Sosial
2.2.2.01.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.404.744.802	1.492.775.684	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.01.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Inspektorat	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.566.570.421	1.657.173.550	Inspektorat
2.2.2.01.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Asemrowo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.171.814.790	1.236.740.783	Kec. Asemrowo
2.2.2.01.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kecamatan Benowo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.356.823.617	1.431.574.536	Kec. Benowo
2.2.2.01.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Bubutan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.768.896.115	1.864.567.915	Kec. Bubutan
2.2.2.01.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Bulak	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.826.106.387	1.939.951.962	Kec. Bulak
2.2.2.01.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.375.366.258	1.450.162.771	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.01.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Gayungan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.737.936.174	1.842.679.895	Kec. Gayungan
2.2.2.01.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Genteng	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.781.729.639	1.884.614.036	Kec. Genteng
2.2.2.01.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Gubeng	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.074.308.680	2.172.749.170	Kec. Gubeng
2.2.2.01.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Gunung Anyar	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.491.357.655	1.576.124.348	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.01.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Jambangan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.307.088.927	1.374.807.451	Kec. Jambangan
2.2.2.01.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Karangpilang	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.320.264.243	1.390.268.018	Kec. Karangpilang
2.2.2.01.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Kenjeran	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.828.483.954	1.933.316.320	Kec. Kenjeran
2.2.2.01.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	kantor kecamatan krembangan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.879.565.493	1.971.189.596	Kec. Krembangan
2.2.2.01.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Lakarsantri	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.620.555.802	1.707.573.491	Kec. Lakarsantri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Mulyorejo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.334.246.143	2.467.945.707	Kec. Mulyorejo
2.2.2.01.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Pabean Cantian	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.744.254.918	1.845.095.942	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.01.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Pakal	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.636.947.978	1.734.908.332	Kec. Pakal
2.2.2.01.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Rungkut	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.173.432.104	2.311.939.846	Kec. Rungkut
2.2.2.01.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sambikerep	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.261.676.420	1.332.384.817	Kec. Sambikerep
2.2.2.01.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sawahan	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.791.677.772	2.979.712.291	Kec. Sawahan
2.2.2.01.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Semampir	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.112.109.817	2.246.429.818	Kec. Semampir
2.2.2.01.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Simokerto	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.666.766.122	1.759.206.694	Kec. Simokerto
2.2.2.01.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sukolilo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.275.367.415	2.392.621.779	Kec. Sukolilo
2.2.2.01.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Sukomanunggal	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.995.159.907	2.117.231.526	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.01.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Tambaksari	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.859.283.153	3.029.294.404	Kec. Tambaksari
2.2.2.01.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Tandes	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.861.466.237	1.963.720.657	Kec. Tandes
2.2.2.01.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Tegalsari	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.431.723.349	2.559.822.270	Kec. Tegalsari
2.2.2.01.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.776.033.939	1.862.854.167	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.01.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wiyung	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.691.523.030	1.791.599.288	Kec. Wiyung
2.2.2.01.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wonocolo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.648.068.446	1.731.039.708	Kec. Wonocolo
2.2.2.01.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Kec. Wonokromo	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	1.875.826.646	1.989.909.273	Kec. Wonokromo
2.2.2.01.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	37.537.069.328	40.410.004.027	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.01.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	89.284.026.093	95.546.462.654	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.01.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	2.623.219.062	2.709.803.558	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.01.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat DPRD	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	29.005.458.378	30.566.374.459	Sekretariat DPRD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	95.883.665.345	98.338.603.864	
			Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100,00%			
2.2.2.01.02.0001	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	535.176.833	543.328.255	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.02.0002	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	321.351.058	323.991.032	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.02.0003	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.183.514.393	1.210.865.384	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.01.02.0004	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	3.971.832.516	4.090.987.464	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
2.2.2.01.02.0005	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	496.132.451	504.943.030	Badan Perencanaan Pembangunan
2.2.2.01.02.0006	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Kerjasama	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	244.117.040	247.179.664	Bagian Administrasi Kerjasama
2.2.2.01.02.0007	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	158.672.321	160.528.250	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.01.02.0008	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.000.184.654	2.054.658.744	Bagian Administrasi Pembangunan
2.2.2.01.02.0009	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	219.446.376	222.212.934	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
2.2.2.01.02.0010	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	179.209.347	181.675.978	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah
2.2.2.01.02.0011	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Hubungan Masyarakat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	544.042.943	554.172.144	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.01.02.0012	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Hukum	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	292.357.322	296.244.555	Bagian Hukum
2.2.2.01.02.0013	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.718.440.495	1.760.320.416	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset
2.2.2.01.02.0014	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Bagian Organisasi	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	131.123.717	132.963.707	Bagian Organisasi
2.2.2.01.02.0015	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kantor Bagian Umum Dan Protokol	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	4.709.372.868	4.806.745.586	Bagian Umum Dan Protokol
2.2.2.01.02.0016	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.907.334.606	2.972.518.337	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
2.2.2.01.02.0017	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	574.605.729	586.498.372	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.01.02.0018	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	664.611.427	677.334.855	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.02.0019	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	594.244.779	600.372.480	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.2.01.02.0020	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Kesehatan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4.895.855.504	5.037.483.552	Dinas Kesehatan
2.2.2.01.02.0021	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.033.147.905	1.056.885.375	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2.2.01.02.0022	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.380.535.326	1.413.380.108	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.01.02.0023	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	550.872.124	556.492.553	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.2.2.01.02.0024	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	567.362.539	577.863.694	Dinas Lingkungan Hidup
2.2.2.01.02.0025	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	4.767.556.619	4.905.969.376	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.01.02.0026	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pemadam Kebakaran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.452.744.476	1.483.806.474	Dinas Pemadam Kebakaran
2.2.2.01.02.0027	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	510.890.518	516.376.538	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.2.2.01.02.0028	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pendidikan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.830.669.708	2.900.190.802	Dinas Pendidikan
2.2.2.01.02.0029	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.311.145.599	1.339.681.724	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.01.02.0030	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	893.587.668	910.710.657	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.2.01.02.0031	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perdagangan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.250.291.195	1.277.954.441	Dinas Perdagangan
2.2.2.01.02.0032	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perhubungan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.067.376.355	6.331.171.486	Dinas Perhubungan
2.2.2.01.02.0033	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	724.087.560	737.186.536	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.2.2.01.02.0034	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.288.275.776	2.343.998.537	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.01.02.0035	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Sosial	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	1.059.969.858	1.084.102.819	Dinas Sosial
2.2.2.01.02.0036	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Dinas Tenaga Kerja	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	474.715.856	483.743.600	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.01.02.0037	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Inspektorat	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	503.057.984	514.351.029	Inspektorat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.02.0038	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Asemrowo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	321.392.171	325.093.041	Kec. Asemrowo
2.2.2.01.02.0039	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Benowo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	296.456.942	300.937.317	Kec. Benowo
2.2.2.01.02.0040	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Bubutan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	297.216.848	301.904.077	Kec. Bubutan
2.2.2.01.02.0041	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Bulak	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	369.668.330	374.160.178	Kec. Bulak
2.2.2.01.02.0042	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Dukuh Pakis	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	306.008.768	310.265.012	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.01.02.0043	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Gayungan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	309.374.992	313.847.239	Kec. Gayungan
2.2.2.01.02.0044	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Genteng	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	341.648.972	346.388.729	Kec. Genteng
2.2.2.01.02.0045	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Gubeng	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	564.309.668	576.243.516	Kec. Gubeng
2.2.2.01.02.0046	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Gunung Anyar	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	326.808.539	329.937.852	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.01.02.0047	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Jambangan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	406.464.186	411.451.509	Kec. Jambangan
2.2.2.01.02.0048	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Karangpilang	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	286.957.232	290.249.346	Kec. Karangpilang
2.2.2.01.02.0049	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Kenjeran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	344.551.057	349.812.129	Kec. Kenjeran
2.2.2.01.02.0050	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kecamatan Krembangan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	600.691.665	612.742.883	Kec. Krembangan
2.2.2.01.02.0051	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Lakarsantri	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	290.545.774	293.709.375	Kec. Lakarsantri
2.2.2.01.02.0052	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Mulyorejo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	383.978.366	389.942.661	Kec. Mulyorejo
2.2.2.01.02.0053	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Pabean Cantian	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	336.123.697	340.292.194	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.01.02.0054	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Pakal	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	324.199.010	327.834.680	Kec. Pakal
2.2.2.01.02.0055	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Rungkut	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	273.712.446	276.661.178	Kec. Rungkut
2.2.2.01.02.0056	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sambikerep	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	282.220.894	285.086.062	Kec. Sambikerep
2.2.2.01.02.0057	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sawahan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	282.266.068	286.232.576	Kec. Sawahan
2.2.2.01.02.0058	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Semampir	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	411.900.500	418.295.082	Kec. Semampir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.01.02.0059	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Simokerto	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	277.365.255	281.422.898	Kec. Simokerto
2.2.2.01.02.0060	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sukolilo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	548.572.394	559.080.681	Kec. Sukolilo
2.2.2.01.02.0061	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Sukomanunggal	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	290.329.938	295.325.965	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.01.02.0062	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Tambaksari	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	425.864.764	432.218.756	Kec. Tambaksari
2.2.2.01.02.0063	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Tandes	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	366.652.511	371.867.398	Kec. Tandes
2.2.2.01.02.0064	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Tegalsari	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	368.421.636	374.185.050	Kec. Tegalsari
2.2.2.01.02.0065	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	306.771.764	311.054.562	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.01.02.0066	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Wiyung	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	296.151.351	299.424.214	Kec. Wiyung
2.2.2.01.02.0067	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Wonocolo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	317.816.938	322.421.100	Kec. Wonocolo
2.2.2.01.02.0068	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Kec. Wonokromo	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	374.581.875	380.443.575	Kec. Wonokromo
2.2.2.01.02.0069	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	6.991.531.688	7.201.277.571	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.01.02.0070	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor RSUD Dr. Mohamad Soewandie	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	16.155.890.399	16.640.567.101	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.01.02.0071	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	2.566.540.738	2.629.049.697	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.01.02.0072	Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Kantor Sekretariat DPRD	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	5.232.764.524	5.380.288.172	Sekretariat DPRD
2.2.2.2	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				14.042.476.133	19.486.278.004	
2.2.2.02.01	Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai		Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	100,00%	4.299.759.436	4.441.083.317	
2.2.2.02.01.0001	Pengelolaan Data Pegawai	BKD	Jumlah data pegawai yang dikelola	8326 data	398.484.130	416.185.633	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0002	Pengembangan Wawasan Aparatur	BKD	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya	365 orang	1.350.843.222	1.387.651.302	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0003	Penilaian Kinerja Pegawai	BKD	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	7226 orang	614.891.098	642.644.779	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0004	Seleksi Penerimaan ASN	surabaya	Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN	4 tahap	1.935.540.986	1.994.601.603	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02	Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM		Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	52,03%	7.128.157.972	12.360.071.175	
			Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	65,06%			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Kode	Urusan-Program-Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.2.2.02.02.0001	Pelaksanaan Asesmen Pegawai	BKD	Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai	5 kali	611.441.413	5.661.870.760	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0002	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	BKD	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural	2 jenis	1.288.304.352	1.321.913.128	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0003	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	BKD	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial	2 jenis	2.745.067.338	2.823.147.697	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0004	Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	BKD	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	2 jenis	2.111.344.160	2.171.430.215	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0005	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	BKD	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)	3 materi	372.000.709	381.709.375	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03	Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai		Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	100,00%	2.614.558.725	2.685.123.512	
2.2.2.02.03.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	BKD	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya	1005 orang	242.549.116	251.602.599	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03.0002	Penataan Administrasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Diklat	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8437 berkas	682.893.199	699.294.531	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03.0003	Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	BKD	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan rotasi jabatan	118 berkas	1.006.691.119	1.035.045.553	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.03.0004	Pengelolaan Disiplin Pegawai	BKD	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai	596 orang	682.425.291	699.180.829	Badan Kepegawaian dan Diklat
TOTAL					7.337.775.492.098	7.615.797.168.488	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Surabaya, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur

menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel VI.1.

Tabel VI.1
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Realisasi				Target	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
A ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	1.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	80,38	81,07	81,73	82,39*	81-82	81-82
	2.	Persentase Penduduk Miskin	N/A	N/A	N/A	N/A	4,75-4,70%	4,71-4,6%
	3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,46%	5,98%	6,12%	6,1%	6,40%-5,95%	6,30%-5,90%
	4.	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	1,26	1,45	1,73	1,75	1,01	1,04
	5.	Indeks Gini	0,39	0,39	0,39	0,38	0,38-0,37	0,38-0,37
B ASPEK PELAYANAN UMUM								
	1.	IKLHS (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan)	62,09	64,86	64,91	64,97	65	65,1
	2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas	0,78%	0,73%	0,25%	0,00%	0,22%	0,00%
	3.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB	A

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				Target	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Indeks Budaya Lokal	69,37%	70,73%	78,39%	82,42%	80,00%	81,50%
2.	Pertumbuhan Ekonomi	6,00%	6,13%	6,19%	6,4%	6,3-6,7%	6,3-6,8%
3.	Indeks Infrastruktur Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	0,8	0,84

Sumber: RPJMD Kota Surabaya 2016-2021

6.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel VI.2.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

Tabel VI.2
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	64,46%	67,65%	66.36 %	68.07 %	68.89%	70.5%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	92,34%	102,25%	100.51 %	102.40 %	99.85%	100,00%		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	85,14%	89,14%	91.23 %	91.33 %	91.64%	91.99%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	83,75%	100,54%	95.72 %	96.33 %	96.23%	96.59%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	81,07%	75,09%	83.81 %	83.90 %	84.18%	84.5%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0,00%	0.00 %	0.00 %	0.79%	0.73%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	0,00%	0.00 %	0.00 %	0.79%	0.73%		
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,97%	100%	100,00%	100,00%	99.2%	99.25%		
		Angka Melanjutkan	105,51%	93,03%	92.35 %	112.21 %	99.4%	99.5%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		(AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs								
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	116,54%	96,68%	100.00 %	99.69 %	98.4%	98.5%		
		Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi	34,40%	69,87%	75.18 %	78.59 %	30.62%	32.86%		
2	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	13,04%	13,62%	27.27 %	30.47 %	33,00%	39.33%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100,00%	100,00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	76,04	68,73	86.00	85.07	70	70		
4	Meningkatnya kualitas layanan	Cakupan pelayanan ibu nifas	93,88%	94,53%	95.95 %	96.68 %	94.76%	95,00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	85,72	79,4	72.99	59.32	≤ 78.30per 100.000 KH	≤ 75.93per 100.000 KH		
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi	93,73%	95,97%	97.78 %	98.00 %	95.54%	96,00%		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	6,39	5,11	5.04	5.01	≤ 6.34per 1.000 KH	≤ 6.26per 1.000 KH		
		Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	23,81%	88,89%	100,00%	100,00%	85.71%	100,00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase rumah sakit yang terakreditasi	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada	78,91	78,73	86.41	86.43	80	81		
		Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M Soewandie	77,03	81,12	87.72	88.80	75	75		
6	Mewujudkan lingkungan	Persentase kelurahan siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	sehat di masyarakat	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%		
7	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	1,78	1,78	1.73	1.73	1.8-1.9	1.8-1.9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan	94,74%	94,78%	95.62%	95.91%	91,00%	92,00%	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	87,89%	133,82%	134.20%	112.93%	94,00%	95,00%	Perdagangan	Dinas Perdagangan
10	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	5,48	11,21	17.72	24.68	30.54	36.65	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
11	Meningkatkan dan mempertahankan	Persentase atlet yang memiliki prestasi di	48,38%	61,15%	97.59%	98.04%	#N/A	65,00%	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	an prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	tingkat Regional, Nasional dan Internasional								
12	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	50,69%	53,58%	70.04%	70.07%	40>%	40>%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase wirausaha muda yang berdaya	12,24%	7,57%	20.37%	8.10%	7.5%	7.5%		
13	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan	2,15%	2,19%	1.77%	1.84%	2.2%	2.1%	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
14	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	13,03%	12,12%	27.28%	28.24%	15,00%	16,00%	Sosial	Dinas Sosial
15	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	66,38%	73,09%	59.70%	65.79%	80,00%	80,00%	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
16	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender		48,39%	61.29%	70.97%	87.10%	100,00%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kelurahan Ramah Anak	19,48%	32,47%	52.60%	68.18%	84.42%	100,00%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	14,38	13,97	1.18	0.82	16.91	16.57	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
19	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	0,58	0,34	0.37	0.44	0.92	0.88	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun	6,90%	20,69%	24.14%	89.66%	34.48%	41.38%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah								Cipta Karya dan Tata Ruang
21	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum	100,00%	88,89%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pertanahan	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
22	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	0,00%	15,10%	26,47%	52,95	58,55%	75,22%	Pertanahan	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
23	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	1,33%	5,72%	10,93%	7,83%	9,33%	11,20%	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
24	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat	Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	13,90%	16,98%	17,23%	21,08%	20,4%	21,9%	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan									
25	Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Udara Ambien	89,57	90,26	90.26	90.30	85.00	85.25	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air Permukaan	54,9	57,5	57.62	57.68	53.08	53.48		
26	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks penanggulangan bencana	66,59%	104,66%	89.09%	81.74%	80.58%	84.69%	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
27	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	3330,17 Ha	4053,29 Ha	6,086.26 Ha	7,871.92 Ha	9853.57 Ha	11437.03 Ha	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
28	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	65,31%	81,63%	89.80%	102.04%	91.84%	100,00%	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase peran serta masyarakat dalam	35,71%	42,86%	50.00%	92.86%	85.71%	100,00%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif								
29	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	0,00%	9,65%	19.30%	28.95%	35.40%	44.25%	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
30	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	89,79%	90,31%	90.84%	91.47%	91.59%	91.59%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
31	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Persentase koleksi buku yang termanfaatkan	89,58%	133,89%	90.06%	93.61%	79.2%	80.7%	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	65,21%	100%	100%	100%	79.3%	83.2%		
		Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan <i>reading text leveling</i>	72,97%	100%	100%	100%	100%	100,00%		
32	Mewujudkan wawasan, karakter dan	Persentase pertumbuhan partisipasi	N/A	5,38%	3.77%	5.36%	4,00%	4,00%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	nilai-nilai kebangsaan	lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan								
33	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan	N/A	5,64%	7.56%	6.43%	5.59%	5.59%	Perdagangan	Dinas Perdagangan
34	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Persentase realisasi tindak lanjut MoU bidang Perdagangan (G to G dan G to B)	N/A	42,86%	85.71%	114.29%	71.43%	85.71%	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Kerjasama
35	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 pegawai	2	1,03	1.14	1.14	1.21	1.15	Pengawasan	Inspektorat
		Persentase pelanggaran tata kelola administrasi	3,05%	6,60%	31.98%	26.40%	14.2%	16.8%		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan								
		Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten	39,20%	58,38%	67.22%	77.60%	85.41%	93.28%	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat
36	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik	7,04%	20,03%	28.46%	43.97%	40,00%	50,00%	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	79,18%	78,55%	87.32%	89.26%	79,00%	80,00%	Kearsipan	Bagian Umum Dan Protokol
		Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
		Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
		Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	74,24%	73,43%	86.63%	88.56%	68,00%	70,00%	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti	83,33%	81,29%	91.40%	95.80%	90,00%	100,00%	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Bagian Administrasi Kerjasama
		Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	93,67%	91,18%	98.04%	97.06%	92.56%	93.05%	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan
		Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan	100,00%	100%	103.30%	103.66%	100,00%	100,00%	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Bagian Hukum
37	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	87,11	77,63	84.65	82.04	73	74	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	82,81	75,30%	83.69%	85.18%	76,00%	76,00%	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota	Baik	Baik	75.61%	77.75%	80,00%	80,00%	Komunikasi dan Informatika serta Persandian	Bagian Hubungan Masyarakat
38	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	73,32%	69,92%	78.03%	74.67%	79.52%	80.06%	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
		Persentase kontribusi bagi	3,22%	2,45%	2.87%	4.99%	3.6%	3.6%	Kebijakan dan Koordinasi	Bagian Administrasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	penerimaan daerah secara efektif dan efisien	hasil BUMD terhadap PAD							Perangkat Daerah	Perekonomian Dan Usaha Daerah
39	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	17,70%	31,26%	23.26%	79.79%	27,00%	31,00%	Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
40	Meningkatkan produktivitas koperasi	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	3,24%	11,10%	30.40%	32.61%	29,00%	35,00%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
41	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Tingkat Produktivitas budidaya pertanian	4,63 ton/ha	5,24 ton/ha	5.56 ton/ha	5.19 ton/ha	3.88 ton/ha	3.92 ton/ha	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
42	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya	5,17 ton/orang	4,58 ton/orang	5.00 ton/orang	3.94 ton/orang	3.49 ton/orang	3.52 ton/orang	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
43	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	N/A	4,75%	6.75%	7.75%	7,00%	8,00%	Pariwisata	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
44	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata	14,38%	29,94%	44.51%	74.21%	37.21%	45.76%	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
45	Meningkatkan realisasi PMA	Rata- rata pertumbuhan	39,21%	11,88%	32.67	21.57	5,00%	5,00%	Penanaman Modal	Dinas Penanaman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	nilai realisasi investasi								Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan	44,07	26,52	41.31	41.24	40.58	39.77	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
47	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Tingkat kehandalan jaringan jalan	0,402	0,4	0.41	0.41	0.42	0.42	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
48	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio ≤ 0.95	50,00%	66,67%	88.10%	95.12%	38,00%	40,00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
49	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Load factor kendaraan umum (Angkot)	18,25%	30,00%	29.53%	34.37%	28,00%	30,00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	30,96%	35,60%	35.88%	42.08%	40,00%	42,00%		
50	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	Cakupan layanan teknis air bersih	95,51%	96,38%	98.97%	99.90%	100,00%	100,00%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi				Target		Urusan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021		
51	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	7,40%	100%	100.00%	29.39%	14.98%	17.51%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
52	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	N/A	100%	100.00%	100.00%	100,00%	100,00%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan kelima sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

RKPD Kota Surabaya tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2021 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu RKPD Tahun 2021 telah mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN 1

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA-RENJA
PERANGKAT DAERAH
DENGAN
NOMENKLATUR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019

**PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA-RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN NOMENKLATUR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019**

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.01.01.00 01	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.01.02.00 01	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.01.00 01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai / Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah data pegawai yang dikelola	8326 data		Pengelolaan Data Kepegawaian		Pengelolaan Data dan Informasi ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,01	4
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.01.00 02	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai / Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah aparatur yang dikembangkan wawasannya	268 orang		Peningkatan Kapasitas ASN		Peningkatan Kapasitas ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,03	1
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.01.00 03	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai / Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	7226 orang		Pengembangan Penilaian Kinerja ASN		Peningkatan Kapasitas ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,03	2
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.01.00 04	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai / Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah tahapan seleksi penerimaan ASN	4 tahap		Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	1
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.02.00 01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM / Pelaksanaan Asesmen Pegawai	Jumlah pelaksanaan assesmen pegawai	5 kali		Pengembangan Assessment Center		Peningkatan Kapasitas ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,03	3
								Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.02.00 02	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM / Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural		2 jenis	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	4
								Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	5
								Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Disiplin		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	7
								Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Disiplin		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	8
								Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	3
								Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	4
								Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	5

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.02.0003	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM / Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial	2	jenis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pemulaan,		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	7
				Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Pemulaan,				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,02	8		
				Program Peningkatan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Pengembangan Kompetensi Teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.02.0004	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM / Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis	2 jenis		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Pengembangan Kompetensi Teknis		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	4	2	2,01	4
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.02.0005	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM / Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah materi diklat pembelajaran (e-learning)	3 materi		Peningkatan Kapasitas ASN		Peningkatan Kapastitas ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,03	1
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.03.0001	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai / Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah orang yang dilayani administrasi kepegawaiannya	500 orang		Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	3
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.03.0002	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai / Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8326 berkas		Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	3
								Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	4
								Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	5
								Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	9
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	10
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.03.0003	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai /	Jumlah berkas penempatan pegawai, promosi dan mutasi	118 berkas		Penataan dan Mutasi Jabatan		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	2
								Pengelolaan Mutasi ASN		Administrasi Kepegawaian		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,02	7

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Diklat	05	Pelatihan		Penempatan Pegawai, Promosi dan Rotasi Jabatan	promosi dan rotasi jabatan			Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional		Pengelolaan Data dan Informasi ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,01	2
Badan Kepegawaian dan Diklat	2.2.2.02.03.0004	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai / Pengelolaan Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan intervensi pengelolaan disiplin pegawai	296	orang	Pembinaan Disiplin ASN		Pembinaan ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,05	1
								Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Pembinaan ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,05	2
								Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan		Pembinaan ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,05	3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.01.0001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Kesatuan Bangsa / Komunikasi, Informasi dan Edukasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan wawasan kebangsaan	750	orang	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	2	2,01	4
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.01.0002	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Kesatuan Bangsa / Pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi sosial politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemberdayaan	31	lembaga	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	3	2,01	3
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.01.0003	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Kesatuan Bangsa / Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30	kali	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	5	2,01	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.02.00 01	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Jumlah kegiatan kerjasama pengendalian keamanan kota	194	kali	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	7
				Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum / Kerjasama pengendalian keamanan kota					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	6	2,01	4	
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.02.00 02	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Jumlah kegiatan pemantauan dan pengendalian ketenteraman kota	54	kali	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	6	2,01	1
				Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum / Kewaspadaan Nasional Dalam Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Ketenteraman Kota					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	6	2,01	4	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	6	2,01	5
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.2.2.01.01.00 02	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.2.2.01.02.00 02	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.03.00 01	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penanggulangan Bencana Alam / Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	8 jenis		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,02	4
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.03.00 02	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penanggulangan Bencana Alam / Pengembangan Manajemen Tanggap Bencana	Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Penanggulangan Bencana Daerah	2 Kegiatan		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,02	8
								Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,03	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,03	2
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.03.003	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penanggulangan Bencana Alam / Penyediaan Kebutuhan Pokok Korban Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	100 %		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,03	4
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.05.001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam / Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Risiko	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1650	orang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,02	2
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.05.002	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam / Peningkatan Kapabilitas Kesiapsiagaan Menghadapi	Jumlah peserta peningkatan kapabilitas kesiapsiagaan menghadapi bencana	500	orang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,02	2
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.10.001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat / Pelatihan kader perlindungan masyarakat	Jumlah peserta pelatihan kader perlindungan masyarakat	100	orang	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,02	2
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.10.002	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat / Pembinaan Potensi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat	81	kali	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	2	2,01	3
								Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	4
								Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,03	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	1.1.1.05.10.003	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat / Pengendalian Perlindungan Masyarakat	Jumlah orang yang mendukung pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	741	orang	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	3	2,04	3
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	3	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	3	
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	2.2.2.01.01.003	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	2.2.2.01.02.003	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.01.001	Keuangan		Program Penagihan Pajak Daerah / Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah berkas Penagihan dan Pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir yang ditagih dan dilayani	7201	berkas	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.01.00 02	Keuangan		Program Penagihan Pajak Daerah / Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Air Tanah yang ditagih dan dilayani	11224	berkas	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.01.00 03	Keuangan		Program Penagihan Pajak Daerah / Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi, Kompensasi, Keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB	Jumlah berkas Penagihan dan pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang PBB dan BPHTB yang ditagih dan dilayani	196762	berkas	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.02.00 01	Keuangan		Program Pengelolaan Keuangan Daerah / Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani	72000	berkas	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,02	5
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.02.00 02	Keuangan		Program Pengelolaan Keuangan Daerah / Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	245	dokumen	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,02	1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.02.00 03	Keuangan		Program Pengelolaan Keuangan Daerah / Penyusunan Laporan Pertanggungjawab n Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22	dokumen	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,03	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.03.00 01	Keuangan		Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	Jumlah Objek Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	34900	objek pajak	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	4	2,02	9
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.03.00 02	Keuangan		Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir	Jumlah Objek Pajak Hotel, Restoran, PPJ dan Parkir hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	6555	objek pajak	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	4	2,02	9
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.03.00 03	Keuangan		Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah / Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah Objek PBB dan BPHTB hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi	695022	objek pajak	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	4	2,02	9
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.04.00 01	Keuangan		Program Perencanaan Anggaran Daerah / Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4	dokumen	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,01	9
								Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,01	10
								Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,01	11
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.04.00 02	Keuangan		Program Perencanaan Anggaran Daerah / Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perimbangan Keuangan Daerah yang disusun	4	dokumen	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,02	3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.02.04.00 03	Keuangan		Program Perencanaan Anggaran Daerah / Penyusunan APBD, Perubahan APBD, RAPBD dan Anggaran Kas	Jumlah Laporan Penganggaran yang Disusun	5	Laporan	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,01	5

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.04.03.00 01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.1.2.04.03.00 02	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang disusun	4	dokumen	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.2.2.01.01.00 04	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	2.2.2.01.02.00 04	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.01.00 01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan / Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	72	PD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	5
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.01.00 02	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan / Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi	4	dokumen	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	5	2	2,04	1
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.02.00 01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Pengembangan Data dan Informasi / Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola	17	data urusan	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	12	Koordinasi Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	7

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.03.003	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	2
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.04.001	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Kota / Penyusunan Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Induk Sektoral Transportasi dan Drainase	1	dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	1
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.04.002	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Kota / Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pertanahan	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang kota dan pertanahan	1	dokumen	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.05.001	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	9	dokumen	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,02	3
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.06.001	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi / Analisa Kinerja Indikator Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Indikator Ekonomi yang disusun	6	dokumen	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	4	2,01	3
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.06.002	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi / Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun	2	dokumen	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,02	2
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.06.003	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi / Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Perdagangan dan Ketenagakerjaan yang disusun	2	dokumen	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	13	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	2	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.06.00 04	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi / Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Daerah yang disusun	2	dokumen	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	4	2,02	1
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.07.00 01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah / Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	Jumlah Dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Infrastruktur Kota	1	dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	5	2,02	1
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.07.00 02	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah / Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Kajian Pendukung Perencanaan Keciptakaryaan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	1	dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	5	2,01	1
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.08.00 01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan / Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Forum	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Kota Sehat yang difasilitasi	12	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.08.00 02	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan / Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan kesejahteraan rakyat	1	dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	3	2,03	1
Badan Perencanaan Pembangunan	2.1.2.04.08.00 03	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan / Penyusunan Kajian Pendukung Perencanaan Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian pendukung perencanaan tata kelola pemerintahan yang disusun	2	dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	3	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Badan Perencanaan Pembangunan	2.2.2.01.01.00 05	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Badan Perencanaan Pembangunan	2.2.2.01.02.00 05	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Bagian Administrasi Kerjasama	2.1.2.01.20.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Peningkatan Kerjasama Daerah / Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah mitra kerjasama dalam negeri yang difasilitasi	20	lembaga	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Fasilitasi Kerjasama Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,04	1
Bagian Administrasi Kerjasama	2.1.2.01.20.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Peningkatan Kerjasama Daerah / Fasilitas Kerjasama Luar Negeri	Jumlah mitra kerjasama luar negeri yang difasilitasi	10	lembaga	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Fasilitasi Kerjasama Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,04	2
Bagian Administrasi Kerjasama	2.1.2.01.20.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Peningkatan Kerjasama Daerah / Fasilitas Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi	88	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Bagian Administrasi Kerjasama	2.1.2.01.20.00 04	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Peningkatan Kerjasama Daerah / Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah mitra kerjasama daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	35	lembaga	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Fasilitasi Kerjasama Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,04	3
Bagian Administrasi Kerjasama	2.2.2.01.01.00 06	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Bagian Administrasi Kerjasama	2.2.2.01.02.00 06	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90	15	-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2.1.2.01.14.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat / Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang kesejahteraan masyarakat yang disusun	2	dokumen	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,02	2
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2.1.2.01.14.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat / Evaluasi Bidang Ketahanan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi bidang ketahanan masyarakat yang disusun	1	dokumen	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,02	3
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2.1.2.01.14.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat / Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat yang disusun	1	dokumen	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,02	3
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2.2.2.01.01.00 07	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	2.2.2.01.02.00 07	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Pembangunan	2.1.2.01.16.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan / Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16	dokumen	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Administrasi Pembangunan	2.1.2.01.16.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan / Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	72	lembaga	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,02	2
Bagian Administrasi Pembangunan	2.1.2.01.16.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan / Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6	sistem	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,02	2
Bagian Administrasi Pembangunan	2.1.2.01.16.00 04	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan / Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6	dokumen	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Administrasi Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,02	1
Bagian Administrasi Pembangunan	2.2.2.01.01.00 08	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Pembangunan	2.2.2.01.02.00 08	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.1.2.01.09.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Daerah Otonom / Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	dokumen	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,03	2
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.1.2.01.09.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Daerah Otonom / Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Jumlah pelaksanaan evaluasi perkembangan kelurahan	1	kali	Evaluasi Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.1.2.01.09.003	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Daerah Otonom / Fasilitas Permasalahan Pertanahan Kota Surabaya	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan Kota Surabaya	720	kali	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Administrasi Tata Pemerintahan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,01	2
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.1.2.01.09.004	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Daerah Otonom / Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah objek rupabumi yang berpotensi diajukan pembakuan	115	objek	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Administrasi Tata Pemerintahan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,01	2
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.1.2.01.09.005	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Daerah Otonom / Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	16	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.1.2.01.09.006	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Daerah Otonom / Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembinaan administrasi umum pemerintahan	185	lembaga	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	2
								Penataan Administrasi Pemerintahan		Administrasi Tata Pemerintahan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,01	1
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.1.2.01.09.007	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Daerah Otonom / Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen Penataan, Pembinaan dan Penegasan Wilayah Kecamatan	1	dokumen	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Administrasi Tata Pemerintahan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,01	2
								Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	15
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.2.2.01.01.009	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.2.2.01.02.009	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	2.1.2.01.08.00.01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD / Monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9	BUMD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,01	1
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	2.1.2.01.18.00.01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian / Analisa dan Evaluasi Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12	laporan	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,01	2
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	2.1.2.01.18.00.02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perekonomian / Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Mikro	2	dokumen	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,01	3
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	2.2.2.01.01.00.10	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	2.2.2.01.02.00.10	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Hubungan Masyarakat	2.1.2.01.15.00.01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan / Pelaksanaan Komunikasi Informasi Media Massa	Jumlah Pelaksanaan Komunikasi Media Massa	1998	kali	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	12

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Hubungan Masyarakat	2.1.2.01.15.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan / Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	89	kali	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	12
Bagian Hubungan Masyarakat	2.1.2.01.15.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan / Penyusunan Dokumentasi, Data dan Informasi	Jumlah Dokumentasi, Data dan Informasi disusun	9	dokumen	Pelayanan Informasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	6
Bagian Hubungan Masyarakat	2.2.2.01.01.00 11	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Hubungan Masyarakat	2.2.2.01.02.00 11	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Hukum	2.1.2.01.11.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum daerah	12	dokumen	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,03	1
Bagian Hukum	2.1.2.01.11.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	65	permasalahan hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,03	2
Bagian Hukum	2.1.2.01.11.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70	rancangan produk hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,03	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Hukum	2.1.2.01.11.00 04	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan / Publikasi Produk Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	70	produk hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	2	2,03	3
Bagian Hukum	2.2.2.01.01.00 12	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Hukum	2.2.2.01.02.00 12	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.1.2.01.17.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset / Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah berkas penetapan Penghapusan Aset/Barang Daerah	6	Berkas	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	9
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.1.2.01.17.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset / Monitoring Pencatatan Barang Milik Daerah	Jumlah perangkat daerah yang pencatatan Barang Milik Daerah nya dimonitor	72	lembaga	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	5
								Inventarisasi Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	6
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	3
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.1.2.01.17.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset / Pelayanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	900	dokumen	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Pengadaan Barang dan Jasa		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	3	2,03	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.1.2.01.17.00 04	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset / Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2526	unit	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	4
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.1.2.01.17.00 05	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset / Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	8891	stel	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,04	2
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.1.2.01.17.00 06	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan Aset / Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	3179	unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,03	13
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.2.2.01.01.00 13	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	2.2.2.01.02.00 13	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Organisasi	2.1.2.01.10.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan / Monitoring Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan monitoring	254	lembaga	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Penataan Organisasi		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Bagian Organisasi	2.1.2.01.10.00.02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan / Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Penyusunan Standar Kompetensi	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta standar kompetensi yang disusun	1	dokumen	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Penataan Organisasi		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,02	1
Bagian Organisasi	2.1.2.01.10.00.03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan / Pelaksanaan Analisis Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisis kelembagaan yang disusun	1	dokumen	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Penataan Organisasi		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,02	1
Bagian Organisasi	2.1.2.01.10.00.04	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan / Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah POS perangkat daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi	155	POS	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Penataan Organisasi		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,02	3
Bagian Organisasi	2.1.2.01.10.00.05	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan / Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah unit layanan publik yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat	254	lembaga	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Penataan Organisasi		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,02	2
Bagian Organisasi	2.1.2.01.19.00.01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja / Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen pendampingan penyusunan laporan kinerja dan monitoring implementasi reformasi birokrasi yang disusun	2	dokumen	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Penataan Organisasi		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,02	3
Bagian Organisasi	2.2.2.01.01.00.14	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Bagian Organisasi	2.2.2.01.02.00.14	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
				Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil	Persentase			Fasilitasi Keprotokolan	23	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,03	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Bagian Umum Dan Protokol	2.1.2.01.12.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Daerah/wakil Kepala Daerah / Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		SEKRETARIAT DAERAH	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	1	4	2,03	2	
				Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX			1	2,03	18			
Bagian Umum Dan Protokol	2.1.2.04.03.00 04	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	1	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX			1	2,03	1			
Bagian Umum Dan Protokol	2.2.2.01.01.00 15	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Bagian Umum Dan Protokol	2.2.2.01.02.00 15	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase Kelayakan dan Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100 %		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,03	32	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX			1	2,03	31			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		X	XX			1	2,03	33			
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.1.03.04.00 01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi / Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hemat Energi	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	2000 titik		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.1.03.04.00 02	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi / Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	6674 rekening		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.1.03.04.00 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi / Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipelihara	73680	titik	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.01.00 01	Lingkungan Hidup		Program Kebersihan / Operasional dan Penyediaan Sarana Posko Kebersihan	Jumlah operasional peningkatan pelayanan posko kebersihan yang dilaksanakan	104	Kegiatan	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.01.00 02	Lingkungan Hidup		Program Kebersihan / Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan jalan dan jalur pedestrian	364	lokasi	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Pengelolaan Sampah		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	11	2,01	3
								Penyediaan Sarana Persampahan		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	4	2,01	6
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.01.00 03	Lingkungan Hidup		Program Kebersihan / Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah lokasi operasional pembersihan sampah di saluran	550	lokasi	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Pengelolaan Sampah		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	11	2,01	3
								Penyediaan Sarana Persampahan		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	4	2,01	6
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.01.00 04	Lingkungan Hidup		Program Kebersihan / Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267	lokasi	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Pengelolaan Sampah		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	11	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.03.00 01	Lingkungan Hidup		Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri / Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah kompetisi pengelolaan kebersihan yang diselenggarakan	3 kali		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	9	2,01	1
								Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,02	1
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.05.00 01	Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Air Limbah Kota / Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Air Limbah	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96	lokasi	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	5	2,01	10
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.05.00 02	Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Air Limbah Kota / Penyediaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	34	lokasi	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Pengelolaan Sampah		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	11	2,01	3
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.07.00 01	Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau / Pemeliharaan, Penyediaan dan Penataan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	425	lokasi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	4	2,01	4
								Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	4	2,01	5
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.07.00 02	Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau / Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	15	lokasi	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.07.0003	Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau / Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Taman Kota	Jumlah taman yang dipelihara	39	lokasi	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	4	2,01	4
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.08.0001	Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Sampah dan Limbah / Penanganan Limbah B3	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1	Kegiatan	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.11.0002	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau / Operasional sarana dan prasarana Kebersihan	Jumlah sarana kebersihan yang dikelola	21	unit	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		Pengelolaan Sampah		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	11	2,01	5
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.11.0003	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau / Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan RTH	Jumlah sarana dan prasarana kebersihan dan RTH yang disediakan	1688	unit	Penyediaan Sarana Persampahan		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	4	2,01	6
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.11.0004	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau / Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Jumlah Rekening Pengolahan Sampah yang Dibayar	1	rekening	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.11.0005	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau / Pemeliharaan prasarana kebersihan dan sarana	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	183	lokasi	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.1.2.05.11.0006	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau / Penyediaan Sarana dan Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Makam	Jumlah Pemakaman yang dibangun/rehab dan dipelihara	14	lokasi	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	1.2.2.02.01.0001	Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif / Pendampingan Pengembangan Energi Alternatif di Masyarakat	Jumlah lokasi pendampingan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	3	Lingkungan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	8	2,01	2
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	2.2.2.01.01.0016	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	2.2.2.01.02.0016	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.1.2.12.01.0001	Kebudayaan		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal / Fasilitasi penyelenggaraan even budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	440	kali	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	2	2,01	2
								Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	2	2,01	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.1.2.12.01.0002	Kebudayaan		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal / Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Lokal	Jumlah pelaksana festival budaya lokal	3	kali	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	2	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.1.2.12.01.003	Kebudayaan		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal / Monitoring penyelenggaraan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah ruang publik dan usaha pariwisata yang dimonitoring	14	lokasi	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	3	2,01	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.1.2.12.02.001	Kebudayaan		Program Perlindungan Budaya Lokal / Monitoring dan evaluasi cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	250	lokasi	Register Cagar Budaya		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	5	2,01	1
								Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	5	2,02	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.1.2.12.02.002	Kebudayaan		Program Perlindungan Budaya Lokal / Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan nilai-nilai sejarah	9	kali	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	4	2,01	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.01.001	Pariwisata		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata / Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah TDUP Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata yang diproses	400	berkas	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,04	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.01.002	Pariwisata		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata / Pelayanan perizinan dan non perizinan usaha rekreasi dan Hiburan Umum	Jumlah Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang diproses	169	berkas	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,04	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.02.00	Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata / Fasilitas	Jumlah fasilitasi	246	kali	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	3	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
dan Pariwisata	01	Pariwisata		Pariwisata / Fasilitas promosi wisata	promosi wisata	240 kali		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	3	2,01	4
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.02.00 02	Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata / Penyelenggaraan even di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	93 kali		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,01	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.02.00 03	Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata / Penyelenggaraan even di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	Jumlah penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan dan Balai Pemuda	41 kali		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,01	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.02.00 04	Pariwisata		Program Pemasaran Pariwisata / Penyelenggaraan pemilihan dan pengiriman duta wisata	Jumlah kegiatan pemilihan dan pengiriman duta wisata yang diselenggarakan dan diikuti	66 kali		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	3	2,01	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.03.00 01	Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Wisata / Fasilitasi Pelatihan dan Pertunjukan di Destinasi Wisata	Jumlah Pelatihan dan pertunjukan seni budaya di destinasi wisata yg difasilitasi	770 kali		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.03.00 02	Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Wisata / Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor Pariwisata	Jumlah kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM di sektor pariwisata yang dilaksanakan	3 kali		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	5	2,01	3
								Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	5	2,01	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.03.00 03	Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Wisata / Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata THP Kenjeran, wisata air kalimas dan Wisata Religi Ampel	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	3 lokasi		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	30	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,03	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.03.0004	Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Wisata / Pemeliharaan dan penyediaan Sarana Penunjang obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah obyek wisata yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	2	lokasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,03	4
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.03.0005	Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Wisata / Peningkatan Destinasi Wisata	Jumlah Penyelenggaraan Event Peningkatan Destinasi Wisata	6	kali	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,03	3
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.03.0006	Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Wisata / Bantuan Operasional Penyelenggaraan	Jumlah museum yang dipelihara	6	lokasi	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	22	6	2,01	1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.03.0007	Pariwisata		Program Pengembangan Destinasi Wisata / Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan	280	orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	2	2,03	6
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.04.0001	Pariwisata		Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata / Forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pelaku usaha industri pariwisata	6	kali	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	5	2,01	2
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.2.2.01.04.0002	Pariwisata		Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata / Monitoring dan evaluasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata serta usaha rekreasi dan hiburan umum pariwisata	Jumlah lokasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang dimonitor dan dievaluasi	6	lokasi	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.2.2.01.01.00 17	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.2.2.01.02.00 17	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.01.00 01	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga / Operasional Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang difasilitasi	11 unit		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.01.00 02	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga / Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang dibangun dan ditingkatkan	52 unit		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	3	2,01	3
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.01.00 03	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga / Penyediaan Sarana Olahraga	Jumlah Sarana Olahraga yang Disediakan	6 jenis		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.01.00 04	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga / Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah dokumen perencanaan prasarana olahraga yang disusun	58 dokumen		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.01.0005	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga / Perbaikan Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana Olahraga yang Diperbaiki	133	unit	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.02.0001	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi yang difasilitasi	41	kali	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	3	2,03	3
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.02.0002	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Fasilitas Kegiatan Pembinaan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi dan tradisional	14	kali	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	3	2,05	4
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.02.0003	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Anak	26	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.02.0004	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	10	kali	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	3	2,03	3
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.02.0005	Kepemudaan dan Olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga / Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Rekreasi yang diselenggarakan	29	kali	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	3	2,05	4
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.03.0001	Kepemudaan dan Olahraga		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan / Pembentukan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	Jumlah Peserta Pemuda yang mendapatkan pembinaan untuk menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja	4565	peserta	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten /kota	33	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	2	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.03.00 02	Kepemudaan dan Olahraga		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan / Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan	30 kali		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	2	2,01	8
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.04.00 01	Kepemudaan dan Olahraga		Program Peningkatan Prestasi Pemuda / Pelatihan Seni Musik Modern di Rumah Kreatif	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan seni musik modern di rumah kreatif	710	orang	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	5	2,01	5
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.1.2.11.04.00 02	Kepemudaan dan Olahraga		Program Peningkatan Prestasi Pemuda / Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan	1050	Orang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	2	2,01	2
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.2.2.01.01.00 18	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.2.2.01.02.00 18	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kependudukan	1.1.2.06.01.00	Administrasi Kependudukan dan		Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil /	Jumlah berkas permohonan akta kelahiran dan	104682	berkas	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	3	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
dan Pencatatan Sipil	01	kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian	kelahiran dan kematian yang dilayani	104000	berkas	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Pelayanan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	3	2,01	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.01.00 02	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil / Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan	Jumlah berkas permohonan perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan yang dilayani	3250	berkas	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	3	2,01	2
								Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		Pelayanan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	3	2,01	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.02.00 01	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk / Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Blanko dan Formulir Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bersumber dari DAK yang disediakan	200000	berkas	Pengadaan Blanko Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Penataan Administrasi Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	4	2,02	2
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.02.00 02	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk / Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP-el	Jumlah berkas permohonan kartu keluarga dan KTP-el yang dilayani	398986	berkas	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	2	2,01	2
								Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	2	2,01	3
								Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	2	2,01	4
				Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	2	2,01	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.02.0003	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Pendaftaran Penduduk / Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah permohonan berkas pindah datang dan pendataan penduduk Non Permanen	40930	berkas	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	2	2,01	2
				Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk					Pelayanan Pendaftaran Penduduk		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	2	2,01	3	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.03.0001	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemanfaatan Data Kependudukan / Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan monitoring pemanfaatan data kependudukan yang dilaksanakan	2 kali		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		Penyusunan Profil Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	5	2,01	2
								Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Penyusunan Profil Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	5	2,01	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.03.0002	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemanfaatan Data Kependudukan / Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pelayanan kerjasama pemanfaatan data dan rekomendasi inovasi pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 dokumen		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	4	2,01	5
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.04.0001	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan / Pemutakhiran Data Kependudukan	data kependudukan yang di mutakhirkan	146684	data	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	4	2,01	2
								Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	4	2,01	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1.2.06.04.00 02	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan / Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sistem informasi administrasi kependudukan yang dikembangkan dan dipelihara	8	sistem	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1.2.04.03.00 05	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	5	2	2,02	8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.2.2.01.01.00 19	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.2.2.01.02.00 19	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.01.00 01	Kesehatan		Program Jaminan Kesehatan / Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	597609	orang	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	26
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.01.00 02	Kesehatan		Program Jaminan Kesehatan / Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (DBHCHT))	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan	332733	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.02.0001	Kesehatan		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu / Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan yang diadakan	90	jenis	Pengadaan Obat, Vaksin		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	16
								Pengadaan Bahan Habis Pakai		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	17
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,01	1
								Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,01	2
								Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,01	3
								Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.02.0002	Kesehatan		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu / Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan dasar di Puskesmas yang diadakan	18	jenis	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.05.0001	Kesehatan		Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / Jaminan Persalinan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Kunjungan Ibu yang mendapatkan perawatan kehamilan, persalinan dan nifas serta perawatan bayi baru lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	691	kunjungan	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.05.0002	Kesehatan		Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / Pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah Lembaga yang melakukan Upaya Pelayanan Kesehatan Keluarga	64	Lembaga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	1
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	7
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	2
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	3
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	6
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	5
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.05.00.03	Kesehatan		Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah ibu, calon pengantin wanita (CPW), dan balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	354	orang	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	15
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.06.00.01	Kesehatan		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154	lembaga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	11
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	25
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	12
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	25
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	10

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.06.00 02	Kesehatan		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah lembaga yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular	154	lembaga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	21
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	22
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	8
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	9
								Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	27
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.06.00 03	Kesehatan		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit / Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Surveilans Terpadu dan Pembinaan Imunisasi	63	lembaga	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	36
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	20
								Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	37

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	13
								Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	28
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.07.00 01	Kesehatan		Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat / Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah lembaga yang melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan	64	lembaga	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.07.00 02	Kesehatan		Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat / Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	Jumlah lembaga yang melakukan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	63	lembaga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	4
								Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	5	2,01	1
								Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	5	2,03	1
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.07.00 03	Kesehatan		Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat / Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63	lembaga	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	18
								Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	5	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	5	2,02	1
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.07.00 04	Kesehatan		Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat / Penyelenggaraan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melakukan Upaya Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	63	lembaga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	17
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	16
								Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	29
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,04	1
								Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,05	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.11.00 01	Kesehatan		Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji / Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan dan siap saji	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	5442	sampel	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,03	1
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,06	1	
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	4	2,06	2	
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.14.00 01	Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan / Pengadaan Sarana Kesehatan Dasar (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Sarana Kesehatan Dasar yang diadakan	1	jenis	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.14.00 02	Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan / Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah sistem informasi manajemen kesehatan yang dikembangkan	1	aplikasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,03	1
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,03	2	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Kesehatan				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,03	3
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.14.00 03	Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan / Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Penunjang Operasionalnya	63	Lembaga	Operasional Pelayanan Puskesmas		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	33
								Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	34
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.17.00 01	Kesehatan		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Akreditasi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi	3	lembaga	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.17.00 02	Kesehatan		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah lembaga yang melaksanakan pelayanan kesehatan primer	64	lembaga	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	35
								Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,04	3
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.17.00 03	Kesehatan		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Pembinaan dan Pengawasan Sarana Kesehatan Rujukan	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dibina dan Diawasi	134	lembaga	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,04	4
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,04	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,04	2
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.17.00 04	Kesehatan		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Penanggulangan Kejadian Darurat dan Pasca Kejadian Darurat	Jumlah lokasi kejadian kegawatdaruratan yang dilayani	900	lokasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan untuk Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	14
								Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	24
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.17.00 05	Kesehatan		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan / Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus dan Tradisional	Jumlah lembaga yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan khusus dan tradisional	64	lembaga	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	23
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	19
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.18.00 01	Kesehatan		Program Sumber Daya Kesehatan / Analisa Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5	dokumen	Pengembangan Puskesmas		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	6
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,01	1
								Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.18.00 02	Kesehatan		Program Sumber Daya Kesehatan / Pembinaan dan pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM di bidang kesehatan	27	kali	Sertifikasi Tenaga Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,04	2
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,02	1
								Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,02	3
								Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,03	1
								Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,03	2
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,05	1
								Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,04	1
								Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,05	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.18.0003	Kesehatan		Program Sumber Daya Kesehatan / Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	30	jenis	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	14
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	20
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.18.0004	Kesehatan		Program Sumber Daya Kesehatan / Penyediaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan pengendalian penyakit yang diadakan	2	item	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.18.0005	Kesehatan		Program Sumber Daya Kesehatan / Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan(DBHCHT)	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	1	Jenis	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.18.0006	Kesehatan		Program Sumber Daya Kesehatan / Pengadaan bahan habis pakai penanggulangan TBC (DAK bidang kesehatan)	Jumlah bahan habis pakai penanggulangan TBC	3	Item	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Kesehatan	1.1.1.02.18.0007	Kesehatan		Program Sumber Daya Kesehatan / Pengadaan Alat Kesehatan penurunan stunting (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	3	item	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
				Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah /	Jumlah Dokumen			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Dinas Kesehatan	2.1.2.04.03.0006	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X	XX	1	2,01	2
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					X	XX	1	2,01	4
Dinas Kesehatan	2.2.2.01.01.0020	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Dinas Kesehatan	2.2.2.01.02.0020	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.1.2.03.01.0001	Pangan		Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan / Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring	15	laporan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Penyusunan Peta Ketahanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	9	4	2,01	1	
								Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	9	3	2,01	4	
								Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	9	3	2,04	1	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	9	3	2,01	1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.1.2.03.02.00 01	Pangan		Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan / Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan yang Beredar	Jumlah sampel produk pangan segar yang diperiksa	2060	sampel	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	9	5	2,01	1
								Belum ada di dalam Permendagri 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Belum ada di dalam Permendagri 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.1.2.03.02.00 02	Pangan		Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan / Pengelolaan Sentra Olahan Pangan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Olahan Pangan Yang Dilaksanakan	11	kali	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	9	3	2,04	2
								Belum ada di dalam Permendagri 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.1.2.03.02.00 03	Pangan		Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan / Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Diversifikasi Pangan	28	kali	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	9	3	2,04	2
								Belum ada di dalam Permendagri 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Belum ada di dalam Permendagri 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.1.2.05.06.00 01	Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya / Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Hutan Raya	Jumlah Taman Hutan Raya yang dibangun dan dipelihara	12	lokasi	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	28	4	2,01	9
								Pengelolaan Kebun Raya		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	4	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.04.01.001	Kelautan dan Perikanan		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan / Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Jumlah pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	30	kali	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,02	4
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.04.02.001	Kelautan dan Perikanan		Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan / Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dipelihara dan diadakan	349	unit	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,04	1
								Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,04	4
								Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,04	7
								Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,04	5
								Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,04	6
								Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	4	2,01	2
								Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,04	2
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	3	2,04	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.04.02.00 02	Kelautan dan Perikanan		Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan / Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah unit sarana dan prasarana perikanan tangkap yang dipelihara dan diadakan	33	unit	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	4	2,01	1
								Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	2	2,01	3
								Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	25	2	2,01	2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.04.02.00 03	Kelautan dan Perikanan		Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan / Pengawasan dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir	Jumlah laporan kegiatan pengawasan dan rehabilitasi kawasan pesisir	12	laporan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,01	1
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.01.00 01	Pertanian		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian / Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diproses	255	berkas	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	6	2,01	2
								Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	6	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.02.00 01	Pertanian		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak / Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan serta Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis	1562	kali	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	4	2,02	3
				Belum ada di dalam Permendagri 90					-		-		-				-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.03.00 01	Pertanian		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan / Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	8	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.03.00 02	Pertanian		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan / Penyediaan Sarana Budidaya	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6	jenis	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.04.00 01	Pertanian		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura / Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan teknologi tepat guna budidaya	Jumlah peserta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Budidaya Pangan dan Hortikultura	300	orang	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	2	2,01	1
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Rumpun					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	5	2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.04.00 02	Pertanian		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura / Pembibitan	Jumlah bahan pembibitan yang disediakan	13	jenis	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.04.00 03	Pertanian		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura / Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	Jumlah peserta pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	125	orang	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	7	2,01	1
								Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.05.00 01	Pertanian		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan / Promosi Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran produk pertanian yang dilaksanakan	72	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-		-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.06.00 01	Pertanian		Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura / Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah peserta pembinaan pemanfaatan lahan pekarangan	525	orang	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	2	2,01	2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.2.2.05.06.00 02	Pertanian		Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura / Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang disediakan dan dipelihara	5	Jenis	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	5	2,01	1
					Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian				Pengembangan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	3	2,01	3	
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	5	2,01	2	
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.2.2.01.01.00 21	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-		-	-	-	-	-
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.2.2.01.02.00 21	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-		-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.01.001	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika / Layanan Sistem Informasi Pemerintahan dan Publik	Jumlah layanan sistem informasi pemerintahan dan publik yang disediakan	396	lokasi	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,01	2
								Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Smart		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	9
								Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	10
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.01.002	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaksanakan	72	lokasi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	1
								Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	2
								Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	11
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.01.003	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika / Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang Dibangun	15	aplikasi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	7
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.01.004	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika / Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen yang dipelihara dan dikembangkan	150	Aplikasi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	7

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.02.00 01	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik / Pelayanan Keluhan dan Pengaduan Masyarakat, Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat, permohonan informasi dan dokumentasi publik yang dilayani	3000	berkas	Pelayanan Informasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	6
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.02.00 02	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik / Pengelolaan Saluran Komunikasi	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	19	Saluran	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	4
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.02.00 03	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik / Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Jumlah pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial	11	kali	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	10
								Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	8
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.02.00 04	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik / Penyusunan Dokumen Analisa Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data Dan Informasi Pemerintah Daerah yang disusun	5	dokumen	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	1
								Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	2
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.02.00 05	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik / Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	4	Jenis	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	2	2,01	5
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.03.00 01	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Pelaksanaan Sistem Persandian Perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Persandian Perkotaan yang dikelola	1289	unit	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	21	2	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.03.00 02	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Pembangunan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana TIK	74	lokasi	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,01	3
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.03.00 03	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK	4	Jenis	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,01	3
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.03.00 04	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Penanganan Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi	Persentase Serangan terhadap Sistem Keamanan Informasi yang ditangani	100	persen	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	21	2	2,01	4
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.09.03.00 05	Komunikasi dan Informatika serta Persandian		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Pengelolaan Pusat Data	Jumlah Pusat Data yang dikelola	2	Lokasi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	16	3	2,02	3
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.1.2.16.01.00 01	Statistik		Program Pengelolaan Data Statistik Daerah / Penyusunan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik daerah yang disusun	1	dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	20	2	2,01	1
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.2.2.01.01.00 22	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.2.2.01.02.00 22	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90	57	-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.02.002	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pengembangan Produk Usaha Mikro / Pembinaan Pelaku Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	858	orang	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	8	2,01	1
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.03.001	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pengembangan Sentra Usaha / Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang difasilitasi	60	sentra usaha	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	8	2,01	1
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.03.003	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pengembangan Sentra Usaha / Pembinaan Pelaku Usaha di Sentra Usaha	Jumlah sentra usaha yang pelaku usahanya mendapatkan pembinaan	49	sentra usaha	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	8	2,01	1
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.04.001	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pengembangan Usaha Koperasi / Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	175	koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	6	2,01	1
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.04.003	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pengembangan Usaha Koperasi / Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	178	Orang	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	6	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.05.001	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi / Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi	Jumlah kelompok yang mendapatkan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kualitas koperasi	50	kelompok	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	2	2,01	1
								Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotai		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	2	2,02	1
								Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Koperasi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	5	2,01	1
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.05.002	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi / Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	629	koperasi	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	3	2,01	2
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.05.003	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Penguatan Kelembagaan Koperasi / Penilaian Kinerja Koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai kinerjanya	35	koperasi	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	3	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.1.2.15.06.00 01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro / Fasilitas Kemitraan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan	175	orang	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	17	7	2,01	2
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.2.2.01.01.00 23	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	2.2.2.01.02.00 23	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.02.00 01	Lingkungan Hidup		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup / Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	100	izin	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	6	2,01	1
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.02.00 02	Lingkungan Hidup		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup / Pelayanan Rekomendasi dan Izin Lingkungan	Jumlah rekomendasi dan izin lingkungan yang diterbitkan	2	berkas	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH		Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	6	2,01	1
								Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Penyimpanan Sementara Limbah B3		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	5	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.02.003	Lingkungan Hidup		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup / Peningkatan Pelayanan Perijinan Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	100	izin	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Penyimpanan Sementara Limbah B3		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	5	2,01	2
								Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	5	2,02	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	5	2,02	2
								Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	6	2,01	3
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.04.001	Lingkungan Hidup		Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga / Peningkatan Kualitas Sarana Sanitasi Permukiman	Jumlah lokasi rumah yang terpasang jamban	400	Unit	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,02	3
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.09.001	Lingkungan Hidup		Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan / Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	96	lokasi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.09.00.02	Lingkungan Hidup		Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan / Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Monitoring Udara Ambien dan Data Display	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublish dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun sebanyak	365	data	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,02	1
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.09.00.03	Lingkungan Hidup		Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan / Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir	Jumlah data air laut (dari 48 sampel) dan kuantitas/kualitas Air Bawah Tanah (730 data dari 2 sumur pantau selama satu tahun) yang didapat sebanyak	778	data	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,02	1
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.09.00.04	Lingkungan Hidup		Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan / Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50	obyek	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	10	2,01	2
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.09.00.05	Lingkungan Hidup		Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan / Pengawasan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah kegiatan usaha yang diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254	lembaga	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	6	2,01	3
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.09.00.06	Lingkungan Hidup		Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan / Pengujian Kualitas Air dan Udara Ambien	Jumlah sampel air dan udara ambien yang diuji dan dianalisa	224	sampel	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,02	1
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.10.00.01	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup / Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	113	kali	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.10.002	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup / Penyelenggaraan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang diselenggarakan	12	kali	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	8	2,01	2
Dinas Lingkungan Hidup	1.1.2.05.10.003	Lingkungan Hidup		Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup / Penyusunan Kajian Pemeliharaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	5	dokumen	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	2	2,01	1
								Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup		Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	2	2,02	3
								Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	4	2,01	1
								Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	9	2,01	1
Dinas Lingkungan Hidup	1.2.2.02.03.001	Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Upaya Konservasi Energi / Pembinaan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pembinaan pengusahaan konservasi energi	120	lembaga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	11	3	2,01	2
Dinas Lingkungan Hidup	2.2.2.01.01.0024	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Lingkungan Hidup	2.2.2.01.02.0024	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.01.0001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur / Fasilitasi dan Rekomendasi Teknis Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan	Jumlah rekomendasi teknis pendukung penunjang ifrastruktur	180	rekomendasi	Pengelolaan Leger Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	3
								Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	4
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.03.0001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan / Fasilitasi Penunjang Penyediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah dokumen fasilitas penunjang penyediaan jaringan air bersih/air minum	2	dokumen	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.03.0002	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan / Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Jumlah peralatan dan alat angkut yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan sebanyak	220	unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,03	30
								Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,03	40
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.03.0003	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan / Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	Jumlah lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan (DAK FISIK)	1	lokasi	Pemeliharaan Berkala Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	10
								Pelebaran Jalan Menambah Lajur		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	7

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.03.0004	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan / Pembangunan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang dibangun	24	lokasi	Pelebaran Jembatan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	17
								Pembangunan Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	5
								Pembangunan Flyover		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	13
								Pembangunan Underpass		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	14
								Pembangunan Jembatan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	12
								Pelebaran Jalan Menuju Standar		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	6
								Rekonstruksi Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	8
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1.1.1.03.03.00	Pekerjaan Umum dan		Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan /	Jumlah lokasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya yang	1466	lokasi	Rehabilitasi Jembatan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	18
								Rehabilitasi Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	9
								Pemeliharaan Berkala Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	10

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	06	Penataan Ruang		Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Kelengkapannya yang dipelihara/direhabilitasi	1400	lokasi	Pemeliharaan Rutin Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	11	
								Pemeliharaan Rutin Jembatan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	19	
								Pemeliharaan Berkala Jembatan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	20	
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.05.001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota / Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Jumlah unit pompa yang dipelihara selama 12 bulan sebanyak	56	unit	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	28	
								Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	55	
								Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	56	
								Pembangunan Stasiun Pompa Banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	13	
								Peningkatan Stasiun Pompa Banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	38	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.05.00 02	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota / Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pematusan	24	lokasi	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	6
								Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	5
								Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	6
								Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	8
								Pembangunan Tanggul Sungai		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	9
								Peningkatan Tanggul Sungai		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	34
								Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	11

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	36
								Pembangunan Polder/Kolam Retensi		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	14
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.05.0004	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota / Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	Jumlah Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Boezem	1025	lokasi	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	7
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	9
								Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	21
								Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	49
								Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	46

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Rehabilitasi Tanggul Sungai		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	24
								Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	26
								Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	29
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.07.0001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan / Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	12	dokumen	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.07.0003	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan / Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	37	dokumen	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	1
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	4
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.08.0001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan / Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	22	dokumen	Supervisi Pembangunan/Penigkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.08.0003	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan / Penyusunan Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota yang disusun	52	dokumen	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	2	2,01	3
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan					Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	1	
				Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan					Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	2	
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.1.03.09.0001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas / Fasilitas Perijinan Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Jumlah ijin Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas yang diterbitkan	10	izin	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,03	1
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.2.04.02.0001	Pertanahan		Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum / Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Jumlah lokasi tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur	3	lokasi	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	10	2,01	2
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	1.1.2.04.05.0001	Pertanahan		Program Pengamanan Aset Infrastruktur / Pengamanan Aset Infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset infrastruktur yang diamankan	40	bidang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Kabupaten/Kota	70	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	2.1.2.04.03.0007	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	3	2,01	3
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	3	2,01	2
								Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,02	2
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	2.2.2.01.01.0025	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	2.2.2.01.02.0025	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pemadam Kebakaran	1.1.1.05.04.0001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penanggulangan Bencana Kebakaran / Operasional Pemadaman Kebakaran	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran yang dipenuhi kebutuhannya	756	orang	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	4	2,01	2
Dinas Pemadam Kebakaran	1.1.1.05.04.0002	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penanggulangan Bencana Kebakaran / Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan simulasi yang dilaksanakan	180	kali	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	4	2,04	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pemadam Kebakaran	1.1.1.05.04.00 03	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penanggulangan Bencana Kebakaran / Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi aparatur dan peran serta masyarakat	60	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pemadam Kebakaran	1.1.1.05.11.00 01	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran / Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang terpelihara	210	unit	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pemadam Kebakaran	1.1.1.05.11.00 02	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran / Pemeriksaan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang dilaksanakan pemeriksaan	264	bangunan	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	4	2,02	2
Dinas Pemadam Kebakaran	1.1.1.05.11.00 03	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran / Perencanaan dan Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan/dibangun	947	unit	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pemadam Kebakaran	2.2.2.01.01.00 26	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pemadam Kebakaran	2.2.2.01.02.00 26	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.01.00 01	Penanaman Modal		Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal / Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanam modal yang dimonitor dan dievaluasi	3500	perusahaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	5	2,01	2
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	5	2,01	3	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.01.00 03	Penanaman Modal		Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal / Pengelolaan Data Investasi	Jumlah data investasi yang dikelola	41751	data	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.02.00 01	Penanaman Modal		Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi / Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan potensi penanaman modal	4	dokumen	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	2	2,02	2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.02.00 02	Penanaman Modal		Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi / Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3	kali	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	3	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.03.0004	Penanaman Modal		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal / Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat / Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok (DBHCHT)	Jumlah pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat / kode registrasi mesin pelinting rokok yang dilaksanakan	2 kali		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.03.0005	Penanaman Modal		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal / Pengawasan Perijinan Industri dan SIUP	Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000	pelaku usaha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	31	3	2,01	2
								Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	4	2,01	3
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	5	2,01	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	5	2,01	3
								Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	4	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.03.0006	Penanaman Modal		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal / Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu yang dihasilkan	60000	berkas	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	4	2,01	1
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan					Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	4	2,01	3	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.03.0007	Penanaman Modal		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal / Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi hasil tembakau	2	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.1.2.10.03.0008	Penanaman Modal		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal / Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan (DBHCHT)	Jumlah penyampaian informasi ketentuan peraturan cukai yang dilakukan	4	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.2.2.01.01.0027	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.2.2.01.02.0027	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0001	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru TPA/TPQ dan kelas minggu yang mendapatkan fasilitasi pelaksanaan TPA/TPQ dan kelas minggu	13000	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0002	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Fasilitasi Pembelajaran dan Sumber Belajar Pendidikan Keluarga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber belajar pendidikan keluarga	2	kali	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,03	13
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0003	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pembinaan pendidikan kesetaraan	31	lembaga	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,04	12
								Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,04	9
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,04	10
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,04	11
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0004	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan /	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Pembinaan Lembaga Kesetaraan /	234	lembaga	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,04	15

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Kursus dan Pelatihan serta PKBM			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,04	16
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0005	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa PLS yang dilaksanakan	12 kali		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	25
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	38
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0006	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1368	lembaga	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,03	13
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0007	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	12,01	orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,03	16
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0008	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah yang dilaksanakan	18 kali		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	4	2,01	5
								Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	19	4	2,01	8
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0009	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Siswa dan Masyarakat	3 kali		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	25
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	38
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-			

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0010	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik selama 12 Bulan	2	lembaga	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,03	9
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0011	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Pengadaan Sarana Belajar PKBM yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah SKB yang mendapatkan peningkatan sarana	4	lembaga	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,04	3
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.01.0012	Pendidikan		Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan / Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan penigkatan sarana dan prasarana	2	lembaga	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,03	3
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0001	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD	Jumlah lembaga sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	302	lembaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	21
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0002	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Fasilitas Pelaksanaan Ujian Sekolah Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian sekolah dasar dan Calistung SD	93864	orang	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	23

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0003	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Fasilitas Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Dasar Sederajat	Jumlah Sekolah Dasar sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	302	lembaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	21
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0004	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas	Jumlah Pendidikan inklusi, Pendidikan Layanan Khusus Sekolah Dasar dan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	73	lembaga	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,01	8
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0005	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	235	lembaga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	28
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0006	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Dasar	658	lembaga	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	2,01	4
								Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	2,01	2
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0007	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Peningkatan Perlengkapan Sekolah Dasar	Jumlah SD yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah dasar	302	lembaga	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	16
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0008	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Pendidikan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Dasar	5	kali	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	25
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.02.0009	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Dasar / Penyediaan Sarana dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan Sekolah Dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana pendidikan sekolah dasar yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	10	lembaga	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	12

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.00 01	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMP Negeri	Jumlah lembaga sekolah Menengah Negeri yang mendapatkan biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 12 bulan	63	lembaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	32
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.00 02	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional Sekolah Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Nasional Sekolah Menengah	40993	orang	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	36
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.00 03	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Sekolah Menengah Sederajat	Jumlah sekolah Menengah sederajat yang mendapatkan biaya pendidikan daerah selama 12 bulan	63	lembaga	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	32
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.00 04	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Inklusi dan Sekolah Terbuka	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah inklusi dan Sekolah Terbuka yang diselenggarakan dan dibina selama 12 bulan	37	lembaga	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,01	8
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.00 05	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah menengah	294	lembaga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	41
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.00 06	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar Sekolah Menengah	245	lembaga	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	2,01	2
								Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	3	2,01	4
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.00 07	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Peningkatan Perlengkapan Sekolah Menengah	Jumlah SMP yang menerima peningkatan perlengkapan sekolah menengah	63	lembaga	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	27

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.0008	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Sekolah Menengah	1 kali		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	38
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.03.0009	Pendidikan		Program Pengembangan Sekolah Menengah / Penyediaan Sarana Sekolah Menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga penerima sarana sekolah menengah yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	6 lembaga		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	27
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.05.0001	Pendidikan		Program Peningkatan Manajemen Sekolah / Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah kegiatan fasilitasi penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan	2 kali		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.05.0002	Pendidikan		Program Peningkatan Manajemen Sekolah / Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	2567	lembaga	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	28
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	41
								Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	5	2	2,01	2
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.05.0003	Pendidikan		Program Peningkatan Manajemen Sekolah / Penunjang Operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	365	lembaga	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,03	2
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	26
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	39

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.06.0001	Pendidikan		Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan / Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah kegiatan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan	1 kali		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.06.0002	Pendidikan		Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan / Fasilitasi Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2031	orang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	27
								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	40
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.06.0003	Pendidikan		Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan / Pengawasan serta Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (APBD / BKK)	Jumlah lembaga yang mendapatkan pengawasan serta penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	957	lembaga	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,02	1
Dinas Pendidikan	1.1.1.01.06.0004	Pendidikan		Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan / Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dokumen Perencanaan Penempatan serta Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan	2	dokumen	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	26
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	39
								Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,03	15
				Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah /	Jumlah Dokumen			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pendidikan	2.1.2.04.03.0008	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,03	3
								Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,03	2
Dinas Pendidikan	2.2.2.01.01.0028	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pendidikan	2.2.2.01.02.0028	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.1.04.04.0001	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pengelolaan Rusunawa / Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat	Jumlah persil rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya yang dikelola	3981	lokasi	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	11
								Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	2	2,01	6
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.1.04.04.0002	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pengelolaan Rusunawa / Pengelolaan Rumah Susun	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105	blok	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	2	2,05	2
								Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	2	2,05	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.01.001	Pertanahan		Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan / Penanganan Sengketa Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	12	Kasus	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.01.002	Pertanahan		Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan / Penanganan Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah sengketa tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	18	obyek	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	4	2,01	2
								Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	4	2,01	1
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.01.003	Pertanahan		Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan / Pengendalian dan Penyuluhan Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah kegiatan penyuluhan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	8	kali	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	8	2,01	1
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.03.001	Pertanahan		Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum / Pendataan dan Persiapan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah dokumen pendataan dan persiapan pengadaan tanah dan/atau bangunan	4	dokumen	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	2	2,02	2
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-		
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.03.002	Pertanahan		Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum / Pengadaan/Pembelian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Umum guna Pembangunan	Lokasi tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum guna pembangunan non infrastruktur yang diadakan	4	lokasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	5	2,01	2
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-		
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.04.001	Pertanahan		Program Pengamanan Aset / Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100	bidang	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	7
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-		

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.04.00 02	Pertanahan		Program Pengamanan Aset / Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Perencanaan Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4	dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	10	2,01	1
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.04.00 03	Pertanahan		Program Pengamanan Aset / Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	75	dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	7
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.06.00 01	Pertanahan		Program Pengelolaan Aset Tanah / Pelayanan Pemanfaatan Tanah Aset	Jumlah izin yang diterbitkan atas pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	7000	izin	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		Penerbitan Izin Membuka Tanah		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	9	2,01	2
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.06.00 02	Pertanahan		Program Pengelolaan Aset Tanah / Pendataan dan Penataan Tanah Aset Pemerintah Kota	Pendataan dan penataan terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang dilaksanakan	1	dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	10	2,01	1
								Pemanfataan Tanah Kosong		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	8	2,02	2
								Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	9
								Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	3	2,01	10
								Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	10	8	2,02	1
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1.1.2.04.06.00 03	Pertanahan		Program Pengelolaan Aset Tanah / Pengukuran dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah lokasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diukur dan dipetakan	8000	lokasi	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	2.1.2.01.13.0001	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Pengelolaan Bangunan Gedung / Pengawasan dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang diawasi dan dikelola	25	lokasi	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	2
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	2.2.2.01.01.0029	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	2.2.2.01.02.0029	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.02.01.0001	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan / Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	29	kali	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	2	2,02	1
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.02.01.0002	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan / Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	289	lembaga	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	2	2,01	1
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	2	2,01	3
								Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG		Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	2	2,01	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.02.01.003	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan / Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	2	dokumen	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	5	2,01	1
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.02.02.001	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Perempuan dan Anak / Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926	orang	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	7	2,02	4
								Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	3	2,03	4
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.02.02.002	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Perempuan dan Anak / Fasilitas Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431	lembaga	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	6	2,02	3
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	6	2,02	2
								Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	6	2,02	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	6	2,02	1
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.02.02.00 03	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Perempuan dan Anak / Pembinaan Pengembangan Kampunge Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154	kampung	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	6	2,02	4
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	3	2,03	2
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	7	2,01	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	7	2,01	2
								Program Perlindungan Perempuan dan Anak / Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200	kasus	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	7	2,02	3
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	7	2,02	1
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	3	2,02	1
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.02.02.0005	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Perempuan dan Anak / Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2	lembaga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	7	2,03	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	8	7	2,02	2
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.01.0001	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana / Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31	lembaga	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.01.002	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana / Fasilitas Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	2208	orang	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	2	2,01	1
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.01.003	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana / Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	650	orang	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	3	2,03	8
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.01.004	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana / Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	52	unit	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.01.006	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Keluarga Berencana / Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	4	unit	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.02.001	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga / Fasilitas dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	100	orang	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	4	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.02.00 02	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga / Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15	lembaga	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	13	5	2,01	5
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.02.00 03	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga / Pembinaan Keluarga Sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	1240	orang	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	4	2,01	3
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.02.00 04	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga / Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	1350	orang	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	4	2,01	4
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.02.00 05	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga / Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1	bangunan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	4	2,01	2
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.2.07.02.00 06	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Peningkatan Ketahanan Keluarga / Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2	lembaga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	14	4	2,01	8

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.2.2.01.01.0030	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.2.2.01.02.0030	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Perdagangan	1.1.2.15.01.0001	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pemasaran Produk Usaha Mikro / Fasilitasi Pemasaran Usaha Mikro	Jumlah UKM Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	330	Orang	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	7	2,01	2
Dinas Perdagangan	1.1.2.15.01.0003	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pemasaran Produk Usaha Mikro / Pengelolaan Sentra dan Stand Usaha Mikro	Jumlah sentra dan Stand Usaha Mikro yang dikelola	12	lokasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	7	2,01	2
Dinas Perdagangan	1.1.2.15.01.0004	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Program Pemasaran Produk Usaha Mikro / Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pembinaan UKM (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pembinaan UKM yang disediakan	11	Jenis	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	7	2,01	2
Dinas Perdagangan	1.2.2.03.01.0001	Perdagangan		Program Distribusi Perdagangan / Monitoring Kelengkapan Data Gudang Terdaftar	Jumlah gudang yang dimonitor	250	lokasi	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	3	2,02	1
Dinas	1.2.2.03.01.00	Perdagangan		Program Distribusi Perdagangan / Pembinaan	Jumlah Pelaku Distribusi	31	Kelompok	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	3	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Perdagangan	02	Perdagangan		terhadap pelaku distribusi perdagangan	Perdagangan yang dibina		51 kelompok	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	3	2,02	2
Dinas Perdagangan	1.2.2.03.01.0003	Perdagangan		Program Distribusi Perdagangan / Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	155	kali	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	4	2,02	1
								Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	4	2,02	2
								Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	4	2,02	3
								Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	4	2,01	1
								Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	4	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019																		
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
Dinas Perdagangan	1.2.2.03.02.0001	Perdagangan		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan / Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin bidang perdagangan yang diterbitkan	400	berkas	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	2	2,01	1						
								Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Penerbitan Tanda Daftar Gudang		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	2	2,02	1						
								Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	2	2,04	2						
								Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	2	2,05	1						
								Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	2	2,03	1						
								Pemeriksanaan Penyimpanan Bahan berbahaya		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	2	2,06	1						
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-		-		-		-		-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perdagangan	1.2.2.03.02.00 02	Perdagangan		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan / Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah usaha di bidang perdagangan yang diawasi perijinannya	1552	Lembaga	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Perdagangan	1.2.2.03.03.00 01	Perdagangan		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Operasional UPTD Metrologi Legal	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi Legal yang dipelihara dan disediakan	16	Jenis	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	6	2,01	1
Dinas Perdagangan	1.2.2.03.03.00 02	Perdagangan		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UPTD)	Jumlah alat UTTP yang dilayani	24570	unit	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	6	2,01	1
Dinas Perdagangan	1.2.2.03.03.00 03	Perdagangan		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan / Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4500	unit	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	6	2,01	2
								Penyidikan Metrologi Legal		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	6	2,01	3
Dinas Perdagangan	2.2.2.01.01.00 31	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Perdagangan	2.2.2.01.02.00 31	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.01.00 01	Perhubungan		Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan / Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan	Kebutuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan yang Diadakan	3	Jenis	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,05	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.02.001	Perhubungan		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi / Pembangunan Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1	bangunan	Pembangunan Gedung Terminal		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,03	2
				Pembangunan Fasilitas Parkir					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	10	
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.02.002	Perhubungan		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi / Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Prasarana Transportasi yang Dipelihara	36	lokasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,03	4
								Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	22
								Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,05	7
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.02.003	Perhubungan		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi / Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Jumlah Terminal Angkutan Umum yang Dikelola selama 12 bulan	14	Lokasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,03	5
								Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,08	3
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.02.004	Perhubungan		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi / Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	Jumlah Paket Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi	5	Paket	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,03	1
Dinas	1.1.2.08.03.00	Perhubungan		Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan	149064	unit	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,05	1
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,05	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Perhubungan	01	Perhubungan		Jalan / Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Uji KIR dilokasi pengujian kendaraan Bermotor	13000	Unit	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,05	5
								Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.03.00 02	Perhubungan		Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas selama 12 bulan	365	Kali	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,08	5
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-				-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.03.00 03	Perhubungan		Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / Pengawasan dan Pengendalian Sarana Angkutan Jalan	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasi dan Dikendalikan selama 12 bulan	7	Jenis	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,08	5
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.03.00 04	Perhubungan		Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan / Pengendalian Pencemaran Udara Melalui Uji Emisi Gas Buang	Jumlah Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang Dilaksanakan	48	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.04.00 01	Perhubungan		Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan / Pengelolaan Transportasi Umum	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	28	Unit	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,09	1
								Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Transportasi Umum				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,1	1
								Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	5	2,03	2
								Perumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	5	2,04	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	5	2,07	2
								Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara		Penyelenggaraan Kebandarudaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	4	2,02	3
				Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan /	Jumlah Kegiatan Pengembangan			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara		Penyelenggaraan Kebandarudaraan		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	4	2,02	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.04.00 02	Perhubungan		Pengembangan Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor	5	Kali	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	4	2,01	2
								Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	5	2,01	2
								Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	5	2,01	3
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	5	2,02	2
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	5	2,07	2
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.04.00 03	Perhubungan		Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan / Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Survey Aksesibilitas Angkutan Barang	2	kali	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	30	4	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.04.00	Perhubungan		Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan / Penyelenggaraan Sarana Transportasi Bagi Pelajar	Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan selama 12 Bulan	8 unit		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,09	1
								Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,09	2
								Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,1	1
								Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,1	2
								Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,13	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,13	2
								Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,09	2
								Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,1	2
								Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,13	1
								Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,13	2
Dinas	1.1.2.08.04.00			Program Pengembangan Sistem Transportasi	Transportasi Umum															

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Perhubungan	05	Perhubungan		yang Berkelanjutan / Penyelenggaraan Transportasi Umum Perkotaan	Perkotaan yang Diselenggarakan	365	kali	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,14	1
								Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,14	2
								Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,15	1
								Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,15	2
								Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah		Penetapan Rencana Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,11	1
								Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,11	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.04.0006	Perhubungan		Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan / Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	10	Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,11	3
								Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,12	1
								Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,12	2
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.05.0001	Perhubungan		Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5	Jenis	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,02	4
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.05.0002	Perhubungan		Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Dladakan	1200	unit	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,02	2
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.05.0003	Perhubungan		Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13	dokumen	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,06	1
								Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,06	2
								Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,06	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.05.00 04	Perhubungan		Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Penyelenggaraan Perparkiran	Jumlah Tempat Parkir yang Diselenggarakan selama 12 bulan	1821	Lokasi	Facilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,04	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,04	2
Dinas Perhubungan	1.1.2.08.05.00 05	Perhubungan		Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Pemasangan Alat Keselamatan Jalan (DAK)	Jenis alat keselamatan jalan yang diadakan dalam satu tahun	1	jenis	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	15	2	2,02	2
Dinas Perhubungan	2.2.2.01.01.00 32	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Perhubungan	2.2.2.01.02.00 32	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas				Program Pembinaan Layanan Baca /	Jumlah layanan baca			Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,01	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.13.01.0001	Perpusatakaan		Pembinaan Pengelolaan Layanan Baca	yang dilakukan pembinaan	100	lembaga	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,01	5
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,01	6				
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.13.02.0001	Perpusatakaan		Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan / Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494	lokasi	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,01	10
								Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,01	1
								Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,01	2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.13.02.0002	Perpusatakaan		Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan / Pengembangan Minat dan Budaya Masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	239	kali	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,02	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.13.03.0001	Perpusatakaan		Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat / Penyediaan dan Perawatan Sarana Layanan Baca	Jumlah sarana layanan baca yang disediakan dan dirawat	22460	Buku	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	23	2	2,01	9
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.14.01.0001	Kearsipan		Program Pembinaan Penataan Kearsipan / Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah PD/unit kerja dan sekolah yang mendapatkan pembinaan sistem kearsipan	130	lembaga	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	24	2	2,03	2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.14.02.0001	Kearsipan		Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan / Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40	kali	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	24	2	2,03	1
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-		-		-		-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.14.03.00 01	Kearsipan		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Pendataan dan Penataan Sistem Kearsipan	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	52	kali	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	24	2	2,02	2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.1.2.14.03.00 02	Kearsipan		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan yang diadakan	15	item	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	24	2	2,01	2
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.2.2.01.01.00 33	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.2.2.01.02.00 33	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	13
								Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	1
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	3
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	4
								Pembangunan Perpustakaan Sekolah	106	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	5

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.01.04.00 01	Pendidikan		Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan / Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Fasilitas/Gedung Pendidikan yang dibangun dan direhabilitasi	33	bangunan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	6	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	9	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	10	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	11	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	12	
								Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	1	
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	3	
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	4	
								Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	5	
								Pembangunan Asrama Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	8	
								Pembangunan Kantin Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	11	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	12	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	14	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	15	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	16	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	17	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	23	
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	24	
								Pembangunan Laboratorium		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	6	
								Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	7	
								Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	18	
								Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,01	19	

Program

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.01.04.0002	Pendidikan		Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan / Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung/Fasilitas Pendidikan yang dipelihara	160	bangunan	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	29
								Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	1	2	2,02	30
								Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	9	2,01	4
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.01.04.0003	Pendidikan		Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan / Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Gedung Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan Fasilitas/Gedung Pendidikan yang disusun	27	dokumen	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	5
								Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	3
								Pembangunan Puskesmas		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	2
								Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.02.10.0001	Kesehatan		Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan / Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan	Jumlah Bangunan Layanan Kesehatan yang dibangun/direhabilitasi	9	bangunan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	10

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Layanan Kesehatan				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	19
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	9	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	8	
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.02.10.003	Kesehatan		Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan / Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan Prasarana Bangunan Layanan Kesehatan	12	Dokumen	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	5
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.03.02.001	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Ruang / Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2	dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,03	1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.03.02.002	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Ruang / Pendataan dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang serta Infrastruktur Kota	Jumlah pemanfaatan ruang dan infrastruktur kota yang didata dan dipetakan	9200	Persil	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	18	6	2,01	1
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.03.02.00 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Ruang / Pendukung perencanaan tata ruang wilayah kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang wilayah kota yang dibuat	2	dokumen	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,01	3
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,01	4
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,02	1
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,02	2
								Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	12	2,02	3
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.03.02.00 04	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Ruang / Penyusunan Dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman yang disusun	9	Dokumen	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	4	2,01	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.03.06.00 01	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengendalian Bidang Bangunan / Pendataan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	7169	data	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.03.06.0002	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengendalian Bidang Bangunan / Pengawasan Bangunan	Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	300	lokasi	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	9
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.03.06.0003	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengendalian Bidang Bangunan / Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan	jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	3	dokumen	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	3
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.01.0001	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan / Pelayanan Perijinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah berkas Perijinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	7169	berkas	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	1
								Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	2	2,06	1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.01.0002	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan / Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	50	berkas	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.02.00 01	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pelayanan Perizinan Konstruksi / Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	700	berkas	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	11	2,03	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.03.00 02	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung / Pembangunan / Rehabilitasi dan Pengawasan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Bangunan Pemerintah Daerah yang prasarananya dibangun/direhabilitasi	43	Bangunan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana		Pembangunan Prasarana Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	27	3	2,02	8
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.03.00 03	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung / Pemeliharaan Fasilitas Gedung Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Pemerintah yang dipelihara	300	bangunan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,03	28
								Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	9	2,01	4
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.03.00 04	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung / Penyusunan Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah di Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Bangunan Pemerintah Daerah	39	Dokumen	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	5
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.05.00 01	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman / Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi infrastruktur kawasan permukiman yang ditingkatkan	149	lokasi	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	7	2,01	1
								Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	6	2,01	6
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	1.1.1.04.05.00	Perumahan dan Kawasan		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman /	Jumlah Prasarana Sanitasi (DAK Bidang	21	lokasi	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	7	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	02	Kawasan Permukiman		Pemukiman / Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Sanitasi) yang dibangun		4 Lokasi	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	7	2,01	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.05.00 03	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman / Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Jumlah rumah yang dibangun		6 bangunan	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahtsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.05.00 04	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman / Pemeliharaan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Infrastruktur dan Rumah yang di Rehabilitasi		200 Lokasi	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	7	2,01	2
								Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahtsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.1.1.04.05.00 05	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman / Penyusunan Dokumen Perencanaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		92 dokumen	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	5
								Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	1.1.1.04.05.00	Perumahan dan		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman /	Jumlah dokumen Perencanaan			Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,01	5

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.2.2.02.02.0006	Kawasan Permukiman		Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Penyediaan Perumahan yang disusun	14	dokumen	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	3	8	2,01	2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.2.2.02.02.0001	Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota / Penyediaan Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman	Jumlah Sarana dalam rangka Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung dan Permukiman yang disediakan	10	unit	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	1.2.2.02.02.0002	Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota / Penyusunan Dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman yang disusun	4	dokumen	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	2.1.2.04.03.0009	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	2
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah				Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	1	2	2,02	2		
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	2.2.2.01.01.0034	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	2.2.2.01.02.0034	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Sosial	1.1.1.06.01.0001	Sosial		Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah / Fasilitas Pemakaman	Jumlah Orang Yang Mendapat Fasilitas Pemakaman	960	Orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Sosial	1.1.1.06.01.0002	Sosial		Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah / Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Keluarga Harapan Yang Dilaksanakan	24	Kali	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus		Kegiatan Penunjang Urusan		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KEUANGAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	2	2	2,04	3
Dinas Sosial	1.1.1.06.01.0003	Sosial		Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah / Penyelenggaraan Layanan Ambulance Gratis	Jumlah Kegiatan Layanan Ambulance Gratis Yang Diselenggarakan	4416	Kali	Pemberian Layanan Kedaruratan		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,02	2
								Pemberian Layanan Kedaruratan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,01	10
Dinas Sosial	1.1.1.06.02.0001	Sosial		Program Partisipasi Keagamaan / Fasilitas Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	102	kali	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8	1	5	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
								Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,01	2
Dinas Sosial	1.1.1.06.03.0001	Sosial		Program Partisipasi Kepahlawanan / Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	Jumlah fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan	62	kali	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	12	4	2,03	9
Dinas Sosial	1.1.1.06.03.0002	Sosial		Program Partisipasi Kepahlawanan / Pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	7	lokasi	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	7	2,01	1
								Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	7	2,01	2
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0001	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Pembinaan dan Pemulangan PMKS	Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan	1420	orang	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,02	12
								Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,02	11
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0002	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi anak	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12	kali	Penyediaan Permakanan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,01	1
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0003	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12	kali	Penyediaan Permakanan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0004	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Pemenuhan kebutuhan dasar permakanaan bagi penyandang disabilitas dan penyakit tertentu	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi	12	kali	Penyediaan Permakanan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,01	1
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0005	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	90	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0006	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	160	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0007	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	45	orang	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	5	2,01	1
								Rujukan Anak-Anak Terlantar		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	5	2,01	2
								Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	5	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0008	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1100	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0009	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	65	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Sosial	1.1.1.06.04.0010	Sosial		Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial / Peningkatan peran serta lanjut usia	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta lanjut usia	34	kali	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	4	2,02	7
Dinas Sosial	1.1.1.06.05.0001	Sosial		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Pemberian bahan pokok kepada panti sosial	Jumlah panti sosial yang mendapat bantuan	17	lembaga	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Sosial	1.1.1.06.05.0002	Sosial		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Pembinaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah kegiatan PSKS yang dibina	45	kali	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	2	2,03	4
Dinas Sosial	1.1.1.06.06.0001	Sosial		Program Pengendalian Layanan Sosial / Monitoring dan Evaluasi Penanganan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	4	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Sosial	1.1.1.06.06.0002	Sosial		Program Pengendalian Layanan Sosial / Pemutakhiran data PMKS dan PSKS	Jumlah lokasi pemutakhiran data PMKS dan PSKS	154	Kelurahan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	5	2,02	1
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	6	5	2,02	2
Dinas Sosial	1.1.1.06.07.0001	Sosial		Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni / Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	842	Unit	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	3	2,03	3
								Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	4	3	2,03	2
Dinas Sosial	2.2.2.01.01.0035	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Sosial	2.2.2.01.02.0035	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
								Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	3	2,03	1
								Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	4	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.01.00 01	Tenaga Kerja		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan / Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah berkas perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diproses	1000	berkas	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	5	2,01	1
								Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.02.00 01	Tenaga Kerja		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja / Bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	Jumlah peserta bimtek harmonisasi hubungan industrial	300	orang	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	5	2,02	1
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.02.00 02	Tenaga Kerja		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja / Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110	Kasus	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	5	2,02	2
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.02.00 03	Tenaga Kerja		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja / Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	300	lembaga	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	5	2,01	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.02.0004	Tenaga Kerja		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja / Penyusunan Dokumen Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun	1	dokumen	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.03.0001	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Bimtek bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (DBHCHT)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja yang mengikuti bimtek	60	lembaga	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.03.0003	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Bimtek Pengembangan Softskill Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti bimtek pengembangan softskill kerja	1050	orang	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	4	2,01	3
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.03.0004	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Bimtek Persiapan Pra Purna Kerja	Jumlah masyarakat pra purna kerja yang mengikuti bimtek persiapan usaha	50	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.03.0005	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Fasilitas Pendampingan Pemilihan Bidang	Jumlah siswa SMK yang mendapatkan pendampingan pemilihan bidang kerja	500	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.03.0006	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Fasilitas Perluasan Kesempatan Kerja bagi Wirausaha Baru (DBHCHT)	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas perluasan kesempatan kerja	150	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.03.0007	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (DBHCHT)	Jumlah even job fair yang diselenggarakan	7	kali	Job Fair/Bursa Kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	4	2,03	3
								Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	4	2,03	2
								Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	4	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.03.0008	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja / Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi bidang dan standar kerja di luar negeri	150	orang	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	4	2,04	1
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.04.0002	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja / Fasilitas Magang bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	120	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.04.0003	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja / Fasilitas Sertifikasi Profesi bagi Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mengikuti sertifikasi profesi	604	orang	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.04.0004	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja / Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi keterampilan kerja	976	orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	3	2,01	1
Dinas Tenaga Kerja	1.1.2.01.04.0005	Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja / Penyusunan Dokumen Pengukuran Tingkat Produktivitas Skala Kota	Jumlah dokumen pengukuran tingkat produktivitas skala kota yang disusun	1	dokumen	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	7	3	2,05	1
Dinas Tenaga Kerja	2.2.2.01.01.0036	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Dinas Tenaga Kerja	2.2.2.01.02.0036	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Inspektorat	2.1.2.03.01.00 01	Pengawasan		Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inventarisasi dan Monitoring Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen inventarisasi dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	12	dokumen	Asistensi dan Pendampingan		Asistensi dan Pendampingan		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	3	2,02	2
Inspektorat	2.1.2.03.01.00 02	Pengawasan		Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	50	kali	Asistensi dan Pendampingan		Asistensi dan Pendampingan		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	3	2,02	2
Inspektorat	2.1.2.03.01.00 03	Pengawasan		Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Survey Penilaian Integritas (SPI)	Jumlah Laporan Survey Penilaian Integritas (SPI)	1	Laporan	Asistensi dan Pendampingan		Asistensi dan Pendampingan		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	3	2,02	2
Inspektorat	2.1.2.03.02.00 01	Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I / Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35	lembaga	Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	1
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	3
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	3
								Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	1
Inspektorat	2.1.2.03.02.00 02	Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I / Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah I	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18	lembaga	Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	2
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	4
								Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	2
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan	124	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	4

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Inspektorat	2.1.2.03.03.0001	Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II / Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35	lembaga	Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	1	
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	3	
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	3	
								Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	1	
Inspektorat	2.1.2.03.03.0002	Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II / Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah II	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18	lembaga	Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	2	
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	4	
								Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	2	
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	4	
Inspektorat	2.1.2.03.04.0001	Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III / Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35	lembaga	Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	1	
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	3	
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	3	
								Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	1	
Inspektorat	2.1.2.03.04.0002	Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III / Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah III	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18	lembaga	Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	2	
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	4	
								Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	2	
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	4	
				Program				Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	1	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019													
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Inspektorat	2.1.2.03.05.00 01	Pengawasan		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV / Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD dan Sekolah yang dilaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan	35	lembaga	Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	3	
								Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	3	
								Audit Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	1	
Inspektorat	2.1.2.03.05.00 02	Pengawasan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV / Reviu Penganggaran dan Pelaporan Kinerja pada Inspektur Pembantu Wilayah IV	Jumlah PD yang dilakukan reviu penganggaran dan pelaporan kinerja	18	lembaga	Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	2	
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	4	
								Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	2	
								Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,02	4	
Inspektorat	2.1.2.04.03.00 10	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	2	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	4	
								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	3	2,01	1	
								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	3	2,01	2	
Inspektorat	2.1.2.04.03.00 11	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Reviu Dokumen Pelaporan Kinerja Tingkat Kota	Jumlah dokumen pelaporan kinerja tingkat kota yang direviu	2	dokumen	Review Kinerja dan Keuangan		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		INSPEKTORAT DAERAH	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6	1	2	2,01	2	
Inspektorat	2.2.2.01.01.00 37	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Inspektorat	2.2.2.01.02.00 37	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.02.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Asem Rowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.02.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.02.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.03.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	139	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.03.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.05.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.06.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.06.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Asemrowo	2.1.2.01.06.00 04	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Asemrowo	2.2.2.01.01.00 38	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Asemrowo	2.2.2.01.02.00 38	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Benowo	2.1.2.01.02.0004	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Benowo	2.1.2.01.02.0005	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Romokalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Benowo	2.1.2.01.02.0006	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sememi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Benowo	2.1.2.01.02.0007	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Oso Wilangon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Benowo	2.1.2.01.03.0003	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	183	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Benowo	2.1.2.01.03.0004	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengembangan Kampung Edukasi (Jamur. Anagrek	Pengembangan Kampung Edukasi	3	kali	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,01	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Pemberdayaan Masyarakat dan Hidroponik)				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	3
Kec. Benowo	2.1.2.01.03.0005	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Benowo	2.1.2.01.05.0004	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Benowo	2.1.2.01.06.0005	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Benowo	2.1.2.01.06.0006	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Benowo	2.1.2.01.06.0008	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Benowo	2.2.2.01.01.0039	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Benowo	2.2.2.01.02.0039	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Bubutan	2.1.2.01.02.0008	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6 Lembaga		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Bubutan	2.1.2.01.02.0009	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bubutan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9 Lembaga		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Bubutan	2.1.2.01.02.0010	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gundih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11 Lembaga		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Bubutan	2.1.2.01.02.0011	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jepara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8 Lembaga		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Bubutan	2.1.2.01.02.00 12	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembok Duku	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Bubutan	2.1.2.01.03.00 06	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	414	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Bubutan	2.1.2.01.03.00 07	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	480	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Bubutan	2.1.2.01.05.00 07	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Bubutan	2.1.2.01.06.00 09	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Bubutan	2.1.2.01.06.00 10	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Bubutan	2.1.2.01.06.00 12	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RPKD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RPKD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Bubutan	2.2.2.01.01.00 40	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Bubutan	2.2.2.01.02.00 40	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Bulak	2.1.2.01.02.00 13	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Bulak	2.1.2.01.02.00 14	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Bulak	2.1.2.01.02.00 15	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenjeran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Bulak	2.1.2.01.02.0016	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Bulak	2.1.2.01.03.0008	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	157	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Bulak	2.1.2.01.03.0009	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Bulak	2.1.2.01.05.0010	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Bulak	2.1.2.01.06.0013	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Bulak	2.1.2.01.06.0014	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Bulak	2.1.2.01.06.00 16	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan .	4	Lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Bulak	2.2.2.01.01.00 41	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Bulak	2.2.2.01.02.00 41	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.02.00 17	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.02.00 18	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.02.00 19	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.02.0020	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.03.0010	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	195	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.03.0011	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.05.0013	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.06.0017	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.06.0018	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Dukuh Pakis	2.1.2.01.06.00 20	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Dukuh Pakis	2.2.2.01.01.00 42	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Dukuh Pakis	2.2.2.01.02.00 42	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Gayungan	2.1.2.01.02.00 21	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gayungan	2.1.2.01.02.00 22	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gayungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gayungan	2.1.2.01.02.00 23	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketintang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Gayungan	2.1.2.01.02.00 24	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gayungan	2.1.2.01.03.00 12	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	197	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Gayungan	2.1.2.01.03.00 13	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Gayungan	2.1.2.01.05.00 16	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Gayungan	2.1.2.01.06.00 21	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Gayungan	2.1.2.01.06.00 22	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Gayungan	2.1.2.01.06.00 24	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RPKD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RPKD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Gayungan	2.2.2.01.01.00 43	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Gayungan	2.2.2.01.02.00 43	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Genteng	2.1.2.01.02.00 25	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Genteng	2.1.2.01.02.00 26	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Genteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Genteng	2.1.2.01.02.00 27	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Genteng	2.1.2.01.02.00 28	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketabang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Genteng	2.1.2.01.02.00 29	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peneleh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Genteng	2.1.2.01.03.00 14	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	364	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Genteng	2.1.2.01.03.00 15	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Genteng	2.1.2.01.05.00 19	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	41	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Genteng	2.1.2.01.06.00 25	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Genteng	2.1.2.01.06.00 26	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Genteng	2.1.2.01.06.00 28	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Genteng	2.2.2.01.01.00 44	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Genteng	2.2.2.01.02.00 44	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Gubeng	2.1.2.01.02.00 30	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Airlangga	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gubeng	2.1.2.01.02.00 31	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baratajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Gubeng	2.1.2.01.02.00 32	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gubeng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gubeng	2.1.2.01.02.00 33	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kertajaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gubeng	2.1.2.01.02.00 34	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gubeng	2.1.2.01.02.00 35	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gubeng	2.1.2.01.03.00 16	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Gubeng	2.1.2.01.03.00 17	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Gubeng	2.1.2.01.05.00 22	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Gubeng	2.1.2.01.06.00 29	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Gubeng	2.1.2.01.06.00 30	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Gubeng	2.1.2.01.06.00 32	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Gubeng	2.2.2.01.01.00 45	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Gubeng	2.2.2.01.02.00 45	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.02.0036	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.02.0037	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.02.0038	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.02.0039	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.03.0018	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	217	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.03.0019	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.05.00 25	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	20	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.06.00 33	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.06.00 34	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Gunung Anyar	2.1.2.01.06.00 36	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Gunung Anyar	2.2.2.01.01.00 46	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Gunung Anyar	2.2.2.01.02.00 46	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Jambangan	2.1.2.01.02.00 40	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jambangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Jambangan	2.1.2.01.02.00 41	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Jambangan	2.1.2.01.02.00 42	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Jambangan	2.1.2.01.02.00 43	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pagesangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Jambangan	2.1.2.01.03.00 20	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	168	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Jambangan	2.1.2.01.03.00 21	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Jambangan	2.1.2.01.05.00 28	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Jambangan	2.1.2.01.06.00 37	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Jambangan	2.1.2.01.06.00 38	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Jambangan	2.1.2.01.06.00 40	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Jambangan	2.2.2.01.01.00 47	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Jambangan	2.2.2.01.02.00 47	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.02.0044	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Pilang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.02.0045	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebraon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.02.0046	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedurus	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.02.0047	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Waru Gunung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.03.0022	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	220	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.03.0023	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.05.00 31	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.06.00 41	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.06.00 42	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Karangpilang	2.1.2.01.06.00 44	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Karangpilang	2.2.2.01.01.00 48	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Karangpilang	2.2.2.01.02.00 48	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.02.00 48	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.02.00 49	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	2	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.02.00 50	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.02.00 51	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.03.00 24	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	460	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.03.00 25	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.05.00 34	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	90	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.06.00 45	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	264	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.06.00 46	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Kenjeran	2.1.2.01.06.00 48	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Kenjeran	2.2.2.01.01.00 49	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Kenjeran	2.2.2.01.02.00 49	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Krembangan	2.1.2.01.02.00 52	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dupak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Krembangan	2.1.2.01.02.00 53	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemayoran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Krembangan	2.1.2.01.02.00 54	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Krembangan	2.1.2.01.02.00 55	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Morokrembangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Krembangan	2.1.2.01.02.00 56	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Barat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Krembangan	2.1.2.01.03.00 26	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	430	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	152	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Krembangan	2.1.2.01.03.00 27	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Krembangan	2.1.2.01.05.00 37	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Krembangan	2.1.2.01.06.00 49	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Krembangan	2.1.2.01.06.00 50	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	240	kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Krembangan	2.1.2.01.06.00 52	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kelurahan dan Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Krembangan	2.2.2.01.01.00 50	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Krembangan	2.2.2.01.02.00 50	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.02.00 57	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkingan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.02.00 58	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jeruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.02.00 59	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lakarsantri	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.02.00 60	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.02.00 61	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.02.0062	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumurwelut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	3	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.03.0028	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	200	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.03.0029	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.05.0040	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.06.0053	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.06.0054	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Lakarsantri	2.1.2.01.06.00 56	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RPKD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RPKD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Lakarsantri	2.2.2.01.01.00 51	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Lakarsantri	2.2.2.01.02.00 51	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.02.00 63	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.02.00 64	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalijudan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.02.00 65	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.02.00 66	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.02.00 67	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.02.00 68	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.03.00 30	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	346	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.03.00 31	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.05.00 43	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.06.00 57	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.06.00 58	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Mulyorejo	2.1.2.01.06.00 60	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Mulyorejo	2.2.2.01.01.00 52	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Mulyorejo	2.2.2.01.02.00 52	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.02.00 69	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bongkaran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.02.0070	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.02.0071	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyamplungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.02.0072	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.02.0073	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Utara	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.03.0032	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	377	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.03.0033	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.05.00 46	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.06.00 61	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.06.00 62	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Pabean Cantian	2.1.2.01.06.00 64	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Pabean Cantian	2.2.2.01.01.00 53	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Pabean Cantian	2.2.2.01.02.00 53	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Pakal	2.1.2.01.02.0074	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pakal	2.1.2.01.02.0075	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benowo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pakal	2.1.2.01.02.0076	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pakal	2.1.2.01.02.0077	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Pakal	2.1.2.01.03.0034	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	229	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Pakal	2.1.2.01.03.0035	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Pakal	2.1.2.01.05.00 49	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Pakal	2.1.2.01.06.00 65	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	288	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Pakal	2.1.2.01.06.00 66	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Pakal	2.1.2.01.06.00 68	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Pakal	2.2.2.01.01.00 54	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Pakal	2.2.2.01.02.00 54	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Rungkut	2.1.2.01.02.0078	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalirungkut	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Rungkut	2.1.2.01.02.0079	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Rungkut	2.1.2.01.02.0080	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Rungkut	2.1.2.01.02.0081	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penjaringansari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	15	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Rungkut	2.1.2.01.02.0082	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Rungkut	2.1.2.01.02.0083	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Rungkut	2.1.2.01.03.0036	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	488	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Rungkut	2.1.2.01.03.0037	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Rungkut	2.1.2.01.05.0052	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Rungkut	2.1.2.01.06.0069	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	408	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Rungkut	2.1.2.01.06.0070	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Rungkut	2.1.2.01.06.00 72	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Rungkut	2.2.2.01.01.00 55	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Rungkut	2.2.2.01.02.00 55	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.02.00 84	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bringin	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.02.00 85	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontar	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.02.00 86	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Made	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.02.0087	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambikerep	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.03.0038	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	259	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.03.0039	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.05.0055	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.06.0073	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.06.0074	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sambikerep	2.1.2.01.06.00 76	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Sambikerep	2.2.2.01.01.00 56	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Sambikerep	2.2.2.01.02.00 56	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Sawahan	2.1.2.01.02.00 88	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banyu Urip	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sawahan	2.1.2.01.02.00 89	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sawahan	2.1.2.01.02.00 90	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakis	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sawahan	2.1.2.01.02.00 91	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petemon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	18	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sawahan	2.1.2.01.02.00 92	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Jaya	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sawahan	2.1.2.01.02.00 93	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sawahan	2.1.2.01.03.00 40	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	627	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Sawahan	2.1.2.01.03.00 41	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Sawahan	2.1.2.01.05.00 58	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sawahan	2.1.2.01.06.0077	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Sawahan	2.1.2.01.06.0078	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Sawahan	2.1.2.01.06.0080	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPDP tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Sawahan	2.2.2.01.01.0057	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Sawahan	2.2.2.01.02.0057	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Semampir	2.1.2.01.02.0094	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	17	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Semampir	2.1.2.01.02.0095	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Semampir	2.1.2.01.02.0096	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Semampir	2.1.2.01.02.0097	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Semampir	2.1.2.01.02.0098	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	16	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Semampir	2.1.2.01.03.0042	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	636	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Semampir	2.1.2.01.03.0043	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Semampir	2.1.2.01.05.00 61	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Semampir	2.1.2.01.06.00 81	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Semampir	2.1.2.01.06.00 82	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Semampir	2.1.2.01.06.00 84	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPd Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPd tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Semampir	2.2.2.01.01.00 58	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Semampir	2.2.2.01.02.00 58	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Simokerto	2.1.2.01.02.0099	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Simokerto	2.1.2.01.02.0100	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Simokerto	2.1.2.01.02.0101	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simokerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Simokerto	2.1.2.01.02.0102	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simolawang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Simokerto	2.1.2.01.02.0103	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Simokerto	2.1.2.01.03.0044	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan mutu selama 12 bulan	356	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Simokerto	2.1.2.01.03.00 45	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Simokerto	2.1.2.01.05.00 64	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Simokerto	2.1.2.01.06.00 85	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Simokerto	2.1.2.01.06.00 86	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Simokerto	2.1.2.01.06.00 88	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Simokerto	2.2.2.01.01.00 59	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Simokerto	2.2.2.01.02.0059	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Sukulilo	2.1.2.01.02.0104	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gebang Putih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukulilo	2.1.2.01.02.0105	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputih	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukulilo	2.1.2.01.02.0106	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukulilo	2.1.2.01.02.0107	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.02.01 08	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.02.01 09	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.02.01 10	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semolowaru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.03.00 46	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	439	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.03.00 47	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.05.00 67	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.06.0089	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	336	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.06.0090	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Sukolilo	2.1.2.01.06.0092	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPDP tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Sukolilo	2.2.2.01.01.0060	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Sukolilo	2.2.2.01.02.0060	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.02.0111	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Putat Gede	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.02.01 12	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.02.01 13	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.02.01 14	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sonokwijenan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.02.01 15	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.02.01 16	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.03.00 48	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	323	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.03.00.49	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.05.00.70	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.06.00.93	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.06.00.94	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Sukomanunggal	2.1.2.01.06.00.96	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPDP tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Sukomanunggal	2.2.2.01.01.00.61	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Sukomanunggal	2.2.2.01.02.00 61	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 17	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 18	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gading	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 19	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 20	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkeling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 21	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pacarkembang	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 22	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ploso	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 23	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rangkah	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.02.01 24	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambaksari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.03.00 50	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	749	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.03.00 51	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.05.0073	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.06.0097	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.06.0098	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Tambaksari	2.1.2.01.06.0100	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Tambaksari	2.2.2.01.01.0062	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Tambaksari	2.2.2.01.02.0062	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tandes	2.1.2.01.02.01 25	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balongsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tandes	2.1.2.01.02.01 26	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tandes	2.1.2.01.02.01 27	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Poh	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tandes	2.1.2.01.02.01 28	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tandes	2.1.2.01.02.01 29	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manukan wetan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tandes	2.1.2.01.02.0130	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tandes	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tandes	2.1.2.01.03.0052	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	371	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Tandes	2.1.2.01.03.0053	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Tandes	2.1.2.01.05.0076	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Tandes	2.1.2.01.06.0101	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Tandes	2.1.2.01.06.0102	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tandes	2.1.2.01.06.0104	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RPKD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RPKD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Tandes	2.2.2.01.01.0063	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Tandes	2.2.2.01.02.0063	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.02.0131	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	14	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.02.0132	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungdoro	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.02.0133	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keputran	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.02.0134	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.02.0135	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.03.0054	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	365	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.03.0055	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.05.0079	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.06.0105	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.06.01 06	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Tegalsari	2.1.2.01.06.01 08	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Tegalsari	2.2.2.01.01.00 64	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Tegalsari	2.2.2.01.02.00 64	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.02.01 36	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kendangsari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.02.01 37	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutisari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.02.0138	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.02.0139	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.03.0056	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	185	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.03.0057	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.05.0082	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.06.0109	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.06.01 10	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.1.2.01.06.01 12	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.2.2.01.01.00 65	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Tenggilis Mejoyo	2.2.2.01.02.00 65	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Wiyung	2.1.2.01.02.01 40	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babatan	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	8	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wiyung	2.1.2.01.02.01 41	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Balas Klumprik	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Wiyung	2.1.2.01.02.01 42	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wiyung	2.1.2.01.02.01 43	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wiyung	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wiyung	2.1.2.01.03.00 58	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	210	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Wiyung	2.1.2.01.03.00 59	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Wiyung	2.1.2.01.05.00 85	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Wiyung	2.1.2.01.06.01 13	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Wiyung	2.1.2.01.06.01 14	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Wiyung	2.1.2.01.06.01 16	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Wiyung	2.2.2.01.01.00 66	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Wiyung	2.2.2.01.02.00 66	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.02.01 44	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	13	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.02.01 45	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.02.01 46	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Margorejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	10	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.02.01 47	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidosermo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	6	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.02.01 48	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siwalankerto	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	7	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.03.00 60	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	280	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.03.00 61	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	120	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.05.00 88	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.06.01 17	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.06.01 18	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan,Verifikasi si dam Validasi Data Sarana	600	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Wonocolo	2.1.2.01.06.01 20	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Peserta dari seluruh Kelurahan di wilayah Kecamatan Wonocolo	4	Lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Wonocolo	2.2.2.01.01.00 67	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Wonocolo	2.2.2.01.02.00 67	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.02.01 49	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Darmo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.02.01 50	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jagir	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	11	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.02.01 51	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	5	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.02.01 52	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.02.01 53	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawunggaling	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	12	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.02.01 54	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Kegiatan Kewilayahan / Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokromo	Jumlah lembaga yang mendapatkan intervensi pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat	9	Lembaga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	3	2,02	2
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.03.00 62	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT	Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan	574	Lembaga	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,04	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.03.0063	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian	48	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.05.0091	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat / Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	116	Kali	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,02	3
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.06.0121	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	360	kali	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	4	2,02	1
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.06.0122	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah	60	Kali	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	6	2,01	18
Kec. Wonokromo	2.1.2.01.06.0124	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitas Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah / Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	4	lembaga	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		KECAMATAN	UNSUR KEWILAYAHAN	7	1	2	2,01	1
Kec. Wonokromo	2.2.2.01.01.0068	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Kec. Wonokromo	2.2.2.01.02.00 68	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	
RSUD Bhakti Dharma Husada	1.1.1.02.03.00 01	Kesehatan		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada / Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan Kesehatan RS yang disediakan	2	jenis	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	17
								Pengadaan Obat, Vaksin		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	16
RSUD Bhakti Dharma Husada	1.1.1.02.08.00 01	Kesehatan		Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada / Pengembangan dan Peningkatan SDM Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Peningkatan SDM Kesehatan	75	kali	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,04	1
RSUD Bhakti Dharma Husada	1.1.1.02.08.00 02	Kesehatan		Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada / Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Promosi Kesehatan yang Dilaksanakan	115	kali	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	18
RSUD Bhakti Dharma Husada	1.1.1.02.12.00 01	Kesehatan		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada / Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan	11751	orang	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	32
RSUD Bhakti Dharma Husada	1.1.1.02.12.00 02	Kesehatan		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada / Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah Pasien RS yang Mendapatkan Pelayanan Medik	2218	orang	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	32

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
RSUD Bhakti Dharma Husada	1.1.1.02.16.0001	Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada / Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan/Kedokteran	3	jenis	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	14
								Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	20
RSUD Bhakti Dharma Husada	1.1.1.02.16.0002	Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada / Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(DBHCHT)	Jumlah jenis Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1	jenis	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
RSUD Bhakti Dharma Husada	2.1.2.04.03.0012	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	2
RSUD Bhakti Dharma Husada	2.2.2.01.01.0069	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
RSUD Bhakti Dharma Husada	2.2.2.01.02.0069	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.04.00 01	Kesehatan		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit yang disediakan	2 jenis		Pengadaan Obat, Vaksin		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	16
								Pengadaan Bahan Habis Pakai		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.09.00 01	Kesehatan		Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Pengembangan Manajemen Rumah Sakit	Jumlah jenis kegiatan pengembangan manajemen rumah sakit yang dilaksanakan	4 jenis		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-				-	-	-	-	-
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.09.00 02	Kesehatan		Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapatkan peningkatan kinerja	200 orang		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	3	2,04	1
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.13.00 01	Kesehatan		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Pelayanan Gizi	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan gizi rumah sakit	28340 orang		Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	32
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.13.00 02	Kesehatan		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan yang diadakan	180 kali		Pengembangan Rumah Sakit		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	5
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.13.00 03	Kesehatan		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Penyelenggaraan Layanan Medik Rumah Sakit	Jumlah kegiatan layanan medik Rumah Sakit yang diselenggarakan	155 kali		Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,02	32

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.15.00 01	Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Kedokteran	Jumlah jenis alat kesehatan/kedokteran yang diadakan dan dipelihara	3	jenis	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	14
								Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	2	2	2,01	20
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	1.1.1.02.15.00 02	Kesehatan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie / Pengadaan Sarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan yang diadakan	1	jenis	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	2.1.2.04.03.00 13	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan		Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12	dokumen	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				X	XX	1	2,01	2
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	2.2.2.01.01.00 70	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	2.2.2.01.02.00 70	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
				Program Penejakan				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	198	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	2

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.1.05.06.0001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Peraturan Daerah Bidang Ekonomi / Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Ekonomi	480	kali	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	3
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota					Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	3	
Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.1.05.07.0001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah / Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sarana Prasarana Wilayah	192	Kali	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	2
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	3
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	3
								Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	2
								Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	1
Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.1.05.07.0002	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah / Penindakan Hasil Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah penindakan pelanggaran Perda	84	Kali	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.1.05.08.0001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial / Pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengawasan hasil operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1368	kali	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	2
								Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	3
Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.1.05.08.0002	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial / Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pamong Praja Bidang Sosial	1368	Kali	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	3
								Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	2
								Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	1
								Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	1
								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,02	3
Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.1.05.09.0001	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja / Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP	96	kali	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	200	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	5

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.1.05.09.00 02	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja / Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa	132	Kali	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	5	2	2,01	5
Satuan Polisi Pamong Praja	2.2.2.01.01.00 71	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Satuan Polisi Pamong Praja	2.2.2.01.02.00 71	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100	%	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.01.00 01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD / Fasilitasi Reses DPRD	Jumlah Fasilitasi Reses	3	kali	Pelaksanaan Reses		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,05	3
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.01.00 02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD / Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	185	kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,05	1
								Orientasi DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,04	1
								Bimbingan Teknis DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,04	2
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.01.00 03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD / Penerimaan Studi Banding	Jumlah studi banding yang difasilitasi	240	kali	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,08	1
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.01.00 04	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD / Pengendalian Keamanan	Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	264	kali	Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.01.00	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat		Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD /	Jumlah pelaksanaan publikasi kegiatan	5	media	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	201	Peningkatan Kapasitas DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,04	3

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019												
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Sekretariat DPRD	05	Koordinasi Perangkat Daerah		Protokol DPRD / Publikasi Kegiatan DPRD	pubikasi kegiatan DPRD		3 media	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Pembahasan Kerja Sama Daerah		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,07	2
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.04.00.01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD / Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	38 kali		Peningkatan Kapasitas ASN		Peningkatan Kapasitas ASN		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		KEPEGAWAIAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	2	2,03	1
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.07.00.01	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD / Pembahasan dan Penyusunan Kajian Kebijakan dan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 dokumen		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,01	1
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Pembahasan Rancangan Perda		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	3	2,01	2		
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.07.00.02	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD / Penyelenggaraan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang diselenggarakan	930 kali		Fasilitasi Rapat DPRD		Layanan Administrasi DPRD		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	2	2,01	2
Sekretariat DPRD	2.1.2.01.07.00.03	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah		Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD / Penyelenggaraan Rapat-Rapat Paripurna	jumlah rapat paripurna yang diselenggarakan	45 kali		Fasilitasi Rapat DPRD		Layanan Administrasi DPRD		PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN		SEKRETARIAT DPRD	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4	2	2	2,01	2
Sekretariat DPRD	2.2.2.01.01.00.72	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-
Sekretariat DPRD	2.2.2.01.02.00.72	Sarana dan Prasarana Perkantoran		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan / Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %		Belum ada di dalam Permendagri 90		-		-		-	-	-	-	-	-	-